



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah perlu diatur pedoman tentang Standar Biaya Masukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 661, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 106);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 888);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107) ;

14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 183);
15. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 228).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA – PD adalah Dokumen Rencana Keuangan Tahunan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
4. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
5. Harga satuan biaya masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Tarif biaya masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

7. Indeks biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II  
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022  
Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai acuan bagi PD untuk menyusun RKA – PD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2022.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA – PD Tahun Anggaran 2022.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai :
  - a. Batas tertinggi; atau
  - b. Estimasi.
- (4) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (5) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efektifitas, dan efesiensi, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati dapat menetapkan Standar Biaya lainnya dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Kekhususan standar biaya yang dimiliki oleh PD;
- b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan atau
- c. Daerah terpencil /daerah perbatasan / pulau terluar.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 2 Januari 2022.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal // Oktober 2021

BUPATI MALUKU TENGAH, *h f*

*TUASHAL ABUA*

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal // Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH, *h*



BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 555

## DAFTAR ISI

### **A. Lampiran I : Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi**

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan .....	1
2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.....	1
3. Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi .....	2
4. Honorarium Tim Teknis Jasa Konsultansi.....	2
5. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan.....	2
6. Honorarium Staf Pelaksana Teknis Kegiatan .....	2
7. Honorarium Pengelola Sistim Akuntansi Instansi (SAI).....	3
8. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah .....	3
9. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan.....	3
10. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan.....	3
11. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Kegiatan Sejenis.....	3
12. Honorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/ Kegiatan Sejenis .....	3
13. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil.....	3
14. Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) .....	3
15. Honorarium Rohaniawan.....	3
16. Honorarium Tenaga IT, Operator Komputer, Tenaga Administrasi, Satpam, Pengemudi, Petugas Damkar, Petugas Kebersihan, Dan Pramubakti.....	3
17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan.....	3
18. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Perda Tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah ...	4
19. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah .....	4
20. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah .....	4
21. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah .....	4
22. Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kabupaten Maluku Tengah.....	4
23. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Perda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah .....	4
24. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah .....	4
25. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	5
26. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah .....	5
27. Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD (DPA - OPD) Kabupaten Maluku Tengah.....	5
28. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	5
29. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	5

30. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	5
31. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	5
32. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Neraca Akhir Dan Laporan Arus Kas Kabupaten Maluku Tengah .....	5
33. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Laporan Realisasi Semester APBD Kabupaten Maluku Tengah .....	5
34. Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi Gaji Kabupaten Maluku Tengah .....	6
35. Honorarium Tim Penyelesaian SPT Tahunan Kabupaten Maluku Tengah .....	6
36. Honorarium Tim Rekonsiliasi Dan Pengawasan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.....	6
37. Honorarium Tim Sismiop PBB-P2 Dan Tenaga Outsourcing.....	6
38. Honorarium Panitia Penyelesaian Dan Penyiapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) .....	6
39. Honorarium Satuan Tugas Pengelola Sistim Informasi Keuangan Daerah (SATGAS SIMDA) Kabupaten Maluku Tengah .....	6
40. Honorarium Satuan Tugas Pengelola Aplikasi Sistim Informasi Keuangan Daerah (SATGAS SIKD) Kabupaten Maluku Tengah .....	6
41. Honorarium Pembuat Keputusan Bupati Maluku Tengah Tentang Penunjukan PA/KPA/Bendahara Pengeluaran /Bendahara Penerimaan Kabupaten Maluku Tengah ...	6
42. Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.....	6
43. Honorarium Tim Pokja dan Sekretariat Pokja Penyusunan Dokumen Standar Penganggaran Program dan Kegiatan Pembangunan .....	6
44. Honorarium Tim Evaluasi Renstra SKPD Kabupaten Maluku Tengah.....	7
45. Honorarium Tim Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.....	7
46. Honorarium Tim Pemutahiran Data Kabupaten Maluku Tengah .....	7
47. Honorarium Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.....	7
48. Honorarium Tim Reviuw Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Dan PD .....	7
49. Honorarium Tim Pokja Fasilitasi SPIP Dan Kapabilitas APIP .....	7
50. Honorarium Tim Reviuw Penyerapan Anggaran PBJ Dan Anggaran ADD .....	7
51. Honorarium Tim Pelaksanaan Dan Unit Pengelola Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Dan RAD .....	7
52. Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.....	7
53. Honorarium Tim Pembinaan, Pengawasan Aparatur Kecamatan Dan Negeri .....	7
54. Honorarium Tim Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi (Kormonev) .....	7
55. Honorarium Pokja Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).....	7
56. Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (TLHTP).....	8
57. Honorarium Tim Pokja Dan Tim Teknis Penyelesaian Kerugian Daerah Dan Negara.....	8
58. Honorarium Tim Pokja Dan Unit Pengelola Penanganan Benturan Kepentingan Dan Whistie Blower.....	8
59. Honorarium Tim Penilaian Internal Zona Integritas .....	8
60. Honorarium Tim Monev Dan Unit Pengelola Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi ..	8
61. Honorarium Tim Pengendalian Dan Sekretariat Pengendalian Gratifikasi.....	8
62. Honorarium Tim Evaluasi Dana Dak PD .....	8
63. Honorarium Tim Penyusunan Analisis Jabatan ASN .....	8
64. Honorarium Tim Pengelola Website Inspektorat.....	8

65. Honorarium Tim Penyelenggaraan Musrenbang RKPD .....	8
66. Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) .....	8
67. Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUAP) .....	8
68. Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) .....	8
69. Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan .	8
70. Honorarium Tim Pembahasan RKA PD .....	9
71. Honorarium Tim Sekretariat Program TabaoS .....	9
72. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) .....	9
73. Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dan Sekretariat TPID Kabupaten Maluku Tengah .....	9
74. Honorarium Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) .....	9
75. Honorarium Tim Penyusun Instrumen Analisis Jabatan .....	9
76. Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan .....	9
77. Honorarium Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah .....	9
78. Honorarium Tim Penyusun Evaluasi Jabatan.....	9
79. Honorarium Tim Penyusunan Tugas Pokok Dan Fungsi .....	9
80. Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik .....	9
81. Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah.....	9
82. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.....	10
83. Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) .....	10
84. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lingkup Daerah Lainnya Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah .....	10
85. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lingkup SKPD (Renstra, Renja, Lakip, DII) .....	10
86. Honorarium Tim Penyusun Jurnal.....	10
87. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah/Sambutan/Pidato/ Naskah .....	10
88. Honorarium Tim Pengelola Data Dokumentasi Dan Publikasi Kehumasan .....	10
89. Honorarium Tim Pengelola Website Pemerintah Daerah .....	10
90. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Dan Negeri Administratif .....	10
91. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Satker Yang Mengelola Belanja Pegawai .....	10
92. Honorarium Penyelenggara Ujian Dan Vakasi .....	10
93. Honorarium Tenaga Ahli Pengelola Buku Perpustakaan .....	11
94. Honorarium Tenaga Pengelola Perpustakaan .....	11
95. Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Terbitan Berkala Dan Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Daerah .....	11
96. Honorarium Petugas Layanan Perpustakaan Keliling (Layanan Ekstesi) .....	11
97. Honorarium Pembahasan APBD (DPRD).....	11
98. Honorarium Pembahasan APBD Perubahan (DPRD) .....	11
99. Honorarium /Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (APPD).....	11
100. Honorarium/Insentif Tim Perencana Dan Tim Data Organisasi Perangkat Daerah.....	11
101. Honorarium Tim Penyusun LAKIP Kabupaten.....	11
102. Honorarium Tim Penyusun TAPKIN Dan RKT Kabupaten .....	11
103. Honorarium Tim Pokja dan Sekretariat Tim Pokja Evaluasi Dak Kabupaten .....	11
104. Honorarium Tim Kesekretariatan Sakip Kabupaten .....	12
105. Honorarium Tim Teknis Pelaporan Dak, Tugas Pembantuan Dan APBD .....	12
106. Honorarium Tim Teknis Pelaporan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.....	12



107. Honorarium Tim Evaluasi RKPD Kabupaten.....	12
108. Honorarium Tim Pelaporan TEPRAB Kabupaten.....	12
109. Honorarium Tim Dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial.....	12
110. Honorarium Tim Koordinasi Dan Operasional Kominda.....	12
111. Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.....	12
112. Honorarium Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan .....	12
113. Honorarium Tim Operasi Penertiban Lalu Lintas Angkutan Darat (LLAJ), Lalu Lintas Angkutan Laut (LALA) Dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyebrangan (LLASDP).....	12
114. Honorarium Forum Lalulintas kabupaten Maluku Tengah.....	12
115. Honorarium Bidang Persandian.....	12
116. Honorarium Petugas Penyiar RPD, Cameramen, Calling Dan Peliputan .....	13
117. Honorarium Rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah .....	13
118. Honorarium Petugas Pengelola .....	13
179. Honorarium Pendamping .....	13
120. Honorarium Tim Pengelolaan Aset Daerah .....	13
121 Honorarium Tim Penyelarasan Produk Hukum Daerah.....	13
122 Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Kabupaten Maluku Tengah ..	13
123 Honorarium Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten Dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Gsc.....	13
124 Honorarium Satuan Tugas Aplikasi Sikeudes .....	13
125 Honorarium Satuan Tugas Aplikasi Sipades.....	13
126 Honorarium Tim Evaluasi Dan Verifikasi Rancangan Peraturan Negeri Tentang APBD Negeri.....	13
127 Honorarium Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Dan Sekretariat Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah.....	13
128 Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) Dan Sekretariat Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah.....	14
129 Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan Dan Catatan Sipil .....	14
130 Honorarium Tim Validasi Data PMKS Dan PSKS.....	14
131 Honorarium Petugas Pengolah Data Statistik Pertanian .....	14
132 Honorarium Tim Teknis Swakelola Dak Pertanian Kabupaten Maluku Tengah .....	14
133 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh .....	14
134 Honorarium Tim Penilai Kelembagaan Petani Dan Pelaku Pertanian Berprestasi .....	14
135 Honorarium Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten .....	14
136 Honorarium Petugas Pengelola Data Alsintan.....	14
137 Honorarium Penyuluh Honorer .....	14
138 Honorarium Penyuluh THL-TBPP .....	14
139 Honorarium Pendamping Siswa Dan Uang Saku Peserta Kegiatan Olimpiade Sains SD Dan SMP Tingkat Kabupaten, Provinsi Dan Nasional.....	14
140 Honorarium Panitia Penyelenggara Event /Lomba Kepariwisataa.....	14
141 Honorarium Fasilitator Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) .....	14
142 Honorarium Instruktur/Pelatih Paskibraka.....	14
143 Honorarium Tim Penyusun Soal Tes Paskibraka.....	14
144 Honorarium Tim TEPRAB Organisasi Perangkat Daerah (PD) .....	14
145 Honorarium Petugas Admin TEPRAB Dan Petugas Admin RUP PD.....	14
146 Honorarium Tim Evaluasi Peraturan Negeri/Negeri Administratif .....	15
147 Honorarium Tim Evaluasi Harga Komoditi (IHK).....	15

148	Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) .....	15
149	Honorarium Panitia Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat. I, Tingkat II, Tingkat III Dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar ASN Golongan II Dan Golongan III Serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II Dan /Atau golongan III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 .....	15
150	Honorarium Panitia Seleksi Penerimaan Calon ASN .....	15
151	Honorarium Tim Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (Dak) Kabupaten Maluku Tengah .....	16
152	Honorarium Tim Musrenbang RKPD Kabupaten .....	16
153	Honorarium Tim Evaluasi Renstra Kabupaten .....	16
154	Honorarium Panitia Seleksi Dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi .....	16
155	Honorarium Panitia Seleksi Dan Sekretariat Panitia Seleksi Rekrutmen Dokter Nusantara Sehat Daerah .....	16
156	Honorarium Panitia Seleksi Penerima Beasiswa Pendidikan Tenaga Kesehatan 'Non ASN' .....	16
157	Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi .....	16
158	Honorarium Tim Evaluasi Kegiatan Pembangunan, Pemerintahan Dan Pelayanan Masyarakat Dan Sekretariat Tim Evaluasi Pembangunan, Pemerintahan Dan Pelayanan Masyarakat .....	16
159	Honorarium Panitia Penyelenggara pelayanan Jamaah Haji Kabupaten Maluku Tengah ..	16
160	Honorarium Panitia Penyelenggara Safari Keagamaan Kabupaten Maluku Tengah .....	17
161	Honorarium Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat dan Pembinaan Sumber Daya Manusia .....	17
162	Honorarium Panitia Penanggungjawab Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif .....	17
163	Honorarium Tim Penyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	17
164	Honorarium Tim Penataan Aset Tanah Pemerintah Daerah .....	17
165	Honorarium Tim Musrenbang RKPD Kabupaten .....	17
166	Honorarium Tim Evaluasi Renstra Kabupaten .....	17
167	Honorarium Tim Penyusun RPJMD .....	17
168	Honorarium Tim Penyusun RKPD Kabupaten .....	17
169	Honorarium Tim Penyusun LKPJ Tahunan Bupati .....	17
170	Honorarium Tim Penyusun LKPJ Akhir masa Jabatan Bupati .....	17
171	Honorarium Admin Aplikasi Pelaporan dan Inovasi Pembangunan Daerah .....	17
172	Honorarium Tim Aplikasi Krisna DAK-APBN Kabupaten .....	18
173	Honorarium Tim Sekretariat Pokja AMPL (Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan) .....	18
174	Honorarium Sekretariat Tim Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Dak Dan APBN Dan Sekretariat Pelaporan Dak Tugas Pembantuan Dan APBD kabupaten .....	18
175	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan pengelola sistim informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Maluku Tengah .....	18
176	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan pengelola sistim informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Maluku Tengah .....	18
177	Honorarium Operator Website Baplitbangda .....	18
178	Honorarium Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah .....	18
179	Honorarium Tim Pembina Penilaian Barang Milik Daerah .....	18
180	Honorarium Tim Pembahasan dan Penyusunan Penilaian Barang Milik Daerah .....	18
181	Honorarium Tim Teknis Penilaian Barang Penilaian Barang Milik Daerah .....	18
182	Honorarium Tim Kerja Penilaian Barang Milik Daerah .....	18

183	Honorarium Tim Pelelangan barang Milik Daerah .....	18
184	Honorarium Tim Monitoring dan Rekon Milik Daerah .....	18
185	Honorarium Tim Penghapusan Barang Milik Daerah .....	18
186	Honorarium Tim Penyusun laporan Barang Milik Daerah .....	79
187	Honorarium Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah .....	79
188	Honorarium Fasilitator DAK Pertanian .....	79
189	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Saksi Ahli dan Belacara .....	79
190	Honorarium Penyelenggara Kesehatan Jamaah Haji Kabupaten Maluku Tengah .....	79
191	Honorarium Tim Teknis Paten .....	79
192	Honorarium Pegawai Honorer Satpol PP .....	79
193	Honorarium Pegawai Honorer Pemadam Kebakaran.....	79
194	Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,Kewajiban,Akuwitas,Pendapatan, Belanja, Pembiayaan LO dan BEBAN.....	79
195	Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan-Semesteran dan Tahunan OPD .....	79
196	Honorarium Pokja Program Subsidi Bunga Skin Kredit Usaha Mikro Kreatif .....	79
197	Honorarium Petugas Admin Aplikasi Jaga .....	79
198	Honorarium operator Server .....	79
199	Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten.....	79
200	Honorarium Jasa Pendamping/Fasititator Kontraktual .....	79
201	Honorarium Jasa Pengawasan Kegiatan Kontraktual .....	79
202	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Data Kependudukan Perkembangan Dan Proyeksi .....	79
203	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Jarinag Dukumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) .....	79
204	Honorarium Enumerator Pemantauan Stok,Pasokan dan harga Pangan.....	20
205	Honorarium Fasilitator Pengembangan Kelembaggaan Dan Jaringan Distribusi Pangan ..	20
206	Honorarium Fasilitator Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten...	20
207	Honorarium Tim Penyediaan Informasi Harga Bahan Pangan Dan Neraca Bahan Makanan (NBM).....	20
208	Honorarium Petugas Penyusunan,Pemutahiran Dan Analisis Peta Ketahan Pangan Dan Kerentangan Pangan.....	20
209	Honorarium Pengawas Lapangan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.....	20
210	Honorarium Tim Penyusun Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) .....	20
211	Honorarium Tim Penyusunan Draf Rancangan Kebijakan Dan Harmonisasi Peraturan Perijinan Dan Non Perijinan .....	20
212	Honorarium Petugas Desa Sampel Dan Petugas Pengolah Data Statistik Perikanan .....	20
213	Honorarium Petugas Penyuluh Perikanan .....	20
214	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Komite Audit.....	20
215	Honorarium Tim Lintas Sektor Untuk Percepatan Target Nasional.....	20
216	Honorarium Tim Inovasi Produk .....	20
217	Honorarium Tim Terpadu Keaaman Dan Kebersihan Pasar .....	20
218	Honorarium Tim Pemantau Harga Stok Dan Barang .....	20
219	Honorarium Panitia Pelaksana Pasar Murah .....	20
220	Honorarium Petugas Pendataan Sumber Daya Industri.....	20
221	Honorarium Petugas Penjaga Outlet Produk Kabupaten (DKI Jakarta) .....	20
222	Honorarium Petugas Jaga Pasar .....	20

223	Honorarium Operator Pemantau Harga Stok Barang.....	20
224	Honorarium Operator Sistim Informasi Kredit .....	20
225	Honorarium Tim Penyelesaian Pangkat Pegawai Negeri Sipil .....	20
226	Honorarium Tim Uji Kompetensi (ASSESSOR) .....	20
227	Honorarium Tim Penyelesaian KARPEG.....	20
228	Honorarium Tim Penyelesaian KARIS/KARSU .....	21
229	Honorarium Tim Penyelesaian PUPNS.....	21
230	Honorarium Tim Seleksi Ujian Dinas/Penyesuaian Ijazah .....	21
231	Honorarium Sumpah Janji PNS .....	21
232	Honorarium PANSIMAS.....	21
233	Honorarium Petugas E-MON DAK.....	21
234	Honorarium Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) .....	21
235	Honorarium Satgas Penanganan Covid-19 Di Kecamatan .....	21
236	Honorarium Tim Evaluasi Pengelolaan BUMD Dan BLUD.....	21
237	Honorarium Tim Bazanas Kabupaten Maluku Tengah .....	21
238	Honorarium Petugas Pendata Sumber Daya Industri Di Kabupaten .....	21
239	Honorarium Tenaga Teknis Pertenakan .....	21
240	Honorarium Tenaga OUTSOURCHING .....	21
241	Honorarium Fasilitator Sanitasi Masyarakat .....	21
242	Honorarium Instuktur MTQ/PESPARAWI .....	21
243	Honorarium Panitia Pasar Murah .....	21
244	Honorarium Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pratama.....	21
245	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan DAK SPAM.....	21
246	Honorarium Tim Terpadu Penertiban Fasilitas Pasar .....	21
247	Honorarium Pengelola Manajemen, Dan Jasa Medis Para Medis Dan JKN.....	21
248	Honorarium Pengelola Dana JKN.....	21
249	Honorarium Pengelola Covid-19.....	21
250	Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan .....	21
251	Honorarium Tim Rekonsiliasi Penyetoran Pajak-Pajak Pusat Yang Di Pungut Dan Di Setor Ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).....	21
252	Honorarium Tim Penanggulangan STUNTING Dan Sekretariat Tim Penanggulangan STUNTING Kabupaten Maluku Tengah .....	22
253	Honorarium Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maluku Tengah.....	22
254	Honorarium Pendamping/Petugas Lapangan.....	22
255	Honorarium Tim Aset Tanah Pemerintah Daerah .....	22
256	Honorarium Tim Kajian dan Analisis Rencana Pemekaran Wilayah .....	22
257	Honorarium Satgas Penanganan Covid – 19.....	22
258	Honorarium Pansus DPRD.....	22
259	Honorarium Personel Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALPOS).....	22
260	Honorarium Tim Verifikasi Dan Validasi Data Panca Bencana .....	22
261	Honorarium Tim Pembahasan RANPERBUP .....	22
262	Honorarium Tim Asistensi Penyusunan RANPERDA .....	22
263	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengelola Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) .....	23
264	Honorarium Tim Pokja Dan Sekretariat Tim Pokja .....	23
265	Honorarium Tim Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	23

266	Honorarium Tim Penyusun Dokumen KUA/PPAS .....	23
267	Honorarium Tim Penyusun Dokumen KUA/PPAS Perubahan .....	23
268	Honorarium Tim Penyelesaian SPT Tahunan Kabupaten Maluku Tengah .....	23
269	Honorarium Kegiatan Forum Lalu Lintas .....	23
270	Honorarium Operasi Penertiban Hari-Hari Besar .....	23
271	Honorarium Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas Car Free Day .....	23
272	Honorarium Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	23
273	Honorarium Tim Inovasi OPD Kasmpus Negeri .....	23
274	Honorarium Penanganan Covid 19 .....	23
275	Honorarium Penyuluh THL-TBPP .....	23
276	Honorarium Petugas Posko Covid Kecamatan.....	23
277	Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Penyetoran Pajak-Pajak Pusat Atau disetor ke Kas Umum Negara Kabupaten Maluku Tengah .....	24
278	Honorarium Tim Penyusun LPPD Masa Akhir Jabatan Bupati dan Wakil Bupati.....	24
279	Honorarium Tim Kesehatan Penyelenggaraan Kesehatan Haji .....	24
280	Honorarium Tim Promosi dan KIE Program KKBK Melalui Media Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Negeri Lainnya .....	24
281	Honorarium Tim Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program .....	24
282	Honorarium Satgas Pengelola Barang Milik Daerah .....	24
283	Honorarium Tim Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program .....	24
284	Honorarium Tim Pelaksanaan Krisna Dak Fisik (Kolaborasi Perencanaan Tim Kerja Kabupaten).....	24
285	Honorarium Pokja PKP .....	24
286	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Dak) .....	24
287	Honorarium Penyuluh.....	24
288	Honorarium IB.....	24
289	Honorarium Tim Verivikal Hibah.....	24
290	Honorarium Tim Teknis Penilaian Aset Daerah .....	24
291	Honorarium Penyelenggaraan Ujian .....	25
292	Honorarium Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah .....	25
293	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual.....	25
294	Honorarium Tim Pokja KLHS.....	25
295	Honorarium Penilai Lomba.....	25
296	Honorarium Tim Verifikasi Administrasi Bantuan Sosial.....	25
297	Honorarium Penyelenggara Clearing House Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah .....	25
298	Honorarium Pengelola Manajemen dan Medis Para Medis.....	25
299	Honorarium Inovasi cabe Holo.....	25
300	Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Lingkungan SKPD .....	25
301	Honorarium Tim Sosialisasi Perda LP2B.....	25
302	Honorarium Tim Aset OPD.....	25
303	Honorarium Tim Uji Kompetensi (Assesor) PBJ.....	25
304	Honorarium Tim IT dan Tim Administrasi Uji Kompetensi/Ujian Sertifikasi PBJ.....	25
305	Honorarium Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.....	25
306	Honorarium Tim Penyusunan dan Evaluasi.....	25
307	Honorarium Penginputan Dokumen Perencanaan.....	26
308	Honorarium Instruktur/Pelatih Membatik.....	26
309	Honorarium Tenaga Operator Mesin Listrik.....	26

310	Honorarium Tim Teknis PTSP.....	26
311	Honorarium Fasilitator Rehabilitasi Rumah Bencana.....	26
312	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.....	26
313	Honorarium Tim Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Infrastruktur .....	26
314	Honorarium Tim Penyusun Memori Pemerintahan Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati	26
315	Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Inovasi Daerah.....	26
316	Honorarium Petugas Pendamping Perempuan dan Anak Korban Kekerasan .....	26
317	Honorarium Tim Pengadaan Cadangan Pangan.....	26
318	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan.....	26
319	Honorarium satuan Tugas Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten.....	26
320	Honorarium Tim Pengelola Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah.....	26
321	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap Kategori Umum.....	26
322	Honorarium Administrasi dan Tenaga Teknis.....	26
323	Honorarium Tim Pelelangan.....	27
324	Honorarium Peningkatan SPAM Jaringan.....	27
325	Honorarium SIPD.....	27
326	Honorarium Operator Perpustakaan.....	27
327	Honorarium Tim Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).....	27
328	Honorarium Tim Penyusunan LKjIP SKPD .....	27
329	Satuan Biaya Pengembangan Aplikasi .....	27
330	Uang Saku Jasa Pengamanan Aset Daerah .....	27
331	Satuan Tambahan Penghasilan Operator OMSPAM Kabupaten .....	27
332	Satuan Tambahan Tunjangan Karena Kelangkaan Profesi Tenaga Dokter, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anastesi .....	27
333	Satuan Biaya Insentif Dokter.....	27
334	Satuan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKPNSD) .....	28
335	Satuan Biaya Jasa Dokter Spesialis, Dokter Umum, Paramedis, Non Paramedis, Supervisor, Jasa Penagihan Retribusi dan Jasa Radiasi (RSUD Masohi) .....	28
336	Satuan Biaya Jasa Dokter Umum, Dokter Spesialis, Paramedis dan Non Paramedis (RSUD Saparua).....	28
337	Satuan Biaya Jasa Dokter Umum, Dokter Spesialis, Paramedis dan Non Paramedis (RSUD Banda).....	28
338	Satuan Biaya Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kabupaten Maluku Tengah .....	28
339	Satuan Tunjangan Supervisi dan Monitoring Pengawas PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF).....	28
340	Satuan Tunjangan Supervisi dan Monitoring Pengawas SD dan SMP.....	28
341	Satuan Tunjangan Biaya Operasional Rumah Tangga Pimpinan DPR.....	29
342	Satuan Biaya Jasa Dokter Umum, Dokter Spesialis, Paramedis dan Non Paramedis (RSUD Saparua).....	29
343	Satuan Biaya Jasa Dokter Umum, Dokter Spesialis, Paramedis dan Non Paramedis (RSUD Banda).....	29
344	Satuan Biaya Jasa Dokter Spesialis, Dokter Umum, Paramedis, Non Paramedis, Supervisor, Jasa Penagihan Restribusi dan Jasa Radiasi (RSUD Masohi).....	29
345	Satuan Biaya Insentif Staf Pengelola Kas Daerah .....	29
346	Satuan Biaya Operasional Penyuluh Honorir.....	29
347	Satuan Biaya Operasional Penyuluh THL-TBPP.....	29

348	Satuan Biaya Pemondokan Penyuluh Honorer dan THL.....	29
349	Satuan Operasional Balai Penyuluh Pertanian .....	29
350	Satuan Operasional Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya.....	29
351	Satuan Biaya Pengelola Lahan .....	29
352	Satuan Biaya Perawatan Tanaman .....	29
353	Satuan Biaya Insentif Panen dan Pasca Panen .....	29
354	Satuan Biaya Insentif Perbanyak Tanaman.....	29
355	Satuan Biaya Insentif Penyuluh Swadaya .....	29
356	Upah Pengisian Polibag.....	29
357	Upah Pesemaian Padi .....	29
358	Upah Penanaman Padi.....	29
359	Upah Pemupukan Padi.....	29
360	Upah Penyiangan Padi .....	29
361	Upah Pengendalian OPT Padi .....	29
362	Upah Panen dan Pasca Panen.....	29
363	Satuan Upah Petugas Kebersihan/TPA Sampah, Petugas Taman, Sopir dan Operator Alat Berat .....	29
364	Satuan Biaya Uang Makan Aparatur Sipil Negara .....	29
365	Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur .....	29
366	Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor .....	29
367	Satuan Biaya Uang saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran yang Sama.....	30
368	Satuan Biaya Uang Saku Kegiatan Bimtek/Pelatihan, Sosialisasi dll .....	30
369	Satuan Biaya Fasilitas Produk Hukum Daerah .....	30
370	Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah .....	30
371	Satuan Biaya Operasional Petugas Mobil Tangki Air Bersih .....	30
372	Satuan Biaya Petugas Pendataan PMKS dan PSKS.....	30
373	Satuan Biaya Jasa Tenaga IPCN (Insfection Prevention Control).....	30
374	Satuan Biaya Jasa Kepala Ruangan, Instalasi dan Komite Rumah Sakit.....	30
375	Satuan Biaya Pencacahan Harga Komoditi .....	30
376	Satuan Biaya Uang Duka / Meninggal Dunia .....	30
377	Satuan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenasah .....	30
378	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Investigasi .....	30
379	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Intervensi.....	30
380	Satuan Tambahan Pengasilan .....	30
381	Satuan Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat .....	30
382	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas.....	30
383	Uang Representasi .....	31
384	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri .....	32
385	Satuan Biaya Penginapan.....	35
386	Satuan Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor.....	38

**B. Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023  
yang berfungsi sebagai Batas Tertinggi**

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan .....	44
2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.....	45
3. Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi .....	46
4. Honorarium Tim Teknis Jasa Konsultansi.....	46
5. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan.....	46
6. Honorarium Staf Pelaksana Teknis Kegiatan .....	46
7. Honorarium Pengelola Sistim Akuntansi Instansi (SAI).....	47
8. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah .....	47
9. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan.....	47
10. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan.....	47
11. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Kegiatan Sejenis.....	47
12. Honorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/ Kegiatan Sejenis .....	48
13. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil.....	48
14. Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) .....	48
15. Honorarium Rohaniawan .....	49
16. Honorarium Tenaga IT, Operator Komputer, Tenaga Administrasi, Satpam, Pengemudi, Petugas Damkar, Petugas Kebersihan, Dan Pramubakti.....	49
17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan.....	49
18. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Perda Tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah ...	50
19. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah .....	50
20. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah .....	50
21. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah .....	51
22. Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kabupaten Maluku Tengah.....	51
23. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Perda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah .....	51
24. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah .....	51
25. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	52
26. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah .....	52
27. Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD (DPA - OPD) Kabupaten Maluku Tengah.....	52
28. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	52
29. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	53



30. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	53
31. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah.....	53
32. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Neraca Akhir Dan Laporan Arus Kas Kabupaten Maluku Tengah .....	53
33. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Laporan Realisasi Semester APBD Kabupaten Maluku Tengah .....	54
34. Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi Gaji Kabupaten Maluku Tengah .....	54
35. Honorarium Tim Penyelesaian SPT Tahunan Kabupaten Maluku Tengah .....	54
36. Honorarium Tim Rekonsiliasi Dan Pengawasan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.....	54
37. Honorarium Tim Sismiop PBB-P2 Dan Tenaga Outsourcing.....	54
38. Honorarium Panitia Penyelesaian Dan Penyiapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	54
39. Honorarium Satuan Tugas Pengelola Sistim Informasi Keuangan Daerah (SATGAS SIMDA) Kabupaten Maluku Tengah .....	55
40. Honorarium Satuan Tugas Pengelola Aplikasi Sistim Informasi Keuangan Daerah (SATGAS SIKD) Kabupaten Maluku Tengah .....	55
41. Honorarium Pembuat Keputusan Bupati Maluku Tengah Tentang Penunjukan PA/KPA/Bendahara Pengeluaran /Bendahara Penerimaan Kabupaten Maluku Tengah ...	55
42. Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.....	55
43. Honorarium Tim Pokja dan Sekretariat Pokja Penyusunan Dokumen Standar Penganggaran Program dan Kegiatan Pembangunan .....	55
44. Honorarium Tim Evaluasi Renstra SKPD Kabupaten Maluku Tengah.....	55
45. Honorarium Tim Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah .....	55
46. Honorarium Tim Pemutahiran Data Kabupaten Maluku Tengah .....	55
47. Honorarium Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.....	56
48. Honorarium Tim Reviuw Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Dan PD .....	56
49. Honorarium Tim Pokja Fasilitasi SPIP Dan Kapabilitas APIP .....	56
50. Honorarium Tim Reviuw Penyerapan Anggaran PBJ Dan Anggaran ADD .....	56
51. Honorarium Tim Pelaksanaan Dan Unit Pengelola Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Dan RAD .....	56
52. Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.....	56
53. Honorarium Tim Pembinaan, Pengawasan Aparatur Kecamatan Dan Negeri .....	56
54. Honorarium Tim Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi (Kormonev) .....	56
55. Honorarium Pokja Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).....	57
56. Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (TLHTP).....	57
57. Honorarium Tim Pokja Dan Tim Teknis Penyelesaian Kerugian Daerah Dan Negara.....	57
58. Honrarium Tim Pokja Dan Unit Pengelola Penanganan Benturan Kepentingan Dan Whistie Blower.....	57
59. Honorarium Tim Penilaian Internal Zona Integritas .....	57
60. Honorarium Tim Monev Dan Unit Pengelola Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi ..	57
61. Honorarium Tim Pengendalian Dan Sekretariat Pengendalian Gratifikasi.....	57
62. Honorarium Tim Evaluasi Dana Dak PD .....	58
63. Honorarium Tim Penyusunan Analisis Jabatan ASN .....	58
64. Honorarium Tim Pengelola Website Inspektorat.....	58

65. Honorarium Tim Penyelenggaraan Musrenbang RKPD .....	58
66. Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) .....	58
67. Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUAP) .....	58
68. Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) .....	58
69. Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan .	58
70. Honorarium Tim Pembahasan RKA PD .....	58
71. Honorarium Tim Sekretariat Program TabaoS .....	59
72. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) .....	59
73. Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dan Sekretariat TPID Kabupaten Maluku Tengah .....	59
74. Honorarium Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) .....	59
75. Honorarium Tim Penyusun Instrumen Analisis Jabatan .....	59
76. Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan .....	59
77. Honorarium Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah .....	60
78. Honorarium Tim Penyusun Evaluasi Jabatan.....	60
79. Honorarium Tim Penyusunan Tugas Pokok Dan Fungsi .....	60
80. Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik .....	60
81. Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah.....	61
82. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.....	61
83. Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) .....	61
84. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lingkup Daerah Lainnya Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah .....	61
85. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lingkup SKPD (Renstra, Renja, Lakip, DII) .....	62
86. Honorarium Tim Penyusun Jurnal.....	62
87. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah/Sambutan/Pidato/ Naskah .....	62
88. Honorarium Tim Pengelola Data Dokumentasi Dan Publikasi Kehumasan .....	62
89. Honorarium Tim Pengelola Website Pemerintah Daerah .....	62
90. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Dan Negeri Administratif .....	63
91. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Satker Yang Mengelola Belanja Pegawai .....	63
92. Honorarium Penyelenggara Ujian Dan Vakasi .....	64
93. Honorarium Tenaga Ahli Pengelola Buku Perpustakaan .....	64
94. Honorarium Tenaga Pengelola Perpustakaan .....	64
95. Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Terbitan Berkala Dan Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Daerah .....	64
96. Honorarium Petugas Layanan Perpustakaan Keliling (Layanan Ekstesi) .....	64
97. Honorarium Pembahasan APBD (DPRD).....	65
98. Honorarium Pembahasan APBD Perubahan (DPRD) .....	65
99. Honorarium /Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (APPD).....	65
100. Honorarium/Insentif Tim Perencana Dan Tim Data Organisasi Perangkat Daerah.....	65
101. Honorarium Tim Penyusun LAKIP Kabupaten.....	65
102. Honorarium Tim Penyusun TAPKIN Dan RKT Kabupaten .....	65
103. Honorarium Tim Pokja dan Sekretariat Tim Pokja Evaluasi Dak Kabupaten .....	66
104. Honorarium Tim Kesekretariatan Sakip Kabupaten .....	66
105. Honorarium Tim Teknis Pelaporan Dak, Tugas Pembantuan Dan APBD .....	66
106. Honorarium Tim Teknis Pelaporan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.....	66

107. Honorarium Tim Evaluasi RKPD Kabupaten.....	66
108. Honorarium Tim Pelaporan TEPRAB Kabupaten.....	66
109. Honorarium Tim Dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial.....	67
110. Honorarium Tim Koordinasi Dan Operasional Kominda.....	67
111. Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.....	67
112. Honorarium Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan .....	67
113. Honorarium Tim Operasi Penertiban Lalu Lintas Angkutan Darat (LLAJ), Lalu Lintas Angkutan Laut (LALA) Dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyebrangan (LLASDP).....	67
114. Honorarium Forum Lalulintas kabupaten Maluku Tengah.....	67
115. Honorarium Bidang Persandian.....	68
116. Honorarium Petugas Penyiar RPD, Cameramen, Calling Dan Peliputan .....	68
117. Honorarium Rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah .....	68
118. Honorarium Petugas Pengelola .....	68
179. Honorarium Pendamping .....	68
120. Honorarium Tim Pengelolaan Aset Daerah .....	68
121 Honorarium Tim Penyelarasan Produk Hukum Daerah.....	68
122 Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Kabupaten Maluku Tengah ..	69
123 Honorarium Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten Dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Gsc.....	69
124 Honorarium Satuan Tugas Aplikasi Sikeudes .....	69
125 Honorarium Satuan Tugas Aplikasi Sipades.....	69
126 Honorarium Tim Evaluasi Dan Verifikasi Rancangan Peraturan Negeri Tentang APBD Negeri.....	69
127 Honorarium Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Dan Sekretariat Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah.....	69
128 Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) Dan Sekretariat Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah.....	69
129 Honorarium Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan Dan Catatan Sipil .....	70
130 Honorarium Tim Validasi Data PMKS Dan PSKS.....	70
131 Honorarium Petugas Pengolah Data Statistik Pertanian .....	70
132 Honorarium Tim Teknis Swakelola Dak Pertanian Kabupaten Maluku Tengah .....	70
133 Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh .....	70
134 Honorarium Tim Penilai Kelembagaan Petani Dan Pelaku Pertanian Berprestasi .....	70
135 Honorarium Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida Kabupaten .....	70
136 Honorarium Petugas Pengelola Data Alsintan.....	71
137 Honorarium Penyuluh Honorer .....	71
138 Honorarium Penyuluh THL-TBPP .....	71
139 Honorarium Pendamping Siswa Dan Uang Saku Peserta Kegiatan Olimpiade Sains SD Dan SMP Tingkat Kabupaten, Provinsi Dan Nasional.....	71
140 Honorarium Panitia Penyelenggara Event /Lomba Kepariwisataa.....	71
141 Honorarium Fasilitator Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) .....	71
142 Honorarium Instruktur/Pelatih Paskibraka.....	71
143 Honorarium Tim Penyusun Soal Tes Paskibraka.....	71
144 Honorarium Tim TEPRAB Organisasi Perangkat Daerah (PD) .....	72
145 Honorarium Petugas Admin TEPRAB Dan Petugas Admin RUP PD.....	72
146 Honorarium Tim Evaluasi Peraturan Negeri/Negeri Administratif .....	72
147 Honorarium Tim Evaluasi Harga Komoditi (IHK).....	72

148	Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) .....	72
149	Honorarium Panitia Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat. I, Tingkat II, Tingkat III Dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar ASN Golongan II Dan Golongan III Serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II Dan /Atau golongan III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1 .....	72
150	Honorarium Panitia Seleksi Penerimaan Calon ASN.....	73
151	Honorarium Tim Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (Dak) Kabupaten Maluku Tengah .....	73
152	Honorarium Tim Musrenbang RKPD Kabupaten .....	73
153	Honorarium Tim Evaluasi Renstra Kabupaten .....	73
154	Honorarium Panitia Seleksi Dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi.....	73
155	Honorarium Panitia Seleksi Dan Sekretariat Panitia Seleksi Rekrutmen Dokter Nusantara Sehat Daerah.....	73
156	Honorarium Panitia Seleksi Penerima Beasiswa Pendidikan Tenaga Kesehatan 'Non ASN..	73
157	Honorarium Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi .....	74
158	Honorarium Tim Evaluasi Kegiatan Pembangunan, Pemerintahan Dan Pelayanan Masyarakat Dan Sekretariat Tim Evaluasi Pembangunan, Pemerintahan Dan Pelayanan Masyarakat .....	74
159	Honorarium Panitia Penyelenggara pelayanan Jamaah Haji Kabupaten Maluku Tengah..	74
160	Honorarium Panitia Penyelenggara Safari Keagamaan Kabupaten Maluku Tengah.....	74
161	Honorarium Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat dan Pembinaan Sumber Daya Manusia .....	74
162	Honorarium Panitia Penanggungjawab Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif .....	74
163	Honorarium Tim Penyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	75
164	Honorarium Tim Penataan Aset Tanah Pemerintah Daerah .....	75
165	Honorarium Tim Musrenbang RKPD Kabupaten .....	75
166	Honorarium Tim Evaluasi Renstra Kabupaten .....	75
167	Honorarium Tim Penyusun RPJMD .....	75
168	Honorarium Tim Penyusun RKPD Kabupaten .....	75
169	Honorarium Tim Penyusun LKPJ Tahunan Bupati.....	75
170	Honorarium Tim Penyusun LKPJ Akhir masa Jabatan Bupati .....	75
171	Honorarium Admin Aplikasi Pelaporan dan Inovasi Pembangunan Daerah .....	75
172	Honorarium Tim Aplikasi Krisna DAK-APBN Kabupaten .....	76
173	Honorarium Tim Sekretariat Pokja AMPL (Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan).....	76
174	Honorarium Sekretariat Tim Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Dak Dan APBN Dan Sekretariat Pelaporan Dak Tugas Pembantuan Dan APBD kabupaten .....	76
175	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan pengelola sistim informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Maluku Tengah .....	76
176	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan pengelola sistim informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Maluku Tengah .....	76
177	Honorarium Operator Website Baplitbangda .....	77
178	Honorarium Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah.....	77
179	Honorarium Tim Pembina Penilaian Barang Milik Daerah .....	77
180	Honorarium Tim Pembahasan dan Penyusunan Penilaian Barang Milik Daerah .....	77
181	Honorarium Tim Teknis Penilaian Barang Penilaian Barang Milik Daerah .....	77
182	Honorarium Tim Kerja Penilaian Barang Milik Daerah .....	77

183	Honorarium Tim Pelelangan barang Milik Daerah .....	77
184	Honorarium Tim Monitoring dan Rekon Milik Daerah .....	77
185	Honorarium Tim Penghapusan Barang Milik Daerah .....	78
186	Honorarium Tim Penyusun laporan Barang Milik Daerah .....	78
187	Honorarium Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah .....	78
188	Honorarium Fasilitator DAK Pertanian .....	78
189	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Saksi Ahli dan Belacara .....	78
190	Honorarium Penyelenggara Kesehatan Jamaah Haji Kabupaten Maluku Tengah .....	78
191	Honorarium Tim Teknis Paten .....	78
192	Honorarium Pegawai Honorer Satpol PP .....	78
193	Honorarium Pegawai Honorer Pemadam Kebakaran.....	79
194	Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,Kewajiban,Akuwitas,Pendapatan, Belanja,Pembiayaan LO dan BEBAN .....	79
195	Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan-Semesteran dan Tahunan OPD .....	79
196	Honorarium Pokja Program Subsidi Bunga Skin Kredit Usaha Mikro Kreatif .....	79
197	Honorarium Petugas Admin Aplikasi Jaga .....	79
198	Honorarium operator Server .....	79
199	Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten.....	79
200	Honorarium Jasa Pendamping/Fasititator Kontraktual .....	79
201	Honorarium Jasa Pengawasan Kegiatan Kontraktual .....	80
202	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Data Kependudukan Perkembangan Dan Proyeksi .....	80
203	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Jarinag Dukumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) .....	80
204	Honorarium Enumerator Pemantauan Stok,Pasokan dan harga Pangan.....	80
205	Honorarium Fasilitator Pengembangan Kelembaggaan Dan Jaringan Distribusi Pangan ..	80
206	Honorarium Fasilitator Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten...	80
207	Honorarium Tim Penyediaan Informasi Harga Bahan Pangan Dan Neraca Bahan Makanan (NBM).....	81
208	Honorarium Petugas Penyusunan,Pemutahiran Dan Analisis Peta Ketahan Pangan Dan Kerentangan Pangan.....	81
209	Honorarium Pengawas Lapangan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.....	81
210	Honorarium Tim Penyusun Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) .....	81
211	Honorarium Tim Penyusunan Draf Rancangan Kebijakan Dan Harmonisasi Peraturan Perijinan Dan Non Perijinan .....	81
212	Honorarium Petugas Desa Sampel Dan Petugas Pengolah Data Statistik Perikanan .....	81
213	Honorarium Petugas Penyuluh Perikanan .....	82
214	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Komite Audit.....	82
215	Honorarium Tim Lintas Sektor Untuk Percepatan Target Nasional.....	82
216	Honorarium Tim Inovasi Produk .....	82
217	Honorarium Tim Terpadu Keaaman Dan Kebersihan Pasar .....	82
218	Honorarium Tim Pemantau Harga Stok Dan Barang .....	82
219	Honorarium Panitia Pelaksana Pasar Murah .....	82
220	Honorarium Petugas Pendataan Sumber Daya Industri.....	82
221	Honorarium Petugas Penjaga Outlet Produk Kabupaten (DKI Jakarta) .....	83
222	Honorarium Petugas Jaga Pasar .....	83

223	Honorarium Operator Pemantau Harga Stok Barang.....	83
224	Honorarium Operator Sistim Informasi Kredit .....	83
225	Honorarium Tim Penyelesaian Pangkat Pegawai Negeri Sipil .....	83
226	Honorarium Tim Uji Kompetensi (ASSESSOR) .....	83
227	Honorarium Tim Penyelesaian KARPEG.....	83
228	Honorarium Tim Penyelesaian KARIS/KARSU .....	83
229	Honorarium Tim Penyelesaian PUPNS.....	84
230	Honorarium Tim Seleksi Ujian Dinas/Penyesuaian Ijazah .....	84
231	Honorarium Sumpah Janji PNS .....	84
232	Honorarium PANSIMAS.....	84
233	Honorarium Petugas E-MON DAK.....	84
234	Honorarium Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) .....	84
235	Honorarium Satgas Penanganan Covid-19 Di Kecamatan .....	84
236	Honorarium Tim Evaluasi Pengelolaan BUMD Dan BLUD.....	84
237	Honorarium Tim Bazanas Kabupaten Maluku Tengah .....	85
238	Honorarium Petugas Pendata Sumber Daya Industri Di Kabupaten .....	85
239	Honorarium Tenaga Teknis Perternakan .....	85
240	Honorarium Tenaga OUTSOURCHING .....	85
241	Honorarium Fasilitator Sanitasi Masyarakat .....	85
242	Honorarium Instuktur MTQ/PESPARAWI .....	85
243	Honorarium Panitia Pasar Murah .....	85
244	Honorarium Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pratama.....	85
245	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan DAK SPAM.....	85
246	Honorarium Tim Terpadu Penertiban Fasilitas Pasar .....	85
247	Honorarium Pengelola Manajemen, Dan Jasa Medis Para Medis Dan JKN.....	86
248	Honorarium Pengelola Dana JKN.....	86
249	Honorarium Pengelola Covid-19.....	86
250	Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan .....	86
251	Honorarium Tim Rekonsiliasi Penyetoran Pajak-Pajak Pusat Yang Di Pungut Dan Di Setor Ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).....	86
252	Honorarium Tim Penanggulangan STUNTING Dan Sekretariat Tim Penanggulangan STUNTING Kabupaten Maluku Tengah .....	86
253	Honorarium Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maluku Tengah.....	87
254	Honorarium Pendamping/Petugas Lapangan.....	87
255	Honorarium Tim Aset Tanah Pemerintah Daerah .....	87
256	Honorarium Tim Kajian dan Analisis Rencana Pemekaran Wilayah .....	87
257	Honorarium Satgas Penanganan Covid – 19.....	87
258	Honorarium Pansus DPRD.....	87
259	Honorarium Personel Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALPOS).....	87
260	Honorarium Tim Verifikasi Dan Validasi Data Panca Bencana .....	88
261	Honorarium Tim Pembahasan RANPERBUP .....	88
262	Honorarium Tim Asistensi Penyusunan RANPERDA .....	88
263	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengelola Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) .....	88
264	Honorarium Tim Pokja Dan Sekretariat Tim Pokja .....	88
265	Honorarium Tim Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	88

266	Honorarium Tim Penyusun Dokumen KUA/PPAS .....	89
267	Honorarium Tim Penyusun Dokumen KUA/PPAS Perubahan .....	89
268	Honorarium Tim Penyelesaian SPT Tahunan Kabupaten Maluku Tengah .....	89
269	Honorarium Kegiatan Forum Lalu Lintas .....	89
270	Honorarium Operasi Penertiban Hari-Hari Besar .....	89
271	Honorarium Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas Car Free Day .....	89
272	Honorarium Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	89
273	Honorarium Tim Inovasi OPD Kasmpus Negeri .....	90
274	Honorarium Penanganan Covid 19 .....	90
275	Honorarium Penyuluh THL-TBPP .....	90
276	Honorarium Petugas Posko Covid Kecamatan.....	90
277	Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Penyetoran Pajak-Pajak Pusat Atau disetor ke Kas Umum Negara Kabupaten Maluku Tengah .....	90
278	Honorarium Tim Penyusun LPPD Masa Akhir Jabatan Bupati dan Wakil Bupati.....	90
279	Honorarium Tim Kesehatan Penyelenggaraan Kesehatan Haji .....	91
280	Honorarium Tim Promosi dan KIE Program KKBK Melalui Media Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Negeri Lainnya .....	91
281	Honorarium Tim Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program .....	91
282	Honorarium Satgas Pengelola Barang Milik Daerah .....	91
283	Honorarium Tim Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program .....	91
284	Honorarium Tim Pelaksanaan Krisna Dak Fisik (Kolaborasi Perencanaan Tim Kerja Kabupaten).....	91
285	Honorarium Pokja PKP .....	92
286	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (DAK).....	92
287	Honorarium Penyuluh.....	92
288	Honorarium IB.....	92
289	Honorarium Tim Verivikal Hibah.....	92
290	Honorarium Tim Teknis Penilaian Aset Daerah .....	92
291	Honorarium Penyelenggaraan Ujian .....	92
292	Honorarium Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah .....	92
293	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.....	93
294	Honorarium Tim Pokja KLHS.....	93
295	Honorarium Penilai Lomba.....	93
296	Honorarium Tim Verifikasi Administrasi Bantuan Sosial.....	93
297	Honorarium Penyelenggara Clearing House Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah .....	93
298	Honorarium Pengelola Manajemen dan Medis Para Medis.....	94
299	Honorarium Inovasi cabe Holo.....	94
300	Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Lingkungan SKPD .....	94
301	Honorarium Tim Sosialisasi Perda LP2B.....	94
302	Honorarium Tim Aset OPD.....	94
303	Honorarium Tim Uji Kompetensi (Assesor) PBJ.....	94
304	Honorarium Tim IT dan Tim Administrasi Uji Kompetensi/Ujian Sertifikasi PBJ.....	94
305	Honorarium Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan.....	94
306	Honorarium Tim Penyusunan dan Evaluasi.....	95
307	Honorarium Penginputan Dokumen Perencanaan.....	95
308	Honorarium Instruktur/Pelatih Membatik.....	95
309	Honorarium Tenaga Operator Mesin Listrik.....	95

310	Honorarium Tim Teknis PTSP.....	95
311	Honorarium Fasilitator Rehabilitasi Rumah Bencana.....	95
312	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.....	95
313	Honorarium Tim Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Infrastruktur .....	96
314	Honorarium Tim Penyusun Memori Pemerintahan Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati .....	96
315	Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Inovasi Daerah.....	96
316	Honorarium Petugas Pendamping Perempuan dan Anak Korban Kekerasan .....	96
317	Honorarium Tim Pengadaan Cadangan Pangan.....	96
318	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan.....	96
319	Honorarium satuan Tugas Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten.....	97
320	Honorarium Tim Pengelola Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah.....	97
321	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap Kategori Umum.....	97
322	Honorarium Administrasi dan Tenaga Teknis.....	97
323	Honorarium Tim Pelelangan.....	97
324	Honorarium Peningkatan SPAM Jaringan.....	97
325	Honorarium SIPD.....	98
326	Honorarium Operator Perpustakaan.....	98
327	Honorarium Tim Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).....	98
328	Honorarium Tim Penyusunan LKJP SKPD .....	98
329	Satuan Biaya Pengembangan Aplikasi .....	98
330	Uang Saku Jasa Pengamanan Aset Daerah .....	98
331	Satuan Tambahan Penghasilan Operator OMSPAM Kabupaten .....	98
332	Satuan Tambahan Tunjangan Karena Kelangkaan Profesi Tenaga Dokter, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anestesi .....	98
333	Satuan Biaya Insentif Dokter.....	99
334	Satuan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKPNSD).....	99
335	Satuan Biaya Jaga Dokter Spesialis, Dokter Umum, Paramedis, Non Paramedis, Supervisor, Jasa Penagihan Retribusi dan Jasa Radiasi (RSUD Masohi) .....	99
336	Satuan Biaya Jaga Dokter Umum, Dokter Spesialis, Paramedis dan Non Paramedis (RSUD Saparua).....	99
337	Satuan Biaya Jaga Dokter Umum, Dokter Spesialis, Paramedis dan Non Paramedis (RSUD Banda).....	99
338	Satuan Biaya Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kabupaten Maluku Tengah .....	100
339	Satuan Tunjangan Supervisi dan Monitoring Pengawas PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF).....	100
340	Satuan Tunjangan Supervisi dan Monitoring Pengawas SD dan SMP.....	100
341	Satuan Tunjangan Biaya Operasional Rumah Tangga Pimpinan DPR.....	100
342	Satuan Biaya Jaga Dokter Umum, Dokter Spesialis, Paramedis dan Non Paramedis (RSUD Saparua).....	100
343	Satuan Biaya Jaga Dokter Umum, Dokter Spesialis, Paramedis dan Non Paramedis (RSUD Banda).....	100
344	Satuan Biaya Jaga Dokter Spesialis, Dokter Umum, Paramedis, Non Paramedis, Supervisor, Jasa Penagihan Restribusi dan Jasa Radiasi (RSUD Masohi).....	100
345	Satuan Biaya Insentif Staf Pengelola Kas Daerah .....	100
346	Satuan Biaya Operasional Penyuluh Honorir.....	101



347	Satuan Biaya Operasional Penyuluh THL-TBPP .....	101
348	Satuan Biaya Pemondokan Penyuluh Honorer dan THL.....	101
349	Satuan Operasional Balai Penyuluh Pertanian .....	101
350	Satuan Operasional Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya.....	101
351	Satuan Biaya Pengelola Lahan .....	101
352	Satuan Biaya Perawatan Tanaman .....	101
353	Satuan Biaya Insentif Panen dan Pasca Panen .....	101
354	Satuan Biaya Insentif Perbanyak Tanaman.....	101
355	Satuan Biaya Insentif Penyuluh Swadaya .....	102
356	Upah Pengisian Polibag.....	102
357	Upah Pesemaian Padi .....	102
358	Upah Penanaman Padi.....	102
359	Upah Pemupukan Padi.....	102
360	Upah Penyiangan Padi .....	102
361	Upah Pengendalian OPT Padi .....	102
362	Upah Panen dan Pasca Panen.....	102
363	Satuan Upah Petugas Kebersihan/TPA Sampah, Petugas Taman, Sopir dan Operator Alat Berat .....	102
364	Satuan Biaya Uang Makan Aparatur Sipil Negara.....	102
365	Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur .....	102
366	Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor .....	103
367	Satuan Biaya Uang saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran yang Sama.....	103
368	Satuan Biaya Uang Saku Kegiatan Bimtek/Pelatihan, Sosialisasi dll .....	103
369	Satuan Biaya Fasilitas Produk Hukum Daerah .....	103
370	Satuan Biaya Pengemasan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah .....	104
371	Satuan Biaya Operasional Petugas Mobil Tangki Air Bersih .....	104
372	Satuan Biaya Petugas Pendataan PMKS dan PSKS.....	104
373	Satuan Biaya Jasa Tenaga IPCN (Inspection Prevention Control) .....	104
374	Satuan Biaya Jasa Kepala Ruangan, Instalasi dan Komite Rumah Sakit.....	104
375	Satuan Biaya Pencacahan Harga Komoditi .....	104
376	Satuan Biaya Uang Duka / Meninggal Dunia .....	104
377	Satuan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenasah .....	104
378	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Investigasi .....	104
379	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Intervensi.....	105
380	Satuan Tambahan Pengasilan .....	105
381	Satuan Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat .....	105
382	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas.....	105
383	Uang Representasi .....	105
384	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri .....	105
385	Satuan Biaya Penginapan.....	106
386	Satuan Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor.....	106

### C. Lampiran II : Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

#### Yang Berfungsi Sebagai Estimasi

1. Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kota/Kecamatan Pergi Pulang (PP) .....	108
2. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural.....	108
3. Satuan Biaya Latihan Prajabatan.....	108
4. Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.....	108
5. Satuan Biaya Perawatan dan Kendaraan Bermotor.....	108
6. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor.....	108
7. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non – Gelar .....	109
8. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS).....	109
9. Satuan Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran .....	109
10. Satuan Biaya Makan dan Minum .....	109
11. Satuan Biaya Makanan dan Belanja Bahan Makanan pada Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah .....	109
12. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru .....	109
13. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan .....	109
14. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan.....	109
15. Satuan Biaya Sewa Kendaraan .....	109
16. Satuan Biaya Sewa Sound Sistem.....	110
17. Satuan Biaya Sewa Generator.....	110
18. Satuan Biaya Sewa Tenda .....	110
19. Satuan Biaya Sewa Meubeler.....	110
20. Satuan Biaya Sewa Dekorasi .....	110
21. Satuan Biaya Sewa Fasilitas Di Kawasan Pariwisata .....	110
22. Satuan Biaya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Belanja dan Kuliner .....	110
23. Satuan Biaya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Belanja dan Warisan Budaya.....	110
24. Satuan Biaya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Traking dan Tematik.....	110
25. Satuan Biaya Jasa Bongkar Pasang Atribut Destinasi Wisata.....	110
26. Satuan Biaya Spanduk .....	110
27. Satuan Biaya Pemasangan Baleho .....	110
28. Satuan Biaya Peliputan Media Eletronik dan Media Cetak.....	110
29. Satuan Biaya Media Cetak Iklan dan Media Online .....	110
30. Satuan Biaya Pembuatan Iklan Media Cetak dan Online .....	111
31. Satuan Biaya Pembuatan Vidio Promosi dan Biaya Jasa Design .....	111
Buku/Majalah/Tabloid/Kalender Wisata/Booklet/Leaflet/Brosur Promosi Wisata .....	111
32. Satuan Biaya Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat .	111
33. Satuan Biaya Belanja Perhargaan Atas Prestasi.....	111
34. Satuan Biaya Dokumentasi .....	111
35. Satuan Biaya Pembuatan Laporan .....	112
36. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas.....	112
37. Satuan Biaya Pangkas Rambut dan Rias Paskibraka .....	112
38. Satuan Biaya Tim Teknis.....	112
39. Satuan Biaya Kontribusi Fasilitas PERDA dan PERBUP .....	112

40. Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB-DAK) .....	112
41. Satuan Biaya Jasa Tenaga Medis .....	112
42. Satuan Biaya Colocation Server.....	112
43. Satuan Biaya Transportasi Pendamping dan Siswa Kegiatan Lomba Olimpiade Sains SD dan SMP Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional .....	112
44. Satuan Biaya Belanja Barang dan Jasa JKN .....	113
45. Satuan Biaya Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19.....	113
46. Satuan Biaya Belanja Modal yang Bersumber dari Dana JKN .....	113
47. Satuan Biaya Belanja Modal untuk Kebutuhan Penanganan Covid-19.....	113
48. Satuan Biaya Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan.....	113
49. Satuan Biaya Jasa Pengelolaan Limba Rumah Sakit.....	113
50. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit .....	114
51. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum.....	114
52. Satuan Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit .....	114
53. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan .....	114
54. Satuan Biaya Pemeliharaan Mobil Ambulance .....	114
55. Satuan Belanja Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Lokal .....	114
56. Satuan Biaya Belanja Hadiah Uang Untuk Lomba Festival B2SA Dalam Rangka HUT RI dan HUT Kota .....	115
57. Satuan Biaya Belanja Hadiah Piala Untuk Juara Lomba Festival B2SA Dalam Rangka HUT RI dan HUT Kota .....	115
58. Satuan Biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi, dan Lain-lain ....	115
59. Satuan Biaya Uang Saku Patroli Pengamanan dan Pengawasan .....	115
60. Satuan Biaya Belanja Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Daerah.....	115
61. Satuan Biaya Bimtek PPNS .....	115
62. Satuan Biaya Pembinaan Peserta Khalifah MTQ.....	115
63. Satuan Biaya Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Hadiah Lomba) .....	115
64. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Dalam Rangka Distribusi Bantuan Bahan Perdagangan dan Industri Bagi Masyarakat (18 Kecamatan) .....	115
65. Satuan Biaya Sewa Barang dan Buruh Angkut Barang.....	115
66. Satuan Biaya Pengadaan Produk Kerajinan Untuk Dekranasda dan Inovasi .....	115
67. Satuan Biaya Peralatan dan Bahan Industri Rumah Tangga .....	115
68. Satuan Biaya Belanja Bantuan Peralatan Usaha Sektor Jasa .....	116
69. Satuan Biaya Belanja Kalibrasi Peralatan Metrologi .....	116
70. Satuan Biaya Belanja Pemeliharaan Peralatan Operasional Tera .....	116
71. Satuan Biaya Tarif Listrik, Tarif Air dan Internet .....	116
72. Satuan Biaya Sewa Hosting/Website .....	117
73. Satuan Biaya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Aplikasi).....	117
74. Satuan Biaya Penyampaian SPPT- PBB.....	117
75. Satuan Biaya Pembayaran PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.....	117
76. Satuan Biaya Angkut SPPT Ke Kecamatan.....	117
77. Satuan Biaya Pengadaan Aplikasi E-Government Pajak Daerah .....	117
78. Satuan Biaya Belanja Hadiah Beasiswa Lomba Pemilihan Anak Kreatif .....	117
79. Satuan Biaya Belanja Hadiah Beasiswa Lomba Pemilihan Anak Kreatif di Kecamatan.....	117
80. Satuan Biaya Belanja Trophi/Piala Lomba Pemilihan Anak Kreatif.....	118

81. Satuan Biaya Belanja Akun Zoom Meeting Untuk Pelaksanaan Kegiatan Lomba Anak Kreatif dan Workshop Anak.....	118
82. Satuan Biaya Belanja Sidang Isbat ke Pengadilan Agama .....	118
83. Satuan Biaya Pengadaan Soal Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah.....	118
84. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas.....	118
85. Satuan Pelatihan/Koordinasi.....	118
86. Satuan Biaya Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) .....	118
87. Satuan Biaya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.....	118
88. Satuan Biaya Pemeliharaan Rutin Jalan .....	118
89. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya .....	118
90. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air .....	118
91. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Tata Ruang .....	119
92. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Bina Marga .....	119
93. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan .....	119
94. Satuan Biaya Belanja Jasa Pengawasan .....	120
95. Satuan Biaya Belanja Jasa Lainnya .....	123
96. Satuan Biaya Belanja Barang, Jasa dan Modal .....	123
97. Satuan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB DAK) .....	123
98. Satuan Biaya Survey Jalan dan Jembatan .....	124
99. Satuan Biaya Penunjang DAK .....	124
100. Satuan Biaya Operasional Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) .....	124
101. Satuan Biaya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan TPA dan IPLT.....	124
102. Satuan Biaya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Waai di Negeri Waai Kecamatan Salahutu.....	124
103. Satuan Biaya Sertifikasi Lahan Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Waai di Negeri Waai Kecamatan Salahutu .....	124
104. Satuan Biaya Pengiriman Nitrogen Cair .....	124
105. Satuan Biaya Pemeriksaan Sampel Darah.....	124
106. Satuan Biaya Medical Chek Up Kesehatan.....	124
107. Satuan Biaya Operasional Penunjang DAK.....	124
108. Satuan Biaya Pembayaran PBB-P2 .....	124
109. Satuan Biaya Makan dan Minum Pada Pelayanan Urusan Kesehatan .....	124
110. Satuan Biaya Jasa Paket/Pengiriman .....	125
111. Satuan Biaya Pengiriman Alat dan Obat Kontrasepsi ke Kecamatan.....	125
112. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung RSUD Masohi .....	125
113. Satuan Biaya Uang Saku Peserta Reses DPRD.....	125
114. Satuan Biaya Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan Serta Alat Rumah Tangga .....	125
115. Satuan Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat.....	125
116. Satuan Biaya Makan dan Minum Tamu Pimpinan DPRD .....	125
117. Satuan Biaya Penghargaan Pemilihan ABDIYASA Teladan.....	125
118. Satuan Biaya Penghargaan atau Hadiah Lomba di Tingkat Kecamatan.....	125
119. Satuan Biaya Pembayaran PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021..	125
120. Satuan Biaya Operasional Penunjang DAK Gedung HCU/ICU.....	126
121. Satuan Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan .....	126
122. Satuan Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Jaminan Kesehatan Nasional .....	126
123. Satuan Biaya Insentif Pengelola Kas Daerah.....	126

124. Satuan Biaya Jasa Tenaga Juri, Kesehatan dan Keamanan pada Festifal/Even Penerimaan Tamu Daerah.....	126
125. Satuan Biaya Sewa Alat Selam .....	126
126. Satuan Biaya Jasa Penagihan Distribusi Pelayanan.....	126
127. Satuan Biaya Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan .....	126
128. Satuan Biaya Jasa Sopir .....	126
129. Satuan Biaya Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian Dan Pangan.....	126
130. Satuan Biaya Pemeliharaan.....	126
131. Satuan Biaya Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah .....	126
132. Satuan Biaya Akomodasi Hotel/Penginapan .....	126
133. Satuan Biaya Makan Dan Minum Rapat APIP .....	126
134. Satuan Biaya Mobil Patwal.....	126
135. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa .....	126
136. Satuan Biaya Uang Saku Previuw/Evaluator .....	126
137. Satuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	126
138. Satuan Biaya Belanja Jasa Tenaga Medis Pelayanan KB MOP (Pengendalian Dan Pengdistribusian) Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Kabupaten/Kota.....	126
139. Satuan Biaya Belanja Jasa Tenaga Medis Pelayanan KB MOW (Pengendalian Dan Pengdistribusian) Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Kabupaten/Kota.....	126
140. Satuan Biaya Belanja Hadiah Biaya Siswa Lomba Pemilihan Anak Kreatif.....	127
141. Satuan Biaya Belanja Hadiah Lomba B2SA Kecamatan.....	127
142. Satuan Biaya Belanja Hadiah Lomba Serba Ikan Kecamatan .....	127
143. Satuan Biaya Belanja Perjalanan Dinas lapangan (BOKB-DAK).....	127
144. Satuan Biaya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK).....	127
145. Biaya Belanja Perjalanan Dinas lapangan .....	127
146. Satuan Biaya Kebutuhan Jemaah Haji .....	127
147. Satuan Biaya Embarkasi Jemaah Haji.....	127
148. Satuan Biaya Belanja Lomba Jurnalistik .....	127
149. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Tamu KDH dan Wakil KDH .....	127
150. Satuan Biaya Fasilitas Perda/Perbup.....	127
151. Satuan Biaya Pengawas Lapangan .....	127
152. Satuan Biaya Tim Kesehatan Seleksi Paskibraka .....	127
153. Satuan Biaya Tenaga Ahli Penulisan Buku .....	127
154. Satuan Biaya non personil penulisan buku .....	127
155. Satuan Biaya Pemasangan Instalasi Video Troon .....	127
156. Satuan Biaya Jasa Tenaga Keamanan/ Kebersihan Sentral Industri .....	127
157. Satuan Biaya Operasional Penyuluh THL-TBPP .....	127
158. Satuan Biaya Tenaga Pendamping OSSBRADAN LKPM.....	127
159. Satuan Biaya Penyambungan Listrik Outlet .....	127
160. Satuan Biaya Iuran Jasminan Kesehatan.....	128
161. Satuan Biaya Jasa Tenaga Medis Dan Non Medis .....	128
162. Satuan Biaya Uang Saku DAK Non Fisik.....	128
163. Satuan Biaya Jasa Tenaga Laboratorium.....	128
164. Satuan Biaya Krans Bunga Bucket.....	128
165. Satuan Biaya Jasa Pemasangan Dan Servis AC.....	128
166. Satuan Biaya Transportasi Laut Masohi-Tulehu.....	128

167. Satuan Biaya Pengawasan Obat Dan Makanan DAK Non Fisik .....	128
168. Satuan Biaya Jasa Tenaga Operator Komputer .....	128
169. Satuan Biaya Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi Konsultasi Evaluasi Dan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota .....	128
170. Satuan Biaya Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi Konsultasi Evaluasi Dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota .....	129
171. Satuan Biaya Penyesuaian KLHS RDTR Masohi, KLHS RDTR Hila, KLHS RDTR Tulehu .....	129
172. Satuan Biaya Insentif Pemungutan Bagi KDH/WKDH Atas Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan .....	129
173. Satuan Biaya Jasa Tanah .....	129
174. Satuan Biaya Pemeliharaan Cliring TPA Banda .....	129
175. Satuan Biaya Sewa Mobilitas Tengki Air .....	129
176. Satuan Biaya Penelitian dan Pengembangan Masyarakat .....	129
177. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang(PP) .....	130
178. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Pergi – Pulang (PP) dari Kota Masohi .....	133

**D. Lampiran II : Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023  
yang berfungsi sebagai Estimasi**

1. Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kota/Kecamatan Pergi Pulang (PP) .....	136
2. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural .....	136
3. Satuan Biaya Latihan Prajabatan .....	136
4. Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur .....	136
5. Satuan Biaya Perawatan dan Kendaraan Bermotor .....	136
6. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor .....	137
7. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non – Gelar .....	137
8. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) .....	137
9. Satuan Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran .....	137
10. Satuan Biaya Makan dan Minum .....	137
11. Satuan Biaya Makanan dan Belanja Bahan Makanan pada Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah .....	138
12. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru .....	138
13. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan .....	138
14. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan .....	138
15. Satuan Biaya Sewa Kendaraan .....	138
16. Satuan Biaya Sewa Sound Sistem .....	138
17. Satuan Biaya Sewa Generator .....	139
18. Satuan Biaya Sewa Tenda .....	139
19. Satuan Biaya Sewa Meubeler .....	139
20. Satuan Biaya Sewa Dekorasi .....	139
21. Satuan Biaya Sewa Fasilitas Di Kawasan Pariwisata .....	139
22. Satuan Biaya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Belanja dan Kuliner .....	139
23. Satuan Biaya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Belanja dan Warisan Budaya .....	139

24. Satuan Biaya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Traking dan Tematik.....	139
25. Satuan Biaya Jasa Bongkar Pasang Atribut Destinasi Wisata.....	139
26. Satuan Biaya Spanduk.....	140
27. Satuan Biaya Pemasangan Baleho .....	140
28. Satuan Biaya Peliputan Media Eletronik dan Media Cetak.....	140
29. Satuan Biaya Media Cetak Iklan dan Media Online .....	140
30. Satuan Biaya Pembuatan Iklan Media Cetak dan Online .....	140
31. Satuan Biaya Pembuatan Vidio Promosi dan Biaya Jasa Design .....	140
Buku/Majalah/Tabloid/Kalender Wisata/Booklet/Leaflet/Brosur Promosi Wisata .....	140
32. Satuan Biaya Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat .	140
33. Satuan Biaya Belanja Perhargaan Atas Prestasi.....	140
34. Satuan Biaya Dokumentasi .....	141
35. Satuan Biaya Pembuatan Laporan .....	141
36. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas.....	141
37. Satuan Biaya Pangkas Rambut dan Rias Paskibraka .....	141
38. Satuan Biaya Tim Teknis.....	141
39. Satuan Biaya Kontribusi Fasilitas PERDA dan PERBUP .....	141
40. Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB-DAK) .....	141
41. Satuan Biaya Jasa Tenaga Medis .....	141
42. Satuan Biaya Colocation Server.....	141
43. Satuan Biaya Transportasi Pendamping dan Siswa Kegiatan Lomba Olimpiade Sains SD dan SMP Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional .....	141
44. Satuan Biaya Belanja Barang dan Jasa JKN .....	142
45. Satuan Biaya Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19.....	142
46. Satuan Biaya Belanja Modal yang Bersumber dari Dana JKN.....	142
47. Satuan Biaya Belanja Modal untuk Kebutuhan Penanganan Covid-19.....	142
48. Satuan Biaya Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan.....	142
49. Satuan Biaya Jasa Pengelolaan Limba Rumah Sakit.....	142
50. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit.....	142
51. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum.....	142
52. Satuan Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit .....	142
53. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan .....	142
54. Satuan Biaya Pemeliharaan Mobil Ambulance .....	143
55. Satuan Belanja Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Lokal .....	143
56. Satuan Biaya Belanja Hadiah Uang Untuk Lomba Festival B2SA Dalam Rangka HUT RI dan HUT Kota .....	143
57. Satuan Biaya Belanja Hadiah Piala Untuk Juara Lomba Festival B2SA Dalam Rangka HUT RI dan HUT Kota .....	143
58. Satuan Biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi, dan Lain-lain....	143
59. Satuan Biaya Uang Saku Patroli Pengamanan dan Pengawasan .....	143
60. Satuan Biaya Belanja Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Daerah.....	143
61. Satuan Biaya Bimtek PPNS .....	143
62. Satuan Biaya Pembinaan Peserta Khalifah MTQ.....	143
63. Satuan Biaya Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Hadiah Lomba) .....	144

64. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Dalam Rangka Distribusi Bantuan Bahan Perdagangan dan Industri Bagi Masyarakat (18 Kecamatan) .....	144
65. Satuan Biaya Sewa Barang dan Buruh Angkut Barang.....	144
66. Satuan Biaya Pengadaan Produk Kerajinan Untuk Dekranasda dan Inovasi .....	144
67. Satuan Biaya Peralatan dan Bahan Industri Rumah Tangga .....	144
68. Satuan Biaya Belanja Bantuan Peralatan Usaha Sektor Jasa .....	144
69. Satuan Biaya Belanja Kalibrasi Peralatan Metrologi .....	144
70. Satuan Biaya Belanja Pemeliharaan Peralatan Operasional Tera .....	144
71. Satuan Biaya Tarif Listrik, Tarif Air dan Internet .....	144
72. Satuan Biaya Sewa Hosting/Website .....	145
73. Satuan Biaya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Aplikasi).....	145
74. Satuan Biaya Penyampaian SPPT- PBB.....	145
75. Satuan Biaya Pembayaran PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.....	145
76. Satuan Biaya Angkut SPPT Ke Kecamatan.....	145
77. Satuan Biaya Pengadaan Aplikasi E-Government Pajak Daerah .....	145
78. Satuan Biaya Belanja Hadiah Beasiswa Lomba Pemilihan Anak Kreatif .....	145
79. Satuan Biaya Belanja Hadiah Beasiswa Lomba Pemilihan Anak Kreatif di Kecamatan.....	145
80. Satuan Biaya Belanja Trophi/Piala Lomba Pemilihan Anak Kreatif.....	145
81. Satuan Biaya Belanja Akun Zoom Meeting Untuk Pelaksanaan Kegiatan Lomba Anak Kreatif dan Workshop Anak .....	145
82. Satuan Biaya Belanja Sidang Isbat ke Pengadilan Agama .....	146
83. Satuan Biaya Pengadaan Soal Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah.....	146
84. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas.....	146
85. Satuan Pelatihan/Koordinasi.....	146
86. Satuan Biaya Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) .....	146
87. Satuan Biaya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.....	146
88. Satuan Biaya Pemeliharaan Rutin Jalan .....	147
89. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya .....	147
90. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air .....	147
91. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Tata Ruang .....	147
92. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Bina Marga .....	147
93. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan .....	147
94. Satuan Biaya Belanja Jasa Pengawasan .....	147
95. Satuan Biaya Belanja Jasa Lainnya .....	147
96. Satuan Biaya Belanja Barang, Jasa dan Modal .....	148
97. Satuan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB DAK) .....	148
98. Satuan Biaya Survey Jalan dan Jembatan .....	148
99. Satuan Biaya Penunjang DAK .....	148
100. Satuan Biaya Operasional Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) .....	148
101. Satuan Biaya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan TPA dan IPLT.....	148
102. Satuan Biaya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Waai di Negeri Waai Kecamatan Salahutu.....	148
103. Satuan Biaya Sertifikasi Lahan Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Waai di Negeri Waai Kecamatan Salahutu .....	148
104. Satuan Biaya Pengiriman Nitrogen Cair .....	148
105. Satuan Biaya Pemeriksaan Sampel Darah.....	149
106. Satuan Biaya Medical Check Up Kesehatan.....	149



107. Satuan Biaya Operasional Penunjang DAK.....	149
108. Satuan Biaya Pembayaran PBB-P2 .....	149
109. Satuan Biaya Makan dan Minum Pada Pelayanan Urusan Kesehatan .....	149
110. Satuan Biaya Jasa Paket/Pengiriman .....	149
111. Satuan Biaya Pengiriman Alat dan Obat Kontrasepsi ke Kecamatan.....	149
112. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung RSUD Masohi .....	149
113. Satuan Biaya Uang Saku Peserta Reses DPRD.....	149
114. Satuan Biaya Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan Serta Alat Rumah Tangga .....	149
115. Satuan Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat .....	149
116. Satuan Biaya Makan dan Minum Tamu Pimpinan DPRD .....	150
117. Satuan Biaya Penghargaan Pemilihan ABDIYASA Teladan .....	150
118. Satuan Biaya Penghargaan atau Hadiah Lomba di Tingkat Kecamatan.....	150
119. Satuan Biaya Pembayaran PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021..	150
120. Satuan Biaya Operasional Penunjang DAK Gedung HCU/ICU.....	150
121. Satuan Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan .....	150
122. Satuan Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Jaminan Kesehatan Nasional .....	150
123. Satuan Biaya Insentif Pengelola Kas Daerah .....	150
124. Satuan Biaya Jasa Tenaga Juri, Kesehatan dan Keamanan pada Festival/Even Penerimaan Tamu Daerah .....	150
125. Satuan Biaya Sewa Alat Selam .....	150
126. Satuan Biaya Jasa Penagihan Distribusi Pelayanan.....	151
127. Satuan Biaya Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan .....	151
128. Satuan Biaya Jasa Sopir .....	151
129. Satuan Biaya Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian Dan Pangan .....	151
130. Satuan Biaya Pemeliharaan.....	151
131. Satuan Biaya Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah .....	151
132. Satuan Biaya Akomodasi Hotel/Penginapan .....	151
133. Satuan Biaya Makan Dan Minum Rapat APIP .....	151
134. Satuan Biaya Mobil Patwal.....	151
135. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa .....	151
136. Satuan Biaya Uang Saku Previuw/Evaluator .....	151
137. Satuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	151
138. Satuan Biaya Belanja Jasa Tenaga Medis Pelayanan KB MOP (Pengendalian Dan Pengdistribusian) Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Kabupaten/Kota.....	152
139. Satuan Biaya Belanja Jasa Tenaga Medis Pelayanan KB MOW (Pengendalian Dan Pengdistribusian) Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Kabupaten/Kota.....	152
140. Satuan Biaya Belanja Hadiah Biaya Siswa Lomba Pemilihan Anak Kreatif.....	152
141. Satuan Biaya Belanja Hadiah Lomba B2SA Kecamatan.....	152
142. Satuan Biaya Belanja Hadiah Lomba Serba Ikan Kecamatan .....	152
143. Satuan Biaya Belanja Perjalanan Dinas lapangan (BOKB-DAK).....	152
144. Satuan Biaya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK) .....	152
145. Biaya Belanja Perjalanan Dinas lapangan .....	152
146. Satuan Biaya Kebutuhan Jemaah Haji .....	153
147. Satuan Biaya Embarkasi Jemaah Haji.....	153
148. Satuan Biaya Belanja Lomba Jurnalistik .....	153

149. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Tamu KDH dan Wakil KDH .....	153
150. Satuan Biaya Fasilitas Perda/Perbup.....	153
151. Satuan Biaya Pengawas Lapangan .....	153
152. Satuan Biaya Tim Kesehatan Seleksi Paskibraka .....	153
153. Satuan Biaya Tenaga Ahli Penulisan Buku .....	153
154. Satuan Biaya non personil penulisan buku .....	153
155. Satuan Biaya Pemasangan Instalasi Video Troon .....	153
156. Satuan Biaya Jasa Tenaga Keamanan/ Kebersihan Sentral Industri .....	153
157. Satuan Biaya Operasional Penyuluh THL-TBPP .....	154
158. Satuan Biaya Tenaga Pendamping OSSBRADAN LKPM.....	154
159. Satuan Biaya Penyambungan Listrik Outlet .....	154
160. Satuan Biaya Iuran Jasminan Kesehatan.....	154
161. Satuan Biaya Jasa Tenaga Medis Dan Non Medis .....	154
162. Satuan Biaya Uang Saku DAK Non Fisik.....	154
163. Satuan Biaya Jasa Tenaga Laboratorium.....	154
164. Satuan Biaya Krans Bunga Bucket.....	154
165. Satuan Biaya Jasa Pemasangan Dan Servis AC.....	154
166. Satuan Biaya Transportasi Laut Masohi-Tulehu.....	154
167. Satuan Biaya Pengawasan Obat Dan Makanan DAK Non Fisik .....	155
168. Satuan Biaya Jasa Tenaga Operator Komputer .....	155
169. Satuan Biaya Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi Konsultasi Evaluasi Dan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota .....	155
170. Satuan Biaya Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi Konsultasi Evaluasi Dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota .....	155
171. Satuan Biaya Penyesuaian KLHS RDTR Masohi, KLHS RDTR Hila, KLHS RDTR Tulehu.....	155
172. Satuan Biaya Insentif Pemungutan Bagi KDH/WKDH Atas Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan.....	155
173. Satuan Biaya Jasa Tanah .....	155
174. Satuan Biaya Pemeliharaan Cliring TPA Banda .....	155
175. Satuan Biaya Sewa Mobilitas Tengki Air .....	155
176. Satuan Biaya Penelitian dan Pengembangan Masyarakat.....	156
177. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang(PP) .....	156
178. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Pergi – Pulang (PP) dari Kota Masohi .....	156

**PENJELASAN**  
**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023**  
**YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

**1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada :

- 1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- 1.2. Pejabat Pembuat Komitmen
- 1.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
- 1.4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD)
- 1.5. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan
- 1.6. Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerima Pembantu/ Staf Pengelola Keuangan/ Staf Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
- 1.7. Bendahara Barang
- 1.8. Petugas Operator SPID Perangkat Daerah.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Untuk membantu PPTK dalam melaksanakan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :
  1. Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA :
    - a). KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya jumlah PPK paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu
    - b). KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu
  2. Jumlah keseluruhan PPK yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali jumlah PPTK
  3. Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - a). Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan
    - b). besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SPKD

- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola
- e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

## **2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**

### **2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa**

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung /pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan per paket pekerjaan.

### **2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konstruksi**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa konstruksi. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberikan per paket pekerjaan.

### **2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Non Konstruksi**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Non Konstruksi untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa non konstruksi. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/ Jasa diberikan per paket pekerjaan.

### **2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultansi/ Jasa lainnya.**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau kelompok kerja

Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa konsultansi. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberikan per paket pekerjaan.

*Catatan :*

Dalam hal Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa telah ditetapkan dalam jabatan fungsional dan telah diberikan tunjangan jabatan fungsionalnya, maka pemberian honorarium kepada Pejabat Pengadaan / Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Pemilihan dinyatakan tidak berlaku.

2.5. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)

Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal :

- a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang/jasa konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa ( Non Konstruksi)

2.7. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konsultansi)

**3. Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang yang diberi tugas sebagai Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi.

**4. Honorarium Tim Teknis Pengadaan Jasa Konsultansi**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang yang diberi tugas sebagai Tim Teknis Jasa Konsultansi.

**5. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh PA/ KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

**6. Honorarium Staf Pelaksana Teknis Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh PA/ KPA sebagai Staf Pelaksana Teknis Kegiatan. Honorarium Staf Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan per paket pekerjaan.

**7. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)**

Honorarium diberikan kepada Pengelola SAI yang diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada PD sesuai dengan unit akuntansi masing – masing, baik yang dikelola secara prosedur, manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah (SABMD).

**8. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah**

Honorarium pengurus/penyimpan barang milik daerah diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah berdasarkan surat keputusan pengguna barang. Jumlah pejabat/pegawai yang diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan paling banyak 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

**9. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atas kelebihan jam kerja normal atau diluar jam kerja paling banyak 4 (empat) jam sehari. Dalam hal peneliti mendapatkan honorarium, peneliti tidak berhak mendapatkan uang lembur.

**10. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan**

Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara / Non Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan penelitian.

**11. Honorarium Narasumber/Pembahas Kegiatan Seminar/Pembawa Kegiatan Seminar / Rakor / Sosialisasi / FGD / Kegiatan Sejenis**

**11.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas**

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang memberikan informasi /pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, desiminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarsehan, symposium, lokakarya, *focus group discussion* kepada dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan :

- a) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik yang dilakukan secara panel maupun individual.
- b) Narasumber atau Pembahas berasal dari :
  1. Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

2. Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
- c). Dalam hal Narasumber atau Pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium Narasumber atau Pembahas.
- d). Apabila Narasumber atau Pembahas tersebut menjadi merangkap menjadi tim/panitia maka honorarium diberikan salah satu.
- e). Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

#### 11.2 Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis (tidak termasuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Pelaksanaan kegiatan seminar / rakor / sosialisasi / diseminasi / *focus group discussion* / kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan.

#### 11.3 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai pemandu acara pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis. Pelaksanaan kegiatan seminar / rakor / sosialisasi / diseminasi / *focus group discussion* / kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa pemandu acara dalam hal diperlukan.

### 12. **Honorarium Panitia Seminar / Rakor / Sosialisasi / Diseminasi / FGD / Kegiatan**

Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar / rakor / sosialisasi / diseminasi / *focus group discussion* / bimtek / kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup penyelenggara.

Jumlah personil kepanitiaan dengan ketentuan :

- a) untuk seminar/sosialisasi/diseminasi maksimal 10 % (sepuluh prosen) dari jumlah peserta;
- b) untuk bimtek dan diklat maksimal 9 (sembilan) orang.

### 13. **Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil**

Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

### 14. **Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP)**

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah Satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para

Aparatur Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

**15. Honorarium Rohaniawan**

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan dan doa. honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniawan.

**16. Honorarium Tenaga IT, Operator Komputer, Tenaga Administrasi/Teknis Lainnya, Pengemudi, Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Kebersihan dan Pramubakti.**

Honorarium yang diberikan kepada Tenaga IT, Operator Komputer/Aplikasi, Tenaga Administrasi / Teknis lainnya, Pengemudi, Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Kebersihan dan Pramubakti sampai dengan 12 bulan dengan ketentuan telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Kepala PD tidak diperkenankan untuk menambah atau mengangkat pegawai tidak tetap yang dipekerjakan pada PD.

Satuan biaya honorarium Tenaga IT dan Operarator Komputer/Aplikasi Tenaga Administrasi/Teknis Lainnya dan Petugas Pemadam Kebakaran diberikan bagi Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Honorarium tersebut diberikan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang / kontrak kerja. Untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga / diborongan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari satuan biaya. Besaran honorarium tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

**17. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan**

**1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
  - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;



- d) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari – hari;
  - e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut :
- a) Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
  - b) Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah
- 18. Honorarium Tim Teknis Penyusunan PERDA Tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah**
- Honorarium Tim Teknis Penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan PERDA tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 19. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah**
- Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk sebagai Tim Teknis untuk menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 20. Honorarium Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah**
- Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 21. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah**
- Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala PD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 22. Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD (DPA-OPD) Kabupaten Maluku Tengah**
- Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD (DPA-OPD) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- Ketentuan pembentukan Tim adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 23. Honorarium Tim Teknis Penyusunan PERDA Tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah**
- Honorarium Tim Teknis Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 24. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah**
- Honorarium Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk sebagai Tim Teknis untuk menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;

- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 25. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 26. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 27. Honorarium Tim Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD (DPA-OPD) Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD (DPA-OPD) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan Tim adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 28. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah.**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan tim teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;

- 29. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 30. Honorarium Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 31. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD /PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- 32. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Neraca Akhir dan Laporan Arus Kas Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Neraca Akhir dan Laporan Arus Kas Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan tim teknis adalah sebagai berikut :
- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD /PA anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
  - c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

**33. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Laporan Realisasi Semester APBD Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Laporan Realisasi Semester APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan Tim Teknis adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD /PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

**34. Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi Gaji Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Penyelesaian Administrasi Gaji Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**35. Honorarium Tim Penyelesaian SPT Tahunan Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk penyelesaian SPT Tahunan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**36. Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Pengawasan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Pengawasan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan rekonsiliasi dan pengawasan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**37. Honorarium Tim SISMIOP PBB-P2 dan Tenaga Outsourcing Kabupaten Maluku Tengah**

1. Honorarium Tim SISMIOP PBB-P2  
Honorarium Tim SISMIOP PBB-P2N adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim SISMIOP PBB-P2 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
2. Honorarium Tenaga Outsourcing  
Honorarium Tenaga Outsourcing adalah honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai tenaga outsourcing berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**38. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelesaian dan Penyiapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD)**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian dan penyiapan Surat Ketetapan Pajak Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 39. Honorarium Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 40. Honorarium Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Aplikasi Sistim Informasi Keuangan Daerah SIKD Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Aplikasi Sistim Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 41. Honorarium Pembuat Keputusan Bupati Maluku Tengah Tentang Penunjukan PA/KPA/Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Kabupaten Maluku Tengah.**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tanggung jawab sebagai pembuat Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Penetapan PA/KPA/Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 42. Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tanggung jawab sebagai Tim BAPERJAKAT berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.
- 43. Honorarium Tim Pokja dan Sekretariat Tim Pokja Penyusunan Dokumen Standar Penganggaran Program dan Kegiatan Pembangunan**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Standar Penganggaran Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan kepala daerah.
- 44. Honorarium Tim Evaluasi Renstra OPD**  
Honorarium Tim Evaluasi Renstra PD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengevaluasi Renstra OPD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 45. Honorarium Tim Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium Tim Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan reviuw atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 46. Honorarium Tim Pemutahiran Data Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium Tim Pemutahiran Data Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur

Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan pemutakhiran data Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**47. Honorarium Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**48. Honorarium Tim Reviu Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah**

Honorarium Tim Reviu Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan PD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan reviu terhadap Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan OPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**49. Honorarium Tim Pokja Fasilitasi SPIP dan Kapabilitas APIP**

Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pokja Fasilitasi SPIP dan Kapabilitas APIP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**50. Honorarium Tim Reviu Penyerapan Anggaran PBJ dan Anggaran ADD**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Reviu Penyerapan Anggaran PBJ dan Anggaran ADD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**51. Honorarium Tim Pelaksanaan dan Unit Pengelola Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan RAD**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi dan RAD dan Unit Pengelola Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan RAD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**52. Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**53. Honorarium Tim Pembinaan, Pengawasan Aparatur Kecamatan dan Negeri**

Honorarium Tim Pembinaan, Pengawasan Aparatur Kecamatan dan Negeri adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap Aparatur Kecamatan dan Negeri dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**54. Honorarium Tim Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV)**

Honorarium Tim pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil

Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) terhadap pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**55. Honorarium Pokja Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)**

Honorarium Pokja Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Unit Pengelola adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Pokja Pendaftaran dan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**56. Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (TLHTP)**

Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**57. Honorarium Pokja dan Tim Teknis Penyelesaian Kerugian Daerah dan Negara**

Honorarium Pokja dan Tim Teknis Penyelesaian Kerugian Daerah dan Negara adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Teknis Penyelesaian Kerugian Daerah dan Negara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**58. Honorarium Tim Pokja dan Unit Pengelola Penanganan Benturan Kepentingan Whistle Blower**

Honorarium Tim Pokja dan Unit Pengelola Penanganan benturan kepentingan Whistle Blower adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Pokja dan Unit Pengelola Penanganan benturan kepentingan Whistle Blower berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

**59. Honorarium Tim Penilaian Internal Zona Integritas**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penilaian Internal Zona Integritas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**60. Honorarium Tim Monev dan Unit Pengelola Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Monev dan Unit Pengelola Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**61. Honorarium Tim Pengendalian dan Sekretariat Pengendalian Gratifikasi**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Pengendalian dan Sekretariat Pengendalian Gratifikasi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.



- 62. Honorarium Tim Evaluasi Dana DAK Perangkat Daerah**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Evaluasi Dana DAK PD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 63. Honorarium Tim Penyusun Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara**  
Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyusun Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 64. Honorarium Tim Pengelola Website Inspektorat**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pengelola Website pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 65. Honorarium Tim Penyelenggaraan Musrenbang RKPD**  
Honorarium Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyelenggaraan Musrenbang RKPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 66. Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)**  
Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 67. Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUAP)**  
Honorarium Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 68. Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS)**  
Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 69. Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan**  
Honorarium Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 70. Honorarium Tim Pembahasan RKA Perangkat Daerah**  
Honorarium Tim Pembahasan RKA PD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pembahasan

RKA PD Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**71. Honorarium Tim Sekretariat Program Tabaos**

Honorarium Tim Sekretariat Program Tabaos adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Sekretariat Program Tabaos berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

**72. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat (TAPD)**

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.

**73. Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Sekretariat TPID Kabupaten Maluku Tengah**

1. Honorarium Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.

2. Honorarium Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.

**74. Honorarium Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)**

Honorarium Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) adalah honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditetapkan sebagai Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**75. Honorarium Tim Penyusun Instrumen Analisis Jabatan**

Honorarium Tim Penyusun Instrumen Analisis Jabatan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Instrumen Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

**76. Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan**

Honorarium Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD /PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

**77. Honorarium Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah**

Honorarium Tim Evaluasi Kelembagaan OPD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Evaluasi Kelembagaan OPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD /PA anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

**78. Honorarium Tim Penyusun Evaluasi Jabatan**

Honorarium Tim Penyusun Evaluasi Jabatan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun hasil evaluasi jabatan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

**79. Honorarium Tim Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi**

Honorarium Tim Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) PD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

**80. Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik**

Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai tim evaluasi kinerja pelayanan publik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;

- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, Anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

**81. Honorarium Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA)**

Honorarium Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

**82. Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA)**

Honorarium Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai tim pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, (RANPERDA) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

**83. Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**

Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/ Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

**84. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lingkup Daerah Lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah**

Honorarium Tim penyusun dokumen lingkup daerah lainnya adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dokumen lingkup daerah

lainnya yang ditetapkan dengan PERDA atau PERKADA berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

*Catatan :*

Kegiatan penyusunan dokumen lingkup daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menyusun sebuah dokumen daerah melalui kajian dan analisa yang mendalam dan hasil dari kegiatan ini digunakan oleh daerah.

**85. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Lingkup Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA, RENJA, LAKIP, DLL)**

Honorarium Tim penyusun dokumen lingkup OPD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dokumen lingkup OPD (RENSTRA, RENJA, LAKIP, dll) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**86. Honorarium Tim Penyusun Jurnal**

Honorarium tim penyusun jurnal dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

**87. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah/Sambutan/ Pidato/ Naskah**

Honorarium tim penyusun buletin/majalah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

**88. Honorarium Tim Pengelola Data Dokumentasi dan Publikasi Kehumasan**

Honorarium Tim Pengelola Data Dokumentasi dan Publikasi Kehumasan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengelola data dokumentasi dan publikasi kehumasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**89. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Website Pemerintah**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengelola Website Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah Website yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Pengelola Website dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :

- a) Honorarium dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan;
- b) data/berita harus selalu di update.

**90. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif**

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif adalah honorarium diberikan kepada Staf Pemerintah Negeri atau Negeri Administratif atau orang lain dari unsur organisasi resmi yang berada dalam Lingkup Pemerintah Negeri atau Negeri Administratif yang diberi tugas sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri atau Negeri Administratif berdasarkan keputusan Kepala Pemerintah Negeri atau Kepala Pemerintah Negeri Administratif.

Ketentuan Pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a) tim pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri / Negeri Administratif
- b). mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur
- c). bersifat koordinatif
- d). bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja
- e). merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada staf Pemerintah Negeri/Negeri Administratif disamping tugas pokoknya sehari – hari
- f). dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien
- g). paling banyak 5 (lima) orang.

**91. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja yang mengelola Belanja Pegawai**

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada Satuan Kerja yang khusus mengelola belanja pegawai dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada Satker sesuai keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan menyangkut honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada Satker yang mengelola belanja pegawai dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Atasan langsung Pemegang Kas/PA/KPA yang merangkap sebagai PPK hanya boleh mengambil salah satu antara honorarium sebagai Pemegang Kas /PA/KPA atau honorarium sebagai PPK.
2. Pemegang Kas / Bendahara yang merangkap sebagai Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran hanya boleh mengambil salah satu antara honorarium Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas.

**92. Honorarium Penyelenggara Ujian dan Vakasi**

1. Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Satuan Biaya Pengawas Ujian sudah termasuk uang transport. Pemberian honorarium penyusun bahan ujian, penguji dan pemeriksa bahan ujian bagi guru/dosen diberikan atas kelebihan

beban kerja guru/dosen dalam penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Vakasi adalah uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir. Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Satuan biaya pengawas sudah termasuk uang transport.

**93. Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Buku Perpustakaan**

Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Buku Perpustakaan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengolah buku perpustakaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Tenaga Ahli Pengolah Buku Perpustakaan terdiri dari :

- a). tenaga klasifikasi buku
- b). tenaga katalogisasi buku
- c). tenaga inventarisasi buku
- d). tenaga entri katalog buku
- e). tenaga finishing dan selfing buku

**94. Honorarium Tenaga Pengelola Perpustakaan Negeri**

Honorarium Tenaga Pengelola Perpustakaan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk mengelola perpustakaan negeri berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**95. Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Terbitan Berkala dan Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Daerah**

Honorarium Tenaga Ahli Pengolah Terbitan Berkala dan Pelestarian Bahan Pustaka Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai tenaga ahli pengolahan terbitan berkala dan pelestarian bahan pustaka koleksi daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Tenaga Ahli Pengolah Terbitan Berkala dan Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Daerah terdiri dari :

- a). tenaga klasifikasi terbitan berkala
- b). tenaga katalogisasi terbitan berkala
- c). tenaga inventarisasi terbitan berkala
- d). tenaga entri katalog terbitan berkala
- e). tenaga fumikasi dan selfing koleksi bahan pustaka

**96. Honorarium Petugas Layanan Perpustakaan Keliling (Layanan Ekstensi)**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai petugas layanan perpustakaan keliling (*layanan ekstensi*) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**97. Honorarium Pembahasan APBD (DPRD)**

Honorarium Pembahasan APBD adalah honorarium yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang melaksanakan pembahasan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**98. Honorarium Pembahasan APBD Perubahan (DPRD)**

Honorarium Pembahasan APBD Perubahan adalah honorarium yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang melaksanakan pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**99. Honorarium/Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (APPD)**

Honorarium/Insentif Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah (APPD) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Perencana Pembangunan Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**100. Honorarium/Insentif Tim Perencana Dan Tim Data Perangkat Daerah**

Honorarium/Insentif Tim Perencana dan Tim Data adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Perencana dan Tim Data Perangkat Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**101. Honorarium Tim Penyusun LAKIP Kabupaten**

Honorarium Tim Penyusun LAKIP Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen LAKIP Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;
- d). honorarium Tim Penyusun LAKIP Kabupaten dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

**102. Honorarium Tim Penyusun TAPKIN dan RKT Kabupaten**

Honorarium Tim Penyusun TAPKIN dan RKT Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen TAPKIN dan RKT Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;



- d). honorarium Tim Penyusun TAPKIN dan RKT Kabupaten dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- 103. Honorarium Tim Pokja dan Sekretariat Tim Pokja Evaluasi DAK Kabupaten**  
Honorarium Tim Pokja dan Sekretariat Tim Pokja Evaluasi DAK Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pokja dan Sekretariat Tim Pokja Evaluasi DAK Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.  
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :
- a). Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
  - b). Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
  - c). Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang;
  - d). Honorarium Tim Pokja Evaluasi DAK Kabupaten dibayar pertriwulan dan dapat diberikan selama 4 (empat) triwulan.
- 104. Honorarium Tim Kesekretariatan SAKIP Kabupaten**  
Honorarium Tim Kesekretariatan SAKIP Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Kesekretariatan SAKIP Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.
- 105. Honorarium Tim Teknis Pelaporan DAK, Tugas Pembantuan dan APBD**  
Honorarium Tim Teknis Pelaporan DAK, Tugas Pembantuan dan APBD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Teknis Pelaporan DAK, Tugas Pembantuan dan APBD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.
- 106. Honorarium Tim Teknis Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah**  
Honorarium Tim Teknis Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Teknis Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.
- 107. Honorarium Tim Evaluasi RKPD Kabupaten**  
Honorarium Tim Penyusun Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang. Honorarium Tim Penyusun Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten diberikan pertriwulan.
- 108. Honorarium Tim Pelaporan TEPRAB Kabupaten**  
Honorarium Tim Pelaporan TEPRAB Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pelaporan TEPRAB Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**109. Honorarium Tim Sekretariat Penanganan Konflik Sosial**

Honorarium Tim penanganan konflik sosial adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau TNI/POLRI yang diberi tugas untuk menangani persoalan konflik sosial, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**110. Honorarium Tim Koordinasi dan Operasional KOMINDA**

Honorarium Tim Koordinasi dan Operasional KOMINDA adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau TNI/POLRI dan atau Lembaga terkait lainnya yang diberi tugas sebagai Tim Koordinasi dan Operasional Kominda berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**111. Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**112. Honorarium Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

Honorarium Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**113. Honorarium Tim Operasi Penertiban Lalu Lintas Angkutan Darat (LLAJ), Lalu Lintas Angkutan Laut (LALA), dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (LLASDP).**

Honorarium Tim Operasi Penertiban Lalu Lintas Angkutan Darat (LLAJ) , Lalu Lintas Angkutan Laut (LALA) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (LLASDP) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI yang diberi tugas untuk melakukan operasi penertiban Lalu Lintas Angkutan Darat (LLAJ), Lalu Lintas Angkutan Laut (LALA) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (LLASDP) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**114. Honorarium Forum Lalu Lintas Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Forum Lalu Lintas Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan Forum Lalu Lintas Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**115. Honorarium Bidang Persandian**

Honorarium bidang persandian adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas dibidang persandian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**116. Honorarium Petugas Penyiar RPD, Cameramen, Calling dan Peliputan**

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai penyiar RPD, Cameramen, Calling dan Peliputan Berita berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**117. Honorarium Rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah**

Honorarium Rapat Forum OPD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai penyelenggara/pelaksana Rapat Forum OPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**118. Honorarium Petugas Pengelola**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai petugas pengelola gudang buffer stock dan Pengelola sistim layanan dan rujukan terpadu berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**119. Honorarium Pendamping**

Honorarium pendamping adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai pendamping keluarga harapan (PKH), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK),Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE),Pendamping Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Pendamping Orang dengan Kecacatan Berat (ODKB), Pendamping Satuan Bakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS), Pendamping Sosial dan Penyuluh Sosial dan Pendamping Bantuan Sosial Pangan berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tengah.

**120. Honorarium Tim Pengelola Aset Daerah**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pengelola Aset Daerah pada masing- masing OPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**121. Honorarium Tim Penyelarasan Produk Hukum Daerah**

Honorarium Tim Penyelarasan Produk Hukum Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai tim penyelarasan produk hukum Daerah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

- a). Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang;
- b). Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala OPD/PA, anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang;
- c). Ditetapkan atas dasar keputusan KPA, anggota paling banyak 7 (tujuh) orang.

**122. Honorarium Tim Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim teknis penyusunan Standar Biaya Khusus dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk menyusun Dokumen Standar Biaya Khusus Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**123. Honorarium Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program GSC.**

Honorarium Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program GSC adalah honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten dan Unit Pengelola Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berdasarkan Keputusan Bupati. Honorarium Fasilitator dan UPK diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

**124. Honorarium Satuan Tugas Aplikasi SIKEUDES**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Satgas Aplikasi SIKEUDES berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**125. Honorarium Satuan Tugas Aplikasi SIPADES**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Satgas Aplikasi SIPADES berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**126. Honorarium Tim Evaluasi dan Verifikasi Rancangan Peraturan Negeri Tentang APBD Negeri**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Evaluasi dan Verifikasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APBD Negeri.

**127. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Sekretariat FORKOMPIMDA Kabupaten Maluku Tengah**

1. Honorarium Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) adalah honorarium yang diberikan kepada Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai tugas dan jabatannya. Honorarium dapat diberikan selama 12 bulan.
2. Honorarium Sekretariat FORKOPIMDA Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai Sekretariat FORKOPIMDA Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**128. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) dan Sekretariat Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) adalah honorarium yang diberikan kepada Forum Pimpinan Kecamatan

sesuai tugas dan jabatannya. Honorarium dapat diberikan selama 12 bulan.

**129. Honorarium Satuan Tugas (SATGAS) Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil.**

Honorarium Satuan Tugas (SATGAS) Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Satuan Tugas (SATGAS) Peningkatan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**130. Honorarium Tim Validasi Data PMKS dan PSKS**

Honorarium Tim validasi data PMKS dan PSKS adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Validasi Data PMKS dan PSKS berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**131. Honorarium Petugas Pengelola Data Statistik Pertanian**

Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai petugas pengelola data statistik pertanian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**132. Honorarium Tim Teknis Swakelola DAK Pertanian Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim Teknis Swakelola DAK Pertanian adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Teknis Swakelola DAK Pertanian Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**133. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh**

Honorarium Tim Penilai angka kredit penyuluh adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**134. Honorarium Tim Penilai Kelembagaan Petani dan Pelaku Pertanian Berprestasi**

Honorarium Tim Penilai Kelembagaan Petani dan Pelaku Pertanian Berprestasi adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai Tim Penilai Kelembagaan Petani dan Pelaku Pertanian Berprestasi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**135. Honorarium Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**136. Honorarium Petugas Pengelola Data ALSINTAN**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai petugas pengelola data ALSINTAN berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**137. Honorarium Penyuluh Honorer**

Honorarium Penyuluh Honorer adalah honorarium yang diberikan kepada tenaga penyuluh honorer yang telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**138. Honorarium Penyuluh THL-TBPP**

Honorarium Penyuluh THL-TBPP adalah honorarium yang diberikan kepada penyuluh tenaga harian lepas atau tenaga bantu penyuluh pertanian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**139. Honorarium Pendamping Siswa dan Uang Saku Peserta Kegiatan Olimpiade SD dan SMP Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional**

1. Honorarium Pendamping siswa adalah honorarium yang diberikan kepada guru pendamping siswa SD atau SMP dalam mengikuti lomba Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
2. Uang saku peserta kegiatan Olimpiade Sains adalah uang saku yang diberikan kepada siswa SD atau SMP yang ditetapkan sebagai peserta lomba Olimpiade Sains Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.

**140. Honorarium Panitia Penyelenggara Event / Lomba Kepariwisata**

Honorarium Panitia Penyelenggara Event/Lomba Kepariwisata adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Panitia Penyelenggara Event/Lomba Kepariwisata berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**141. Honorarium Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS)**

Honorarium Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**142. Honorarium Instruktur/Pelatih PASKIBRAKA**

Honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI yang ditetapkan sebagai Instruktur/Pelatih PASKIBRAKA Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**143. Honorarium Tim Penyusunan Soal Tes PASKIBRAKA**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI yang ditetapkan sebagai Tim Penyusun Soal

PASKIBRAKA Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**144. Honorarium Tim TEPRA Perangkat Daerah**

Honorarium Tim TEPRA Perangkat Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Tim TEPRA Perangkat Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**145. Honorarium Petugas Admin TEPRA dan Petugas Admin RUP Perangkat Daerah**

Honorarium Petugas Admin TEPRA dan Petugas Admin RUP Perangkat Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/ Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Petugas Admin TEPRA dan Petugas Admin RUP Perangkat Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**146. Honorarium Tim Evaluasi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Tim Evaluasi Peraturan Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**147. Honorarium Tim Evaluasi Indeks Harga Komoditi (IHK)**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Evaluasi Indeks Harga Komoditi (IHK) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**148. Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)**

Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Tim Evaluasi Kinerja Konsultan Keuangan Mitra Bank Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**149. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III Dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara Gol. II dan Gol. III, Serta Pelatihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara Gol. I, Gol. II Kategori I dan/Atau Ktegori II dan atau Kategori II Gol III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Katagori 1 dan atau Kategori II**

Honorarium dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara Gol. II dan Gol. III Serta Pelatihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara Gol. I dan Gol. II dan/atau Gol. III yang diangkat dari Tenaga Honorer Katagori 1 dan/atau Katagori 2 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 150. Honorarium Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 151. Honorarium Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Maluku Tengah**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium tersebut dibayarkan paling banyak 6 (enam) bulan.
- 152. Honorium Tim Musrenbang RKPD Kabupaten**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Tim pelaksana Musrenbang RKPD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 153. Honorium Tim Evaluasi Renstra Kabupaten**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Tim Evaluasi Renstra Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 154. Honorarium Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 155. Honorarium Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Rekrutmen Dokter Nusantara Sehat Daerah**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Rekrutmen Dokter Nusantara Sehat Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 156. Honorarium Panitia Seleksi Penerima Beasiswa Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Panitia Seleksi penerima beasiswa Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 157. Honorarium Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Dan Tenaga Ahli Fraksi**  
Honorarium Tenaga Ahli DPRD adalah honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai tenaga ahli DPRD



Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**158. Honorarium Tim Evaluasi Pembangunan, Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Dan Sekretariat Tim Evaluasi Pembangunan, Pemerintahan Dan Pelayanan Masyarakat**

Honorarium Tim Evaluasi Pembangunan, Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Tim Evaluasi Pembangunan, Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**159. Honorarium Panitia Penyelenggara Pelayanan Jamaah Haji Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/ Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Panitia Penyelenggara Pelayanan Jamaah Haji Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

**160. Honorarium Panitia Penyelenggara Safari Keagamaan Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara / Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Panitia Penyelenggara Safari Keagamaan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

**161. Honorarium Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara / Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat dan Pembinaan Sumber Daya Manusia berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

**162. Honorarium Panitia Penanggungjawab Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif**

Honorarium panitia penanggungjawab pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai panitia penanggungjawab pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**163. Honorarium Tim Penyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Honorarium Tim penyusun laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim penyusun laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**164. Honorarium Tim Penataan Aset Tanah Pemerintah Daerah**

Honorarium Tim penataan aset tanah Pemerintah Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim penataan aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**165. Honorarium Tim Musrenbang RKPD Kabupaten**

Honorarium Tim Musrenbang RKPD Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Musrenbang RKPD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**166. Honorarium Tim Evaluasi Renstra Kabupaten**

Honorarium Tim Evaluasi Renstra Kabupaten yaitu Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Evaluasi Renstra Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**167. Honorarium Tim Penyusun RPJMD**

Honorarium Tim Penyusun RPJMD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk menyusun RPJMD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**168. Honorarium Tim Penyusun RKPD Kabupaten**

Honorarium Tim Penyusun RKPD Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk menyusun RKPD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**169. Honorarium Tim Penyusun LKPJ Tahunan Bupati**

Honorarium Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan Bupati adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Penyusun LKPJ Tahunan Bupati berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**170. Honorarium Tim Penyusun LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati**

Honorarium Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Penyusun LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**171. Honorarium Admin Aplikasi Pelaporan dan Inovasi Pembangunan Daerah**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Admin Aplikasi Pelaporan dan Inovasi Pembangunan Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang

berwenang. Admin aplikasi pelaporan dan inovasi pembangunan daerah terdiri dari :

- a. Admin SIMPAPEDA
- b. Admin KRISNA DAK
- c. Admin WALANG INOVASI
- d. Admin TEPRA KABUPATEN
- e. Admin SIPD

**172. Honorarium Tim Aplikasi Krisna DAK-APBN Kabupaten**

Honorarium Tim Aplikasi Krisna DAK-APBN Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Aplikasi Krisna DAK-APBN Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**173. Honorarium Tim Sekretariat Pokja AMPL (Air Minum Penyehatan Lingkungan)**

Honorarium Tim Sekretariat AMPL adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim AMPL Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**174. Honorarium Sekretariat Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan DAK APBN dan Sekretariat Pelaporan DAK Tugas Pembantuan dan APBD Kabupaten**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Sekretariat Tim Verifikasi usulan program dan kegiatan DAK APBN dan Sekretariat Pelaporan DAK Tugas Pembantuan dan APBD Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**175. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola SIPD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**176. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Perangkat Daerah**

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola SIPD Perangkat Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**177. Honorarium Operator Website BAPPLITBANGDA**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai operator Website BAPPLITBANGDA berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**178. Honorarium Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah**

Honorarium Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**179. Honorarium Tim Penilaian Barang Milik Daerah**

Honorarium Tim Penilaian Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim Penilaian Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**180. Honorarium Tim Pembahasan, Penyusunan dan Penilaian Barang Milik Daerah**

Honorarium Tim Pembahasan, Penyusunan dan Penilaian Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Pembahasan, Penyusunan dan Penilaian Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**181. Honorarium Tim Teknis Penilaian Barang Milik Daerah**

Honorarium Tim Teknis Penilaian Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Teknis Penilaian Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**182. Honorarium Tim Kerja Penilaian Barang Milik Daerah**

Honorarium Tim Kerja Penilaian Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Kerja Penilaian Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**183. Honorarium Tim Pelelangan Barang Milik Daerah**

Honorarium Tim Pelelangan Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Pelelangan Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**184. Honorarium Tim Monitoring dan Rekon Barang Milik Daerah**

Honorarium Tim Monitoring dan Rekon Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Monitoring dan Rekon Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**185. Honorarium Tim Penghapusan Barang Milik Daerah**

Honorarium Tim Penghapusan Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**186. Honorarium Tim Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah**

Honorarium Tim Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**187. Honorarium Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah**

Honorarium Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Rekonsiliasi Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**188. Honorarium Fasilitator DAK Pertanian**

Honorarium Fasilitator DAK adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Fasilitator DAK Pertanian Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**189. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara**

Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli dan beracara adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang memberikan keterangan ahli atau saksi ahli dan beracara berdasarkan keputusan pengadilan.

**190. Honorarium Tim Penyelenggara Kesehatan Jamaah Haji Kabupaten Maluku Tengah.**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim penyelenggara kesehatan jamaah haji berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**191. Honorarium Tim Teknis PATEN**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Teknis PATEN Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**192. Honorarium Pegawai Honorer Satpol PP**

Honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja sebagai Pegawai Honorer Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 193. Honorarium Pegawai Honorer Pemadam Kebakaran**  
Honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja sebagai Pegawai Honorer Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 194. Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 195. Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan /Bulanan /Triwulan /Semesteran/Tahunan OPD**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim penyusun laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran/tahunan OPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 196. Honorarium Pokja Program Subsidi Bunga SKIM Kredit Usaha Mikro Kreatif**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai kelompok kerja program subsidi bunga SKIM Kredit Usaha Mikro Kreatif Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 197. Honorarium Petugas Admin Aplikasi Jaga**  
Honorarium petugas Admin Aplikasi Jaga adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Admin Aplikasi Jaga berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 198. Honorarium Operator Server**  
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai operator server berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 199. Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten**  
Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Dewan Pengupahan Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 200. Honorarium Jasa Pendamping/Fasilitator Kontraktual**  
Honorarium jasa pendamping/fasilitator kontraktual adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai pendamping/fasilitator kontraktual berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**201. Honorarium Jasa Pengawasan Kegiatan Kontraktual**

Honorarium jasa pengawasan kegiatan kontraktual adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai pengawas kegiatan kontraktual berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**202. Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Data Kependudukan Perkembangan dan Proyeksi**

Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Data Kependudukan Perkembangan dan Proyeksi adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Data Kependudukan Perkembangan dan Proyeksi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**203. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)**

Honorarium tim pelaksana kegiatan pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Pelaksanaan kegiatan pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**204. Honorarium Enumerator Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan**

Honorarium enumerator pemantauan stok, pasokan dan harga pangan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai enumerator pemantauan stok, pasokan dan harga pangan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**205. Honorarium Fasilitator Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan**

Honorarium fasilitator pengembangan kelembagaan dan distribusi pangan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai fasilitator pengembangan kelembagaan dan distribusi pangan Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**206. Honorarium Fasilitator Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten**

Honorarium fasilitator pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai fasilitator pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**207. Honorarium Tim Penyediaan Informasi Harga Bahan Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)**

Honorarium tim penyediaan informasi harga bahan pangan dan neraca bahan makan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim penyediaan informasi harga bahan pangan dan neraca bahan makan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**208. Honorarium Petugas Penyusunan, Pemutahiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentangan Pangan**

Honorarium penyusunan, pemutahiran dan analisis peta ketahanan pangan dan kerentangan pangan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim penyusunan, pemutahiran dan analisis peta ketahanan pangan dan kerentangan pangan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**209. Honorarium Pengawas Lapangan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Honorarium pengawas lapangan pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai pengawas pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**210. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Honorarium Tim Penyusun Dokumen Survey +Indeks Kepuasan Masyarakat adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim penyusun dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**211. Honorarium Tim Penyusunan Draft Rancangan Kebijakan Dan Harmonisasi Peraturan Perizinan Dan Non Perizinan**

Honorarium tim penyusun draft rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan perizinan dan non perizinan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim penyusun draft rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan perizinan dan non perizinan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**212. Honorarium Petugas Desa Sampel dan Petugas Pengolah Data Statistik Perikanan**

Honorarium petugas desa sampel dan petugas pengolah data statistik perikanan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai petugas desa sampel dan petugas pengolah data statistik perikanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.



**213. Honorarium Petugas Penyuluh Perikanan**

Honorarium petugas penyuluh perikanan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai petugas penyuluh perikanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**214. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Komite Audit**

Honorarium tim pelaksana kegiatan komite audit adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Komite Audit berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**215. Honorarium Tim Lintas Sektor Untuk Percepatan Target Nasional**

Honorarium tim lintas sektor untuk percepatan target nasional adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim lintas sektor untuk percepatan target nasional berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**216. Honorarium Tim Inovasi Produk**

Honorarium tim inovasi produk adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim inovasi produk berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**217. Honorarium Tim Terpadu Keamanan dan Kebersihan Pasar**

Honorarium tim terpadu keamanan dan kebersihan pasar adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim terpadu keamanan dan kebersihan pasar berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**218. Honorarium Tim Pemantau Harga Stok dan Barang**

Honorarium tim pemantau harga stok dan barang adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim pemantau harga stok dan barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**219. Honorarium Panitia Pelaksana Pasar Murah**

Honorarium panitia pelaksana pasar murah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai panitia pelaksana pasar murah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**220. Honorarium Petugas Pendataan Sumber Daya Industri di Kabupaten**

Honorarium petugas pendataan sumber daya industri di Kabupaten dan Kecamatan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai petugas pendataan sumber daya industri Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 221. Honorarium Petugas Penjaga Outlet Produk Kabupaten (DKI-Jakarta)**  
Honorarium petugas penjaga outlet produk Kabupaten (DKI-Jakarta) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai petugas penjaga outlet produk Kabupaten (DKI-Jakarta) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 222. Honorarium Petugas Jaga Pasar**  
Honorarium Petugas Jaga Pasar adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai petugas jaga pasar berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 223. Honorarium Operator Pemantau Harga dan Stok Barang**  
Honorarium operator pemantau harga dan stok barang adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai operator pemantau harga dan stok barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 224. Honorarium Operator Sistim Informasi Kredit**  
Honorarium operator sistim informasi kredit adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara /Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai operator sistim informasi kredit berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 225. Honorarium Tim Pnyelelesaian Pangkat PNS**  
Honorarium tim penyelesaian pangkat PNS adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk mengurus penyelesaian pangkat PNS berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.
- 226. Honorarium Tim Uji Kompetensi (Assesor)**  
Honorarium tim uji kompetensi adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk menguji kompetensi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 227. Honorarium Tim Penyelesaian KARPEG**  
Honorarium penyelesaian KARPEG adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan KARPEG berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 228. Honorarium Tim Penyelesaian KARIS/KARSU**  
Honorarium penyelesaian KARIS/KARSU adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan KARIS/KARSU berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**229. Honorarium Penyelesaian Permasalahan PUPNS**

Honorarium penyelesaian permasalahan PUPNS adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan PUPNS berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**230. Honorarium Tim Seleksi Ujian Dinas/Penyesuaian Ijasah**

Honorarium tim seleksi ujian dinas adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai tim seleksi ujian dinas/penyesuaian pangkat PNS berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**231. Honorarium Sumpah Janji PNS**

Honorarium sumpah janji PNS adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Rohaniawan yang melaksanakan sumpah dan janji PNS berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.

**232. Honorarium Penyelenggara PANSIMAS**

Honorarium penyelenggara PANSIMAS adalah honorarium yang diberikan kepada District Project Management Unit (DPMU) dan Panitia Kemitraan (PAKEM) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**233. Honorarium Petugas E-Mon DAK**

Honorarium Petugas E-Mon DAK adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Petugas E-Mon DAK berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**234. Honorarium Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)**

Honorarium Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Pengawas dan Asessor pada Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**235. Honorarium SATGAS Penanganan Covid-19 di Kecamatan**

Honorarium SATGAS Penanganan Covid-19 di Kecamatan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai SATGAS Penanganan Covid-19 di Kecamatan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**236. Honorarium Tim Evaluasi Pengelolaan BUMD dan BLUD**

Honorarium Tim Evaluasi pengelolaan BUMD dan BLUD adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai Tim Evaluasi Pengelolaan BUMD dan BLUD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**237. Honorarium Tim Baznas Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim Baznas Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai Tim Baznas Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**238. Honorarium Petugas Pendata Sumber Daya Industri di Kabupaten**

Honorarium Petugas Pendata Sumber Daya Industri di Kabupaten adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang di beri tugas sebagai Petugas Pendata Sumber Daya Industri di Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**239. Honorarium Tenaga Teknis Peternakan**

Honorarium Tenaga Teknis Peternakan adalah honorarium yang diberikan kepada Tenaga Teknis Peternakan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**240. Honorarium Tenaga Outsourcing**

Honorarium Tenaga Outsourcing adalah honorarium yang diberikan kepada tenaga teknis lainnya atau pihak ketiga yang dipekerjakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**241. Honorarium Fasilitator Sanitasi Masyarakat**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai fasilitator sanitasi masyarakat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**242. Honorarium Instruktur MTQ/Pesparawi**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai instruktur/pelatih MTQ atau Pesparawi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**243. Honorarium Panitia Pasar Murah**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai panitia pasar murah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**244. Honorarium Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pratama**

Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pratama adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Panitia Seleksi Jabatan Pratama berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**245. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan DAK – SPAM**

Honorarium Tim Pelaksana DAK-SPAM adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pelaksana DAK-SPAM berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**246. Honorarium Tim Terpadu Penertiban Fasilitas Pasar**

Honorarium Tim Terpadu Penertiban Fasilitas Pasar adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Terpadu Penertiban Fasilitas Pasar berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**247. Honorarium Pengelola Management dan Jasa Medis Paramedis Dana JKN**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai pengelola management dan jasa medis paramedis yang berasal dari dana JKN berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**248. Honorarium Pengelola Dana JKN**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai pengelola dana JKN berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**249. Honorarium Pengelola Pesein Covid -19**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai pengelola pesein covid-19 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**250. Honorarium Penyuluh atau Pendampingan**

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai petugas penyuluh atau pendampingan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**251. Honorarium Tim Rekonsiliasi Penyetoran Pajak-Pajak Pusat yang Dipungut dan Disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN)**

Honorarium Tim Rekonsiliasi Penyetoran Pajak-Pajak Pusat yang Dipungut dan Disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Rekonsiliasi Penyetoran Pajak-Pajak Pusat yang Dipungut dan Disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**252. Honorarium Tim Penanggulangan Stunting dan Sekretariat Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim Penanggulangan Stunting dan Sekretariat Penanggulangan Stunting Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penanggulangan Stunting dan Sekretariat Penanggulangan Stunting Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**253. Honorarium Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**254. Honorarium Tim Pendamping Petugas Lapangan**

Honorarium Tim Pendamping Petugas Lapangan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pendamping Petugas Lapangan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**255. Honorarium Tim Aset Tanah Pemerintah Daerah**

Honorarium Tim Aset Tanah Pemerintah Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**256. Honorarium Tim Kajian Dan Analisis Rencana Pemekaran Wilayah**

Honorarium Tim Kajian dan Analisis Rencana Pemekaran Wilayah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Kajian dan Analisis Rencana Pemekaran Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**257. Honorarium Satgas Penanganan Covid-19**

Honorarium Satgas Penanganan Covid-19 adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Satgas Penanganan Covid-19 Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**258. Honorarium PANSUS DPRD**

Honorarium Pansus DPRD adalah honorarium yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang melaksanakan Pansus DPRD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**259. Honorarium Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALPOS-PB)**

Honorarium Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALPOS-PB) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALPOS-PB) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**260. Honorarium Tim Verifikasi Dan Validasi Data Bencana**

Honorarium Tim Verifikasi dan Validasi Data Bencana adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Verifikasi dan Validasi Data Bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**261. Honorarium Tim Pembahasan Ranperbup**

Honorarium Tim Pembahasan Ranperbup adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pembahasan Ranperbup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**262. Honorarium Tim Asistensi Penyusunan Ramperda**

Honorarium Tim Asistensi Penyusunan Ramperda adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Asistensi Penyusunan Ramperda Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**263. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)**

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**264. Honorarium Tim Pokja Dan Sekretariat Tim Pokja**

Honorarium Tim Pokja dan Sekretariat Tim Pokja adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Pokja dan Sekretariat Tim Pokja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**265. Honorarium Tim Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Honorarium Tim Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**266. Honorarium Tim Penyusun Dokumen KUA/PPAS**

Honorarium Tim Penyusun Dokumen KUA/PPAS adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyusun Dokumen KUA/PPAS Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**267. Honorarium Tim Penyusun Dokumen KUA/PPAS Perubahan**

Honorarium Tim Penyusun Dokumen KUA/PPAS Perubahan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyusun Dokumen KUA/PPAS Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**268. Honorarium Tim Penyelesaian SPT-Tahunan Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim Penyelesaian SPT-Tahunan Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyelesaian SPT-Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**269. Honorarium Kegiatan Forum Lalu Lintas**

Honorarium Kegiatan Forum Lalu Lintas adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Kegiatan Forum Lalu Lintas Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**270. Honorarium Operasi Penertiban Hari- Hari Besar**

Honorarium Operasi Penertiban Hari-hari Besar adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Operasi Penertiban Hari-hari Besar Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**271. Honorarium Pengaturan Dan Pengendalian Lalu Lintas Car Freeday**

Honorarium Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas Car Freeday adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Operasi Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas Car Freeday Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**272. Honorarium Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Honorarium Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Evaluasi Pelaksanaan



Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**273. Honorarium Tim Inovasi OPD Kampus Negeri**

Honorarium Tim Inovasi OPD Kampus Negeri adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Inovasi OPD Kampus Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**274. Honorarium Satgas Penanganan Covid-19**

Honorarium Satgas Penanganan Covid-19 adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Satgas Penanganan Covid-19 Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**275. Honorarium Penyuluh THL TBPP**

Honorarium Penyuluh THL TBPP adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyuluh THL TBPP Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**276. Honorarium Petugas Posko Covid Kecamatan**

Honorarium Petugas Posko Covid Kecamatan adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Petugas Posko Covid Kecamatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**277. Honorarium Tim Rekonsiliasi Dan Penyetoran Pajak- pajak Pusat Atau di Setor ke Kas Umum Negara Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim Rekonsiliasi dan Penyetoran Pajak-pajak Pusat atau di Setor ke Kas Umum Negara Kabupaten Maluku Tengah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Rekonsiliasi dan Penyetoran Pajak-pajak Pusat atau di Setor ke Kas Umum Negara Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**278. Honorarium Tim Penyusun LPPD Masa Akhir Jabatan Bupati Dan Wakil Bupati**

Honorarium Tim Penyusun LPPD Masa Akhir Jabatan Bupati dan Wakil Bupati adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyusun LPPD Masa Akhir Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

- 279. Honorarium Tim Kesehatan Penyelenggaraan Kesehatan Haji**  
Honorarium Tim Kesehatan Penyelenggaraan Kesehatan Haji adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Kesehatan Penyelenggaraan Kesehatan Haji Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 280. Honorarium Tim Promosi Dan KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak Dan Elektronik Serta Media Luar Lainnya**  
Honorarium Tim Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media masa cetak dan Elektronik serta media luar lainnya adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media masa cetak dan Elektronik serta media luar lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 281. Honorarium Tim Penyediaan Dan Distribusi Sarana KIE Program**  
Honorarium Tim Penyedia dan distribusi sarana KIE program adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyedia dan distribusi sarana KIE program Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 282. Honorarium Satgas Pengelola Barang Milik Daerah**  
Honorarium satgas pengelola barang milik daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim satgas pengelola barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 283. Honorarium Tim Penyediaan Dan Distribusi Sarana KIE Program**  
Honorarium Tim Penyedia dan distrubusi sarana KIE program adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Penyedia dan distribusi sarana KIE program Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- 284. Honorarium Tim Pelaksana KRISNA Dak Fisik (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Kabupaten)**  
Honorarium Tim pelaksana KRISNA Dak Fisik (kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja kabupaten) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim pelaksana KRISNA Dak Fisik (kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**285. Honorarium POKJA PKP**

Honorarium POKJA PKP adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim POKJA PKP Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**286. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (DAK)**

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (DAK) adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan (DAK) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**287. Honorarium Penyuluh**

Honorarium Penyuluh adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Penyuluh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**288. Honorarium IB**

Honorarium IB adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai IB Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**289. Honorarium Tim Verivikal Hibah**

Honorarium Tim Verivikal Hibah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai Tim Verivikal Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**290. Honorarium Tim Teknis Penilaian Aset Daerah**

Honorarium Tim Teknis Aset Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/ Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Teknis Penilaian Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**291. Honorarium Penyelenggara Ujian**

Honorarium Penyelenggara Ujian adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/ Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Pengawas ujian PBJ dan Pengawas Sertifikasi dasar pengadaan barang dan jasa Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**292. Honorarium Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/ Non Aparatur Sipil Negara

yang diberi Tugas sebagai Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**293. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual**

Honorarium Tim Pelaksana kegiatan fasilitas pengelolaan bina mental spiritual adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/ Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Pelaksana kegiatan fasilitas pengelolaan bina mental spiritual Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**294. Honorarium Tim POKJA KLHS**

Honorarium Tim POKJA KLHS adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim POKJA KLHS Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**295. Honorarium Tim Penilai Lomba**

Honorarium Tim Penilai Lomba adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Penilai Lomba Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**296. Honorarium Tim Verifikasi Administrasi Bantuan Sosial**

Honorarium Tim Verifikasi Administrasi Bantuan Sosial adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Verifikasi Administrasi Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**297. Honorarium Tim Penyelenggara Clearing House Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah**

Honorarium Tim Penyelenggara Clearing House Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Penyelenggara Clearing House Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**298. Honorarium Tim Pengelola, Manajemen Dan Medis Paramedis**

Honorarium Tim Pengelola, Manajemen dan Medis Paramedis adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Pengelola, Manajemen dan Medis Paramedis Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**299. Honorarium Tim Inovasi Cabe Holo**

Honorarium Tim Inovasi Cabe Holo adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Inovasi Cabe Holo Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**300. Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Lingkup SKPD**

Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Lingkup SKPD adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Evaluasi Kinerja Lingkup SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**301. Honorarium Tim Sosialisasi Perda LP2B**

Honorarium Tim Sosialisasi Perda LP2B adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Sosialisasi Perda LP2B Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**302. Honorarium Tim Aset OPD**

Honorarium Tim Aset OPD adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Aset OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**303. Honorarium Tim Uji Kompetensi (Asessor) PBJ**

Honorarium Tim Uji Kompetensi (Asessor) PBJ adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Uji Kompetensi (Asessor) PBJ Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**304. Honorarium Tenaga IT Dan Tim Administrasi Uji Kompetensi/ Ujian Sertifikasi PBJ**

Honorarium Tenaga IT dan Tim Administrasi Uji Kompetensi/ Ujian Sertifikasi PBJ adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tenaga IT dan Tim Administrasi Uji Kompetensi/ Ujian Sertifikasi PBJ Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**305. Honorarium Tim Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan**

Honorarium Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**306. Honorarium Tim Penyusunan Dan Evaluasi**

Honorarium Tim Penyusunan dan Evaluasi adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Penyusunan dan Evaluasi adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**307. Honorarium Tim Penginputan Dokumen Perencanaan**

Honorarium Tim Penginputan Dokumen Perencanaan adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Penginputan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**308. Honorarium Instruktur/ Pelatih Membatik**

Honorarium Instruktur/Pelatih Membatik adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Instruktur/ Pelatih Membatik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**309. Honorarium Tenaga Operator Mesin Listrik**

Honorarium Tenaga Operator Mesin Listrik adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tenaga Operator Mesin Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**310. Honorarium Tim Teknis PTSP**

Honorarium Tim Teknis PTSP adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Teknis PTSP Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**311. Honorarium Fasilitator Rehabilitasi Rumah Bencana**

Honorarium Fasilitator Rehabilitasi Rumah Bencana adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Fasilitator Rehabilitasi Rumah Bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**312. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan**

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**313. Honorarium Tim Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Infrastruktur**

Honorarium Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Infrastruktur adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Infrastruktur Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**314. Honorarium Tim Penyusun Memori Pemerintahan Masa Jabatan Bupati Dan Wakil Bupati**

Honorarium Tim Penyusun Memori Pemerintahan Masa Jabatan Bupati Dan Wakil Bupati adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Penyusun Memori Pemerintahan Masa Jabatan Bupati Dan Wakil Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**315. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Inovasi Daerah**

Honorarium Tim Penyusun Dokumen Inovasi Daerah adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Penyusun Dokumen Inovasi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**316. Honorarium Petugas Pendamping Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan**

Honorarium Petugas Pendamping Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Petugas Pendamping Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**317. Honorarium Tim Pengadaan Cadangan Pangan**

Honorarium Tim Pengadaan Cadangan Pangan adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**318. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan**

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintah

Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**319. Honorarium Satuan Tugas Pengelola Sistim Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten**

Honorarium Satuan Tugas Pengelola Sistim Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Satuan Tugas Pengelola Sistim Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**320. Honorarium Tim Pengelolaan Restribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah**

Honorarium Tim Pengelolaan Restribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Pengelolaan Restribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**321. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum**

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum adalah Honorarium yang diberikan kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**322. Honorarium Tenaga Administrasi Dan Teknis**

Honorarium Tenaga Administrasi Dan Teknis adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tenaga Administrasi Dan Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**323. Honorarium Tim Pelelangan**

Honorarium Tim Pelelangan adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Pelelangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**324. Honorarium Peningkatan SPAM Jaringan**

Honorarium Peningkatan SPAM Jaringan adalah Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Peningkatan SPAM Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.



**325. Honorarium SIPD**

Honorarium SIPD adalah Honorarium yang diberikan kepada Apartur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Petugas SIPD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**326. Honorarium Operator Perpustakaan**

Honorarium Operator Perpustakaan adalah Honorarium yang diberikan kepada Apartur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Operator Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**327. Honorarium Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)**

Honorarium Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah Honorarium yang diberikan kepada Apartur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Tim Penyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**328. Satuan Biaya Pengembangan Aplikasi Monitoring**

Satuan Biaya Pengembangan Aplikasi Monitoring adalah Sistem yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/ Non Aparatur Sipil Negara yang diberi Tugas sebagai Operator Aplikasi Monitoring Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**329. Uang Saku Jasa Pengamanan Aset Daerah**

Uang saku jasa pengamanan aset daerah adalah uang saku yang diberikan kepada Aparatur Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah yang ditugaskan untuk mengamankan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**330. Satuan Biaya Pengembangan Aplikasi**

Satuan Biaya Pengembangan Aplikasi adalah Biaya Pengembangan Aplikasi yang digunakan untuk Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**331. Satuan Tambahan Penghasilan Operator OMSPAN Kabupaten**

Satuan Tambahan Penghasilan Operator OMSPAN Kabupaten adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sebagai Operator OMSPAN Kabupaten berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**332. Satuan Tambahan Tunjangan Karena Kelangkaan Profesi Tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anestesi.**

Satuan tambahan tunjangan karena kelangkaan profesi tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan penata anestesi adalah tambahan tunjangan penghasilan yang diberikan kepada dokter spesialis,

dokter umum, dokter gigi dan penata anasthesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**333. Satuan Biaya Insentif Dokter**

Satuan biaya insentif dokter adalah insentif yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter penugasan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**334. Satuan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKPNSD)**

Satuan Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah (TKPNSD) adalah tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Maluku Tengah.

**335. Satuan Biaya Jaga Dokter Spesialis, Dokter Umum, Paramedis, Non Paramedis, Supervisor, Jasa Penagihan Retribusi dan Radiasi RSUD Masohi.**

Satuan biaya jaga dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis, jasa penagihan retribusi dan radiasi adalah biaya jaga dan biaya jasa yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis serta jasa penagihan retribusi dan radiasi pada RSUD Masohi.

**336. Satuan Biaya Jaga, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Paramedis dan Non Paramedis RSUD Saparua**

Satuan biaya jaga dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis adalah biaya jaga yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis yang bekerja pada RSUD Saparua.

**337. Satuan Biaya Jaga, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Paramedis dan Non Paramedis RSUD Banda**

Satuan biaya jaga dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis adalah biaya jaga yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis yang bekerja pada RSUD Banda.

**338. Satuan Biaya Tim Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPSTSP Kabupaten Maluku Tengah**

Satuan Biaya Tim Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPSTSP adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai penyelenggara perizinan dan non perizinan pada DPMPSTSP Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**339. Satuan Tunjangan Suvervisi dan Monitoring Pengawas PAUD dan Pendidikan Non Formal**

Satuan Tunjangan Suvervisi dan Monitoring Pengawas PAUD dan Pendidikan Non Formal adalah tunjangan yang diberikan kepada Pengawas PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) untuk melakukan tugas suvervisi dan monitoring.

**340. Satuan Tunjangan Suvervisi dan Monitoring Pengawas SD dan SMP**

Satuan Tunjangan Suvervisi dan Monitoring Pengawas SD dan SMP adalah tunjangan yang diberikan kepada Pengawas SD dan SMP untuk melakukan tugas suvervisi dan monitoring.

**341. Satuan Tunjangan Biaya Operasional Rumah Tangga Pimpinan DPRD**

Satuan Biaya Operasional Rumah Tangga Pimpinan DPRD adalah biaya operasional rumah tangga pimpinan DPRD yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**342. Satuan Biaya Jaga, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Paramedis dan Non Paramedis RSUD Saparua**

Satuan biaya jaga dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis adalah biaya jaga yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis yang bekerja pada RSUD Saparua.

**343. Satuan Biaya Jaga, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Paramedis dan Non Paramedis RSUD Banda**

Satuan biaya jaga dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis adalah biaya jaga yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis yang bekerja pada RSUD Banda.

**344. Satuan Biaya Jaga Dokter Spesialis, Dokter Umum, Paramedis, Non Paramedis, Supervisor, Jasa Penagihan Retribusi dan Radiasi RSUD Masohi.**

Satuan biaya jaga dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis, jasa penagihan retribusi dan radiasi adalah biaya jaga dan biaya jasa yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum, paramedis, non paramedis serta jasa penagihan retribusi dan radiasi pada RSUD Masohi.

**345. Satuan Biaya Insentif Staf Pengelola Kas Daerah**

Satuan Biaya Insentif Staf Pengelola Kas Daerah adalah Insentif yang diberikan kepada Staf Pengelola Kas Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.

**346. Satuan Biaya Operasional Penyuluh Honorer**

Satuan Biaya Operasional Penyuluh Honorer adalah biaya operasional yang diberikan kepada Penyuluh Honorer berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**347. Satuan Biaya Operasional Penyuluh THL-TBPP**

Satuan Biaya Operasional Penyuluh THL-TBPP adalah biaya operasional yang diberikan kepada Penyuluh THL-TBPP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**348. Satuan Biaya Pemondokan Penyuluh Honorer dan THL-TBPP**

Satuan biaya pemondokan Penyuluh Honorer dan Penyuluh THL-TBPP adalah biaya pemondokan yang diberikan kepada Penyuluh Honorer dan Penyuluh THL-TBPP berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**349. Satuan Biaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian**

Satuan Biaya Operasional Balai Penyuluh Pertanian adalah biaya operasional yang diberikan kepada Balai Penyuluh Pertanian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**350. Satuan Biaya Operasional Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS)**

Satuan Biaya Operasional Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya adalah biaya operasional yang diberikan kepada Fasilitator Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**351. Satuan Biaya Insentif Pengolahan Lahan**

Satuan biaya insentif pengolahan lahan adalah biaya yang diberikan kepada petani yang melakukan pengolahan lahan pertanian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**352. Satuan Biaya Insentif Perawatan Tanaman**

Satuan biaya isentif perawatan tanaman adalah biaya yang diberikan kepada petani yang melakukan perawatan tanaman berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**353. Satuan Biaya Insentif Panen dan Paskah Panen**

Satuan biaya insentif panen dan paskah panen adalah biaya yang diberikan kepada petani yang melakukan panen dan paskah panen berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**354. Satuan Biaya Insentif Perbanyak Tanaman**

Satuan biaya insentif perbanyak tanaman adalah biaya yang diberikan kepada petani yang melakukan perbanyak tanaman berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**355. Satuan Biaya Insentif Penyuluh Swadaya**

Satuan biaya insentif Penyuluh Swadaya adalah biaya insentif yang diberikan kepada Penyuluh Swadaya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**356. Upah Pengisian Polibag**

Upah yang diberikan kepada petani yang melakukan pengisian polibag untuk penyemaian benih berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**357. Upah Pesemaian Padi**

Upah yang diberikan kepada petani untuk melakukan pesemaian padi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**358. Upah Penanaman Padi**

Upah yang diberikan kepada petani untuk melakukan penanaman padi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**359. Upah Pemupukan Padi**

Upah yang diberikan kepada petani untuk melakukan pemupukan padi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**360. Upah Penyiangan Padi**

Upah yang diberikan kepada petani untuk melakukan penyiangan padi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**361. Upah Pengendalian OPT Padi**

Upah yang diberikan kepada petani untuk melakukan pengendalian OPT padi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**362. Upah Panen dan Paskah Panen Padi**

Upah yang diberikan kepada petani untuk melakukan panen padi dan paskah panen padi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**363. Satuan Upah Petugas Kebersihan/TPA Sampah, Petugas Taman**

Upah yang diberikan kepada petugas kebersihan/TPA sampah, kebersihan/TPA sampah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**364. Satuan Biaya Uang Makan Aparatur Sipil Negara**

Satuan biaya uang makan Aparatur Sipil Negara merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan uang makan Aparatur Sipil Negara yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

**365. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur**

1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang.

2. Uang makan lembur diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

**366. Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor**

Uang saku rapat di kantor merupakan kompensasi bagi Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan rapat di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebahagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor.

Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang :

- a. melibatkan peserta dari masyarakat;
- b. dilaksanakan minimal 4 jam diluar jam kerja;
- c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
- d. dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja;
- e. surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; dan
- f. surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (minimal pejabat setingkat eselon III/kepala satuan kerja).

Satuan biaya uang saku rapat tidak termasuk konsumsi rapat.

**367. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran yang Sama**

Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (*auditor*) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan internal dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 6 (*enam*) jam.

Terhadap aparat fungsional pemeriksa (*auditor*) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

**368. Satuan Biaya Uang Saku Kegiatan Bimtek/Pelatihan, Sosialisasi Dan Lain-Lain**

Satuan biaya uang saku kegiatan Bimtek/Pelatihan, Sosialisasi dan lain-lain adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya uang saku peserta kegiatan Bimtek/Pelatihan, Sosialisasi dan kegiatan yang sejenis.

**369. Satuan Biaya Fasilitas Produk Hukum Daerah**

Satuan biaya fasilitas produk hukum daerah adalah satuan biaya yang digunakan untuk biaya fasilitas produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Satuan biaya ini diberikan dengan waktu pembahasan paling lama 2 jam.

**370. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah**

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

**371. Satuan Biaya Operasional Petugas Mobil Tangki Air Bersih**

Satuan biaya operasional petugas mobil tangki air bersih adalah biaya operasional yang diberikan kepada petugas mobil tangki air bersih berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**372. Satuan Biaya Petugas Pendata PMKS dan PSKS**

Satuan biaya petugas pendata PMKS dan PSKS adalah biaya yang diberikan kepada petugas yang melakukan pendataan PMKS dan PSKS berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**373. Satuan Biaya Jasa Petugas IPCN (Infection Prevection Control)**

Satuan Biaya Jasa Petugas IPCN (Infection Prevection Control) adalah biaya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai petugas IPCN berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**374. Satuan Biaya Jasa Kepala Ruangan, Instalasi dan Komite Rumah Sakit**

Satuan Biaya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas sebagai Kepala Ruangan, Instalasi dan Komite Rumah Sakit berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**375. Satuan Biaya Jasa Pencacahan Harga Komoditi**

Satuan biaya jasa pencacahan harga komoditi adalah biaya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara sebagai imbalan jasa atas kegiatan pencacahan harga komoditi/survey harga komoditi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

**376. Satuan Biaya Uang Duka/Meninggal Dunia**

Satuan Biaya Uang Duka/Meninggal Dunia adalah uang duka yang diberikan kepada keluarga Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Aparatur Sipil Negara yang mengalami duka. Uang duka dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi.

**377. Satuan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah**

Biaya pemetian dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi.

**378. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Investigasi**

Satuan biaya Uang Harian perjalanan dinas dalam rangka Investigasi adalah biaya bagi Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam rangka Investigasi.

**379. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Intervensi**

Satuan biaya perjalanan Dinas dalam rangka Intervensi adalah biaya bagi Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam rangka Intervensi.

**380. Satuan Biaya Tambahan Penghasilan**

Satuan biaya Tambahan Penghasilan adalah biaya Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan Tugas Berdasarkan Keputusan Pejabat yang Berwenang.

**381. Satuan Biaya Sewa Mobilitas Darat**

Satuan biaya Mobilitas Darat adalah biaya Sewa Transport bagi Aparatur Sipil Negara/Non Apartur Sipil Negara dalam menjalankan Tugas Berdasarkan Keputusan Pejabat yang Berwenang.

**382. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas**

Satuan biaya Uang Harian perjalanan dinas merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.

Uang harian perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. Untuk perjalanan dinas PP dalam Kecamatan Kota Masohi kurang dari 6 (*enam*) jam hanya diberikan biaya transportasi. Sedangkan untuk perjalanan dinas diatas 6 (*enam*) jam diberikan biaya transportasi dan uang harian dan disesuaikan dengan waktu penugasan.

Catatan :

Pejabat yang menduduki jabatan Plt (rangkap jabatan), pembayaran uang harian untuk perjalanan dinas disesuaikan dengan jabatan difinitifnya. Pejabat yang menduduki jabatatan Plt (tidak rangkap jabatan), pembayaran uang harian untuk perjalanan dinas disesuaikan dengan jabatan Plt yang didukinya.

**383. Uang Representasi**

Uang Representasi adalah uang saku yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II. Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Uang Representasi tidak berlaku bagi Pjs/Plt yang menduduki jabatan Eselon II.

**384. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas keluar negeri. Uang harian perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Catatan :

Pejabat yang menduduki jabatan Plt (rangkap jabatan), pembayaran uang harian untuk perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan jabatan



difinitifnya. Pejabat yang menduduki jabatan Plt (tidak rangkap jabatan), pembayaran uang harian untuk perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan jabatan Plt yang didudukinya.

### **385. Satuan Biaya Penginapan**

Satuan Biaya Penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

#### Catatan :

1. Biaya penginapan diberikan sesuai dengan jumlah hari/waktu perjalanan dinas.
2. Biaya penginapan bagi istri pejabat (Bupati dan Wakil Bupati) disetarakan dengan Aparatur Sipil Negara Golongan III Non Eselon.
3. Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, maka pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
4. Pejabat yang menduduki jabatan sebagai Plt (rangkap jabatan), pembayaran uang harian untuk perjalanan dinas disesuaikan dengan jabatan difinitifnya. Pejabat yang menduduki jabatan sebagai Plt (tidak rangkap jabatan), pembayaran uang harian untuk perjalanan dinas disesuaikan dengan jabatan Plt yang didudukinya.

### **386. Satuan Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor**

Satuan Biaya kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang di gunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari kementerian negara/Lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 jenis yaitu :

- a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah adalah kegiatan yang melibatkan Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah;
- b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor Anggota DPRD/Eselon II adalah kegiatan yang melibatkan Anggota DPRD/Eselon II;
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor Eselon III/Gol IV, Eselon IV/Gol III adalah kegiatan yang melibatkan Eselon III/Gol IV, Eselon IV/Gol III.

Satuan Biaya Paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

- a. Paket Fullboard  
Satuan biaya fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
- b. Paket Fullday  
Satuan biaya fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- c. Paket Halfday  
Satuan biaya halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Catatan :

1. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut :
    - a. Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1(satu) kamar untuk 1 (satu) orang
    - b. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1(satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
  2. Satuan Biaya Paket Fullboard ini digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat fullboard per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua ) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket fullboard untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a dapat diberikan 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya fullboard dalam peraturan Bupati ini.
  3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.
  4. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat , KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 

**BUPATI MALUKU TENGAH,**

**TUASIKAL ABUA**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH**  
**NOMOR : TAHUN 2022**  
**TANGGAL : JANUARI 2022**  
**TENTANG : STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023  
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.25.01.01.001	1	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
		1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	1,000,000
		b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1,150,000
		c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1,300,000
		d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	1,450,000
		e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2.5 miliar	OB	1,600,000
		f. Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	1,750,000
		g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	1,900,000
		h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	2,050,000
		1.2. Pejabat Pembuat Komitmen		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	700,000
		b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	760,000
		c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	810,000
		d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	960,000
		e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2.5 miliar	OB	1,070,000
		f. Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	1,190,000
		g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	1,450,000
		h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	1,740,000
		1.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	700,000
		b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	760,000
		c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	810,000
		d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	960,000
		e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2.5 miliar	OB	1,070,000
		f. Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	1,190,000
		g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	1,450,000
		h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	1,740,000
		1.4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	400,000
		b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	480,000
		c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	570,000
		d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	660,000
		e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2.5 miliar	OB	770,000
		f. Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	880,000
		g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	990,000
		h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	1,250,000
		1.5. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	320,000
		b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	420,000
		c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	500,000
		d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	570,000
		e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2.5 miliar	OB	670,000
		f. Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	770,000
		g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	860,000
		h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	1,320,000
		1.6. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu / Staf Pengelola Keuangan / Staf Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	260,000
		b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	310,000
		c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	370,000
		d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	430,000
		e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2.5 miliar	OB	500,000
		f. Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	570,000
		g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	640,000
		h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	810,000
		1.7. Bendahara Barang		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	260,000
		b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	310,000
		c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	370,000
		d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	430,000
		e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2.5 miliar	OB	500,000
		f. Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	570,000
		g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	640,000
		h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	810,000
		1.8. Petugas Operator SIPD Perangkat Daerah		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	470,000
		b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	560,000
		c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	650,000
		d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	760,000
		e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2.5 miliar	OB	870,000
		f. Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	980,000
		g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	1,240,000
		h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	1,500,000
9.1.2.25.02.01.001	2	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA</b>		
		2.1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	480,000
		2.2. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konstruksi		
		a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	OP	480,000
		b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	650,000
		c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OP	819,700
		d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2.5 miliar	OP	1,070,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2.5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	1,319,700
		f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OP	1,580,000
		g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar	OP	1,890,000
	2.3.	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Non Konstruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	OP	460,000
		b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	560,000
		c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OP	619,700
		d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2.5 miliar	OP	840,000
		e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2.5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	1,070,000
		f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OP	1,300,000
		g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar	OP	1,600,000
	2.4.	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya		
		a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp.50 juta	OP	350,000
		b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50 juta s.d Rp.100 juta	OP	350,000
		c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OP	450,000
		d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OP	550,000
		e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.500 juta s.d Rp1 miliar	OP	650,000
		f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d Rp.2.5 miliar	OP	750,000
		g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.2.5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	850,000
		h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OP	1,070,000
	2.5.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	3,000,000
		b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	4,000,000
		c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	4,400,000
	2.6.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2,500,000
		b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	3,500,000
		c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	3,900,000
	2.7.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konsultansi)		
		a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1,500,000
		b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1,700,000
		c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1,900,000
9.1.2.25.02.01.001	3	HONORARIUM TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI		
		a. Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	OP	480,000
		b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	650,000
		c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OP	820,000
		d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2.5 miliar	OP	1,070,000
		e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2.5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	1,320,000
		f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OP	1,580,000
		g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar	OP	1,890,000
9.1.2.25.02.01.001	4	HONORARIUM TIM TEKNIS PENGADAAN JASA KONSULTANSI		
		a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp.50 juta	OP	350,000
		b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50 juta s.d Rp.100 juta	OP	350,000
		c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OP	450,000
		d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OP	550,000
		e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	650,000
		f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d Rp.2.5 miliar	OP	750,000
		g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.2.5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	850,000
		h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OP	1,070,000
9.1.2.25.04.01.001	5	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	5.1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa	OB	220,000
	5.2	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa		
		a. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp.200 juta	OP	220,000
		b. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan di atas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	OP	320,000
		c. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan di atas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OP	420,000
		d. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2.5 miliar	OP	570,000
		e. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan di atas Rp.2.5 miliar s.d Rp.5 miliar	OP	710,000
		f. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OP	860,000
		g. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan di atas Rp.10 miliar	OP	1,060,000
9.1.2.25.04.01.001	6	HONORARIUM STAF PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN		
	6.1.	Direksi		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	320,000
		b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	420,000
		c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	520,000
		d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	620,000
		e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2.5 miliar	OB	720,000
		f. Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	820,000
		g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	920,000
		h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	1,020,000
	6.2.	Pengawas Lapangan		
		a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	270,000
		b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	340,000
		c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	410,000
		d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	480,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2.5 miliar	OB	550,000
		f. Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	620,000
		g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	690,000
		h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar	OB	760,000
		i. Staf Administrasi	OB	110,000
9.1.2.25.04.01.001	7	<b>HONORARIUM PENGELOLA SISTIM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)</b> Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB) yang ditetapkan atas Dasar SK Kepala SKPD		
		7.1. Pengarah	OB	400,000
		7.2. Penanggungjawab	OB	300,000
		7.3. Kordinator	OB	250,000
		7.4. Ketua/Wakil Ketua	OB	200,000
		7.5. Anggota/Petugas	OB	150,000
9.1.2.25.04.01.001	8	<b>HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH</b>		
		8.1 Tingkat Pengguna Barang	OB	500,000
		8.2 Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	350,000
9.1.2.25.04.01.001	9	<b>HONORARIUM KELEBIHAN JAM PENELITIAN/PEREKAYASAAN</b>		
		9.1 Peneliti/Perekayasa Utama	OJ	60,000
		9.2 Peneliti/Perekayasa Madya	OJ	50,000
		9.3 Peneliti/Perekayasa Muda	OJ	40,000
		9.4 Peneliti/Perekayasa Pratama	OJ	35,000
9.1.2.25.04.01.001	10	<b>HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN</b>		
		10.1 Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	28,000
		10.2 Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	320,000
		10.3 Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	200,000
		10.4 Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	750,000
		10.5 Petugas Survey	Orang/ Responden	8,000
		10.6 Pembantu Lapangan	OH	80,000
9.1.2.25.03.01.001	11	<b>HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI /FGD/KEGIATAN SEJENIS</b>		
		11.1 Honorarium Narasumber/Pembahas :		
		a. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1,200,000
		b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1,000,000
		c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	800,000
		d. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	600,000
		11.2 Honorarium Moderator	OJ	500,000
		11.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	400,000
		11.4 Honorarium Narasumber/Pembahas	OJ	300,000
		11.5 Honorarium Moderator	OJ	75,000
		11.6 Honorarium Moderator	OJ	115,000
		11.7 Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara	OK	750,000
		11.8 Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara	OK	500,000
9.1.2.25.01.01.001	12	<b>HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FGD/ KEGIATAN SEJENIS</b>		
		12.1 Penanggung Jawab	OK	450,000
		12.2 Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000
		12.3 Sekretaris	OK	300,000
		12.4 Anggota	OK	250,000
9.1.2.25.04.01.001	13	<b>HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>		
		13.1 SLTA	OB	1,700,000
		13.2 Sarjana Muda/Diploma	OB	2,000,000
		13.3 Sarjana (S1)	OB	2,300,000
		13.4 Sarjana (S2)	OB	2,600,000
9.1.2.25.04.01.001	14	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH (BOP)</b>		
		14.1 Biaya Operasional Penyuluh	OB	350,000
9.1.2.26.03.01.001	15	<b>HONORARIUM ROHANIAWAN</b>		
		15.1 Rohaniawan Doa	OK	300,000
		15.3 Rohaniawan Sumpah	OK	300,000
9.1.2.25.04.01.001	16	<b>HONORARIUM TENAGA IT. OPERATOR KOMPUTER. TENAGA ADMINISTRASI. SATPAM. PENGEMUDI. PETUGAS KEBERSIHAN. KEAMANAN,PRAMUBAKTI DAN PRAMUSAJI</b>		
		16.1 Tenaga IT	OB	1,800,000
		16.2 Operator Computer (Aplikasi)	OB	1,500,000
		16.3 Tenaga Administrasi dan Teknis Lainnya		
		a. Klasifikasi 1	OB	1.750.000 - 2.000.000
		b. Klasifikasi 2	OB	1.500.000 - 1.750.000
		c. Klasifikasi 3	OB	1.442.000 - 1.600.000
		d. Klasifikasi 4	OB	1.250.000 - 1.500.000
		e. Klasifikasi 5	OB	1.000.000 - 1.250.000
		f. Klasifikasi 6	OB	750.000 - 1.000.000
		g. Klasifikasi 7	OB	400.000 - 750.000
		h. Klasifikasi 8	OB	400.000 - 200.000
		16.4 Satpam dan Pengemudi		
		a. Satpam	OB	1,500,000
		b. Pengemudi	OB	1,500,000
		16.5 c. Klasifikasi 3		
		a. Bangunan Tidak Bertingkat	OB	1,000,000
		b. Bangunan Bertingkat	OB	1,500,000
		16.6 Keamanan	OB	1,500,000
		16.7 Pramubakti	OB	1,600,000
		16.8 Pramusaji	OB	2,500,000
		16.9 Juru Masak	Tahun	1,000,000
9.1.2.25.01.01.001	17	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN</b>		
		17.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		17.1.1. Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
		a. Pengarah	OB	1,500,000
		b. Penanggung Jawab	OB	1,250,000
		c. Ketua	OB	1,000,000
		d. Wakil Ketua	OB	850,000
		e. Sekretaris	OB	750,000
		f. Anggota	OB	650,000
		17.1.2. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
		a. Pengarah	OB	750,000
		b. Penanggung Jawab	OB	700,000
		c. Ketua	OB	650,000
		d. Wakil Ketua	OB	600,000
		e. Sekretaris	OB	500,000
		f. Anggota	OB	450,000
		17.1.3. Yang ditetapkan oleh Pimpinan OPD/PA/KPA		
		a. Pengarah	OB	500,000
		b. Penanggung Jawab	OB	450,000
		c. Ketua	OB	400,000
		d. Wakil Ketua	OB	350,000
		e. Sekretaris	OB	300,000
		f. Anggota	OB	250,000
		17.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
		a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250,000
		b. Anggota	OB	200,000
9.1.2.25.04.01.001	18	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERDA TENTANG APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		18.1 Pembina	OK	9,000,000
		18.2 Wakil Pembina	OK	8,500,000
		18.3 Pengarah	OK	8,000,000
		18.4 Koordinator I	OK	7,500,000
		18.5 Koordinator II	OK	7,500,000
		18.6 Ketua	OK	7,000,000
		18.7 Sekretaris	OK	6,500,000
		18.8 Anggota	OK	5,000,000
		18.9 Staf Gol. III	OK	4,500,000
9.1.2.25.04.01.001	19	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		19.1 Pembina	OK	9,000,000
		19.2 Wakil Pembina	OK	8,500,000
		19.3 Pengarah	OK	8,000,000
		19.4 Koordinator I	OK	7,500,000
		19.5 Koordinator II	OK	7,500,000
		19.6 Ketua	OK	7,000,000
		19.7 Sekretaris	OK	6,500,000
		19.8 Anggota	OK	5,000,000
		19.9 Staf Gol. III	OK	4,500,000
		19.10 Staf Gol. II	OK	4,000,000
9.1.2.25.04.01.001	20	<b>HONORARIUM TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		20.1 Ketua	OK	5,000,000
		20.2 Wakil Ketua	OK	4,750,000
		20.3 Sekretaris	OK	4,500,000
		20.4 Wakil Sekretaris	OK	4,250,000
		20.5 Anggota	OK	3,000,000
9.1.2.25.04.01.001	21	<b>HONORARIUM TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		21.1 Ketua	OK	5,000,000
		21.2 Wakil Ketua	OK	4,750,000
		21.3 Sekretaris	OK	4,500,000
		21.4 Wakil Sekretaris	OK	4,250,000
		21.5 Anggota	OK	3,000,000
9.1.2.25.04.01.001	22	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (DPA-OPD) KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		22.1 Pembina	OK	5,000,000
		22.2 Wakil Pembina	OK	4,750,000
		22.3 Ketua	OK	4,500,000
		22.4 Wakil Ketua	OK	4,250,000
		22.5 Sekretaris	OK	4,000,000
		22.6 Wakil Sekretaris	OK	3,750,000
		22.7 Anggota	OK	3,000,000
		22.8 Staf Gol. III	OK	3,000,000
		22.9 Staf Gol. II	OK	2,750,000
9.1.2.25.04.01.001	23	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		23.1 Pembina	OK	9,000,000
		23.2 Wakil Pembina	OK	8,500,000
		23.3 Pengarah	OK	8,000,000
		23.4 Koordinator I	OK	7,500,000
		23.5 Koordinator II	OK	7,500,000
		23.6 Ketua	OK	7,000,000
		23.7 Sekretaris	OK	6,500,000
		23.8 Anggota	OK	6,250,000
		23.9 Staf Gol. III	OK	6,000,000
		23.10 Staf Gol. II	OK	5,500,000
9.1.2.25.04.01.001	24	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		24.1 Pembina	OK	9,000,000
		24.2 Wakil Pembina	OK	8,500,000
		24.3 Pengarah	OK	8,000,000
		24.4 Koordinator I	OK	7,500,000
		24.5 Koordinator II	OK	7,500,000
		24.6 Ketua	OK	7,000,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.25.04.01.001	24	24.7 Sekretaris	OK	6,500,000
		24.8 Anggota	OK	6,250,000
		24.9 Staf Gol. III	OK	6,000,000
		24.10 Staf Gol. II	OK	5,500,000
9.1.2.25.04.01.001	25	<b>HONORARIUM TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		25.1 Ketua	OK	5,000,000
		25.2 Wakil Ketua	OK	4,750,000
		25.3 Sekretaris	OK	4,500,000
		25.4 Wakil Sekretaris	OK	4,250,000
		25.5 Anggota	OK	3,000,000
9.1.2.25.04.01.001	26	<b>HONORARIUM TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		26.1 Ketua	OK	5,000,000
		26.2 Wakil Ketua	OK	4,750,000
		26.3 Sekretaris	OK	4,500,000
9.1.2.25.04.01.001	27	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN OPD (DPA - OPD) KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		27.1 Pembina	OK	5,000,000
		27.2 Wakil Pembina	OK	4,750,000
		27.3 Ketua	OK	4,500,000
		27.4 Wakil Ketua	OK	4,250,000
		27.5 Sekretaris	OK	4,000,000
		27.6 Wakil Sekretaris	OK	3,750,000
		27.7 Anggota	OK	3,000,000
		27.8 Staf Gol. III	OK	3,000,000
		27.9 Staf Gol. II	OK	2,750,000
9.1.2.25.04.01.001	28	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		28.1 Pembina	OK	9,000,000
		28.2 Wakil Pembina	OK	8,500,000
		28.3 Pengarah	OK	8,000,000
		28.4 Koordinator I	OK	7,500,000
		28.5 Koordinator II	OK	7,500,000
		28.6 Koordinator III	OK	7,500,000
		28.7 Ketua	OK	7,000,000
		28.8 Sekretaris	OK	6,500,000
		28.9 Anggota	OK	6,250,000
		28.10 Staf Gol. III	OK	6,000,000
		28.11 Staf Gol. II	OK	5,500,000
9.1.2.25.04.01.001	29	<b>HONORARIUM TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		29.1 Ketua	OK	5,000,000
		29.2 Wakil Ketua	OK	4,750,000
		29.3 Sekretaris	OK	4,500,000
		29.4 Wakil Sekretaris	OK	4,250,000
		29.5 Anggota	OK	3,000,000
9.1.2.25.04.01.001	30	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		30.1 Pembina	OK	9,000,000
		30.2 Wakil Pembina	OK	8,500,000
		30.3 Pengarah	OK	8,000,000
		30.4 Koordinator I	OK	7,500,000
		30.5 Koordinator II	OK	7,500,000
		30.6 Koordinator III	OK	7,500,000
		30.7 Ketua	OK	7,000,000
		30.8 Sekretaris	OK	6,500,000
		30.9 Anggota	OK	6,250,000
		30.10 Staf Gol. III	OK	6,000,000
		30.11 Staf Gol. II	OK	5,500,000
9.1.2.25.04.01.001	31	<b>HONORARIUM TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		31.1 Ketua	OK	5,000,000
		31.2 Wakil Ketua	OK	4,750,000
		31.3 Sekretaris	OK	4,500,000
		31.4 Wakil Sekretaris	OK	4,250,000
		31.5 Anggota	OK	3,000,000
9.1.2.25.04.01.001	32	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN NERACA AKHIR DAN LAPORAN ARUS KAS KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		32.1 Pembina	OK	5,000,000
		32.2 Wakil Pembina	OK	4,750,000
		32.3 Pengarah	OK	4,500,000
		32.4 Koordinator I	OK	4,250,000
		32.5 Koordinator II	OK	4,250,000
		32.6 Koordinator III	OK	4,250,000
		32.7 Ketua	OK	4,000,000
		32.8 Sekretaris	OK	3,750,000
		32.9 Anggota	OK	3,000,000
		32.10 Staf Gol. III	OK	3,000,000
		32.11 Staf Gol. II	OK	2,750,000
9.1.2.25.04.01.001	33	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI SEMESTER APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		33.1 Pembina	OK	7,000,000
		33.2 Wakil Pembina	OK	6,500,000
		33.3 Pengarah	OK	6,000,000
		33.4 Koordinator I	OK	5,500,000
		33.5 Koordinator II	OK	5,500,000
		33.6 Koordinator III	OK	5,500,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.25.04.01.001	34	33.7 Ketua	OK	5,000,000
		33.8 Sekretaris	OK	4,750,000
		33.9 Anggota	OK	4,500,000
		33.10 Staf Gol. III	OK	4,500,000
		33.11 Staf Gol. II	OK	4,250,000
		<b>HONORARIUM TIM PENYELESAIAN ADMINISTRASI GAJI KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		34.1 Penanggung Jawab	OB	1,500,000
		34.2 Ketua	OB	1,250,000
		34.3 Sekretaris	OB	1,100,000
		34.4 Anggota	OB	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	35	<b>HONORARIUM TIM PENYELESAIAN SPT TAHUNAN KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
9.1.2.25.04.01.001	36	35.1 Pembina	OB	2,000,000
		35.2 Koordinator	OB	1,740,000
		35.3 Ketua	OB	1,500,000
		35.4 Sekretaris	OB	1,300,000
		35.5 Anggota	OB	1,200,000
		<b>HONORARIUM TIM REKONSILIASI DAN PENGAWASAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		36.1 Pengarah	OB	2,000,000
		36.2 Penanggunjawab	OB	1,750,000
		36.3 Ketua	OB	1,500,000
		36.4 Wakil Ketua	OB	1,250,000
9.1.2.25.04.01.001	37	36.5 Sekretaris	OB	1,200,000
		36.6 Anggota	OB	1,000,000
		<b>HONORARIUM TIM SISMIOP PBB-P2 DAN TENAGA OUTSOURCING</b>		
		37.1 Tim Sismiop PBB - P2		
		a. Penanggunjawab	OB	2,500,000
		b. Ketua	OB	2,250,000
		c. Wakil Ketua	OB	2,225,000
		d. Sekretaris	OB	2,000,000
		e. Administrasi SISMIOP	OB	1,500,000
		f. Anggota	OB	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	38	37.2 Tenaga Outsorcing (Masa Kerja 5 Tahun Keatas)		
		a. SLTA	OB	1,350,000
		b. Sarjana Muda/Diploma	OB	1,500,000
		c. Sarjana (S1)	OB	1,590,000
		d. Sarjana (S2)	OB	1,770,000
		<b>HONORARIUM PANITIA PENYELESAIAN DAN PENYIAPAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (OPD)</b>		
		38.1 Penanggunjawab	OB	700,000
		38.2 PPTK	OB	600,000
		38.3 Ketua	OB	350,000
		38.4 Wakil Ketua	OB	300,000
9.1.2.25.04.01.001	39	38.5 Sekretaris	OB	250,000
		38.6 Anggota	OB	200,000
		<b>HONORARIUM SATUAN TUGAS PENGELOLA SISTIM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SATGAS SIPD) KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		39.1 Pembina	OB	4,250,000
		39.2 Wakil Pembina	OB	4,000,000
		39.3 Koordinator	OB	3,750,000
		39.4 Penanggunjawab	OB	3,500,000
		39.5 Ketua	OB	3,250,000
		39.6 Sekretaris	OB	3,000,000
		39.7 Wakil Sekretaris	OB	2,750,000
9.1.2.25.04.01.001	40	39.8 Admin Pengendali Aplikasi	OB	2,500,000
		39.9 Admin Pengendali Sistim	OB	2,500,000
		39.10 Anggota	OB	2,000,000
		<b>HONORARIUM SATUAN TUGAS PENGELOLA APLIKASI SISTIM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SATGAS SIKD) KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		40.1 Pembina	OB	2,500,000
		40.2 Wakil Pembina	OB	2,350,000
		40.3 Koordinator	OB	2,250,000
		40.4 Wakil Koordinator	OB	2,200,000
		40.5 Ketua	OB	2,120,000
		40.6 Wakil Ketua	OB	2,000,000
9.1.2.25.04.01.001	41	40.7 Sekretaris	OB	1,740,000
		40.8 Anggota	OB	1,590,000
		<b>HONORARIUM PEMBUAT KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PENUNJUKAN PA/KPA/BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENERIMAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
			OB	500,000
9.1.2.15.04.01.001	42	<b>HONORARIUM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		42.1 Ketua	OB	1,500,000
		42.2 Sekretaris	OB	1,500,000
		42.3 Anggota	OB	1,500,000
9.1.2.25.04.01.001	43	<b>HONORARIUM TIM POKJA DAN SEKRETARIAT POKJA PENYUSUN DOKUMEN STANDAR PENGANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN</b>		
		43.1 Honorarium Tim Pokja		
		a. Pengarah	OB	2,000,000
		b. Wakil Pengarah	OB	1,700,000
		c. Penanggunjawab	OB	1,500,000
		d. Ketua I	OB	1,400,000
		e. Ketua II	OB	1,400,000
		f. Wakil Ketua	OB	1,300,000
		g. Sekretaris	OB	1,200,000
		h. Anggota	OB	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	43	43.2 Honorarium Sekretariat Tim Pokja		
		a. Ketua	OB	750,000
		b. Anggota	OB	500,000



KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
9.1.2.25.01.01.001	44	HONORARIUM TIM EVALUASI RENSTRA OPD			
		44.1 Penanggungjawab	OB	350,000	
		44.2 Ketua	OB	300,000	
		44.3 Sekretaris	OB	250,000	
		44.4 Anggota	OB	200,000	
9.1.2.25.01.01.001	45	HONORARIUM TIM REVIUW LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH			
		45.1 Penanggungjawab/Ketua	OK	4,000,000	
		45.2 Pengendali Teknis	OK	3,500,000	
		45.3 Ketua	OK	3,500,000	
		45.4 Anggota	OK	3,000,000	
9.1.2.25.01.01.001	46	HONORARIUM TIM PEMUTAHIRAN DATA KABUPATEN MALUKU TENGAH			
		46.1 Honorarium Tim Pemutahiran Data/Gelar Pengawasan			
		a. Pengarah	OK	3,500,000	
		b. Penanggungjawab	OK	3,000,000	
		c. Ketua	OK	2,500,000	
		d. Sekretaris	OK	2,000,000	
		e. Anggota	OK	1,500,000	
		46.2 Honorarium Tim Pembahas Pemutahiran Data/Gelar Pengawasan			
		a. Penanggungjawab	OK	4,000,000	
		b. Ketua	OK	3,500,000	
c. Anggota	OK	3,000,000			
9.1.2.25.01.01.001	47	HONORARIUM TIM EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH			
		47.1 Honorarium Tim Evaluasi LAKIP OPD			
		a. Penanggungjawab	OK	3,500,000	
		b. Pengendali Teknis	OK	3,000,000	
		c. Ketua	OK	3,000,000	
		d. Anggota	OK	2,500,000	
		47.2 Honorarium Tim Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah			
		a. Penanggungjawab	OK	3,500,000	
		b. Pengendali Teknis	OK	3,000,000	
		c. Ketua	OK	3,000,000	
d. Anggota	OK	2,500,000			
9.1.2.25.01.01.001	48	HONORARIUM TIM REVIUW DOKUMEN PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH PERANGKAT DAERAH			
		48.1 Penanggungjawab	OK	3,500,000	
		48.2 Pengendali Teknis	OK	3,000,000	
		48.3 Ketua	OK	3,000,000	
		48.4 Anggota	OK	2,500,000	
9.1.2.25.01.01.001	49	HONORARIUM TIM POKJA FASILITASI SPIP DAN KAPABILITAS APIP			
		49.1 Penanggungjawab	OB	350,000	
		49.2 Ketua	OB	300,000	
		49.3 Sekretaris	OB	250,000	
		49.4 Anggota	OB	200,000	
9.1.2.25.01.01.001	50	HONORARIUM TIM REVIUW PENYERAPAN ANGGARAN PBJ DAN ANGGARAN ADD			
		50.1 Penanggungjawab	OB	350,000	
		50.2 Ketua	OB	300,000	
		50.3 Anggota	OB	200,000	
9.1.2.25.01.01.001	51	HONORARIUM TIM PELAKSANAAN DAN UNIT PENGELOLA PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI DAN RAD			
		51.1 Honorarium Tim Reformasi Birokrasi			
		a. Pengarah	OK	7,500,000	
		b. Penanggungjawab	OK	7,000,000	
		c. Ketua	OK	6,500,000	
		d. Sekretaris	OK	6,000,000	
		e. Anggota	OK	5,500,000	
		51.2 Horarium Unit Pengelola			
		a. Ketua	OK	5,500,000	
		b. Anggota	OK	5,000,000	
9.1.2.25.01.01.001	52	HONORARIUM TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL			
		52.1 Penanggungjawab	OK	3,000,000	
		52.2 Ketua	OK	2,500,000	
		52.3 Anggota	OK	2,000,000	
9.1.2.25.01.01.001	53	HONORARIUM TIM PEMBINAAN. PENGAWASAN APARATUR KECAMATAN DAN NEGERI			
		53.1 Penanggungjawab	OB	350,000	
		53.2 Ketua	OB	300,000	
		53.3 Sekretaris	OB	200,000	
9.1.2.25.01.01.001	54	HONORARIUM TIM PELAKSANAAN KOORDINASI. MONITORING DAN EVALUASI (KORMONEV)			
		54.1 Pengarah	OB	450,000	
		54.2 Penanggungjawab	OB	350,000	
		54.3 Ketua	OB	300,000	
		54.4 Wakil Ketua	OB	250,000	
		54.5 Sekretaris	OB	200,000	
		54.6 Anggota	OB	200,000	
9.1.2.25.04.01.001	55	HONORARIUM POKJA PENDAFTARAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)			
		55.1 Honorarium Pokja Pendaftaran LHKPN			
		a. Penasihat	OK	7,500,000	
		b. Pengarah	OK	7,500,000	
		c. Ketua	OK	7,000,000	
		d. Wakil Ketua	OK	6,500,000	
		e. Sekretaris	OK	6,000,000	
		f. Anggota	OK	5,500,000	

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.25.04.01.001	55.2	Honorarium Unit Pengelola LHKPN		
		a. Penanggungjawab	OK	4,000,000
		b. Administrator	OK	3,000,000
9.1.2.25.04.01.001	56	<b>HONORARIUM TIM TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN (TLHTP)</b>		
		56.1 Penanggungjawab	OB	350,000
		56.2 Ketua	OB	300,000
		56.3 Sekretaris	OB	200,000
		56.4 Anggota	OB	200,000
9.1.2.25.04.01.001	57	<b>HONORARIUM TIM POKJA DAN TIM TEKNIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN NEGARA</b>		
		57.1 Honorarium Tim Pokja Penyelesaian Kerugian Daerah dan Negara		
		a. Penasihat	OB	650,000
		b. Ketua	OB	625,000
		c. Wakil Ketua	OB	600,000
		d. Sekretaris	OB	525,000
		e. Anggota	OB	500,000
		57.2 Honorarium Tim Teknis Penyelesaian Kerugian Daerah dan Negara		
		a. Ketua	OB	425,000
		b. Anggota	OB	400,000
9.1.2.25.04.01.001	58	<b>HONORARIUM TIM POKJA DAN UNIT PENGELOLA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN WHISTIE BLOWER</b>		
		58.1 Honorarium Tim Pokja Pengelola Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistie Blower		
		a. Pengarah	OK	3,500,000
		b. Penanggungjawab	OK	3,000,000
		c. Ketua	OK	2,750,000
		d. Sekretaris	OK	2,500,000
		e. Anggota	OK	2,000,000
		58.2 Honorarium Unit Pengelola Pengelola Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistie Blower		
		a. Ketua	OK	2,500,000
		b. Sekretaris	OK	2,000,000
9.1.2.25.04.01.001	59	<b>HONORARIUM TIM PENILAIAN INTERNAL ZONA INTEGRITAS</b>		
		59.1 Pengarah	OK	3,500,000
		59.2 Penanggungjawab	OK	3,000,000
		59.3 Ketua	OK	2,500,000
		59.4 Anggota	OK	2,000,000
9.1.2.25.04.01.001	60	<b>HONORARIUM TIM MONEV DAN UNIT PENGELOLA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI</b>		
		60.1 Honorarium Tim Monev Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
		a. Pengarah	OK	7,500,000
		b. Penanggungjawab	OK	7,000,000
		c. Ketua	OK	6,500,000
		d. Sekretaris	OK	6,000,000
		e. Anggota	OK	5,500,000
		60.2 Honorarium Unit Pengelola Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
		a. Ketua	OK	5,500,000
		b. Anggota	OK	5,000,000
9.1.2.25.04.01.001	61	<b>HONORARIUM TIM PENGENDALIAN DAN SEKRETARIAT PENGENDALIAN GRATIFIKASI</b>		
		61.1 Honorarium Tim Pengendalian Gratifikasi		
		a. Pengarah	OK	5,000,000
		b. Penanggungjawab	OK	4,500,000
		c. Ketua	OK	4,000,000
		d. Sekretaris	OK	3,500,000
		e. Anggota	OK	3,000,000
		61.2 Honorarium Sekretariat Pengendalian Gratifikasi		
		a. Ketua	OK	3,500,000
		b. Sekretaris	OK	3,500,000
		c. Anggota	OK	3,000,000
9.1.2.25.04.01.001	62	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI DANA DAK PERANGKAT DAERAH</b>		
		62.1 Penanggungjawab	OK	3,000,000
		62.2 Pengendali Teknis	OK	2,500,000
		62.3 Ketua	OK	2,500,000
		62.4 Anggota	OK	2,000,000
9.1.2.25.04.01.001	63	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN ASN</b>		
		63.1 Penanggungjawab	OK	2,500,000
		63.2 Ketua	OK	2,000,000
		63.3 Anggota	OK	1,750,000
9.1.2.25.04.01.001	64	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE INSPEKTORAT</b>		
		64.1 Penanggungjawab	OB	350,000
		64.2 Ketua	OB	300,000
		64.3 Anggota	OB	200,000
9.1.2.25.04.01.001	65	<b>HONORARIUM TIM PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPDP</b>		
		65.1 Panitia Pelaksana Musrenbang	OB	150,000
		65.2 Panitia Pelaksana Forum Bersama SKPD	OB	150,000
9.1.2.25.04.01.001	66	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)</b>	OK	2,500,000
9.1.2.25.04.01.001	67	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN (KUAP)</b>	OK	2,500,000
9.1.2.25.04.01.001	68	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PENETAPAN PAGU ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)</b>	OK	2,500,000
9.1.2.25.04.01.001	69	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PENETAPAN PAGU ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN</b>	OK	2,500,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.25.04.01.001	70	<b>HONORARIUM TIM PEMBAHASAN RKA PERANGKAT DAERAH</b> 70.1 Koordinator 70.2 Ketua 70.3 Anggota	OB OB OB	500,000 400,000 300,000
9.1.2.25.01.01.001	71	<b>HONORARIUM TIM SEKRETARIAT PROGRAM TABAOS</b> 71.1 Pengarah 71.2 Penanggungjawab 71.3 Koordinator/Ketua 71.4 Wakil Ketua 71.5 Sekretaris 71.6 Anggota	OB OB OB OB OB OB	500,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000
9.1.2.25.04.01.001	72	<b>HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TAPD</b> 72.1 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) a. Pembina b. Pengarah c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Wakil Sekretaris g. Anggota 72.2 Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,250,000 1,000,000 1,000,000 900,000 600,000
9.1.2.25.04.01.001	73	<b>HONORARIUM TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) DAN SEKRETARIAT TPID KABUPATEN MALUKU TENGAH</b> 73.1 Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota 73.2 Honorarium Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	1,500,000 1,250,000 1,000,000 850,000 750,000 750,000 750,000 500,000 350,000
9.1.2.26.03.01.001	74	<b>HONORARIUM KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK (KKMB)</b> 74.1 Tenaga Ahli Manajemen 74.2 Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)	OB OB	2,500,000 2,000,000
9.1.2.25.04.01.001	75	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN INSTRUMEN ANALISIS JABATAN</b> 75.1 Pengarah 75.2 Penanggungjawab 75.3 Koordinator/Ketua 75.4 Wakil Ketua 75.5 Sekretaris 75.6 Anggota	OB OB OB OB OB OB	1,500,000 1,400,000 1,300,000 1,250,000 1,200,000 1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	76	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN</b> 76.1 Pengarah 76.2 Penanggungjawab 76.3 Koordinator/Ketua 76.4 Wakil Ketua 76.5 Sekretaris 76.6 Anggota	OB OB OB OB OB OB	1,750,000 1,650,000 1,550,000 1,450,000 1,250,000 750,000
9.1.2.25.04.01.001	77	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH</b> 77.1 Pengarah 77.2 Penanggungjawab 77.3 Koordinator/Ketua 77.4 Wakil Ketua 77.5 Sekretaris 77.6 Anggota	OB OB OB OB OB OB	1,500,000 1,400,000 1,300,000 1,250,000 1,200,000 1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	78	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN EVALUASI JABATAN</b> 78.1 Pengarah 78.2 Penanggungjawab 78.3 Koordinator/Ketua 78.4 Wakil Ketua 78.5 Sekretaris 78.6 Anggota	OB OB OB OB OB OB	1,750,000 1,650,000 1,550,000 1,450,000 1,250,000 750,000
9.1.2.25.04.01.001	79	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b> 79.1 Pengarah 79.2 Penanggungjawab 79.3 Koordinator/Ketua 79.4 Wakil Ketua 79.5 Sekretaris 79.6 Anggota	OB OB OB OB OB OB	1,750,000 1,650,000 1,550,000 1,450,000 1,250,000 750,000
9.1.2.25.04.01.001	80	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK</b> 80.1 Pengarah 80.2 Penanggungjawab 80.3 Ketua 80.4 Wakil Ketua 80.5 Sekretaris 80.6 Anggota	OB OB OB OB OB OB	1,500,000 1,400,000 1,300,000 1,250,000 1,200,000 1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	81	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)</b> 81.1 Pengarah 81.2 Pembina 81.3 Koordinator/Ketua 81.4 Sekretaris 81.5 Anggota	OP OP OP OP OP	9,000,000 8,500,000 8,000,000 7,500,000 6,000,000



KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		a. Diploma I/II/III/IV dan Strata Satu (S1)		
		1. Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	250,000
		2. Pengawas Ujian	OH	290,000
		3. Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	7,500
		4. Penguji Tugas Akhir/Skripsi	Orang/Mahasiswa	250,000
		5. Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/Mata Ujian	290,000
		6. Penguji ujian ketrampilan pada ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri	Peserta	75,000
		b. Strata 2 (S2)		
		1. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	260,000
		2. Pengawas Ujian	OH	300,000
		3. Pemeriksaan Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	15,000
		4. Penguji Tesis	Orang/Mahasiswa	350,000
		c. Strata 3 (S3)		
		1. Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Mata Kuliah	280,000
		2. Pengawas Ujian	OH	300,000
		3. Pemeriksa Hasil Ujian	Mahasiswa/Mata Ujian	19,700
		4. Penguji Disertasi	Orang/Mahasiswa	500,000
9.1.2.25.04.01.001	93	<b>HONORARIUM TENAGA AHLI PENGOLAH BUKU PERPUSTAKAAN</b>		
		93.1 Tenaga Klasifikasi Buku	OBk	1,970
		93.2 Tenaga Katalogisasi Buku	OBk	1,970
		93.3 Tenaga Inventarisasi Buku	OBk	1,500
		93.4 Tenaga Entri Katalog Buku	OBk	1,500
		93.5 Tenaga Finishing dan Selfing Buku	OBk	1,500
9.1.2.25.04.01.001	94	<b>HONORARIUM TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN</b>		
		93.1 Perpustakaan Negeri	OB	250,000
		93.2 Perpustakaan Sekolah	OB	750,000
		93.3 Perpustakaan Negeri/Desa/Kelurahan	OB	750,000
9.1.2.25.04.01.001	95	<b>HONORARIUM TENAGA AHLI PENGOLAH TERBITAN BERKALA DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA KOLEKSI DAERAH</b>		
		95.1 Tenaga Klasifikasi Terbitan Berkala	Oeks	1,970
		95.2 Tenaga Katalogisasi Terbitan Berkala	Oeks	1,970
		96.3 Petugas Layanan Perpusing (Gol. II)	OJ	15,000
		96.4 Tenaga Fulmikasi dan Selving	OK	200,000
9.1.2.25.04.01.001	96	<b>HONORARIUM PETUGAS LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING (LAYANAN EKSTESI)</b>		
		96.1 Petugas Layanan Perpusing (Gol. III)	OJ	16,900
		96.2 Petugas Layanan Perpusing (Gol. II)	OJ	15,000
		96.3 Petugas Layanan Perpusing atau Mobil Keliling	OJ	50,000
9.1.2.26.03.01.001	97	<b>HONORARIUM PEMBAHASAN APBD (DPRD)</b>		
		97.1 Ketua	OK	3,500,000
		97.2 Wakil Ketua	OK	3,000,000
		97.3 Sekretaris	OK	2,500,000
		97.4 Anggota	OK	2,000,000
9.1.2.26.03.01.001	98	<b>HONORARIUM PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN (DPRD)</b>		
		98.1 Ketua	OK	3,500,000
		98.2 Wakil Ketua	OK	3,000,000
		98.3 Sekretaris	OK	2,500,000
		98.4 Anggota	OK	2,000,000
9.1.2.25.04.01.001	99	<b>HONORARIUM /INSENTIF APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (APPD)</b>		
		99.1 Kepala	OB	2,000,000
		99.2 Sekretaris	OB	1,500,000
		99.3 Kepala Bidang	OB	1,250,000
		99.4 Kepala Sub. Bidang / Kepala Sub. Bagian	OB	1,000,000
		99.5 Staf (ASN/CASN) Gol. III	OB	750,000
		99.6 Staf (ASN/CASN) Gol. II	OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	100	<b>HONORARIUM/INSENTIF TIM PERENCANA DAN TIM DATA PERANGKAT DAERAH</b>		
		100.1 Tim Perencana	OB	500,000
		100.2 Tim Data	OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	101	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN LAKIP KABUPATEN</b>		
		101.1 Pengarah	OK	5,000,000
		101.2 Penanggung Jawab	OK	4,500,000
		101.3 Ketua	OK	4,000,000
		101.4 Koordinator	OK	3,500,000
		101.5 Anggota	OK	3,000,000
9.1.2.25.04.01.001	102	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN TAPKIN DAN RKT KABUPATEN</b>		
		102.1 Pengarah	OK	4,000,000
		102.2 Penanggung Jawab	OK	3,750,000
		102.3 Ketua	OK	3,250,000
		102.4 Anggota	OK	2,750,000
9.1.2.25.04.01.001	103	<b>HONORARIUM TIM POKJA DAN SEKRETARIAT TIM POKJA EVALUASI DAK KABUPATEN</b>		
		103.1 Tim Pokja	OK	7,000,000
		a. Pengarah	OK	7,000,000
		b. Penanggung Jawab	OK	6,000,000
		c. Ketua	OK	5,000,000
		d. Sekretaris	OK	4,000,000
		e. Anggota	OK	3,000,000
		103.2 Sekretariat Tim Pokja		
		a. Ketua	OK	3,600,000
		b. Anggota	OK	3,500,000
9.1.2.25.04.01.001	104	<b>HONORARIUM TIM KESEKRETARIATAN SAKIP KABUPATEN</b>		
		104.1 Pengarah	OB	1,400,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		104.2 Penanggungjawab	OB	1,350,000
		104.3 Ketua	OB	1,300,000
		104.4 Sekretaris	OB	1,250,000
		104.5 Anggota	OB	1,200,000
9.1.2.25.04.01.001	105	HONORARIUM TIM TEKNIS PELAPORAN DAK. TUGAS PEMBANTUAN DAN APBD		
		105.1 Pengarah	OB	1,400,000
		105.2 Penanggungjawab	OB	1,350,000
		105.3 Ketua	OB	1,300,000
		105.4 Sekretaris	OB	1,250,000
		105.5 Anggota	OB	1,200,000
9.1.2.25.04.01.001	106	HONORARIUM TIM TEKNIS PELAPORAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH		
		106.1 Pengarah	OB	1,350,000
		106.2 Penanggungjawab	OB	1,300,000
		106.3 Ketua	OB	1,250,000
		106.4 Anggota	OB	1,200,000
9.1.2.25.04.01.001	107	HONORARIUM TIM EVALUASI RKPD KABUPATEN		
		107.1 Penanggung Jawab	OK	3,600,000
		107.2 Ketua	OK	3,400,000
		107.3 Anggota	OK	2,600,000
9.1.2.25.04.01.001	108	HONORARIUM TIM PELAPORAN TEPRA KABUPATEN		
		108.1 Pengarah	OB	1,500,000
		108.2 Penanggung Jawab	OB	1,250,000
		108.3 Pejabat Penghubung	OB	1,150,000
		108.4 Koordinator/Ketua	OB	1,100,000
		108.5 Anggota	OB	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	109	HONORARIUM TIM DAN SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
		109.1 Honorarium Tim Penanganan Konflik Sosial		
		a. Ketua	OB	1,500,000
		b. Wakil Ketua	OB	1,250,000
		c. Wakil Ketua 1	OB	1,000,000
		d. Sekretaris	OB	750,000
		e. Wakil Sekretaris	OB	750,000
		f. Anggota	OB	400,000
		109.2 Honorarium Sekretariat Tim		
		a. Ketua	OB	350,000
b. Anggota	OB	300,000		
9.1.2.25.04.01.001	110	HONORARIUM TIM KOORDINASI DAN OPERASIONAL KOMINDA		
		110.1 Ketua	OB	1,200,000
		110.2 Ketua Pelaksana Harian	OB	1,100,000
		110.3 Sekertaris	OB	1,000,000
		110.4 Anggota	OB	750,000
		110.5 Honorarium Sekretariat Tim		
		a. Ketua	OB	750,000
b. Anggota	OB	500,000		
9.1.2.25.04.01.001	111	HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH		
		111.1 Ketua	OB	1,750,000
		111.2 Wakil Ketua	OB	1,500,000
		111.3 Sekretaris	OB	1,200,000
		111.4 Anggota	OB	600,000
9.1.2.25.04.01.001	112	HONORARIUM TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN		
		112.1 Pengarah	OB	3,500,000
		112.2 Pembina	OB	3,000,000
		112.3 Penanggungjawab	OB	2,500,000
		112.4 Ketua	OB	2,250,000
		112.5 Sekretaris	OB	1,750,000
		112.6 Anggota/Tim Teknis	OB	1,500,000
9.1.2.26.03.01.001	113	HONORARIUM TIM OPERASI PENERTIBAN LALU LINTAS ANGKUTAN DARAT (LLAJ),LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT (LALA) DAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI. DANAU DAN PENYEBRANGAN (LLASDP)		
		113.1 Tim Operasi Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Honor Petugas Kepolisian/POM/Polisi Pamong Praja/Penyidik PASN/ Aparatur Perhubungan	OH	350,000
		113.2 Tim Operasi Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut (LALA) Honor Petugas Pol. Air/Syahbandar/KPLP	OH	350,000
		113.3 Tim Operasi Penertiban Lalu Lintas Angkutan Sungai. Danau dan Penyebrangan (LLASDP)		
		a. Pengarah	OB	500,000
		b. Penanggungjawab	OB	400,000
		c. Koordinator/Ketua	OB	350,000
		d. Wakil Ketua	OB	300,000
		e. Sekretaris	OB	250,000
		f. Anggota	OB	200,000
9.1.2.26.03.01.001	114	HONORARIUM FORUM LALU LINTAS KABUPATEN MALUKU TENGAH		
		114.1 Pengarah	OB	1,500,000
		114.2 Pembina	OB	1,200,000
		114.3 Penasehat	OB	1,000,000
		114.4 Ketua	OB	850,000
		114.5 Wakil Ketua	OB	750,000
		114.6 Sekretaris	OB	650,000
		114.7 Wakil Sekretaris	OB	650,000
114.8 Anggota	OB	450,000		
9.1.2.25.04.01.001	115	HONORARIUM BIDANG PERSANDIAN		
		115.1 Sandimen	OB	1,700,000
		115.2 Operator Transmisi Sandi	OB	1,500,000
		115.3 Pembina Pengamanan Persandian	OB	1,500,000
		115.4 Penanggung Jawab Pengamanan Persandian	OB	1,300,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.25.04.01.001	115.5	Pelaksana Pengkajian dan Pengamanan Persandian	OB	1,100,000
		Petugas Kamar Sandi	OB	900,000
		Pendukung Persandian	OB	700,000
9.1.2.25.01.01.001	116	<b>HONORARIUM PETUGAS PENYIAR RPD. CAMERAMEN. CALLING DAN PELIPUTAN</b>		
		116.1 Peniyar RPD	OB	2,000,000
		116.2 Cameramen	OB	1,000,000
		116.3 Calling	OB	1,000,000
9.1.2.25.01.01.001	116.4	Peliputan	OB	2,000,000
9.1.2.25.04.01.001	117	<b>HONORARIUM RAPAT FORUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>		
		117.1 Penanggungjawab	OK	500,000
		117.2 Koordinator/Ketua	OK	400,000
		117.3 Wakil Ketua	OK	350,000
9.1.2.25.04.01.001	117.4	Sekretaris	OK	300,000
		117.5 Anggota	OK	250,000
9.1.2.25.04.01.001	118	<b>HONORARIUM PETUGAS PENGELOLA</b>		
		118.1 Pengelola Gudang Buffer Stock	OB	750,000
		118.2 Pengelola Sistim Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT)	OB	750,000
9.1.2.25.04.01.001	119	<b>HONORARIUM PENDAMPING</b>		
		119.1 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	OB	750,000
		119.2 Pendamping Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	750,000
		119.3 Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	OB	750,000
9.1.2.25.04.01.001	119.4	Pendamping Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	OB	750,000
		119.5 Pendamping Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB)	OB	750,000
		119.6 Pendamping Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)	OB	750,000
		119.7 Pendamping Sosial Dan Penyuluh Sosial	OB	750,000
9.1.2.25.04.01.001	119.8	Pendamping Bantuan Sosial Pangan	OB	750,000
9.1.2.25.04.01.001	120	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>		
		120.1 Ketua	OB	1,500,000
		120.2 Sekretaris	OB	1,300,000
		120.3 Anggota	OB	1,200,000
9.1.2.25.04.01.001	121	<b>HONORARIUM TIM PENYELARASAN PRODUK HUKUM DAERAH</b>		
		121.1 Pengarah	OB	750,000
		121.2 Penangung Jawab	OB	700,000
		121.3 Ketua	OB	650,000
9.1.2.25.04.01.001	121.4	Wakil Ketua	OB	600,000
		121.5 Sekretaris	OB	500,000
		121.6 Anggota	OB	350,000
9.1.2.25.04.01.001	122	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS</b>		
		122.1 Pengarah	OB	1,500,000
		122.2 Penanggungjawab	OB	1,400,000
		122.3 Koordinator/Ketua	OB	1,300,000
9.1.2.25.04.01.001	122.4	Wakil Ketua	OB	1,200,000
		122.5 Sekretaris	OB	1,000,000
		122.6 Anggota	OB	750,000
9.1.2.25.04.01.001	123	<b>HONORARIUM FASILITATOR PEMBERDAYAAN KABUPATEN DAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM GSC</b>		
		123.1 Fasilitator Kabupaten	OB	3,000,000
		123.2 Unit Pengelola Kegiatan (UPK)		
		a. Ketua	OB	2,500,000
9.1.2.25.04.01.001	123.2	b. Sekretaris	OB	1,770,000
		c. Bendahara I	OB	1,770,000
		d. Bendahara II	OB	1,740,000
9.1.2.25.04.01.001	124	<b>HONORARIUM SATUAN TUGAS APLIKASI SIKEUDES</b>		
		124.1 Pengarah	OB	2,500,000
		124.2 Wakil Pengarah	OB	2,350,000
		124.3 Koordinator	OB	2,250,000
9.1.2.25.04.01.001	124.4	Wakil Koordinator	OB	2,200,000
		124.5 Penanggungjawab	OB	2,150,000
		124.6 Ketua	OB	2,000,000
		124.7 Wakil Ketua	OB	1,750,000
9.1.2.25.04.01.001	124.8	Sekretaris	OB	1,600,000
		124.9 Anggota	OB	1,500,000
9.1.2.25.04.01.001	125	<b>HONORARIUM SATUAN TUGAS APLIKASI SIPADES</b>		
		125.1 Penanggungjawab	OB	2,000,000
		125.2 Koordinator	OB	1,740,000
		125.3 Ketua	OB	1,500,000
9.1.2.25.04.01.001	125.4	Wakil Ketua	OB	1,250,000
		125.5 Sekretaris	OB	1,000,000
		125.6 Pengendali Teknis/Admin	OB	750,000
		125.7 Anggota	OB	250,000
9.1.2.25.04.01.001	126	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI DAN VERIKASI RANCANGAN PERATURAN NEGERI TENTANG APED NEGERI</b>		
		126.1 Penanggungjawab	OB	450,000
		126.2 Ketua	OB	350,000
		126.3 Sekretaris	OB	300,000
9.1.2.25.03.01.001	126.4	Anggota	OB	250,000
9.1.2.25.03.01.001	127	<b>HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) DAN SEKRETARIAT FORKOPIMDA KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		127.1 Ketua	OB	2,500,000
		127.2 Wakil Ketua	OB	2,000,000
		127.3 Sekretaris	OB	2,000,000
9.1.2.25.03.01.001	127.4	Anggota	OB	2,000,000
		127.5 Sekretariat FORKOPIMDA		
		a. Koordinator/Ketua	OB	1,500,000
		b. Anggota	OB	1,300,000
9.1.2.25.04.01.001	127.5	c. Staf Administrasi	OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	128	<b>HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN (FORKOPINCAM)</b>		

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.25.04.01.001	129	<b>DAN SEKRETARIAT FORKOPIMDA KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		128.1 Ketua	OB	1,500,000
		128.2 Anggota	OB	1,300,000
		128.3 Staf Administrasi	OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	129	<b>HONORARIUM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENINGKATAN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>		
		129.1 Penanggung Jawab/Pengarah	OB	2,500,000
		129.2 Ketua	OB	1,750,000
		129.3 Wakil Ketua		
9.1.2.25.04.01.001		a. Bidang Kependudukan	OB	1,500,000
		b. Bidang Pencatatan Sipil	OB	1,500,000
		c. Bidang Pengolahan Data dan Informasi	OB	1,500,000
		d. Sekretaris	OB	1,250,000
9.1.2.25.04.01.001		e. Anggota	OB	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	130	<b>HONORARIUM TIM VALIDASI DATA PMKS DAN PSKS</b>		
		130.1 Penanggung Jawab	OB	750,000
		130.2 Koordinator/Ketua	OB	700,000
		130.3 Sekretaris	OB	650,000
9.1.2.25.04.01.001		130.4 Anggota	OB	600,000
9.1.2.25.04.01.001	131	<b>HONORARIUM PETUGAS PENGOLAH DATA STATISTIK PERTANIAN</b>		
		131.1 Koordinator Statistik Kabupaten	OB	250,000
		131.2 Petugas Statistik Kabupaten	OB	200,000
		131.3 Petugas Statistik Kecamatan (Mantri Tani)	OB	150,000
9.1.2.25.04.01.001	132	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS SWAKELOLA DAK PERTANIAN KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		132.1 Ketua	OB	400,000
		132.2 Sekretaris	OB	300,000
		132.3 Anggota	OB	200,000
9.1.2.25.04.01.001	133	<b>HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH</b>		
		133.1 Ketua	OB	750,000
		133.2 Sekretaris	OB	500,000
		133.3 Anggota	OB	400,000
9.1.2.25.04.01.001	134	<b>HONORARIUM TIM PENILAI KELEMBAGAAN PETANI DAN PELAKU PERTANIAN BERPRESTASI</b>		
		134.1 Ketua	OB	750,000
		134.2 Sekretaris	OB	500,000
		134.3 Anggota	OB	400,000
9.1.2.26.03.01.001	135	<b>HONORARIUM KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN</b>		
		135.1 Pembina	OB	1,500,000
		135.2 Ketua	OB	1,200,000
		135.3 Sekretaris	OB	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001		135.4 Anggota	OB	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	136	<b>HONORARIUM PETUGAS PENGELOLA DATA ALSINTAN</b>	OB	200,000
9.1.2.25.04.01.001	137	<b>HONORARIUM PENYULUH HONORER</b>	OB	1,770,000
9.1.2.25.04.01.001	138	<b>HONORARIUM PENYULUH THL-TBPP</b>		
		138.1 Penyuluh THL-TBPP	OB	1,770,000
		138.2 Penyuluh THL-TBPP	OB	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	139	<b>HONORARIUM PENDAMPING SISWA DAN UANG SAKU PESERTA KEGIATAN OLIMPIADE SAINS SD DAN SMP TINGKAT KABUPATEN. PROVINSI DAN NASIONAL</b>		
		139.1 Tingkat Kabupaten		
		a. Honorarium Pendamping	OK	350,000
		b. Uang Saku Peserta/Siswa	OK	150,000
		139.2 Tingkat Provinsi		
		a. Honorarium Pendamping	OK	550,000
		b. Uang Saku Peserta/Siswa	OK	300,000
		139.3 Tingkat Nasional		
		a. Honorarium Pendamping	OK	750,000
		b. Uang Saku Peserta/Siswa	OK	500,000
9.1.2.25.01.01.001	140	<b>HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA EVENT /LOMBA KEPARIWISATAAN</b>		
		140.1 Panitia Lomba	OK	500,000
		140.2 Juri	OK	1,000,000
		140.3 MC	OK	500,000
		140.4 Rohaniawan	OK	500,000
		140.5 Tim Medis	OK	500,000
		140.6 Petugas Keamanan	OK	500,000
		140.7 Instruktur Senam	OK	500,000
9.1.2.25.04.01.001	141	<b>HONORARIUM FASILITATOR BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)</b>	OB	3,200,000
9.1.2.25.04.01.001	142	<b>HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH PASKIBRAKA</b>		
		142.1 Instruktur /Pelatih Paskibraka	OB	1,500,000
		142.2 Pelatih Tingkat Kabupaten	OJ	60,000
9.1.2.25.04.01.001	143	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN SOAL TES PASKIBRAKA</b>	OK	500,000
9.1.2.25.04.01.001	144	<b>HONORARIUM TIM TEPRA PERANGKAT DAERAH</b>		
		144.1 Koordinator/Ketua	OB	1,500,000
		144.2 Sekretaris	OB	1,250,000
		144.3 Anggota	OB	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	145	<b>HONORARIUM PETUGAS ADMIN TEPRA DAN PETUGAS ADMIN RUP OPD</b>		
		145.1 Petugas Admin TEPRA	OB	1,500,000
		145.2 Petugas Admin RUP	OB	1,500,000
9.1.2.25.04.01.001	146	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI PERATURAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF</b>		
		146.1 Pengarah	OB	750,000



KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		146.2 Penanggung Jawab	OB	700,000
		146.3 Ketua	OB	650,000
		146.4 Wakil Ketua	OB	600,000
		146.5 Sekretaris	OB	500,000
		146.6 Anggota	OB	350,000
9.1.2.25.04.01.001	147	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI INDEKS HARGA KOMODITI</b>		
		147.1 Penanggung Jawab	OB	750,000
		147.2 Ketua	OB	600,000
		147.3 Sekretaris	OB	500,000
		147.4 Anggota	OB	400,000
9.1.2.25.04.01.001	148	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI KINERJA KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK (KKMB)</b>		
		148.1 Pengarah	OB	4,400,000
		148.2 Penanggungjawab	OB	4,000,000
		148.3 Ketua	OB	3,500,000
		148.4 Wakil Ketua	OB	3,350,000
		148.5 Sekretaris	OB	3,300,000
		148.6 Anggota	OB	3,200,000
		148.7 Sekretariat Keuangan Mitra Bank		
		a. Ketua	OB	650,000
		b. Wakil Ketua	OB	600,000
		c. Sekretaris	OB	500,000
		d. Anggota	OB	400,000
9.1.2.25.01.01.001	149	<b>HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN 'TK. I. TKT. II. TKT. III DAN TKT. IV. PELATIHAN DASAR ASN GOLONGAN II DAN GOL. III 'SERTA PELATIHAN DASAR CALON APARATUR SIPIL NEGARA GOLONGAN I. GOLONGAN II 'KATEGORI 1 DAN/ATAU KATEGORI 2 'DAN/ATAU KATEGORI 2 GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER 'DAN/ATAU GOLONGAN III YANG DIANGKAT DARI TENAGA HONORER KATEGORI 1</b>		
		149.1 Honorarium Panitia Penyelenggara		
		a. Penanggungjawab	OK	900,000
		b. Ketua	OK	800,000
		c. Wakil Ketua	OK	800,000
		d. Anggota	OK	600,000
		149.2 Honorarium Tenaga Akademis		
		a. Penceramah		
		1. Staregi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	OJP	1,000,000
		2. Muatan Teknis Subtansi Lembaga	OJP	1,000,000
		3. Studi Lapangan (agenda II dan III)	OJP	1,000,000
		4. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Nilai-Nilai ASN	OJP	250,000
		b. Pengajar		
		1. Pengampu Materi		
		1.1 Overviuw Kebijakan	OJP	250,000
		1.2 Dinamika kelompok	OJP	250,000
		1.3 Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara	OJP	250,000
		1.4 Analisis Isu Kontemporer	OJP	250,000
		1.5 Kesiapan Bela Negara	OJP	250,000
		1.6 Berorientasi Pelayanan	OJP	250,000
		1.7 Pembentukan sifat dan perilaku disiplin	OJP	250,000
		1.8 Akuntabilitas ASN	OJP	250,000
		1.9 Kompeten	OJP	250,000
		1.10 Harmonis	OJP	250,000
		1.11 Loyal	OJP	250,000
		1.12 Adaptif	OJP	250,000
		1.13 Kolaboratif	OJP	250,000
		1.14 Nasionalisme	OJP	250,000
		1.15 Etika Publik	OJP	250,000
		1.16 Komitmen Mutu	OJP	250,000
		1.17 Anti korupsi	OJP	250,000
		1.18 Manajemen ASN	OJP	250,000
		1.19 Smarth ASN	OJP	250,000
		1.20 Whole Government	OJP	250,000
		1.21 Pelayanan Publik	OJP	250,000
		1.22 Konsepsi Aktualisasi	OJP	250,000
		1.23 Penjelasan Aktualisasi	OJP	250,000
		1.24 Pembekalan Habitiasi	OJP	250,000
		1.14 Study lapangan	OJP	250,000
		1.15 Reviuw Kebijakan penyelenggaraan Diklat	OJP	250,000
		2. Pembimbing (Coach & Mentor)		
		2.1 Rancangan dan Pembimbingan Aktualisasi		
		- Coach	OJP	1,000,000
		- Pembimbing Pra Evaluasi	OJP	1,000,000
		2.2 Rancangan dan Pembimbingan Aktualisasi		
		- Coach		
		2.2 Evaluasi Rancangan Aktualisasi		
		- Penguji	OJP	250,000
		- Coach	OJP	250,000
		- Mentor	OJP	200,000
		2.3 Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi		
		- Coach	OJP	200,000
		2.4 Evaluasi Aktualisasi		
		- Penguji	OJP	250,000
		- Coach	OJP	250,000
		- Mentor	OJP	200,000
		2.5 Evaluasi Aktualisasi		
		- Penguji	OJP	200,000
		2.5 Evaluasi Akademik	OJP	250,000
		149.3 Instruktur Senam	OJP	250,000
		149.4 Tenaga Kesehatan	OK	300,000
9.1.2.25.01.01.001	150	<b>HONORARIUM PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA</b>		
		150.1 Honorarium Panitia Penerimaan CASN		
		a. Pengarah	OB	500,000
		b. Penanggungjawab	OB	450,000
		c. Ketua	OB	400,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		d. Wakil Ketua	OB	350,000
		e. Sekertaris	OB	300,000
		f. Anggota	OB	250,000
	150.2	Honorarium Tim Seleksi Administrasi dan verifikasi		
		a. Kordinator	OB	300,000
		b. Administrator Instansi	OB	1,000,000
		c. Verifikator	OB	500,000
		d. Petugas Administrasi Berkas	OB	500,000
	150.3	Honorarium Tim Pelaksana Seleksi		
		a. Ketua	OB	750,000
		b. Wakil Ketua	OB	500,000
		c. Kordinator	OB	300,000
		d. Tim Pengawas	OH	100,000
		e. Tim Keamanan	OH	100,000
	150.4	Honorarium Tim Pengawasan		
		a. Ketua	OB	350,000
		b. Anggota	OB	300,000
9.1.2.25.04.01.001	151	<b>HONORARIUM TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		151.1 Penanggungjawab	OB	1,000,000
		151.2 Verifikator DAK	OB	750,000
9.1.2.25.01.01.001	152	<b>HONORARIUM TIM MUSRENBANG RKPd KABUPATEN</b>		
		152.1 Pengarah	OK	2,500,000
		152.2 Penanggungjawab	OK	2,000,000
		152.3 Ketua	OK	1,740,000
		152.4 Anggota	OK	1,500,000
9.1.2.25.01.01.001	153	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI RENSTRA KABUPATEN</b>		
		153.1 Penanggungjawab	OK	3,000,000
		153.2 Ketua	OK	2,750,000
		153.3 Koordinator	OK	2,500,000
		153.4 Anggota	OK	2,000,000
9.1.2.25.01.01.001	154	<b>HONORARIUM PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI</b>		
		154.1 Panitia Seleksi		
		a. Ketua	OB	2,500,000
		b. Sekretaris	OB	2,000,000
		c. Anggota	OB	2,000,000
		154.2 Sekretariat Panitia		
		a. Ketua	OB	1,000,000
		b. Anggota	OB	500,000
9.1.2.25.01.01.001	155	<b>HONORARIUM PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI REKRUITMEN DOKTER NUSANTARA SEHAT DAERAH</b>		
		155.1 Panitia Seleksi		
		a. Pengarah	OB	1,500,000
		b. Pembina	OB	1,250,000
		c. Ketua	OB	1,000,000
		d. Sekretaris	OB	850,000
		e. Anggota	OB	750,000
		155.2 Sekretariat Panitia		
		a. Ketua	OB	750,000
		b. Sekretaris	OB	500,000
		c. Anggota	OB	250,000
9.1.2.25.01.01.001	156	<b>HONORARIUM PANITIA SELEKSI PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN NON ASN</b>		
		156.1 Ketua	OB	1,000,000
		156.2 Sekretaris	OB	850,000
		156.3 Anggota	OB	750,000
9.1.2.26.03.01.001	157	<b>HONORARIUM KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI</b>		
		157.1 Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD	OB	3,000,000
		157.2 Tenaga Ahli Fraksi	OB	3,000,000
		157.3 Badan Kehormatan	OB	3,000,000
		157.4 Bamberda	OB	3,000,000
9.1.2.25.04.01.001	158	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI PEMBANGUNAN. PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI PEMBANGUNAN. PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT</b>		
		158.1 Tim Evaluasi		
		a. Pengarah	OB	2,500,000
		b. Wakil Pengarah	OB	2,250,000
		c. Penanggungjawab	OB	2,000,000
		d. Ketua	OB	1,750,000
		e. Wakil Ketua	OB	1,500,000
		f. Sekretaris	OB	1,250,000
		g. Anggota	OB	1,100,000
		158.2 Sekretariat Tim		
		a. Ketua	OB	1,000,000
		b. Sekretaris	OB	750,000
		c. Anggota	OB	500,000
9.1.2.25.01.01.001	159	<b>HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA PELAYANAN JAMA'AH HAJI KABUPATEN 'MALUKU TENGAH</b>		
		159.1 Pengarah	OB	500,000
		159.2 Wakil Pengarah	OB	450,000
		159.3 Penanggungjawab	OB	400,000
		159.4 Ketua/Koordinator	OB	300,000
		159.5 Wakil Ketua	OB	250,000
		159.6 Sekretaris	OB	200,000
		159.7 Anggota	OB	150,000
9.1.2.25.01.01.001	160	<b>HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA SAFARI KEAGAMAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.25.01.01.001	160	160.1 Pengarah	OB	500,000
		160.2 Wakil Pengarah	OB	450,000
		160.3 Penanggungjawab	OB	400,000
		160.4 Ketua/Koordinator	OB	300,000
		160.5 Wakil Ketua	OB	250,000
		160.6 Sekretaris	OB	200,000
		160.7 Anggota	OB	150,000
9.1.2.25.01.01.001	161	<b>HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PEMBINAAN SUMBER DATA MANUSIA</b>		
		161.1 Pengarah	OB	500,000
		161.2 Wakil Pengarah	OB	450,000
		161.3 Penanggungjawab	OB	400,000
		161.4 Ketua/Koordinator	OB	300,000
		161.5 Wakil Ketua	OB	250,000
		161.6 Sekretaris	OB	200,000
9.1.2.25.01.01.001	162	<b>HONORARIUM PANITIA PENANGGUNGJAWAB PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAHAN NEGERI/NEGERI ADMSITRATIF</b>		
		162.1 Pengarah	OB	1,500,000
		162.2 Penanggungjawab	OB	1,100,000
		162.3 Ketua	OB	1,000,000
		162.4 Wakil Ketua	OB	900,000
		162.5 Sekretaris	OB	850,000
		162.6 Anggota	OB	800,000
9.1.2.25.04.01.001	163	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)</b>		
		163.1 Pengarah	OB	1,500,000
		163.2 Penanggungjawab	OB	1,400,000
		163.3 Ketua	OB	1,300,000
		163.4 Wakil Ketua	OB	1,200,000
		163.5 Sekretaris	OB	1,100,000
		163.6 Anggota	OB	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	164	<b>HONORARIUM TIM PENATAAN ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH</b>		
		164.1 Pengarah	OB	1,500,000
		164.2 Penanggungjawab	OB	1,250,000
		164.3 Ketua	OB	1,150,000
		164.4 Wakil Ketua	OB	1,100,000
		164.5 Sekretaris	OB	1,050,000
		164.6 Pengendali Teknis	OB	1,000,000
9.1.2.25.01.01.001	165	<b>HONORARIUM TIM MUSRENBANG RKPD KABUPATEN</b>		
		165.1 Penanggungjawab	OK	450,000
		165.2 Ketua	OK	400,000
		165.3 Sekretaris	OK	300,000
		165.4 Anggota	OK	300,000
9.1.2.25.01.01.001	166	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI RENSTRA KABUPATEN</b>		
		166.1 Penanggungjawab	OK	3,000,000
		166.2 Ketua	OK	2,750,000
		166.3 Koordinator	OK	2,500,000
		166.4 Anggota	OK	2,000,000
9.1.2.25.04.01.001	167	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN RPJMD</b>		
		167.1 Pengarah	OB	1,500,000
		167.2 Pengarah 1	OB	1,500,000
		167.3 Penanggungjawab	OB	1,250,000
		167.4 Ketua	OB	1,000,000
		167.5 Wakil Ketua	OB	850,000
		167.6 Tim Koordinator	OB	850,000
9.1.2.25.04.01.001	168	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN RKPD KABUPATEN</b>		
		168.1 Pengarah 1	OK	1,500,000
		168.2 Pengarah 2	OK	1,500,000
		168.3 Penanggungjawab	OK	1,250,000
		168.4 Ketua	OK	1,000,000
		168.5 Wakil Ketua	OK	850,000
		168.6 Anggota	OK	750,000
9.1.2.25.04.01.001	169	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN LKPJ TAHUNAN BUPATI</b>		
		169.1 Pengarah 1	OK	1,500,000
		169.2 Pengarah 2	OK	1,500,000
		169.3 Penanggungjawab	OK	1,250,000
		169.4 Ketua	OK	1,000,000
		169.5 Wakil Ketua	OK	850,000
		169.6 Anggota	OK	750,000
9.1.2.25.04.01.001	170	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN LKPJ AKHIR MASA JABATAN BUPATI</b>		
		170.1 Pengarah 1	OK	1,500,000
		170.2 Pengarah 2	OK	1,500,000
		170.3 Penanggungjawab	OK	1,250,000
		170.4 Ketua	OK	1,000,000
		170.5 Wakil Ketua	OK	850,000
		170.6 Anggota	OK	750,000
9.1.2.25.04.01.001	171	<b>HONORARIUM ADMIN APLIKASI PELAPORAN DAN INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		
		171.1 Admin KRISNA DAK	OB	500,000
		171.2 Admin WALANG INOVASI	OB	500,000
		171.3 Admin TEPRA KABUPATEN	OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	172	<b>HONORARIUM TIM APLIKASI KRISNA DAK KABUPATEN</b>		
		172.1 User Kepala Bappeda -KRISNA DAK	OB	1,500,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.25.04.01.001	173	172.2 User Admin Kabupaten - KRISNA DAK	OB	1,250,000
		172.3 User Bappeda - KRISNA DAK	OB	1,000,000
		<b>HONORARIUM TIM SEKRETARIAT POKJA AMPL (AIR MINUM DAN PENYEHTATAN - LINGKUNGAN)</b>		
		173.1 Pengarah	OB	1,500,000
		173.2 Penanggungjawab	OB	1,250,000
		173.3 Ketua	OB	1,000,000
		173.4 Wakil Ketua	OB	850,000
9.1.2.25.04.01.001	174	173.5 Sekretaris	OB	750,000
		173.6 Anggota	OB	650,000
		<b>HONORARIUM SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK APBN DAN SEKRETARIAT PELAPORAN DAK TUGAS PEMBANTUAN DAN APBD KABUPATEN</b>		
		174.1 Honorarium Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan DAK. APBN		
		a. Admin Krisna Kabupaten	OB	1,500,000
		b. Verifikator	OB	1,500,000
		174.2 Honorarium Sekretariat Pelaporan DAK. Tugas Pembantuan dan APBD Kabupaten		
9.1.2.25.01.01.001	175	a. Pengarah	OB	750,000
		b. Penanggungjawab	OB	650,000
		c. Ketua	OB	300,000
		d. Anggota	OB	250,000
		<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA SISTIM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		175.1 Pengarah	OB	1,500,000
		175.2 Penanggung Jawab	OB	1,300,000
9.1.2.25.01.01.001	176	175.3 Ketua	OB	1,250,000
		175.4 Wakil Ketua	OB	1,150,000
		175.5 Sekretaris	OB	1,000,000
		175.6 Anggota	OB	750,000
		175.7 Koordinator Verifikator	OB	1,000,000
		175.8 Anggota Verifikator	OB	750,000
		175.9 Koordinator /Admin Kabupaten	OB	1,000,000
9.1.2.25.01.01.001	176	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA SISTIM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PERANGKAT DAERAH</b>		
		176.1 Penanggung Jawab	OB	1,000,000
		176.2 Ketua/Koordinator	OB	750,000
		176.3 Anggota	OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	177	<b>HONORARIUM OPERATOR WEBSITE BAPPLITBANGDA</b>	OB	1,500,000
9.1.2.25.04.01.001	178	<b>HONORARIUM TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH</b>		
		178.1 Pengarah	OB	1,500,000
		178.2 Penanggungjawab	OB	1,400,000
		178.3 Koordinator	OB	1,300,000
		178.4 Ketua	OB	1,200,000
		178.5 Wakil Ketua	OB	1,100,000
		178.6 Sekretaris	OB	1,000,000
		178.7 Anggota (Kabag Lingkup Setda)	OB	950,000
		178.8 Anggota (Kasie pada Bidang Aset)	OB	850,000
		178.9 Anggota (Staf pada Bidang Aset)	OB	750,000
9.1.2.25.04.01.001	179	<b>HONRARIUM TIM PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH</b>	OK	9,000,000
9.1.2.25.04.01.001	180	<b>HONORARIUM TIM PEMBAHASAN. PENYUSUNAN DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH</b>	OK	8,250,000
9.1.2.25.04.01.001	181	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH</b>		
		181.1 Ketua	OK	7,500,000
		181.2 Wakil Ketua	OK	6,750,000
		181.3 Sekretaris	OK	6,000,000
		181.4 Anggota	OK	3,750,000
9.1.2.25.04.01.001	182	<b>HONORARIUM TIM KERJA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH</b>	OK	9,000,000
9.1.2.25.04.01.001	183	<b>HONORARIUM TIM PELELANGAN BARANG MILIK DAERAH</b>		
		183.1 Ketua	OK	6,500,000
		183.2 Wakil Ketua	OK	6,000,000
		183.3 Sekretaris	OK	5,500,000
		183.4 Anggota	OK	5,000,000
		183.5 Dokumentasi	OK	250,000
9.1.2.25.04.01.001	184	<b>HONORARIUM TIM MONITORING DAN REKON BARANG MILIK DAERAH</b>		
		184.1 Pengarah I	OK	2,500,000
		184.2 Pengarah II	OK	2,000,000
		184.3 Penanggungjawab	OK	1,700,000
		184.4 Ketua	OK	1,650,000
		184.5 Wakil Ketua	OK	1,500,000
		184.6 Sekretaris I	OK	1,250,000
		184.7 Sekretaris II	OK	1,250,000
		184.8 Anggota	OK	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	185	<b>HONORARIUM TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH</b>		
		185.1 Pengarah 1	OK	10,000,000
		185.2 Pengarah 2	OK	9,500,000
		185.3 Anggota Pengarah	OK	9,000,000
		185.4 Ketua	OK	8,000,000
		185.5 Wakil Ketua	OK	7,000,000
		185.6 Sekretaris 1	OK	1,250,000
		185.7 Sekretaris 2	OK	1,250,000
		185.8 Anggota		1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	186	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH</b>		
		186.1 Pengarah	OB	1,000,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		186.2 Penanggungjawab	OB	900,000
		186.3 Ketua	OB	850,000
		186.4 Wakil Ketua	OB	800,000
		186.5 Sekretaris	OB	750,000
		186.6 Anggota	OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	187	<b>HONORARIUM TIM REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH</b>		
		187.1 Pengarah	OB	1,500,000
		187.2 Penanggungjawab	OB	1,400,000
		187.3 Ketua	OB	1,250,000
		187.4 Wakil Ketua	OB	1,000,000
		187.5 Sekretaris	OB	900,000
		187.6 Anggota	OB	750,000
9.1.2.25.04.01.001	188	<b>HONORARIUM FASILITATOR DAK PERTANIAN</b>	OB	3,000,000
9.1.2.25.04.01.001	189	<b>HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA</b>		
		189.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1,500,000
		189.2 Honorarium Beracara	OK	1,500,000
9.1.2.25.01.01.001	190	<b>HONORARIUM TIM PENYELENGGARA KESEHATAN JAMA'AH HAJI KABUPATEN 'MALUKU TENGAH</b>		
		190.1 Penanggungjawab	OB	500,000
		190.2 Ketua	OB	450,000
		190.3 Wakil Ketua	OB	400,000
		190.4 Sekretaris	OB	350,000
		190.5 Anggota	OB	300,000
9.1.2.25.01.01.001	191	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PATEN</b>		
		191.1 Pengarah	OB	1,500,000
		191.2 Penanggung jawab	OB	1,400,000
		191.3 Ketua	OB	1,250,000
		191.4 Wakil Ketua	OB	1,100,000
		191.5 Sekretaris	OB	1,000,000
		191.6 Anggota	OB	750,000
9.1.2.25.04.01.001	192	<b>HONORARIUM PEGAWAI HONORER SATPOL PP</b>	OB	2,700,000
9.1.2.25.04.01.001	193	<b>HONORARIUM PEGAWAI HONORER PEMADAM KEBAKARAN</b>	OB	2,600,000
9.1.2.25.01.01.001	194	<b>HONORARIUM TIM REKONSILIASI DAN VERIPKASI ASET. KEWAJIBAN. EKUITAS.PENDAPATAN. BELANJA. PEMBIAYAAN LO DAN BEBAN</b>		
		194.1 Ketua	OB	600,000
		194.2 Wakil Ketua	OB	550,000
		194.3 Sekretaris	OB	500,000
		194.4 Wakil Sekretaris	OB	450,000
		194.5 Anggota Gol. III	OB	400,000
		194.6 Anggota Gol. II	OB	300,000
9.1.2.25.01.01.001	195	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/ SEMESTERAN DAN TAHUNAN OPD</b>		
		195.1 Penanggung Jawab	OB	1,250,000
		195.2 Koordinator/Ketua	OB	1,100,000
		195.3 Anggota	OB	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	196	<b>HONORARIUM POKJA PROGRAM SUBSIDI BUNGA SKIM KREDIT USAHA MIKRO KREATIF</b>		
		196.1 Pengarah I	OB	1,500,000
		196.2 Pengarah II	OB	1,300,000
		196.3 Pembina	OB	1,100,000
		196.4 Koordinator Pengawas	OB	900,000
		196.5 Koordinator Keuangan	OB	900,000
		196.6 Ketua	OB	850,000
		196.7 Sekretaris	OB	700,000
		196.8 Anggota	OB	550,000
9.1.2.25.04.01.001	197	<b>HONORARIUM PETUGAS ADMIN APLIKASI JAGA</b>	OB	1,500,000
9.1.2.25.04.01.001	198	<b>HONORARIUM OPERATOR SERVER</b>	OB	1,500,000
9.1.2.25.04.01.001	199	<b>HONORARIUM DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN</b>		
		199.1 Ketua	OB	2,000,000
		199.2 Wakil Ketua	OB	1,500,000
		199.3 Sekretaris	OB	1,250,000
		199.4 Anggota	OB	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	200	<b>HONORARIUM JASA PENDAMPING/FASILITATOR KONTRAKTUAL</b>		
		200.1 Jasa Pendamping Kegiatan Konstruksi Bangunan	OB	1,500,000
		200.2 Fasilitator Kegiatan Konstruksi Bangunan	OB	1,500,000
9.1.2.25.04.01.001	201	<b>HONORARIUM JASA PENGAWASAN KEGIATAN KONTRAKTUAL</b>		
		201.1 Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan	OB	7,500,000
		201.2 Pengawas Administrasi Kontrak	OB	7,500,000
		201.3 Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses	OB	7,500,000
9.1.2.25.01.01.001	202	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL DATA KEPENDUDUKAN PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI</b>		
		202.1 Pengarah	OB	750,000
		202.2 Penanggung jawab	OB	700,000
		202.3 Ketua	OB	650,000
		202.4 Wakil Ketua	OB	600,000
		202.5 Sekretaris	OB	550,000
		202.6 Anggota	OB	500,000
9.1.2.25.01.01.001	203	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)</b>		
		203.1 Ketua	OB	650,000
		203.2 Wakil Ketua	OB	600,000
		203.3 Sekretaris	OB	500,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		203.4 Anggota/Admin OPD	OB	450,000
9.1.2.25.04.01.001	204	HONORARIUM ENUMERATOR PEMANTAUAN STOK. PASOKAN DAN HARGA PANGAN	OB	190,000
9.1.2.25.04.01.001	205	HONORARIUM FASILITATOR PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN	OB	200,000
9.1.2.25.04.01.001	206	HONORARIUM FASILITATOR PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN	OB	200,000
9.1.2.25.01.01.001	207	HONORARIUM TIM PENYEDIAAN INFORMASI HARGA BAHAN PANGAN DAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)		
		207.1 Honorarium Tim Pengumpul Data	OK	500,000
		207.2 Honorarium Petugas Pengolah Data	OK	500,000
		207.3 Honorarium Tim Penyusun Narasi	OK	500,000
9.1.2.25.01.01.001	208	HONORARIUM PETUGAS PENYUSUNAN, PEMUTAHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN PANAGAN DAN KERENTANGAN PANGAN		
		208.1 Honorarium Pengolah Data Akses Pangan Tingkat Rumah Tangga	OK	500,000
		208.2 Honorarium Penyusun dan Narasi Akses Pangan Tingkat Rumah Tangga	OK	500,000
9.1.2.25.04.01.001	209	HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	OK	300,000
9.1.2.25.01.01.001	210	HONOR TIM PENYUSUN DOKUMEN SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)		
		210.1 Penanggung jawab	OB	450,000
		210.2 Ketua	OB	400,000
		210.3 Sekretaris	OB	300,000
		210.4 Anggota (Surveyor)	OB	250,000
		210.5 Anggota (Pengolah Data)	OB	250,000
9.1.2.25.01.01.001	211	HONOR TIM PENYUSUNAN DRAFT RANCANGAN KEBIJAKAN DAN HARMONISASI PERATURAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		
		211.1 Penanggung jawab	OB	450,000
		211.2 Ketua	OB	400,000
		211.3 Sekretaris	OB	300,000
		211.4 Anggota	OB	250,000
9.1.2.25.04.01.001	212	HONORARIUM PETUGAS DESA SAMPEL DAN PETUGAS PENGOLAH DATA STATISTIK PERIKANAN		
		212.1 Honorarium Petugas Desa Sampel	OB	85,000
		212.2 Honorarium Petugas Pengolah Data Statistik Perikanan	OB	35,000
9.1.2.25.04.01.001	213	HONORARIUM PETUGAS PENYULUH PERIKANAN		
		213.1 Penyuluh Perikanan (Pegawai Honorer)	OB	1,700,000
		213.2 Penyuluh Perikanan Terampil	OB	1,400,000
9.1.2.25.01.01.001	214	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN KOMITE AUDIT		
		214.1 Ketua	OB	650,000
		214.2 Sekretaris	OB	500,000
		214.3 Anggota	OB	450,000
9.1.2.25.04.01.001	215	HONORARIUM TIM LINTAS SEKTOR UNTUK PERCEPATAN TARGET NASIONAL		
		215.1 Pengarah	OB	1,500,000
		215.2 Penanggung jawab	OB	1,250,000
		215.3 Ketua	OB	1,000,000
		215.4 Wakil Ketua	OB	850,000
		215.5 Sekretaris	OB	750,000
		215.6 Anggota	OB	750,000
9.1.2.25.01.01.001	216	HONORARIUM TIM INOVASI PRODUK	OB	500,000
9.1.2.25.01.01.001	217	HONORARIUM TIM TERPADU KEAMANAN DAN KEBERSIHAN PASAR	OB	500,000
9.1.2.25.01.01.001	218	HONORARIUM TIM PEMANTAU HARGA STOK DAN BARANG	OB	500,000
9.1.2.25.01.01.001	219	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA PASAR MURAH	OK	200,000
9.1.2.25.04.01.001	220	HONORARIUM PETUGAS PENDATAAN SUMBER DAYA INDUSTRI		
		220.1 Industri Kabupaten	OB	500,000
		220.2 Industri Kecamatan	OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	221	HONORARIUM PETUGAS PENJAGA OUTLET PRODUK KABUPATEN (DKI JAKARTA)	OB	3,750,000
9.1.2.25.04.01.001	222	HONORARIUM PETUGAS JAGA PASAR	OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	223	HONORARIUM OPERATOR PEMANTAU HARGA DAN STOK BARANG	OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	224	HONORARIUM OPERATOR SISTIM INFORMASI KREDIT	OB	600,000
9.1.2.25.01.01.001	225	HONORARIUM TIM PENYELESAIAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL		
		225.1 Pengarah	OB	1,000,000
		225.2 Ketua	OB	850,000
		225.3 Wakil Ketua	OB	750,000
		225.4 Sekretaris	OB	650,000
		225.5 Verifikator	OB	600,000
		225.6 Operator SAPK	OB	600,000
9.1.2.25.04.01.001	226	HONORARIUM TIM UJI KOMPETENSI (ASESOR)	OP	1,000,000
9.1.2.25.01.01.001	227	HONORARIUM TIM PENYELESAIAN KARPEG		
		227.1 Pengarah	OB	1,000,000
		227.2 Ketua	OB	850,000
		227.3 Wakil Ketua	OB	750,000
		227.4 Sekretaris	OB	650,000
		227.5 Verifikator	OB	600,000
		227.6 Tenaga Administrator	OB	600,000
9.1.2.25.01.01.001	228	HONORARIUM TIM PENYELESAIAN KARIS/KARSU		
		228.1 Pengarah	OB	1,000,000
		228.2 Ketua	OB	850,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.25.04.01.001	228	228.3 Wakil Ketua	OB	750,000
		228.4 Sekretaris	OB	650,000
		228.5 Verifikator	OB	600,000
		228.6 Tenaga Administrator	OB	600,000
			OB	600,000
9.1.2.25.01.01.001	229	<b>HONORARIUM TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PUPNS</b>		
		229.1 Pengarah	OB	1,000,000
		229.2 Ketua	OB	850,000
		229.3 Wakil Ketua	OB	750,000
		229.4 Sekretaris	OB	650,000
9.1.2.25.04.01.001	230	229.5 Verifikator	OB	600,000
		229.6	OB	600,000
			OB	600,000
		<b>HONORARIUM TIM SELEKSI UJIAN DINAS / PENYESUAIAN IJAZAH</b>		
		230.1 Pengarah	OB	750,000
9.1.2.25.04.01.001	231	230.2 Penanggung Jawab	OB	700,000
		230.3 Ketua	OB	650,000
		230.4 Wakil Ketua	OB	600,000
		230.5 Sekretaris	OB	500,000
		230.6 Anggota	OB	450,000
9.1.2.25.04.01.001	231	<b>HONORARIUM SUMPAH JANJI PNS</b>		
		231.1 Pengambil Sumpah	OK	700,000
		231.2 Saksi Sumpah	OK	500,000
9.1.2.25.04.01.001	232	<b>HONORARIUM PANSIMAS</b>		
		232.1 District Project Management Unit (DPMU)	OB	750,000
		232.2 Panitia Kemitraan (PAKEM)	OB	600,000
9.1.2.25.04.01.001	233	<b>HONORARIUM PETUGAS E-MON DAK</b>		
			OB	1,300,000
9.1.2.25.01.01.001	234	<b>HONORARIUM UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)</b>		
		234.1 Pengawas Ujian	OK	300,000
		234.2 Asessor	OK	300,000
9.1.2.25.01.01.001	235	<b>HONORARIUM SATGAS PENANGANAN COVID 19 DI KECAMATAN</b>		
		235.1 Koordinator	OB	750,000
		235.2 Ketua I	OB	700,000
		235.3 Ketua II	OB	700,000
		235.4 Sekretaris	OB	650,000
9.1.2.25.04.01.001	236	235.5 Operator	OB	500,000
		235.6 Anggota	OB	400,000
9.1.2.25.04.01.001	236	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD</b>		
		236.1 Penanggung Jawab	OB	1,650,000
		236.2 Ketua	OB	1,500,000
		236.3 Wakil Ketua	OB	1,250,000
		236.4 Sekretaris	OB	1,100,000
9.1.2.25.04.01.001	237	236.5 Anggota	OB	1,000,000
		<b>HONORARIUM TIM BAZNAS KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		237.1 Ketua	OB	2,500,000
		237.2 Wakil Ketua	OB	2,250,000
9.1.2.25.04.01.001	238	237.3 Sekretaris	OB	2,000,000
		237.4 Anggota	OB	1,750,000
9.1.2.25.04.01.001	238	<b>HONORARIUM PETUGAS PENDATA SUMBER DAYA INDUSTRI DI KABUPATEN</b>		
			OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	239	<b>HONORARIUM TENAGA TEKNIS PETERNAKAN</b>		
			OB	80,000
9.1.2.26.03.01.001	240	<b>HONORARIUM TENAGA OUTSOURCHING</b>		
		240.1 Sarjana (S2)	OB	1,770,000
		240.2 Sarjana (S1)	OB	1,590,000
9.1.2.25.04.01.001	241	<b>HONORARIUM FASILITATOR SANITASI MASYARAKAT</b>		
			OB	3,000,000
9.1.2.26.03.01.001	242	<b>HONORARIUM INSTRUKTUR MTQ/PESPARAWI</b>		
			OB	2,500,000
9.1.2.25.04.01.001	243	<b>HONORARIUM PANITIA PASAR MURAH</b>		
			OB	200,000
9.1.2.25.04.01.001	244	<b>HONORARIUM PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PRATAMA</b>		
		244.1 Panitia		
		Ketua	OB	2,500,000
		Anggota	OB	2,000,000
		Asessor	OB	1,000,000
9.1.2.25.01.01.001	245	244.2 Sekretariat		
		Ketua	OB	1,000,000
		Anggota	OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	246	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAK SPAM</b>		
			OB	2,430,000
9.1.2.25.01.01.001	247	<b>HONORARIUM TIM TERPADU PENERTIBAN FASILITAS PASAR</b>		
			OB	500,000
9.1.2.25.01.01.001	248	<b>HONORARIUM PENGELOLA MANAGEMENT. DAN JASA MEDIS PARAMEDIS 'DANA JKN</b>	Triwulan	460,000,000
9.1.2.25.01.01.001	249	<b>HONORARIUM PENGELOLA DANA JKN</b>	Triwulan	1,882,500,000
9.1.2.25.01.01.001	250	<b>HONORARIUM PENGELOLA PASEIN COVID 19</b>	Triwulan	1,600,000,000
9.1.2.25.04.01.001	251	<b>HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN</b>		
			OB	1,700,000
9.1.2.25.04.01.001	251	<b>HONORARIUM TIM REKONSIALIASI PENYETORAN PAJAK-PAJAK PUSAT YANG DIPUNGUT 'DAN DISETOR KE REKENING KAS UMUM NEGARA (RKUN)</b>		
		251.1 Penanggungjawab	OB	3,500,000
		251.2 Koordinator	OB	3,000,000
		251.3 Ketua	OB	2,500,000
		251.4 Sekretaris	OB	2,000,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.25.04.01.001	251	251.5 Pengendali Teknis	OB	1,750,000
		251.6 Anggota	OB	1,500,000
	252	<b>HONORARIUM TIM PENANGGULANGAN STUNTING DAN SEKRETARIAT TIM PENANGGULANGAN STUNTING KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		252.1 Tim Penanggulangan		
		a. Pengarah	OB	1,500,000
		b. Penanggung Jawab	OB	1,250,000
		c. Ketua	OB	1,000,000
		d. Wakil Ketua	OB	850,000
		e. Sekretaris	OB	750,000
		f. Koordinator	OB	700,000
		g. Anggota	OB	600,000
		252.2 Sekretariat Tim		
		a. Ketua	OB	750,000
		b. Anggota	OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	253	<b>HONORARIUM TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD) KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		253.1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)		
		a. Pengarah	OB	2,250,000
		b. Koordinator	OB	2,000,000
		c. Sekretaris I	OB	1,750,000
		d. Sekretaris II	OB	1,600,000
		e. Anggota	OB	1,500,000
		253.2 Sekretariat Tim		
		a. Anggota	OB	750,000
9.1.2.25.04.01.001	254	<b>HONORARIUM PENDAMPING/PETUGAS LAPANGAN</b>		
			OB	200,000
9.1.2.25.04.01.001	255	<b>HONORARIUM TIM ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH</b>		
		255.1 Pengarah	OB	1,500,000
		255.2 Penanggungjawab	OB	1,250,000
		255.3 Ketua	OB	1,000,000
		255.4 Wakil Ketua	OB	850,000
		255.5 Sekretaris	OB	750,000
		255.6 Anggota	OB	650,000
9.1.2.25.04.01.001	256	<b>HONORARIUM TIM KAJIAN DAN ANALISIS RENCANA PEMEKARAN WILAYAH</b>		
		256.1 Pengarah	OB	1,500,000
		256.2 Penanggungjawab	OB	1,250,000
		256.3 Ketua	OB	1,000,000
		256.4 Wakil Ketua	OB	850,000
		256.5 Sekretaris	OB	750,000
		256.6 Anggota	OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	257	<b>HONORARIUM SATGAS PENANGANAN COVID -19</b>		
		257.1 Ketua	OB	2,250,000
		257.2 Wakil Ketua	OB	2,000,000
		257.3 Sekretaris	OB	1,500,000
		257.4 Wakil Sekertaris	OB	700,000
		257.5 Ketua Bagian	OB	600,000
		257.6 Ketua Bidang	OB	600,000
		257.7 Anggota Bidang	OB	450,000
		257.8 Anggota Sekertaris	OB	400,000
9.1.2.25.04.01.001	258	<b>HONORARIUM PANSUS DPRD</b>		
		258.1 Ketua	OB	3,500,000
		258.2 Wakil Ketua	OB	3,000,000
		258.3 Sekretaris	OB	2,500,000
		258.4 Anggota	OB	2,000,000
9.1.2.25.01.01.001	259	<b>HONORAIUM PERSONIL PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALPOS - PB)</b>		
		259.1 Pengarah	OB	2,250,000
		259.2 Penanggungjawab	OB	2,000,000
		259.3 Pengawas	OB	1,500,000
		259.4 Manager	OB	750,000
		259.5 Koordinator Administrasi	OB	600,000
		259.6 Sarana dan Prasarana	OB	500,000
		259.7 Keuangan	OB	450,000
		259.8 Dokumentasi	OB	400,000
		259.9 Supervisor	OB	350,000
9.1.2.25.01.01.001	260	<b>HONORARIUM TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PASCA BENCANA</b>		
		260.1 Ketua	OB	4,500,000
		260.2 Wakil Ketua	OB	4,250,000
		260.3 Sekretaris	OB	4,000,000
		260.4 Wakil Sekertaris	OB	3,750,000
		260.5 Anggota	OB	3,000,000
		260.6 Staf Golongan III	OB	3,000,000
		260.7 Staf Golongan II	OB	2,500,000
9.1.2.25.01.01.001	261	<b>HONORARIUM TIM PEMBAHASAN RANPERBUP</b>		
		261.1 Pengarah	OP	9,000,000
		261.2 Pembina	OP	8,500,000
		261.3 Ketua	OP	8,000,000
		261.4 Sekretaris	OP	7,500,000
		261.5 Anggota	OP	6,000,000
9.1.2.25.01.01.001	262	<b>HONORAIUM TIM ASISTENSI PENYUSUNAN RANPERDA</b>		
		262.1 Pengarah	OK	9,000,000
		262.2 Pembina	OK	8,500,000
		262.3 Ketua	OK	8,000,000
		262.4 Sekretaris	OK	7,500,000
		262.5 Anggota	OK	6,000,000
9.1.2.25.01.01.001	263	<b>HONORAIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI &amp; INFORMASI HUKUM (JDIH)</b>		
		263.1 Pengarah	OK	9,000,000



KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.25.01.01.001	264	263.2 Pembina	OK	8,500,000
		263.3 Ketua	OK	8,000,000
		263.4 Sekretaris	OK	7,500,000
		263.5 Anggota	OK	6,000,000
		<b>HONORARIUM TIM POKJA DAN SEKRETARIAT TIM POKJA</b>		
		264.1 Honorarium Tim Pokja		
		a. Pengarah	OB	3,000,000
		b. Penanggungjawab	OB	2,800,000
		c. Ketua	OB	2,400,000
		d. Wakil Ketua	OB	2,300,000
		e. Sekretaris	OB	2,200,000
		f. Anggota	OB	2,100,000
		264.2 Honorarium Sekretariat Tim Pokja		
		a. Ketua	OB	1,000,000
		b. Wakil Ketua	OB	750,000
		c. Sekretaris	OB	500,000
		d. Anggota	OB	400,000
		<b>HONORARIUM TIM KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD. BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b>		
		265.1 Pembina	OK	3,000,000
		265.2 Wakil pembina	OK	2,750,000
9.1.2.25.01.01.001	265	265.3 Pengarah	OK	2,500,000
		265.4 Koordinator I	OK	2,250,000
		265.5 Koordinator II	OK	2,250,000
		265.6 Koordinator III	OK	2,250,000
		265.7 Ketua	OK	2,000,000
		265.8 Sekretaris	OK	1,750,000
		265.9 Anggota	OK	1,600,000
		265.10 Staf Gol. III	OK	1,600,000
		265.11 Staf Gol. II	OK	1,450,000
		<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN KUA/PPAS</b>		
		266.1 Pengarah	OB	1,500,000
		266.2 Penanggungjawab	OB	1,250,000
		266.3 Ketua	OB	1,000,000
		266.4 Wakil Ketua	OB	850,000
		266.5 Sekretaris	OB	750,000
		266.6 Anggota	OB	750,000
		<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN KUA/PPAS PERUBAHAN</b>		
		267.1 Pengarah	OB	1,500,000
		267.2 Penanggungjawab	OB	1,250,000
		267.3 Ketua	OB	1,000,000
		267.4 Wakil Ketua	OB	850,000
		267.5 Sekretaris	OB	750,000
		267.6 Anggota	OB	750,000
9.1.2.25.01.01.001	268	<b>HONORARIUM TIM PENYELESAIAN SPT TAHUNAN KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		268.1 Pembina	OB	2,000,000
		268.2 Koordinator	OB	1,740,000
		268.3 Ketua	OB	1,500,000
		268.4 Sekretaris	OB	1,300,000
		268.5 Anggota	OB	1,200,000
		<b>HONORARIUM KEGIATAN FORUM LALU LINTAS</b>	OK	58,500,000
		<b>HONORARIUM OPERASI PENERTIBAN HARI-HARI BESAR</b>	OH	300,000
		<b>HONORARIUM PENGATURAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS CAR FREE DAY</b>	OK	100,000
		<b>HONORARIUM TIM EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI</b>		
		272.1 Pengarah	OB	1,500,000
		272.2 Penanggungjawab	OB	1,400,000
		272.3 Ketua	OB	1,500,000
		272.4 Wakil Ketua	OB	1,250,000
		272.5 Sekretaris	OB	1,200,000
		272.6 Anggota	OB	1,000,000
		<b>HONORARIUM TIM INOVASI OPD KAMPUS NEGERI</b>		
		273.1 Pengarah	OB	1,750,000
		273.2 Wakil Pengarah	OB	1,500,000
		273.3 Koordinator	OB	1,250,000
		273.4 Ketua	OB	1,000,000
		273.5 Sekretaris	OB	900,000
		273.6 Anggota	OB	600,000
9.1.2.25.01.01.001	274	<b>HONORARIUM PENANGANAN COVID-19</b>		
		274.1 Petugas Penjaga TPA	OB	2,000,000
		274.2 Petugas Kali Bersih	OB	2,000,000
		274.3 Petugas Angkut Sampah	OB	2,000,000
		<b>HONORARIUM PENYULUH THL-TBPP</b>	OB	1,000,000
		<b>HONORARIUM PETUGAS POSKO COVID KECAMATAN</b>		
		276.1 Kecamatan Seram Utara Barat - SBB	OB	1,200,000
		276.2 Kecamatan Teluk Elpaputih - SBB	OB	1,500,000
		276.3 Kecamatan Salahutu - Ambon	OB	1,800,000
		276.4 Kecamatan Salahutu - SBB	OB	1,800,000
		276.5 Kecamatan Leihitu Barat - Ambon	OB	1,500,000
		276.6 Kecamatan Leihitu - SBB	OB	1,500,000
		276.7 Kecamatan Leihitu - Ambon	OB	1,800,000
		276.8 Kecamatan Saparua - SBB - Masohi - Kulur	OB	1,500,000
		276.9 Kecamatan Saparua - Ambon	OB	1,500,000
		276.10 Kecamatan Seram Utara - Papua Barat	OB	1,500,000
		276.11 Kecamatan Seram Utara Timur Kobi - Kobisadar	OB	1,500,000
		276.12 Kecamatan Banda - Bandara	OB	1,200,000
		276.13 Kecamatan Banda - Pelabuhan	OB	1,800,000
		276.14 Kecamatan Amahai - Kapal Cepat	OB	1,800,000
		276.15 Kecamatan Kota Masohi - Ina Marina	OB	1,800,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.25.01.01.001	276	276.16 Kecamatan Seram Utara Timur Kobi - di Sesuaikan	OB	1,200,000
		276.17 Kecamatan Seram Utara Barat - SBB - di Sesuaikan	OB	1,200,000
	277	<b>HONORARIUM TIM REKONSILIASI DAN PENYETORAN PAJAK -PAJAK PUSAT ATAU DISETOR KE KAS UMUM NEGARA KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		277.1 Pengarah	OB	3,500,000
		277.2 Penanggung jawab	OB	3,250,000
		277.3 Koordinator	OB	2,750,000
		277.4 Ketua	OB	2,500,000
		277.5 Sekretaris	OB	2,000,000
		277.6 Pengendali Teknis	OB	1,750,000
		277.7 Anggota	OB	1,500,000
	278	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN LPPD MASA AKHIR JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>		
		278.1 Pengarah	OB	1,500,000
		278.2 Penanggungjawab	OB	1,400,000
		278.3 Ketua	OB	1,300,000
		278.4 Wakil Ketua	OB	1,200,000
		278.5 Sekretaris	OB	1,100,000
		278.6 Anggota	OB	1,000,000
	279	<b>HONORARIUM TIM KESEHATAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI</b>		
		279.1 Pengarah	OB	500,000
		279.2 Ketua	OB	450,000
		279.3 Wakil Ketua	OB	400,000
		279.4 Sekretaris	OB	350,000
		279.5 Anggota	OB	300,000
9.1.2.25.01.01.001	280	<b>HONORARIUM TIM PROMOSI DAN KIE PROGRAM KKBPK MELALUI MEDIA MASA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR LAINNYA</b>		
		280.1 Pengguna Anggaran	OB	1,000,000
		280.2 PPTK	OB	850,000
9.1.2.25.01.01.001	281	<b>HONORARIUM TIM PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI SARANAN KIE PROGRAM</b>		
		281.1 Pengguna Anggaran	OK	960,000
		281.2 PPTK	OK	960,000
		281.3 Pejabat Pengadaan	OK	619,000
9.1.2.25.01.01.001	282	<b>HONORARIUM SATGAS PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH</b>		
		282.1 Pengarah I	OB	4,500,000
		282.2 Pengarah II	OB	4,500,000
		282.3 Penanggung Jawab	OB	3,500,000
		282.4 Koordinator	OB	3,250,000
		282.5 Ketua	OB	2,750,000
		282.6 Wakil Ketua	OB	2,500,000
		282.7 Sekretaris	OB	2,500,000
		282.8 Operator	OB	2,000,000
		282.9 Anggota Gol III	OB	1,750,000
		282.10 Anggota Gol II	OB	1,650,000
9.1.2.25.01.01.001	283	<b>HONORARIUM TIM PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI SARANAN KIE PROGRAM</b>		
		283.1 Pembina	OB	1,500,000
		283.2 Wakil Pembina	OB	1,450,000
		283.3 Penanggung Jawab	OB	1,250,000
		283.4 Ketua	OB	1,000,000
		283.5 Wakil Ketua	OB	850,000
		283.6 Admin Pengendali Aplikasi	OB	1,000,000
		283.7 Anggota (Koordinator Bidang)	OB	750,000
9.1.2.25.01.01.001	284	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KRISNA DAK FISIK (KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA KABUPATEN)</b>		
		284.1 Penanggung Jawab	OB	1,500,000
		284.2 Pengarah	OB	1,250,000
		284.3 Ketua	OB	1,000,000
		284.4 Verifikator	OB	650,000
		284.5 Anggota	OB	650,000
9.1.2.25.01.01.001	285	<b>HONORARIUM POKJA PKP</b>		
		285.1 Pokja PKP Kotaku	Tahun	144,000,000
		285.2 Pokja PKP	Paket	60,000,000
9.1.2.25.01.01.001	286	<b>HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (DAK)</b>		
		286.1 Narasumber	OJ	500,000
9.1.2.25.01.01.001	286.2	Pendamping Desa	OB	350,000
9.1.2.25.01.01.001	287	<b>HONORARIUM PENYULUH</b>		
		287.1 Pengolah Data	OB	35,000
		287.2 Pendamping Desa	OB	85,000
9.1.2.25.01.01.001	288	<b>HONORARIUM IB</b>	Strow	20,000
9.1.2.25.01.01.001	289	<b>HONORARIUM TIM VERIFIKASI HIBAH</b>		
		289.1 Pengarah	OK	2,500,000
		289.2 Penanggung Jawab	OK	2,000,000
		289.3 Ketua	OK	1,500,000
		289.4 Anggota	OK	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	290	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENILAIAN ASET DAERAH</b>		
		290.1 Pengarah 1	OK	10,000,000
		290.2 Pengarah 2	OK	9,500,000
		290.3 Anggota Pengarah	OK	9,000,000
		290.4 Anggota Pengarah	OK	9,000,000
		290.5 Anggota Pengarah	OK	9,000,000
		290.6 Ketua	OK	7,500,000
		290.7 Wakil Ketua	OK	6,750,000
9.1.2.25.04.01.001	291	<b>HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN</b>		
		291.1 Pengawas Ujian PBJ	OJ	300,000
	291.2	Pengawas Ujian Sertifikasi Dasar Pengadaan Barang/Jasa	OJ	300,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.25.04.01.001	292	291.3 Petugas Kelas Pelatihan PBJ	OJ	500,000
		291.4 Petugas Kelas Latihan Dasar/Prajab	OJ	45,000
		<b>HONORARIUM TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		292.1 Tingkat Pengadilan Negeri		
		a. Ketua	Kali	275,000
		b. Sekretaris	Kali	250,000
		c. Anggota	Kali	225,000
		292.2 Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon		
		a. Ketua	Kali	500,000
		b. Sekretaris	Kali	425,000
		c. Anggota	Kali	350,000
9.1.2.25.01.01.001	293	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL</b>		
		293.1 Pengarah	OB	1,500,000
		293.2 Penanggung Jawab	OB	1,250,000
		293.3 Ketua	OB	1,000,000
		293.4 Sekretaris	OB	750,000
		293.5 Anggota	OB	600,000
	294	<b>HONORARIUM TIM POKJA KLHS</b>		
		294.1 Ketua	OB	1,500,000
		294.2 Wakil Ketua	OB	1,250,000
		294.3 Sekretaris	OB	1,000,000
		294.4 Pokja I	OB	750,000
		294.5 Anggota Pokja 1	OB	650,000
		294.6 Pokja 2	OB	750,000
		294.7 Anggota Pokja 2	OB	650,000
		294.8 Pokja 3	OB	750,000
		294.9 Anggota Pokja 3	OB	650,000
9.1.2.25.01.01.001	295	<b>HONORARIUM TIM PENILAI LOMBA</b>	Orang	3,000,000
	296	<b>HONORARIUM TIM VERIFIKASI ADMINASTRASI BANTUAN SOSIAL</b>		
		296.1 Pengarah	OB	2,000,000
		296.2 Ketua	OB	1,750,000
		296.3 Sekretaris	OB	1,500,000
		296.4 Anggota	OB	1,250,000
	297	<b>HONORARIUM TIM PENYELENGGARA CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH</b>		
		297.1 Pengarah	OB	5,000,000
		297.2 Penaschat	OB	4,750,000
		297.3 Pembina	OB	4,500,000
		297.4 Ketua	OB	4,250,000
		297.5 Sekretaris	OB	4,000,000
		297.6 Anggota	OB	3,750,000
9.1.2.25.02.01.001	298	<b>HONORARIUM PENGELOLA, MANEJEMEN DAN MEDIS PARAMEDIS</b>	Triwulan	275,000,000
	299	<b>HONORARIUM TIM INOVASI CABE HOLO</b>		
		299.1 Ketua/Wakil Ketua	OK	300,000
		299.2 Sekretaris	OK	250,000
		299.3 Anggota	OK	200,000
9.1.2.25.04.01.001	300	<b>HONORARIUM TIM EVALUASI KINERJA LINGKUP SKPD</b>		
		300.1 Ketua/Wakil Ketua	OK	250,000
		300.2 Anggota	OK	200,000
9.1.2.25.04.01.001	301	<b>HONORARIUM TIM SOSIALISASI PERDA LP2B</b>		
		301.1 Ketua/Wakil Ketua	OK	1,000,000
		301.2 Anggota	OK	750,000
9.1.2.25.04.01.001	302	<b>HONORARIUM TIM ASET OPD</b>		
		302.1 Ketua	OB	1,200,000
		302.2 Sekretaris	OB	1,100,000
		302.3 Anggota	OB	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	303	<b>HONORARIUM TIM UJI KOMPETENSI (ASSESOR) PBJ</b>	OK	3,600,000
	304	<b>HONORARIUM TENAGA IT DAN TIM ADMINISTRASI UJI KOMPETENSI/ UJIAN SERTIFIKASI PBJ</b>		
		304.1 Tenaga IT	OK	1,800,000
		304.2 Tim Administrasi	OK	1,750,000
9.1.2.25.01.01.001	305	<b>HONORARIUM TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN</b>		
		305.1 Honorarium Tim Pokja		
		a. Pengarah	OB	1,500,000
		b. Penanggungjawab	OB	1,250,000
		c. Ketua	OB	1,000,000
		d. Wakil Ketua	OB	850,000
		e. Sekretaris	OB	750,000
		f. Anggota	OB	750,000
		305.2 Honorarium Sekretariat Tim Pokja		
		a. Ketua	OB	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	306	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN DAN EVALUASI</b>		
		306.1 Pengarah	OB	500,000
		306.2 Penanggung Jawab	OB	450,000
		306.3 Ketua	OB	400,000
		306.4 Wakil Ketua	OB	350,000
		306.5 Sekretaris	OB	300,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		306.6 Anggota	OB	250,000
9.1.2.25.04.01.001	307	HONORARIUM PENGINPUTAN DOKUMEN PERENCANAAN	OB	1,500,000
9.1.2.26.03.01.001	308	HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH MEMBATIK	OK	1,000,000
9.1.2.26.03.01.001	309	HONORARIUM TENAGA OPERATOR MESIN LISTRIK	OB	1,500,000
9.1.2.26.03.01.001	310	HONORARIUM TIM TEKNIS PTSP		
		310.1 Pengarah	OB	2,500,000
		310.2 Pembina	OB	2,000,000
		310.3 Penanggung Jawab	OB	1,500,000
		310.4 Ketua	OB	1,250,000
		310.5 Sekretaris	OB	1,000,000
		310.6 Anggota/Tim Teknis	OB	750,000
9.1.2.26.03.01.001	311	HONORARIUM FASILITATOR REHABILITASI RUMAH BENCANA	OB	3,200,000
	312	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	Tahun	4,000,000
	313	HONORARIUM TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR		
		313.1 Pengarah	OB	1,500,000
		313.2 Wakil Pengarah	OB	1,350,000
		313.3 Penanggung Jawab	OB	1,250,000
		313.4 Ketua	OB	1,100,000
		313.5 Wakil Ketua	OB	1,000,000
		313.6 Sekretaris	OB	850,000
		313.7 Anggota	OB	750,000
9.1.2.25.01.01.001	314	HONORARIUM TIM PENYUSUN MEMORI PEMERINTAHAN MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI		
		314.1 Pengarah	OB	2,500,000
		314.2 Penanggunjawab	OB	2,250,000
		314.3 Ketua	OB	2,000,000
		314.4 Wakil Ketua	OB	1,850,000
		314.5 Sekretaris	OB	1,750,000
		314.6 Anggota	OB	1,500,000
9.1.2.25.01.01.001.0	315	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INOVASI DAERAH		
		315.1 Pengarah	OB	1,500,000
		315.2 Penanggunjawab	OB	1,250,000
		315.3 Ketua	OB	1,000,000
		315.4 Anggota	OB	750,000
9.1.2.25.01.01.001.0	316	HONORARIUM PETUGAS PENDAMPING PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN	OB	1,200,000
9.1.2.25.01.01.001.0	317	HONORARIUM TIM PENGADAAN CADANGAN PANGAN		
		317.1 Penanggunjawab	OB	1,450,000
		317.2 PPTK	OB	1,070,000
		317.3 Anggota	OB	210,000
	318	HONORARIUM TIM PELKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIS TIM PELAKSANA KEGIATAN		
		318.1 Penanggunjawab	OB	1,450,000
		318.2 PPTK	OB	1,070,000
		318.3 Administrasi Kegiatan	OB	210,000
9.1.2.25.04.01.001.0	319	HONORARIUM SATUAN TUGAS PEBGELOLA SISTIM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN		
		319.1 Pembina		1,500,000
		319.2 Wakil Pembina		1,450,000
		319.3 Penanggunjawab		1,250,000
		319.4 Ketua		1,000,000
		319.5 Wakil Ketua		850,000
		319.6 Anggota (Koordinator Bidang)		750,000
		319.7 Admin Pengendali Aplikasi		1,000,000
9.1.2.25.04.01.001.0	320	HONORARIUM TIM PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALUKU TENGAH		
		320.1 Pengarah	OB	500,000
		320.2 Wakil Pengarah	OB	450,000
		320.3 Penanggunjawab	OB	400,000
		320.4 Wakil Penanggunjawab 1	OB	350,000
		320.5 Wakil Penanggunjawab 2	OB	350,000
		320.6 Ketua	OB	325,000
		320.7 Sekretaris	OB	300,000
		320.8 Anggota	OB	150,000
9.1.2.26.02.01.001.0	321	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP KATEGORI UMUM		
		321.1 Tenaga Perhubungan, Tenaga Penagih Retribusi Bidang Perhubungan	OB	800,000
		321.2 Tenaga Perhubungan, Tenaga Penagih Retribusi Bidang Perhubungan	Tahun	1,130,000,000
9.1.2.26.02.01.001.0	322	HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI DAN TEKNIS		
		322.1 Tenaga Adminitrasi dan Teknis Dinas PUPR	OB	1,500,000
9.1.2.25.04.01.001.0	323	HONORARIUM TIM PELELANGAN		
		323.1 Ketua	OK	4,500,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		323.2 Wakil Ketua	OK	3,750,000
		323.3 Sekretaris	OK	3,300,000
		323.4 Anggota	OK	2,500,000
		323.5 Dokumentasi	OK	250,000
	<b>324</b>	<b>HONORARIUM PENINGKATAN SPAM JARINGAN</b>	OB	2,430,000
9.1.1.02.01.01.001	<b>325</b>	<b>HONORARIUM SIPD</b>		
		325.1 Penanggungjawab	OB	1,200,000
		325.2 Ketua	OB	1,100,000
		325.3 Anggota	OB	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001.0	<b>326</b>	<b>HONORARIUM OPERATOR PERPUSTAKAAN</b>		
		326.1 Operator Perpustakaan Berbasis Wilayah NPP	OB	1,000,000
		326.2 Operator Aplikasi Media Sosial OPD	OB	1,000,000
	<b>327</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)</b>		
		327.1 Pengarah	OB	1,250,000
		327.2 Ketua Tim	OB	950,000
		327.3 Sekretaris	OB	750,000
		327.4 Anggota	OB	640,000
	<b>328</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUN LKJIP SKPD</b>		
		328.1 Pengarah	OB	1,500,000
		328.2 Penanggung Jawab	OB	1,400,000
		328.3 Ketua	OB	1,300,000
		328.4 Wakil Ketua	OB	1,200,000
		328.5 Sekretaris	OB	1,200,000
		328.6 Anggota	OB	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	<b>329</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGEMBANGAN APLIKASI</b>		
		329.1 Satuan Biaya Pengembangan Aplikasi Monitoring	Aplikasi	49,050,000
		329.2 Satuan Biaya Pengembangan Aplikasi	Aplikasi	40,000,000
9.1.2.25.04.01.001	<b>330</b>	<b>UANG SAKU JASA PENGAMANAN ASET DAERAH</b>	OB	500,000
9.1.1.02.05.01.001	<b>331</b>	<b>SATUAN TAMBAHAN PENGHASILAN OPERATOR OMSPAN KABUPATEN</b>	OB	1,500,000
9.1.1.02.05.01.001	<b>332</b>	<b>SATUAN TAMBAHAN TUNJANGAN KARENA KELANGKAAN PROFESI TENAGA DOKTER DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN PENATA ANESTHESI</b>		
		332.1 RSUD Masohi	OB	7,500,000
		332.2 Puskesmas Masohi	OB	7,500,000
		332.3 Puskesmas Letwaru	OB	7,500,000
		332.4 Puskesmas Perawatan Amahai	OB	7,500,000
		332.5 Puskesmas Perawatan Tamiouw	OB	7,500,000
		332.6 Puskesmas Perawatan Layeni	OB	7,500,000
		332.7 Puskesmas Rumday	OB	7,500,000
		332.8 Puskesmas Perawatan Sahulauw	OB	7,500,000
		332.9 Puskesmas Perawatan Tehoru	OB	7,500,000
		332.10 Puskesmas Tehua	OB	7,500,000
		332.11 Puskesmas Perawatan Laimu	OB	7,500,000
		332.12 RSUD Saparua	OB	7,500,000
		332.13 Puskesmas Saparua	OB	7,500,000
		332.14 Puskesmas Booi - Paperu	OB	7,500,000
		332.15 Puskesmas Portho - Haria	OB	7,500,000
		332.16 Puskesmas Hatawano	OB	7,500,000
		332.17 Puskesmas Jazirah Tenggara	OB	7,500,000
		332.18 Puskesmas Perawatan Ameth	OB	7,500,000
		332.19 Puskesmas Perawatan Pelauw	OB	7,500,000
		332.20 Puskesmas Perawatan Haruku-Sameth	OB	7,500,000
		332.21 Puskesmas Perawatan Hitu	OB	7,500,000
		332.22 Puskesmas Perawatan Hila	OB	7,500,000
		332.23 Puskesmas Perawatan Negegi Lima	OB	7,500,000
		332.24 Puskesmas Perawatan Alang	OB	7,500,000
		332.25 Puskesmas Tulehu	OB	7,500,000
		332.26 Puskesmas Perawatan Waai	OB	7,500,000
		332.27 Puskesmas Perawatan Suli	OB	7,500,000
		332.28 Puskesmas Perawatan Wahai	OB	7,500,000
		332.29 Puskesmas Perawatan Pasanea	OB	7,500,000
		332.30 Puskesmas Saleman	OB	7,500,000
		332.31 Puskesmas Pasahari B	OB	7,500,000
		332.32 Puskesmas Perawatan Morokay	OB	7,500,000
		332.33 Puskesmas Perawatan Pasahari A	OB	7,500,000
		332.34 RSUD Banda	OB	7,500,000
		332.35 Puskesmas Walang	OB	7,500,000
		332.36 Puskesmas Waer	OB	7,500,000
9.1.1.02.05.01.001	<b>333</b>	<b>SATUAN BIAYA INSENTIF DOKTER</b>		
		333.1 RSUD Masohi	OB	2,250,000
		333.2 RSUD Saparua	OB	2,250,000
		333.3 RSUD Banda	OB	2,250,000
		333.4 Puskesmas di Kecamatan Salahutu	OB	2,250,000
		333.5 Dokter Spesialis PNS		
		a. Penyakit Dalam	OB	21,250,000
		b. Penyakit Anak	OB	21,250,000
		c. Bedah	OB	21,250,000
		d. Obstetri dan Ginekologi	OB	21,250,000
		e. Anestesi	OB	21,250,000
		f. Radiologi	OB	18,000,000
		g. Mata	OB	18,000,000
		h. Neurologi	OB	18,000,000
		i. Patologi Klinik	OB	18,000,000
		j. Andrologi	OB	18,000,000
		k. Patologi Anatomi	OB	18,000,000
		l. Forensik	OB	18,000,000
		m. Gigi Klinik	OB	18,000,000
		333.6 Dokter Spesialis Paruh Waktu Kategori I	OB	10,000,000
		333.7 Dokter Spesialis Paruh Waktu Kategori II	OB	20,000,000
		333.8 Dokter Umum/Gigi Paruh Waktu	OB	6,000,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.1.02.05.01.001	333	333.9 Dokter Penugasan Khusus Residen Senio Spesialis	OB	15,000,000
		333.10 Pendayagunaan Dokter Spesialis		
		a. RSUD Masohi	OB	25,000,000
		b. RSUD Saparua	OB	31,000,000
		c. RSUD Banda	OB	35,000,000
		333.11 Besaran Gaji/Insentif Dokter Umum/Gigi Penugasan Khusus Daerah Sangat Terpencil	OB	11,181,000
		333.12 Besaran Gaji/Insentif Dokter Umum/Gigi Penugasan Khusus Daerah Terpencil	OB	8,595,000
		333.13 Besaran Gaji/Insentif Dokter Umum/Gigi Penugasan Khusus Daerah Biasa	OB	6,900,000
		333.14 Insentif Penata Anestesi	OB	15,000,000
		<b>334 SATUAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (TKPNSD)</b>		
		<b>A. Jabatan Struktural</b>		
		334.1 Sekretaris Daerah	OB	12,500,000
		334.2 Asisten. Inspektur. Kepala Baplitbangda. Kepala BPKAD. Kepala Dinas Kesehatan. Sekretaris DPRD	OB	7,500,000
9.1.2.25.04.01.001	335	334.3 Kepala Dinas/Kepala Badan	OB	6,500,000
		334.4 Staf Ahli Bupati	OB	4,500,000
		334.5 Direktur RSUD Masohi	OB	3,500,000
		334.6 Kepala Bagian Sekretariat Daerah/Camat	OB	3,500,000
		334.7 Direktur RSUD Saparua. Direktur RSUD Banda	OB	3,000,000
		334.8 Sekretaris BAPPLITBANGDA.Sekretaris BPKAD.Sekretaris Dinas Kesehatan. Sekretaris Inspektorat	OB	1,400,000
		334.9 Inspektur Pembantu.Sekretaris Dinas.Badan.Kepala Bidang Baplitbangda.Kepala Bidang PPKAD. Kepala Bidang Dinas Kesehatan	OB	1,100,000
		334.10 Kepala Bidang Dinas. Kepala Bidang Badan. Auditor Madya	OB	1,000,000
		334.11 Kepala Bagian Sekretariat DPRD/ Sekretaris Kecamatan	OB	950,000
		334.12 Kepala Seksi/Kepala Sub bagian/Kepala Sub Bidang ( Sekretaris Daerah/BAPPLITBANGDA/Inspektorat/ BPKAD/Dinkes)/Auditor Pertama/Auditor Muda/Kepala Kelurahan	OB	800,000
		334.13 Kepala Seksi/Kepala Sub bagian/Kepala Sub Bidang Dinas/Badan/Kantor	OB	675,000
		<b>B. Jabatan Fungsional Umum Pelaksana</b>		
		334.14 JFU/Pelaksana Gol IV ( Sekretaris Daerah /BAPPLITBANGDA/Inspektorat/BPKAD/Dinkes )	OB	675,000
9.1.2.25.04.01.001	336	334.15 JFU/Pelaksana Gol IV (Dinas/Badan/Kantor)	OB	550,000
		334.16 JFU/Pelaksana Gol III (Sekretariat Daerah/BAPPLITBANGDA/Inspektorat/PPKAD/Dinkes	OB	550,000
		334.17 JFU/Pelaksana Gol III (Dinas/Badan/Kantor)	OB	500,000
		334.18 JFU/Pelaksana Gol II ( Sekretaris Daerah/BAPPLITBANGDA/Inspektorat/BPKAD/Dinkes)	OB	500,000
		334.19 JFU/Pelaksana Gol II (Dinas/Badan/Kantor)	OB	450,000
		334.20 JFU/Pelaksana Gol I (Dinas/Badan/Kantor)	OB	450,000
		<b>335 SATUAN BIAYA JAGA DOKTER SPESIALIS. DOKTER UMUM. PARAMEDIS. NON PARAMEDIS. SUPERVISOR. JASA PENAGIHAN RETRIBUSI DAN JASA RADIASI (RSUD MASOHI)</b>		
		335.1 Biaya Jaga Dokter Spesialis	OB	900,000
		335.2 Biaya Jaga Dokter Umum (Non Hari Libur)	OH	250,000
		335.3 Biaya Jaga Dokter Umum (Hari Libur)	OH	500,000
		335.4 Biaya Jaga Paramedis dan Non Paramedis	OB	200,000
		335.5 Biaya Jaga Supervisor	OB	300,000
		335.6 Biaya Jasa Penagihan Retribusi Pelayanan	OB	150,000
		335.7 Biaya Jasa Radiasi	OB	950,000
9.1.2.25.04.01.001	336	<b>SATUAN BIAYA JAGA DOKTER UMUM. DOKTER SPESIALIS. PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS (RSUD SAPARUA)</b>		
		336.1 Biaya Jaga Dokter Spesialis	OB	750,000
		336.2 Biaya Jaga Dokter Umum (Non Hari Libur)	OH	250,000
		336.3 Biaya Jaga Dokter Umum (Hari Libur)	OH	500,000
		336.4 Biaya Jaga Paramedis dan Non Paramedis	OH	20,000
9.1.2.25.04.01.001	337	<b>SATUAN BIAYA JAGA DOKTER UMUM. DOKTER SPESIALIS. PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS (RSUD BANDA)</b>		
		337.1 Biaya Jaga Dokter Spesialis	OB	750,000
		337.2 Biaya Jaga Dokter Umum (Non Hari Libur)	OH	250,000
		337.3 Biaya Jaga Dokter Umum (Hari Libur)	OH	500,000
		337.4 Biaya Jaga Paramedis dan Non Paramedis	OH	20,000
9.1.2.25.04.01.001	338	<b>SATUAN BIAYA TIM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KABUPATEN MALUKU TENGAH</b>		
		338.1 Pengarah	OB	7,500,000
		338.2 Pembina	OB	7,000,000
		338.3 Penanggung Jawab	OB	6,500,000
		338.4 Ketua	OB	5,000,000
		338.5 Sekretaris	OB	3,500,000
		338.6 Anggota: - ASN Ess. II	OB	3,000,000
		- ASN Ess. III DPMPTSP	OB	2,750,000
		- ASN Ess. IV DPMPTSP	OB	2,500,000
		- ASN Gol. III DPMPTSP	OB	2,250,000
		- ASN Gol. II DPMPTSP	OB	2,000,000
9.1.2.25.04.01.001	339	<b>SATUAN TUNJANGAN SUVERVISI DAN MONITORING PENGAWAS PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)</b>		
		339.1 Intensif Pengawas PAUD	OB	300,000
		339.2 Intensif Pamong Belajar PNF	OB	300,000
9.1.2.25.04.01.001	340	<b>SATUAN TUNJANGAN SUVERVISI DAN MONITORING PENGAWAS SD DAN SMP</b>		
		340.1 Intensif Pengawas SD	OB	350,000
		340.2 Intensif Pengawas SMP	OB	350,000
9.1.2.03.12.01.001	341	<b>SATUAN TUNJANGAN BIAYA OPERASIONAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD</b>		
		341.1 Ketua	OB	22,000,000
		341.2 Wakil Ketua	OB	17,000,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.03.12.01.001	342	<b>SATUAN BIAYA JAGA DOKTER UMUM. DOKTER SPESIALIS. PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS (RSUD SAPARUA)</b> 342.1 Biaya Jaga Dokter Spesialis 342.2 Biaya Jaga Dokter Umum (Non Hari Libur) 342.3 Biaya Jaga Dokter Umum (Hari Libur) 342.4 Biaya Jaga Paramedis dan Non Paramedis	OB OH OH OH	750,000 250,000 500,000 200,000
9.1.2.03.12.01.001	343	<b>SATUAN BIAYA JAGA DOKTER UMUM. DOKTER SPESIALIS. PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS (RSUD BANDA)</b> 343.1 Biaya Jaga Dokter Spesialis 343.2 Biaya Jaga Dokter Umum (Non Hari Libur) 343.3 Biaya Jaga Dokter Umum (Hari Libur) 343.4 Biaya Jaga Paramedis dan Non Paramedis	OB OH OH OH	750,000 250,000 500,000 200,000
9.1.2.03.12.01.001	344	<b>SATUAN BIAYA JAGA DOKTER SPESIALIS. DOKTER UMUM. PARAMEDIS. NON PARAMEDIS. SUPERVISOR. JASA PENAGIHAN RETRIBUSI DAN JASA RADIASI (RSUD MASOHI)</b> 344.1 Biaya Jaga Dokter Spesialis 344.2 Biaya Jaga Dokter Umum (Non Hari Libur) 344.3 Biaya Jaga Dokter Umum (Hari Libur) 344.4 Biaya Jaga Paramedis dan Non Paramedis 344.5 Biaya Jaga Supervisor 344.6 Biaya Jasa Supervisor Pelayanan Kesehatan 344.7 Biaya Jasa Penagihan Retribusi Pelayanan 344.8 Biaya Jasa Radiasi	OB OH OH OB OB OB OB OB	750,000 250,000 500,000 200,000 300,000 250,000 150,000 950,000
9.1.2.25.04.01.001	345	<b>SATUAN BIAYA INSENTIF STAF PENGELOLA KAS DAERAH</b>	OB	2,000,000
9.1.2.25.04.01.001	346	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH HONORER</b>	OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	347	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH THL-TBPP</b>	OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	348	<b>SATUAN BIAYA PEMONDOKAN PENYULUH HONORER DAN THL-TBPP</b>	OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	349	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUH PERTANIAN</b>	OB	1,000,000
9.1.2.25.04.01.001	350	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL FASILITATOR BANTUAN STIMULANS PERUMAHAN SWADAYA</b>	OB	750,000
9.1.2.25.04.01.001	351	<b>SATUAN BIAYA INTENSIF PENGOLAHAN LAHAN</b>	Ha	2,000,000
9.1.2.25.04.01.001	352	<b>SATUAN BIAYA INTENSIF PERAWATAN TANAMAN</b>	Ha	1,500,000
9.1.2.25.04.01.001	353	<b>SATUAN BIAYA INTENSIF PANEN DAN PASKAH PANEN</b>	Ha	2,000,000
9.1.2.25.04.01.001	354	<b>SATUAN BIAYA INTENSIF PERBANYAKAN TANAMAN</b>	OB	1,500,000
9.1.2.25.04.01.001	355	<b>SATUAN BIAYA INTENSIF PENYULUH SWADAYA</b>	OB	561,000
9.1.2.26.03.01.001	356	<b>UPAH PENGISIAN POLIBAG</b>	Polibag	1,970
9.1.2.26.03.01.001	357	<b>UPAH PESEMAIAN PADI</b>	Ha	1,250,000
9.1.2.26.03.01.001	358	<b>UPAH PENANAMAN PADI</b>	Ha	1,740,000
9.1.2.26.03.01.001	359	<b>UPAH PEMUPUKAN PADI</b>	Ha	1,250,000
9.1.2.26.03.01.001	360	<b>UPAH PENYIANGAN PADI</b>	Ha	1,740,000
9.1.2.26.03.01.001	361	<b>UPAH PENGENDALIAN OPT PADI</b>	Ha	1,250,000
9.1.2.26.03.01.001	362	<b>UPAH PANEN DAN PASKAH PANEN PADI</b>	Ha	2,000,000
9.1.2.25.04.01.001	363	<b>SATUAN UPAH PETUGAS KEBERSIHAN/TPA SAMPAH. PETUGAS TAMAN</b> 363.1 Petugas Penjaga TPU 363.2 Petugas Kebersihan / TPA Sampah 363.3 Petugas Taman/Sapu Jalan 363.4 Petugas Pemilah Sampah di TPA 363.5 Petugas Penjaga TPA 363.6 Petugas Kali Bersih 363.7 Petugas Siram Taman 363.8 Petugas Kebersihan 363.9 Restribusi Sampah 363.10 Iuran Sampah Kantor	OB OB OB OB OB OB OB OB Bulan Bulan	2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 550,000 50,000 100,000
9.1.2.25.04.01.001	364	<b>SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA</b> 364.1 Golongan I dan II 364.2 Golongan III 364.3 Golongan IV	OH OH OH	35,000 37,000 40,000
9.1.1.07.01.01.001	365	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b> 365.1 Uang Lembur a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV 365.2 Uang Makan Lembur a. Golongan I dan II b. Golongan III c. Golongan IV	OJ OJ OJ OJ OH OH OH	15,000 17,000 20,000 25,000 35,000 37,000 40,000
9.1.2.25.04.01.001	366	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR</b>	Orang/Kali	100,000
9.1.2.25.04.01.001	367	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA</b>	OH	250,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.25.04.01.001	368	SATUAN BIAYA UANG SAKU KEGIATAN BIMTEK/PELATIHAN. SOSIALISASI. DLL	OH	100,000
9.1.2.26.03.01.001	369	SATUAN BIAYA FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH		
		369.1 Peraturan Daerah	Perda	5,000,000
		369.2 Peraturan Bupati	Perbup	5,000,000
9.1.2.26.03.01.001	370	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH	m³	100,000
9.1.2.26.03.01.001	371	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PETUGAS MOBIL TANGKI AIR BERSIH	OB	750,000
9.1.2.25.04.01.001	372	SATUAN BIAYA PETUGAS PENDATA PMKS DAN PSKS	Lembar	3,000
9.1.2.25.04.01.001	373	SATUAN BIAYA JASA TENAGA IPCN (INSFECTION PREVENTION CONTROL)	OB	500,000
9.1.2.25.04.01.001	374	SATUAN BIAYA JASA KEPALA RUANGAN. INSTALASI DAN KOMITE RUMAH SAKIT	OB	300,000
9.1.2.26.03.01.001	375	SATUAN BIAYA PENCACAHAN HARGA KOMODITI	Responden	60,000
9.1.2.03.12.01.001	376	SATUAN BIAYA UANG DUKA / MENINGGAL DUNIA	Orang/Duka	5,000,000
9.1.2.03.12.01.001	377	SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH		
		377.1 Bupati/Wakil Bupati	Paket	5,000,000
		377.2 Pimpinan DPRD	Paket	5,000,000
		377.3 Sekretaris Daerah	Paket	5,000,000
		377.4 Eselon II	Paket	4,500,000
		377.5 Eselon III/Golongan IV	Paket	4,000,000
		377.6 Eselon IV/Golongan III	Paket	3,500,000
		377.7 Golongan II/I	Paket	3,000,000
9.1.2.25.01.01.001	378	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA INVESTIGASI	OB/OT	2,960,000
9.1.2.25.01.01.001	379	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA INTERVENSI	OT	2,960,000
9.1.1.01.21.01.001	380	SATUAN TAMBAHAN PENGHASILAN		
		380.1 Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	700,000
		380.2 Pembantu Bendahara Pengeluaran DAK	OB	700,000
		380.3 Bendahara Pembantu Penerimaan	OB	700,000
		380.4 Bendahara Penerimaan	OB	900,000
9.1.2.08.01.01.001	381	SATUAN BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT		
		381.1 Mobil Darat Luar Kota	Hari	1,200,000
		381.2 Mobil Unit/Hari	Unit	700,000
		381.3 Mobil Pemeliharaan Jalan	Hari	200,000
9.1.2.15.01.01.001	382	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS		
		382.1 Dalam Daerah		
		1 Kota Masohi	OH	330,000
		2 Amahai	OH	330,000
		3 Teon Nila Serua	OH	330,000
		4 Teluk Elpaputih	OH	330,000
		5 Tehoru	OH	330,000
		6 Telutih	OH	330,000
		7 Seram Utara Barat	OH	330,000
		8 Seram Utara	OH	330,000
		9 Seram Utara Timur Kobi	OH	330,000
		10 Seram Utara Timur Seti	OH	330,000
		11 Saparua	OH	330,000
		12 Saparua Timur	OH	330,000
		13 Nusalaot	OH	330,000
		14 Pulau Haruku	OH	330,000
		15 Salahutu	OH	330,000
		16 Leihitu	OH	330,000
		17 Leihitu Barat	OH	330,000
		18 Banda	OH	330,000
		382.2 Luar Daerah Dalam Provinsi		
		1 Kota Ambon	OH	380,000
		2 Seram Bagian Barat	OH	380,000
		3 Seram Bagian Timur	OH	380,000
		4 Pulau Buru	OH	380,000
		5 Buru Selatan	OH	380,000
		6 Kota Tual	OH	380,000
		7 Maluku Tenggara	OH	380,000
		8 Maluku Tenggara Barat	OH	380,000
		9 Kepulauan Aru	OH	380,000
		10 Maluku Barat Daya	OH	380,000
		382.3 Luar Provinsi		
		1 Aceh	OH	360,000
		2 Sumatera Utara	OH	370,000
		3 Riau	OH	370,000
		4 Kepulauan Riau	OH	370,000
		5 Jambi	OH	370,000
		6 Sumatera Barat	OH	380,000
		7 Sumatera Selatan	OH	380,000
		8 Lampung	OH	380,000
		9 Bengkulu	OH	380,000
		10 Bangka Belitung	OH	410,000
		11 Banten	OH	370,000
		12 Jawa Barat	OH	430,000
		13 D.K.I. Jakarta	OH	530,000
		14 Jawa Tengah	OH	370,000
		15 D.I. Yogyakarta	OH	420,000
		16 Jawa Timur	OH	410,000
		17 Bali	OH	480,000
		18 Nusa Tenggara Barat	OH	440,000
		19 Nusa Tenggara Timur	OH	430,000



KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.15.01.01.001	383	20 Kalimantan Barat	OH	380,000
		21 Kalimantan Tengah	OH	360,000
		22 Kalimantan Timur	OH	430,000
		23 Kalimantan Selatan	OH	380,000
		24 Kalimantan Utara	OH	430,000
		25 Sulawesi Utara	OH	370,000
		26 Gorontalo	OH	370,000
		27 Sulawesi Barat	OH	410,000
		28 Sulawesi Selatan	OH	430,000
		29 Sulawesi Tengah	OH	370,000
		30 Sulawesi Tenggara	OH	380,000
		31 Maluku Utara	OH	430,000
		32 Papua	OH	680,000
		33 Papua Barat	OH	480,000
		<b>UANG REPRESENTASI</b>		
		383.1 Dalam Daerah		
		a. Bupati / Wakil Bupati	OH	300,000
		b. Ketua DPRD	OH	250,000
		c. Wakil Ketua DPRD	OH	200,000
		d. Sekretaris Daerah	OH	200,000
		e. Anggota DPRD	OH	150,000
		f. Eselon II	OH	150,000
		383.2 Luar Daerah Dalam Provinsi		
		a. Bupati / Wakil Bupati	OH	350,000
		b. Ketua DPRD	OH	250,000
		c. Wakil Ketua DPRD	OH	250,000
		d. Sekretaris Daerah	OH	250,000
		e. Anggota DPRD	OH	200,000
		f. Eselon II	OH	150,000
		383.3 Luar Provinsi		
		a. Bupati / Wakil Bupati	OH	350,000
		b. Ketua DPRD	OH	250,000
		c. Wakil Ketua DPRD	OH	250,000
		d. Sekretaris Daerah	OH	250,000
		e. Anggota DPRD	OH	200,000
		f. Eselon II	OH	200,000

**384 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

<i>(dalam US\$)</i>						
No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>AMERIKA UTARA</b>					
1	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382
2	Kanada	OH	447	404	368	307
	<b>AMERIKA SELATAN</b>					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brasil	OH	436	341	291	241
6	Chilie	OH	415	316	270	222
7	Columbia	OH	436	323	276	254
8	Peru	OH	459	347	320	276
9	Suriname	OH	398	295	252	207
10	Ekuador	OH	385	273	242	241
	<b>AMERIKA TENGAH</b>					
11	Mexico	OH	493	366	324	323
12	Kuba	OH	406	305	261	221
13	Panama	OH	414	342	306	271
	<b>EROPA BARAT</b>					
14	Austria	OH	504	453	318	317
15	Belgia	OH	466	419	282	281
16	Perancis	OH	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	447	415	285	285
18	Belanda	OH	463	416	272	271
19	Swiss	OH	636	570	403	401
	<b>EROPA UTARA</b>					
20	Denmark	OH	567	491	343	301
21	Finlandia	OH	453	409	354	313
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	<b>EROPA SELATAN</b>					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	287	286
28	Yunani	OH	422	379	242	241
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	242	241
31	Serbia	OH	417	375	346	288
	<b>EROPA TIMUR</b>					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Hongaria	OH	485	438	390	345
34	Polandia	OH	461	415	360	319
35	Rumania	OH	416	381	313	277
36	Rusia	OH	556	512	407	406
37	Slovakia	OH	437	394	341	303

(dalam US\$)						
No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38	Ukraina	OH	485	436	375	331
	<b>AFRIKA BARAT</b>					
39	Nigeria	OH	361	313	292	291
40	Senegal	OH	384	317	237	231
	<b>AFRIKA TIMUR</b>					
41	Ethiopia	OH	358	295	221	193
42	Kenya	OH	384	317	237	225
43	Madagaskar	OH	296	244	182	181
44	Tanzania	OH	350	290	244	218
45	Zimbabwe	OH	328	281	248	247
46	Mozambique	OH	399	329	265	264
	<b>AFRIKA SELATAN</b>					
47	Namibia	OH	405	334	268	233
48	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251
	<b>AFRIKA UTARA</b>					
49	Aljazair	OH	358	295	221	193
50	Mesir	OH	384	317	237	225
51	Maroko	OH	296	244	182	181
52	Tunisia	OH	350	290	244	218
53	Sudan	OH	328	281	248	247
54	Libia	OH	399	329	265	264
	<b>ASIA BARAT</b>					
55	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
56	Bahrain	OH	416	294	228	214
57	Irak	OH	447	325	253	231
58	Yordania	OH	406	292	236	225
59	Kuwait	OH	456	325	296	294
60	Libanon	OH	357	267	207	186
61	Qatar	OH	386	276	215	196
62	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
63	Turki	OH	456	364	283	253
64	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301
65	Yaman	OH	353	241	197	196
66	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251
67	Kesultanan Oman	OH	413	292	247	249
	<b>ASIA TIMUR</b>					
68	Rep. Rakyat Tiongkok	OH	378	238	207	206
69	Hongkong	OH	472	320	287	286
70	Jepang	OH	519	303	262	261
71	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
72	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	<b>ASIA SELATAN</b>					
73	Afganistan	OH	385	226	173	172
74	Bangladesh	OH	339	196	167	166
75	India	OH	422	329	327	325

<i>(dalam US\$)</i>						
No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
76	Pakistan	OH	343	203	182	181
77	Srilanka	OH	380	242	209	199
78	Iran	OH	421	312	243	217
	<b>ASIA TENGAH</b>					
79	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
80	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	<b>ASIA TENGGARA</b>					
81	Philipina	OH	498	459	365	364
82	Singapura	OH	416	294	228	214
83	Malasia	OH	447	325	253	231
84	Thailand	OH	406	292	236	225
85	Myanmar	OH	456	325	296	294
86	Laos	OH	357	267	207	186
87	Vietnam	OH	386	276	215	196
88	Brunei Darusalam	OH	358	257	200	196
89	Kamboja	OH	456	364	283	253
90	Timor Leste	OH	459	323	302	301
	<b>ASIA PASIFIK</b>					
91	Australia	OH	636	585	394	393
92	Selandia Baru	OH	451	308	278	276
93	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
94	Papua Nugini	OH	520	476	319	259
95	Fiji	OH	363	329	221	179







**385. SATUAN BIAYA PENGINAPAN**

KODE KELOMPOK	NO	TUJUAN KECAMATAN/ DAERAH / PROVINSI	BUPATI/WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPR/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPR/ESELON II	ESELON III/GOL. IV	ESELON IV/GOL. III	GOLONGAN II/I
<b>9.1.2.15.01.01.001</b>	<b>385.1</b>	<b>DALAM DAERAH</b>						
9.1.2.15.01.01.001	1.	KOTA MASOHI	550,000	550,000	355,000	300,000	300,000	300,000
9.1.2.15.01.01.001	2.	AMAHAI	500,000	500,000	300,000	250,000	250,000	250,000
9.1.2.15.01.01.001	3.	TNS	350,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
9.1.2.15.01.01.001	4.	TELUK ELPAPUTIH	350,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
9.1.2.15.01.01.001	5.	TEHORU	350,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
9.1.2.15.01.01.001	6.	TELUTIH	350,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
9.1.2.15.01.01.001	7.	SERAM UTARA BARAT	500,000	450,000	400,000	350,000	350,000	350,000
9.1.2.15.01.01.001	8.	SERAM UTARA	500,000	450,000	400,000	350,000	350,000	350,000
9.1.2.15.01.01.001	9.	SERAM UTARA TIMUR KOBI	500,000	450,000	400,000	350,000	350,000	350,000
9.1.2.15.01.01.001	10.	SERAM UTARA TIMUR SETI	500,000	450,000	400,000	350,000	350,000	350,000
9.1.2.15.01.01.001	11.	SAPARUA	500,000	450,000	400,000	350,000	350,000	350,000
9.1.2.15.01.01.001	12.	SAPARUA TIMUR	500,000	450,000	400,000	350,000	350,000	350,000
9.1.2.15.01.01.001	13.	NUSALAUT	500,000	450,000	400,000	350,000	350,000	350,000
9.1.2.15.01.01.001	14.	PULAU HARUKU	400,000	350,000	275,000	250,000	250,000	250,000
9.1.2.15.01.01.001	15.	SALAHUTU	900,000	800,000	600,000	450,000	350,000	350,000
9.1.2.15.01.01.001	16.	LEIHITU	500,000	450,000	400,000	350,000	350,000	350,000
9.1.2.15.01.01.001	17.	LEIHITU BARAT	500,000	450,000	400,000	350,000	350,000	350,000
9.1.2.15.01.01.001	18.	BANDA	570,000	570,000	400,000	350,000	300,000	300,000
<b>9.1.2.15.01.01.001</b>	<b>385.2</b>	<b>LUAR DAERAH DALAM PROVINSI</b>						
9.1.2.15.01.01.001	1.	KOTA AMBON	1,500,000	1,200,000	750,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	2.	SERAM BAGIAN BARAT	850,000	750,000	550,000	400,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	3.	SERAM BAGIAN TIMUR	850,000	750,000	550,000	400,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	4.	PULAU BURU	850,000	750,000	550,000	400,000	400,000	400,000



KODE KELOMPOK	NO	TUJUAN KECAMATAN/ DAERAH / PROVINSI	BUPATI/WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPR/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPR/ESELON II	ESELON III/GOL. IV	ESELON IV/GOL. III	GOLONGAN II/I
9.1.2.15.01.01.001	5.	BURU SELATAN	850,000	750,000	550,000	400,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	6.	KOTA TUAL	850,000	750,000	550,000	400,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	7.	MALUKU TENGGARA	850,000	750,000	550,000	400,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	8.	MALUKU TENGGARA BARAT	850,000	750,000	550,000	400,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	9.	KEPULAUAN ARU	850,000	750,000	550,000	400,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	10.	MALUKU BARAT DAYA	850,000	750,000	550,000	400,000	400,000	400,000
<b>9.1.2.15.01.01.001</b>	<b>385.3</b>	<b>LUAR PROVINSI</b>						
9.1.2.15.01.01.001	1.	ACEH	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	2.	SUMATERA UTARA	1,520,000	1,120,000	650,000	480,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	3.	RIAU	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	4.	KEPULAUAN RIAU	1,520,000	1,120,000	650,000	480,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	5.	JAMBI	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	6.	SUMATERA BARAT	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	7.	SUMATERA SELATAN	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	8.	LAMPUNG	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	9.	BENGKULU	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	10.	BANGKA BELITUNG	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	11.	BANTEN	1,520,000	1,120,000	650,000	480,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	12.	JAWA BARAT	1,520,000	1,120,000	650,000	480,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	13.	D.K.I. JAKARTA	1,870,000	1,425,000	900,000	650,000	610,000	550,000
9.1.2.15.01.01.001	14.	JAWA TENGAH	1,520,000	1,120,000	650,000	480,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	15.	D.I. YOGYAKARTA	1,520,000	1,120,000	650,000	480,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	16.	JAWA TIMUR	1,520,000	1,120,000	650,000	480,000	400,000	400,000

KODE KELOMPOK	NO	TUJUAN KECAMATAN/ DAERAH / PROVINSI	BUPATI/WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPR/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPR/ESELON II	ESELON III/GOL. IV	ESELON IV/GOL. III	GOLONGAN II/I
9.1.2.15.01.01.001	17.	BALI	2,870,000	2,425,000	1,200,000	904,000	854,000	854,000
9.1.2.15.01.01.001	18.	NUSA TENGGARA BARAT	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	20.	KALIMANTAN BARAT	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	21.	KALIMANTAN TENGAH	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	22.	KALIMANTAN TIMUR	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	23.	KALIMANTAN SELATAN	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	24.	KALIMANTAN UTARA	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	25.	SULAWESI UTARA	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	26.	GORONTALO	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	27.	SULAWESI BARAT	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	28.	SULAWESI SELATAN	1,720,000	1,320,000	925,000	650,000	610,000	610,000
9.1.2.15.01.01.001	29.	SULAWESI TENGAH	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	30.	SULAWESI TENGGARA	1,425,000	1,025,000	600,000	450,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	31.	MALUKU UTARA	1,200,000	900,000	500,000	400,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	32.	PAPUA	1,870,000	1,425,000	750,000	500,000	400,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	33.	PAPUA BARAT	1,870,000	1,425,000	750,000	500,000	400,000	400,000

KODE KELOMPOK	NO	TUJUAN KECAMATAN/ DAERAH / PROVINSI	BUPATI/WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPR/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPR/ESELON II	ESELON III/GOL. IV	ESELON IV/GOL. III	GOLONGAN II/I
---------------	----	--	------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------









**386. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

A. - BUPATI/WAKIL BUPATI

- PIMPINAN DPR/SEKRETARIS DAERAH

KODE KELOMPOK	NO.	KOTA / DAERAH TUJUAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
<b>9.1.2.15.01.01.001</b>	<b>386.1</b>	<b>LUAR DAERAH DALAM PROVINSI</b>					
9.1.2.15.01.01.001	1	KOTA AMBON	OP	300,000	450,000	1,300,000	750,000
9.1.2.15.01.01.001	2	SERAM BAGIAN BARAT	OP	270,000	380,000	1,000,000	550,000
9.1.2.15.01.01.001	3	SERAM BAGIAN TIMUR	OP	270,000	380,000	1,000,000	550,000
9.1.2.15.01.01.001	4	PULAU BURU	OP	285,000	400,000	1,100,000	650,000
9.1.2.15.01.01.001	5	BURU SELATAN	OP	285,000	410,000	1,050,000	620,000
9.1.2.15.01.01.001	6	KOTA TUAL	OP	285,000	420,000	1,200,000	635,000
9.1.2.15.01.01.001	7	MALUKU TENGGARA	OP	285,000	420,000	1,250,000	630,000
9.1.2.15.01.01.001	8	MALUKU TENGGARA BARAT	OP	285,000	420,000	1,230,000	620,000
9.1.2.15.01.01.001	9	KEPULAUAN ARU	OP	285,000	420,000	1,230,000	670,000
9.1.2.15.01.01.001	10	MALUKU BARAT DAYA	OP	290,000	420,000	1,230,000	670,000
<b>9.1.2.15.01.01.001</b>	<b>386.2</b>	<b>LUAR PROVINSI</b>					
9.1.2.15.01.01.001	1	ACEH	OP	345,000	400,000	1,000,000	750,000
9.1.2.15.01.01.001	2	SUMATERA UTARA	OP	275,000	360,000	800,000	600,000
9.1.2.15.01.01.001	3	RIAU	OP	200,000	235,000	690,000	550,000
9.1.2.15.01.01.001	4	KEPULAUAN RIAU	OP	230,000	360,000	790,000	590,000
9.1.2.15.01.01.001	5	JAMBI	OP	270,000	364,000	1,000,000	635,000
9.1.2.15.01.01.001	6	SUMATERA BARAT	OP	245,000	300,000	980,000	550,000
9.1.2.15.01.01.001	7	SUMATERA SELATAN	OP	268,000	384,000	860,000	650,000
9.1.2.15.01.01.001	8	LAMPUNG	OP	260,000	370,000	835,000	630,000
9.1.2.15.01.01.001	9	BENGKULU	OP	250,000	370,000	970,000	620,000
9.1.2.15.01.01.001	10	BANGKA BELITUNG	OP	300,000	400,000	900,000	700,000
9.1.2.15.01.01.001	11	BANTEN	OP	395,000	460,000	900,000	860,000
9.1.2.15.01.01.001	12	JAWA BARAT	OP	425,000	530,000	1,100,000	950,000
9.1.2.15.01.01.001	13	D.K.I. JAKARTA	OP	430,000	500,000	1,200,000	940,000
9.1.2.15.01.01.001	14	JAWA TENGAH	OP	230,000	300,000	745,000	540,000
9.1.2.15.01.01.001	15	D.I. YOGYAKARTA	OP	250,000	400,000	960,000	650,000



KODE KELOMPOK	NO.	KOTA / DAERAH TUJUAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
9.1.2.15.01.01.001	16	JAWA TIMUR	OP	350,000	400,000	1,780,000	760,000
9.1.2.15.01.01.001	17	BALI	OP	375,000	490,000	1,500,000	865,000
9.1.2.15.01.01.001	18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	368,000	530,000	1,000,000	898,000
9.1.2.15.01.01.001	19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	300,000	380,000	1,000,000	690,000
9.1.2.15.01.01.001	20	KALIMANTAN BARAT	OP	337,000	400,000	800,000	700,000
9.1.2.15.01.01.001	21	KALIMANTAN TENGAH	OP	300,000	480,000	1,250,000	800,000
9.1.2.15.01.01.001	22	KALIMANTAN TIMUR	OP	270,000	360,000	860,000	630,000
9.1.2.15.01.01.001	23	KALIMANTAN SELATAN	OP	260,000	360,000	930,000	600,000
9.1.2.15.01.01.001	24	KALIMANTAN UTARA	OP	270,000	350,000	840,000	600,000
9.1.2.15.01.01.001	25	SULAWESI UTARA	OP	270,000	350,000	870,000	600,000
9.1.2.15.01.01.001	26	GORONTALO	OP	200,000	390,000	1,300,000	600,000
9.1.2.15.01.01.001	27	SULAWESI BARAT	OP	260,000	380,000	850,000	640,000
9.1.2.15.01.01.001	28	SULAWESI SELATAN	OP	290,000	400,000	1,550,000	700,000
9.1.2.15.01.01.001	29	SULAWESI TENGAH	OP	280,000	380,000	1,000,000	670,000
9.1.2.15.01.01.001	30	SULAWESI TENGGARA	OP	230,000	350,000	800,000	580,000
9.1.2.15.01.01.001	31	MALUKU UTARA	OP	315,000	490,000	850,000	800,000
9.1.2.15.01.01.001	32	PAPUA	OP	300,000	500,000	1,800,000	850,000
9.1.2.15.01.01.001	33	PAPUA BARAT	OP	290,000	520,000	1,750,000	800,000





B. ANGGOTA DPRD/ESELON II

KODE KELOMPOK	NO.	KOTA / DAERAH TUJUAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
<b>9.1.2.15.01.01.001</b>	<b>386.1</b>	<b>LUAR DAERAH DALAM PROVINSI</b>					
9.1.2.15.01.01.001	1	KOTA AMBON	OP	300,000	450,000	1,300,000	750,000
9.1.2.15.01.01.001	2	SERAM BAGIAN BARAT	OP	270,000	380,000	1,000,000	550,000
9.1.2.15.01.01.001	3	SERAM BAGIAN TIMUR	OP	270,000	380,000	1,000,000	550,000
9.1.2.15.01.01.001	4	PULAU BURU	OP	285,000	400,000	1,100,000	650,000
9.1.2.15.01.01.001	5	BURU SELATAN	OP	285,000	410,000	1,050,000	620,000
9.1.2.15.01.01.001	6	KOTA TUAL	OP	285,000	420,000	1,200,000	635,000
9.1.2.15.01.01.001	7	MALUKU TENGGARA	OP	285,000	420,000	1,250,000	630,000
9.1.2.15.01.01.001	8	MALUKU TENGGARA BARAT	OP	285,000	420,000	1,230,000	620,000
9.1.2.15.01.01.001	9	KEPULAUAN ARU	OP	285,000	420,000	1,230,000	670,000
9.1.2.15.01.01.001	10	MALUKU BARAT DAYA	OP	290,000	420,000	1,230,000	670,000
<b>9.1.2.15.01.01.001</b>	<b>386.2</b>	<b>LUAR PROVINSI</b>					
9.1.2.15.01.01.001	1	ACEH	OP	300,000	330,000	770,000	650,000
9.1.2.15.01.01.001	2	SUMATERA UTARA	OP	178,000	275,000	746,000	453,000
9.1.2.15.01.01.001	3	RIAU	OP	185,000	245,000	590,000	430,000
9.1.2.15.01.01.001	4	KEPULAUAN RIAU	OP	227,000	273,000	625,000	500,000
9.1.2.15.01.01.001	5	JAMBI	OP	215,000	301,000	840,000	515,000
9.1.2.15.01.01.001	6	SUMATERA BARAT	OP	170,000	240,000	660,000	400,000
9.1.2.15.01.01.001	7	SUMATERA SELATAN	OP	215,000	290,000	745,000	510,000
9.1.2.15.01.01.001	8	LAMPUNG	OP	215,000	270,000	640,000	485,000
9.1.2.15.01.01.001	9	BENGKULU	OP	210,000	280,000	910,000	495,000
9.1.2.15.01.01.001	10	BANGKA BELITUNG	OP	295,000	385,000	800,000	680,000
9.1.2.15.01.01.001	11	BANTEN	OP	275,000	350,000	835,000	625,000
9.1.2.15.01.01.001	12	JAWA BARAT	OP	330,000	395,000	820,000	725,000
9.1.2.15.01.01.001	13	D.K.I. JAKARTA	OP	350,000	430,000	1,195,000	785,000
9.1.2.15.01.01.001	14	JAWA TENGAH	OP	190,000	260,000	675,000	450,000
9.1.2.15.01.01.001	15	D.I. YOGYAKARTA	OP	210,000	310,000	750,000	520,000
9.1.2.15.01.01.001	16	JAWA TIMUR	OP	335,000	395,000	1,350,000	730,000
9.1.2.15.01.01.001	17	BALI	OP	330,000	440,000	1,180,000	770,000
9.1.2.15.01.01.001	18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	280,000	420,000	760,000	700,000
9.1.2.15.01.01.001	19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	270,000	375,000	825,000	645,000

KODE KELOMPOK	NO.	KOTA / DAERAH TUJUAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
9.1.2.15.01.01.001	20	KALIMANTAN BARAT	OP	250,000	330,000	660,000	580,000
9.1.2.15.01.01.001	21	KALIMANTAN TENGAH	OP	240,000	340,000	1,030,000	580,000
9.1.2.15.01.01.001	22	KALIMANTAN TIMUR	OP	205,000	300,000	750,000	505,000
9.1.2.15.01.01.001	23	KALIMANTAN SELATAN	OP	190,000	295,000	730,000	485,000
9.1.2.15.01.01.001	24	KALIMANTAN UTARA	OP	205,000	300,000	750,000	505,000
9.1.2.15.01.01.001	25	SULAWESI UTARA	OP	185,000	270,000	375,000	455,000
9.1.2.15.01.01.001	26	GORONTALO	OP	175,000	250,000	1,295,000	425,000
9.1.2.15.01.01.001	27	SULAWESI BARAT	OP	235,000	320,000	790,000	555,000
9.1.2.15.01.01.001	28	SULAWESI SELATAN	OP	205,000	320,000	1,125,000	525,000
9.1.2.15.01.01.001	29	SULAWESI TENGAH	OP	230,000	385,000	735,000	615,000
9.1.2.15.01.01.001	30	SULAWESI TENGGARA	OP	195,000	295,000	685,000	490,000
9.1.2.15.01.01.001	31	MALUKU UTARA	OP	165,000	345,000	665,000	520,000
9.1.2.15.01.01.001	32	PAPUA	OP	290,000	475,000	990,000	770,000
9.1.2.15.01.01.001	33	PAPUA BARAT	OP	280,000	420,000	1,120,000	705,000

C. - ESELON III/GOL.IV

- ESELON IV/GOL. III

KODE KELOMPOK	NO.	KOTA / DAERAH TUJUAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
<b>9.1.2.15.01.01.001</b>	<b>386.1</b>	<b>LUAR DAERAH DALAM PROVINSI</b>				
9.1.2.15.01.01.001	1	KOTA AMBON	OP	250,000	300,000	700,000
9.1.2.15.01.01.001	2	SERAM BAGIAN BARAT	OP	270,000	380,000	1,000,000
9.1.2.15.01.01.001	3	SERAM BAGIAN TIMUR	OP	270,000	380,000	1,000,000
9.1.2.15.01.01.001	4	PULAU BURU	OP	285,000	400,000	1,100,000
9.1.2.15.01.01.001	5	BURU SELATAN	OP	285,000	410,000	1,050,000
9.1.2.15.01.01.001	6	KOTA TUAL	OP	285,000	420,000	1,200,000
9.1.2.15.01.01.001	7	MALUKU TENGGARA	OP	285,000	420,000	1,250,000
9.1.2.15.01.01.001	8	MALUKU TENGGARA BARAT	OP	285,000	420,000	1,230,000
9.1.2.15.01.01.001	9	KEPULAUAN ARU	OP	285,000	420,000	1,230,000
9.1.2.15.01.01.001	10	MALUKU BARAT DAYA	OP	290,000	420,000	1,230,000
<b>9.1.2.15.01.01.001</b>	<b>386.2</b>	<b>LUAR PROVINSI</b>				
9.1.2.15.01.01.001	1	ACEH	OP	300,000	350,000	850,000
9.1.2.15.01.01.001	2	SUMATERA UTARA	OP	200,000	340,000	750,000
9.1.2.15.01.01.001	3	RIAU	OP	200,000	300,000	700,000
9.1.2.15.01.01.001	4	KEPULAUAN RIAU	OP	200,000	250,000	650,000
9.1.2.15.01.01.001	5	JAMBI	OP	250,000	300,000	850,000
9.1.2.15.01.01.001	6	SUMATERA BARAT	OP	150,000	200,000	650,000
9.1.2.15.01.01.001	7	SUMATERA SELATAN	OP	200,000	350,000	700,000
9.1.2.15.01.01.001	8	LAMPUNG	OP	200,000	250,000	750,000
9.1.2.15.01.01.001	9	BENGKULU	OP	200,000	350,000	900,000
9.1.2.15.01.01.001	10	BANGKA BELITUNG	OP	250,000	350,000	950,000
9.1.2.15.01.01.001	11	BANTEN	OP	300,000	400,000	1,050,000
9.1.2.15.01.01.001	12	JAWA BARAT	OP	400,000	450,000	800,000
9.1.2.15.01.01.001	13	D.K.I. JAKARTA	OP	350,000	400,000	1,150,000
9.1.2.15.01.01.001	14	JAWA TENGAH	OP	200,000	250,000	650,000
9.1.2.15.01.01.001	15	D.I. YOGYAKARTA	OP	200,000	300,000	750,000
9.1.2.15.01.01.001	16	JAWA TIMUR	OP	300,000	400,000	1,350,000

KODE KELOMPOK	NO.	KOTA / DAERAH TUJUAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
9.1.2.15.01.01.001	17	BALI	OP	350,000	400,000	1,400,000
9.1.2.15.01.01.001	18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	300,000	400,000	800,000
9.1.2.15.01.01.001	19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	250,000	350,000	800,000
9.1.2.15.01.01.001	20	KALIMANTAN BARAT	OP	250,000	300,000	700,000
9.1.2.15.01.01.001	21	KALIMANTAN TENGAH	OP	200,000	300,000	1,150,000
9.1.2.15.01.01.001	22	KALIMANTAN TIMUR	OP	200,000	300,000	900,000
9.1.2.15.01.01.001	23	KALIMANTAN SELATAN	OP	250,000	350,000	800,000
9.1.2.15.01.01.001	24	KALIMANTAN UTARA	OP	200,000	300,000	850,000
9.1.2.15.01.01.001	25	SULAWESI UTARA	OP	200,000	250,000	700,000
9.1.2.15.01.01.001	26	GORONTALO	OP	200,000	250,000	1,250,000
9.1.2.15.01.01.001	27	SULAWESI BARAT	OP	200,000	300,000	950,000
9.1.2.15.01.01.001	28	SULAWESI SELATAN	OP	250,000	350,000	1,100,000
9.1.2.15.01.01.001	29	SULAWESI TENGAH	OP	250,000	350,000	850,000
9.1.2.15.01.01.001	30	SULAWESI TENGGARA	OP	200,000	250,000	650,000
9.1.2.15.01.01.001	31	MALUKU UTARA	OP	200,000	400,000	800,000
9.1.2.15.01.01.001	32	PAPUA	OP	300,000	450,000	1,000,000
9.1.2.15.01.01.001	33	PAPUA BARAT	OP	300,000	400,000	1,100,000

**BUPATI MALUKU TENGAH**

**TUASIKAL ABUA**











LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
 NOMOR : TAHUN 2022  
 TANGGAL : JANUARI 2022  
 TENTANG : STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.15.01.01.001	1	<b>SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA KABUPATEN/KECAMATAN PERGI PULANG (PP)</b>	Orang/Kali	150,000
9.1.2.23.04.01.001	2	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL</b>		
	2.1.	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	30,820,000
	2.2.	Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	24,150,000
	2.3.	Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	22,425,000
	2.4	Break Trough Laboratorium Kepemimpinan	Orang/Kali	5,000,000
	2.5	Uang Saku Diklat Kepemimpinan (PIM Tk III dan IV)	Orang/Kali	100,000
9.1.2.23.04.01.001	3	<b>SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN</b>		
	3.1	Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4,470,000
	3.2	Golongan III	Peserta/Angkatan	5,545,000
9.1.2.23.04.01.001	4	<b>SATUAN BIAYA KONTRIBUSI BIMBINGAN TEKNIS. PENDIDIKAN DAN APARATUR</b>		
	4.1	Tanpa Akomodasi Penginapan		
	a.	Golongan IV	Peserta/Angkatan	5,100,000
	b.	Golongan III	Peserta/Angkatan	5,100,000
	c.	Golongan II	Peserta/Angkatan	5,100,000
	d.	Golongan I	Peserta/Angkatan	5,100,000
	4.2	Dengan Akomodasi Penginapan dan Biaya Makan		
	a.	Golongan IV	Peserta/Angkatan	6,500,000
	b.	Golongan III	Peserta/Angkatan	6,500,000
	c.	Golongan II	Peserta/Angkatan	6,500,000
	d.	Golongan I	Peserta/Angkatan	6,500,000
	4.3	Biaya Kontribusi	Orang	5,100,000
		Biaya Kontribusi	Orang	6,000,000
		Biaya Kontribusi	Orang	5,500,000
		Biaya Kontribusi	Orang	7,000,000
1.3.2.02.01.01.006	5	<b>SATUAN BIAYA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR</b>		
	5.1	Kendaraan Bupati	Unit/Tahun	25,450,000
	5.2	Kendaraan Wakil Bupati	Unit/Tahun	22,260,000
	5.3	Kendaraan Ketua DPRD	Unit/Tahun	22,260,000
	5.4	Kendaraan Wakil Ketua DPRD	Unit/Tahun	20,350,000
	5.5	Kendaraan Sekretaris Daerah	Unit/Tahun	20,350,000
	5.6	Kendaraan Staf Ahli	Unit/Tahun	12,720,000
	5.7	Kendaraan Assisten Sekretaris Daerah	Unit/Tahun	12,720,000
	5.8	Kendaraan Kepala OPD/Kepala Bagian Sekretariat Daerah	Unit/Tahun	12,720,000
	5.9	Kendaraan Operasional Roda 4 (empat)	Unit/Tahun	14,740,000
	5.10	Kendaraan Operasional Lapangan ( <i>double gardan</i> )	Unit/Tahun	16,540,000
	5.11	Kendaraan Roda 4 (empat) Patroli Jalan Raya	Unit/Tahun	16,540,000
	5.12	Kendaraan Roda 6 (enam)	Unit/Tahun	12,340,000
	5.13	Kendaraan Laut ( <i>speed boat</i> )	Unit/Tahun	19,340,000
	5.14	Kendaraan Toyota Inova Pick Up Hilux	Unit/Tahun	29,000,000
	5.15	Kendaraan Patroli Jalan Raya	Unit/Tahun	16,540,000
	5.16	Kendaraan Bermotor	Unit/Tahun	25,000,000
	5.17	Kendaraan Roda 4 (empat) Crane	Unit	15,000,000
	5.18	Kendaraan Operasional Roda 4 (empat)	Unit	4,540,000
	5.19	Kendaraan Operasional Roda 4 (empat) Sedan Nisan Teana 2,5 CTV 2016	Unit/Tahun	40,000,000
	5.20	Kendaraan Mobil Jabatan	Unit	4,000,000
	5.21	Kendaraan Mobil Jabatan	Paket	11,325,600
9.1.2.03.12.01.001	6	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR</b>		
	6.1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	100,000
	6.2	Meja. Kursi dan Lemari Kantor	Unit/Tahun	300,000
	6.3	Meja. Kursi dan Lemari Kantor	Unit/Tahun	100,000
	6.3	Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	630,000
	6.4	Server	Unit/Tahun	1,500,000
	6.5	Printer	Unit/Tahun	600,000
	6.6	Scanner	Unit/Tahun	500,000
	6.7	Infocus	Unit/Tahun	500,000
	6.8	AC Split	Unit/Tahun	530,000
	6.9	Mesin Ketik	Unit/Tahun	200,000
	6.10	Sound System	Unit/Tahun	500,000
	6.11	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	6,250,000
	6.12	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	7,500,000
	6.13	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	8,820,000
	6.14	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	9,360,000
	6.15	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	11,520,000
	6.16	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	12,860,000
	6.17	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	13,770,000
	6.18	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	14,580,000
	6.19	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	15,430,000
	6.20	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	18,200,000
	6.21	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	19,940,000
	6.22	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	22,250,000
	6.23	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	27,590,000
	6.24	Mesin Ketik	Unit/Tahun	500,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.22.05.01.001	6.25	Genset 300 KVA	Hari	120,000
	6.26	Rumah Genset	Paket	5,000,000
	6.27	Printer	Unit	500,000
	6.28	Mesin Ketik	Unit/Tahun	500,000
	<b>7</b>	<b>SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON-GELAR</b>		
	7.1	Program Diploma I, III dan Diploma IV/ Strata 1		
	a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	-	Diploma I dan Diploma III	OT	15,300,000
	-	Diploma IV dan Strata 1	OT	16,200,000
	b.	Uang Buku dan Referensi per tahun		
9.1.2.11.05.01.001	-	Diploma I	OT	1,250,000
	-	Diploma III	OT	1,500,000
	-	Diploma IV dan Strata 1	OT	3,575,000
	7.2	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2		
	a.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	-	Strata 2	OT	50,000,000
	-	Strata 3, Spesialis 1, Spesialis 2	OT	100,000,000
	b.	Uang Saku dan Referensi per tahun		
	-	Strata 2 dan Spesialis 1	OT	2,000,000
	-	Strata 3 dan Spesialis 2	OT	2,250,000
9.1.2.11.05.01.001	7.3	Program Beasiswa Ners	Orang	18,000,000
	<b>8</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN PASEIN RUMAH SAKIT DAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL (PMKS)</b>		
	8.1	Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit		
	a.	Kelas I	OH	32,000
	b.	Kelas II	OH	28,000
	c.	Kelas III	OH	25,000
	d.	VIP	OH	40,000
	e.	VIP Covid 19	OH	75,000
	f.	Snack Jaga Pasien	OH	3,000
	8.2	Pengadaan Bahan Makanan untuk Penyandang Masalah Sosial (PMKS)	OH	25,000
9.1.2.11.05.01.001	<b>9</b>	<b>SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</b>		
	9.1	Memiliki Sampai dengan 40 Pegawai	Satker/Tahun	61,000,000
9.1.2.11.02.01.001	9.2	Memiliki lebih dari 40 Pegawai	OT	1,525,000
	<b>10</b>	<b>SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN</b>		
	10.1	Makan dan Minum Rapat		
	a.	Makan	Orang/Porsi	45,000
	b.	Minum	Orang/Snach	15,000
	10.2	Makan dan Minum Kegiatan (Pelatihan. Sosialisasi. Penyuluhan dll)		
	a.	Makan	Orang/Porsi	45,000
	b.	Minum	Orang/Snach	15,000
	10.3	Makan dan Minum Tamu		
	a.	Makan	Orang/Porsi	45,000
9.1.2.11.05.01.001	b.	Minum	Orang/Snach	15,000
	10.4	Makan dan Minum Penjagaan Kantor / Rumah Dinas		
	a.	Makan	Orang/Porsi	35,000
	b.	Minum	Orang/Snach	10,000
	10.5	Makan dan Minum Uji Kompetensi PBJ	Orang/Porsi	100,000
	10.6	Makan dan Minum Pelatih Tematik	Paket	50,000
	<b>11</b>	<b>SATUAN BIAYA MAKANAN DAN BELANJA BAHAN MAKANAN PADA RUMAH JABATAN BUPATI. WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH</b>		
	11.1	Satuan Biaya Belanja Makanan		
	a.	Cathering	Orang/Porsi	75,000
	b.	Nasi ikan	Orang/Porsi	27,500
9.1.2.03.12.01.001	c.	Nasi ikan telur	Orang/Porsi	33,000
	d.	Nasi ayam/daging	Orang/Porsi	45,000
	11.2	Satuan Biaya Belanja Bahan Makanan		
	a.	Bupati	Bulan	35,000,000
	b.	Wakil Bupati	Bulan	28,500,000
	c.	Sekretaris Daerah	Bulan	15,000,000
	<b>12</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN /ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU</b>	Pegawai/Tahun	1,600,000
9.1.2.03.12.01.001	<b>13</b>	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN</b>		
	13.1	Gedung Bertingkat	m <sup>2</sup> /Tahun	187,000
	13.2	Gedung Tidak Bertingkat	m <sup>2</sup> /Tahun	130,000
9.1.2.07.02.01.001	13.3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m <sup>2</sup> /Tahun	13,000
	<b>14</b>	<b>SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN</b>		
	14.1	Ruang Besar 100-300 Peserta	Per hari	5,000,000
	14.2	Ruang Sedang 50-100 Peserta	Per hari	1,500,000
9.1.2.08.01.01.001	14.3	Ruang Kecil 50 Peserta	Per hari	750,000
	<b>15</b>	<b>SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN</b>		
	15.1	Roda Empat	Per hari	800,000
	15.2	Roda Enam/Bus Sedang	Per hari	1,500,000
1.5.2.01.01.01.002	15.3	Roda Enam/Bus Besar	Per hari	2,000,000
	<b>16</b>	<b>SATUAN BIAYA SEWA SOUND SYSTEM</b>		
	16.1	Sound System Ruangan	Per hari	3,000,000
	16.2	Sound System Ruangan	Per hari	1,000,000
	16.3	Sound System Lapangan Standar	Per KW	1,000
	16.4	Sound System Lapangan Lux	Per KW	1,500
	16.5	Sound System	Paket	700,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		16.6 Sound System	Buah	70,000
9.1.2.10.04.01.001	17	<b>SATUAN BIAYA SEWA GENERATOR</b>	Per hari	3,000,000
9.1.2.10.05.01.001	18	<b>SATUAN BIAYA SEWA TENDA</b>		
		18.1 Tenda Biasa	Per hari	350,000
		18.2 Tenda Biasa	Per hari	450,000
		18.3 Tenda Lux	Per hari	500,000
		18.4 Tenda Lux Lengkap	Per hari	750,000
		18.5 Tenda	Paket	1,500,000
9.1.2.03.12.01.001	19	<b>SATUAN BIAYA SEWA MEUBELER</b>		
		19.1 Sewa Kursi	Per hari	5,000
		19.2 Sewa Kursi	Per hari	7,000
		19.3 Sewa Kursi	Per Paket	200,000
		19.4 Sewa Sofa	Per hari	500,000
		19.5 Sewa Meja	Per hari	250,000
		19.5 Sewa Meja	Per Buah	50,000
9.1.2.07.02.01.001	20	<b>SATUAN BIAYA SEWA DEKORASI</b>		
		20.1 Untuk Ruang Besar	Per hari	1,500,000
		20.2 Untuk Ruang Kecil	Per hari	750,000
		20.3 Untuk Luar Ruangan	Per Kegiatan	2,000,000
		20.4 Dekorasi	Per Paket	500,000
9.1.2.10.07.01.001	21	<b>SATUAN BIAYA SEWA FASILITAS DI KAWASAN PARIWISATA</b>		
		21.1 Sewa Alat Diving	Per Paket	1,500,000
		21.2 Sewa Buku	Per Buku	30,000
		21.3 Sewa Speed Boat/Katinting	Per hari	800,000
		21.4 Sewa Alat Snorking	Per Paket	750,000
		21.5 Sewa Alat Musik Orgen dan Pemain	Per hari	1,500,000
		21.6 Sewa Spadbood	Km	100,000
9.1.2.10.07.01.001	22	<b>SATUAN BIAYA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN PELATIHAN PEMANDU WISATA BELANJA DAN KULINER</b>		
		22.1 Barang Untuk Peserta	OK	250,000
		22.2 Alat/Bahan Peraga Kuliner	OK	150,000
9.1.2.10.07.01.001	23	<b>SATUAN BIAYA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN PELATIHAN PEMANDU WISATA BELANJA DAN WARISAN BUDAYA</b>		
		23.1 Biaya Masuk Daya Tarik Wisata/Objek Wisata	OH	25,000
9.1.2.10.07.01.001	24	<b>SATUAN BIAYA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN PELATIHAN PEMANDU WISATA TRAKING DAN TEMATIK</b>		
		24.1 Jasa Penerjemah Lokal	OH	100,000
		24.2 Jasa Penunjuk Jalan	OH	150,000
		24.3 Jasa Buruh Pemanggul Barang	OT	150,000
9.1.2.03.12.01.001	25	<b>SATUAN BIAYA JASA BONGKAR PASANG ATRIBUT DESTINASI WISATA</b>	OK	200,000
9.1.2.03.12.01.001	26	<b>SATUAN BIAYA PEMBUATAN DAN PEMASANGAN SPANDUK</b>		
		26.1 Pembuatan Spanduk	Per Meter	60,000
		26.2 Pemasangan Spanduk	Perbuah	50,000
9.1.2.03.12.01.001	27	<b>SATUAN BIAYA PEMASANGAN BALEHO</b>		
		27.2 Pemasangan Baleho	Per Buah	200,000
		27.3 Pemasangan Baleho	Per Meter	20,000
9.1.2.03.12.01.001	28	<b>SATUAN BIAYA PELIPUTAN MEDIA ELETRONIK DAN MEDIA CETAK</b>		
		28.1 Media Elektronik	Paket	50,000,000
		28.2 Media Elektronik	Paket	25,203,000
		28.3 Media Elektronik	Paket	3,000,000
		28.4 Media Elektronik	Paket	1,500,000
		28.5 Media Cetak	Per Berita	500,000
9.1.2.03.12.01.001	29	<b>SATUAN BIAYA MEDIA CETAK IKLAN DAN MEDIA ONLINE</b>		
		29.1 Media Cetak Harian	Eksemplar	5,000
		29.2 Media Cetak Harian	Buah	100,000
		29.3 Media Cetak Mingguan	Eksemplar/ Buah	100,000
		29.4 Media Cetak Bulanan	Eksemplar/Buah	200,000
		29.5 Media Parlementaria	Paket	150,000,000
		29.6 Media Online	Bulan	1,000,000
		29.7 Suplemen Khusus Media Nasional	Bulan	15,000,000
		29.8 Suplemen Khusus Media Online	Bulan	9,000,000
		29.9 Suplemen Khusus kerjasama Media lokal	Bulan	20,750,000
		29.10 Kerjasama Media Lokal	Bulan	9,000,000
		29.11 Pemberitaan Media Elektronik Lokal	Bulan	1,000,000
		29.12 Pemberitaan Media Elektronik Nasional	Bulan	6,000,000
		29.13 Pemberitaan Media Elektronik TV Kabel	Bulan	5,000,000
		29.14 Pemberitaan Media Elektronik TV Streaming	Bulan	1,500,000
		29.15 Iuran TV Kabel	Bulan	40,000
		29.16 Surat Kabar	Eksemplar/ Bulan	100,000
		29.17 Surat Kabar	Eksemplar/ Bulan	75,000
		29.18 Surat Kabar	Eksemplar	15,000
		29.19 Surat Kabar	Eksemplar	7,000
		29.20 Penerbitan Buletin	Paket	200,000,000
		29.21 Media Cetak	Paket	20,640,000
		29.22 Cetak Data Keluarga Beresiko Stunting	OB	5,000
		29.23 Media Cetak Online	Buah	5,000
		29.24 Media Elektronik	Paket	50,000,000
		29.25 Media Cetak Bulanan	Eksemplar	60,000
		29.26 Media Cetak Mingguan	Eksemplar	15,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.03.12.01.001	30	29.27 Media Cetak Harian	Eksemplar	7,000
		29.28 Penerbitan Buletin/ Surat Kabar/ Majalah	Paket	100,000,000
		29.29 Penerbitan Parlementaria	Paket	550,000,000
		29.30 Iklan Media Online	Perbuah	500,000
		<b>SATUAN BIAYA PEMBUATAN IKLAN MEDIA CETAK DAN ONLINE</b>		
		30.1 Iklan Besar Warna 900 cm2	Per Iklan	2,500,000
		30.2 Iklan Besar Warna 440 cm2	Per Iklan	2,000,000
		30.3 Iklan Sedang Hitam Putih 270 cm2	Per Iklan	1,000,000
		30.4 Iklan Kecil Hitam Putih 120 cm2	Per Iklan	250,000
		30.5 Iklan Media Cetak 400 cm²	Buah	1,000,000
9.1.2.03.12.01.001	31	30.6 Iklan Media Cetak 100 cm²	Buah	500,000
		30.7 Iklan	Paket	100,000,000
		30.8 Iklan	Buah	625,000
		30.9 Iklan	Per Tahun	75,000
		<b>SATUAN BIAYA PEMBUATAN VIDIO PROMOSI DAN BIAYA JASA DESAIN BUKU/MAJALAH/TABLOID/KALENDER WISATA/BOOKLET/LEAFLET/BROSUR PROMOSI WISATA</b>		
		31.1 Jasa Pembuatan Vidio	Durasi/Menit	1,700,000
		31.2 Jasa Desain Layout		
		a. Booklet	Halaman	35,000
		b. Buku/Majalah	Halaman	45,000
		c. Tabloid	Halaman	75,000
9.1.2.27.02.01.001	32	d. Brosur	Lembar	200,000
		e. Leaflet Lipatan 6	Lembar	200,000
		f. Leaflet Lipatan 12	Lembar	350,000
		g. Leaflet Lipatan 24	Lembar	500,000
		h. Formulir	Lembar	25,000
		i. Kalender Wisata Gantung	Lembar	100,000
		j. Kalender Wisata Duduk	Lembar	150,000
		31.3 Jasa Desain Cover		
		a. Booklet	Lembar	300,000
		b. Buku/Majalah	Lembar	300,000
9.1.2.03.12.01.001	33	c. Tabloid	Lembar	350,000
		31.4 Jasa Desain Plakat	Buah	300,000
		<b>SATUAN BIAYA BELANJA UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA /PIHAK LAIN/MASYARAKAT</b>		
		32.1 Festival Pattimura/Festival Pamahanu		
		Lomba Perahu Semang		
		a. Juara I	Tim	3,500,000
		b. Juara II	Tim	3,000,000
		c. Juara III	Tim	2,500,000
		d. Juara Harapan I	Tim	2,000,000
		e. Juara Harapan II	Tim	1,500,000
9.1.2.03.12.01.001	34	f. Juara Harapan III	Tim	1,000,000
		32.2 Festival Banda		
		Lomba Perahu Belang Adat/Nasional		
		a. Juara I	Tim	7,000,000
		b. Juara II	Tim	6,000,000
		c. Juara III	Tim	5,000,000
		d. Juara Harapan I	Tim	4,000,000
		e. Juara Harapan II	Tim	3,000,000
		f. Juara Harapan III	Tim	2,000,000
		32.3 Turnamen Volly Ball Kelurahan Lesane	Organisasi	20,000,000
9.1.2.03.12.01.001	35	32.4 Turnamen Sepak Bola Negeri Morella	Organisasi	20,000,000
		32.5 Turnamen Sepak Bola Negeri Hilla	Organisasi	20,000,000
		32.6 PSSI Kabupaten Maluku Tengah	Organisasi	40,000,000
		32.7 Pengurus Halawang Football Club (Halawang FC) Negeri Hilla	Organisasi	50,000,000
		32.8 Pengurus Tunas Harapan Football Club Tunas Harapan FC) Negeri Liang	Organisasi	15,000,000
		32.9 Kwarcab Pramuka Kabupaten Maluku Tengah	Organisasi	300,000,000
		32.10 Kelompok Usaha Wisata Sapaindo Permai	Kelompok	10,000,000
		32.11 Panitia Penyelenggara Festifal Cristina Martha Tiahahu Kec Nusa laut	Organisasi	50,000,000
		<b>SATUAN BIAYA BELANJA PENGHARGAAN ATAS PRESTASI</b>		
		33.1 Stimulan Penari Tunggal	Orang	1,000,000
9.1.2.03.12.01.001	36	33.2 Stimulan Penyanyi Tunggal	Orang	1,000,000
		33.3 Stimulan Pembaca Hikayat/Sejarah/Puisi	Orang	1,000,000
		33.4 Stimulan Kelompok Tari/Kesenian Pendukung Kegiatan Kepariwisataaan (Dengan Live Musik)	Tim	10,000,000
		33.5 Stimulan Kelompok Tari/Kesenian Pendukung Kegiatan Kepariwisataaan (Dengan Live Musik)	Tim	7,500,000
		33.6 Stimulan Pentas Group Band	Tim	15,000,000
		33.7 Stimulan Kepada Peserta Lomba Desain Mitif Cele	Orang	250,000
		33.8 Stimulan Kepada Peserta Lomba Cipta Motif Batik	Orang	250,000
		33.9 Peserta Lomba Sapta Pesona	Orang	250,000
		<b>SATUAN BIAYA DOKUMENTASI</b>	Per Paket/Kegiatan	300,000
		<b>SATUAN BIAYA PEMBUATAN LAPORAN</b>		
9.1.2.12.01.01.001	37	35.1 Laporan Akhir/Laporan Tahunan	Buku	150,000
		35.2 Laporan Triwulan	Buku	130,000
		35.3 Laporan Bulanan	Buku	100,000
		<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS</b>		
		36.1 Kemeja Putih	Buah	2,500,000
		36.2 Pakaian Batik	Buah	2,000,000
		36.3 Pakaian Korpri	Buah	3,000,000
		36.4 Pakaian Nasional	Stel	2,800,000
		36.5 Pakaian Dinas Harian Lengkap	Stel	3,600,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		36.6 Pakaian Dinas Satpol PP Lengkap	Stel	3,500,000
		36.7 Pakaian Sipil Harian	Stel	3,600,000
		36.8 Pakaian Sipil Resmi	Stel	3,600,000
		36.9 Pakaian Dinas Upacara	Stel	4,000,000
		36.10 Pakaian Sipil Lengkap	Stel	3,600,000
		36.11 Pakaian Pramuka	Stel	3,000,000
		36.12 Pakaian Olah Raga	Stel	2,500,000
		36.13 Pakaian Daerah	Stel	3,100,000
		36.14 Pakaian Kerja Lapangan (Pamdai)	Stel	900,000
		36.15 Pakaian Dinas Harian Lengkap	Stel	600,000
		36.16 Pakaian Kerja Lapangan	Buah	460,000
9.1.2.12.01.01.001	37	<b>SATUAN BIAYA KEBUTUHAN PASKIBRAKA</b>		
		37.1 Pangkas Rambut Pria	Orang	75,000
		37.2 Pangkas Rambut Wanita	Orang	50,000
		37.3 Rias Wanita	Orang	200,000
		37.4 Rias Pria	Orang	50,000
		37.5 Pas Foto Peserta	Orang	30,000
9.1.2.15.01.01.001	38	<b>SATUAN BIAYA TIM TEKNIS</b>		
		38.1 Dukungan Tim Teknis	Paket	50,000,000
		38.2 Tim Teknis	Paket	40,000,000
9.1.2.24.01.01.001	39	<b>SATUAN BIAYA KONTRIBUSI FASILITASI PERDA DAN PERBUP</b>		
		39.1 Biaya Kontribusi Fasilitasi PERDA	Per PERDA	5,000,000
		39.2 Biaya Kontribusi Fasilitasi PERBUP	Per PERBUP	5,000,000
9.1.2.11.02.01.001	40	<b>SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN BIAYA OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB - DAK)</b>		
		Biaya Makanan dan Minum Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Program Bangsa Kencana	OB	45,000
		40.2 Biaya Makanan dan Minum Rapat Tenaga Lini Lapangan	OB	25,000
		40.3 Biaya Makanan dan Minum Identifikasi Kasus Stunting	OB	45,000
		40.4 Biaya Makanan dan Minum Evaluasi Hasil Audit Stunting	OB	45,000
		40.5 Biaya Makanan dan Minum Akseptor MOW	OB	381,000
		40.6 Biaya Makanan dan Minum Akseptor Cabut Implant	OB	29,000
		40.7 Biaya Makanan dan Minum Rapat Pembinaan Pelayanan KB Di Faskes	OB	50,000
		40.8 Biaya Snack		
		a. Snack Mini Lokakarya	OB	25,000
		b. Snack Penyuluhan	OB	25,000
		c. Snack Pengelola Data	OB	25,000
		d. Snack Pembinaan Kader IMP	OB	25,000
		e. Snack Akseptor IUD	OB	26,600
		f. Snack Akseptor Implant	OB	13,600
		g. Snack Rapat Koordinasi Pelayanan KB Di Faskes	OB	25,000
		h. Snack Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB	OB	25,000
		i. Snack Kegiatan Orientasi Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok	OB	25,000
9.1.2.24.01.01.001	41	<b>SATUAN BIAYA JASA TENAGA MEDIS</b>		
		41.1 Pelayanan KB IUD dan Implant	OH	100,000
		41.2 Pelayanan KB IUD	OK	100,000
		41.3 Pelayanan KB Implant	OK	100,000
		41.4 Pelayanan KB MOW	OK	1,782,700
		41.5 Pelayanan KB Cabut Implant	OK	100,000
		41.6 Pelayanan Test Covid-19	OK	300,000
9.1.2.03.12.01.001	42	<b>SATUAN BIAYA COLACATION SERVER</b>	Bulan	6,200,000
9.1.2.15.01.01.001	43	<b>SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PENDAMPING DAN SISWA KEGIATAN LOMBA OLIMPIADE SAINS SD DAN SMP TINGKAT KABUPATEN. PROVINSI DAN NASIONAL</b>		
		43.1 Transportasi Pendamping Siswa Tingkat Kabupaten dari :		
		a. Kecamatan Kota Masohi	OT	110,000
		b. Kecamatan Amahai	OT	110,000
		c. Kecamatan Teluk Elpaputih	OT	165,000
		d. Kecamatan Teon Nila Serua	OT	110,000
		e. Kecamatan Seram Utara	OT	550,000
		f. Kecamatan Seram Utara Barat	OT	550,000
		g. Kecamatan Tehoru	OT	330,000
		h. Kecamatan Banda	OT	1,430,000
		i. Kecamatan Saparua	OT	550,000
		j. Kecamatan Saparua Timur	OT	550,000
		k. Kecamatan Nusalaut	OT	550,000
		l. Kecamatan P. Haruku	OT	550,000
		m. Kecamatan Salahutu	OT	605,000
		n. Kecamatan Leihitu	OT	825,000
		o. Kecamatan Leihitu Barat	OT	825,000
		p. Kecamatan Seram Utara Timur Kobi	OT	605,000
		q. Kecamatan Seram Utara Timur Seti	OT	660,000
		r. Kecamatan Telutih	OT	550,000
		43.2 Transportasi Pendamping Siswa Tingkat Provinsi	OT	825,000
		43.3 Transportasi Pendamping Siswa Tingkat Nasional	OT	6,150,000
		43.4 Transportasi Siswa Tingkat Kabupaten dari :		
		a. Kecamatan Kota Masohi	OT	110,000
		b. Kecamatan Amahai	OT	110,000
		c. Kecamatan Teluk Elpaputih	OT	165,000
		d. Kecamatan Teon Nila Serua	OT	110,000
		e. Kecamatan Seram Utara	OT	550,000
		f. Kecamatan Seram Utara Barat	OT	550,000



KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		g. Kecamatan Tehoru	OT	330,000
		h. Kecamatan Banda	OT	1,430,000
		i. Kecamatan Saparua	OT	550,000
		j. Kecamatan Saparua Timur	OT	550,000
		k. Kecamatan Nusalaut	OT	550,000
		l. Kecamatan P. Haruku	OT	550,000
		m. Kecamatan Salahutu	OT	605,000
		n. Kecamatan Leihitu	OT	825,000
		o. Kecamatan Leihitu Barat	OT	825,000
		p. Kecamatan Seram Utara Timur Kobi	OT	605,000
		q. Kecamatan Seram Utara Timur Seti	OT	660,000
		r. Kecamatan Telutih	OT	550,000
	43.5	Transportasi Siswa Tingkat Provinsi	OT	825,000
	43.6	Transportasi Siswa Tingkat Nasional	OT	6,150,000
9.1.2.03.12.01.001	44	<b>SATUAN BIAYA BELANJA BARANG DAN JASA JKN</b>	Bulan	2,000,000
9.1.2.03.12.01.001	45	<b>SATUAN BIAYA BELANJA BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN COVID-19</b>	Bulan	3,000,000,000
9.1.2.03.12.01.001	46	<b>SATUAN BIAYA BELANJA MODAL YANG BERSUMBER DARI DANA JKN</b>	Bulan	60,000,000
9.1.2.03.12.01.001	47	<b>SATUAN BIAYA BELANJA MODAL UNTUK KEBUTUHAN PENANGANAN COVID-19</b>	Bulan	60,000,000
9.1.2.03.08.01.001	48	<b>SATUAN BIAYA BELANJA JASA KALIBRASI ALAT KESEHATAN</b>		
	48.1	Belanja Jasa Kalibrasi Alat General X-Ray Purpose	Unit	1,872,000
	48.2	Belanja Jasa Kalibrasi Alat X-Ray Mobile	Unit	1,400,000
	48.3	Belanja Jasa Kalibrasi Alat CT Scan	Unit	1,054,000
	48.4	Belanja Jasa Kalibrasi Computer Radography	Unit	600,000
	48.5	Belanja Maitanance dan Servis Alkes Fisioterapi	Unit	5,000,000
	48.6	Belanja Jasa Kalibrasi TLD	Unit	150,000
	48.7	Belanja Jasa Kalibrasi Pengukuran Paparan Radiasi GP	Unit	750,000
	48.8	Belanja Jasa Kalibrasi Jasa Kalibrasi Bedside Monitor	Unit	588,000
	48.9	Belanja Jasa Kalibrasi Blood Pressure Monitor	Unit	162,000
	48.10	Belanja Jasa Kalibrasi Centrifuge	Unit	240,000
	48.11	Belanja Jasa Kalibrasi CPAP	Unit	396,000
	48.12	Belanja Jasa Kalibrasi DC Shock	Unit	300,000
	48.13	Belanja Jasa Kalibrasi Dental Unit	Unit	168,000
	48.14	Belanja Jasa Kalibrasi ECG Recorder	Unit	180,000
	48.15	Belanja Jasa Kalibrasi ESU	Unit	348,000
	48.16	Belanja Jasa Kalibrasi Examination Lamp	Unit	192,000
	48.17	Belanja Jasa Kalibrasi Fetal Ddetector	Unit	156,000
	48.18	Belanja Jasa Kalibrasi Flow Meter	Unit	192,000
	48.19	Belanja Jasa Kalibrasi Infant Warmer	Unit	240,000
	48.20	Belanja Jasa Kalibrasi Infusion Pump	Unit	288,000
	48.21	Belanja Jasa Kalibrasi Infant Inkubator	Unit	324,000
	48.22	Belanja Jasa Kalibrasi LAB Refrigerator	Unit	354,000
	48.23	Belanja Jasa Kalibrasi Rotator	Unit	144,000
	48.24	Belanja Jasa Kalibrasi Lampu Operasi	Unit	192,000
	48.25	Belanja Jasa Kalibrasi Nebulizer	Unit	228,000
	48.26	Belanja Jasa Kalibrasi Oven	Unit	396,000
	48.27	Belanja Jasa Kalibrasi Photo Therapy	Unit	204,000
	48.28	Belanja Jasa Kalibrasi Portable O2 Concentrate	Unit	288,000
	48.29	Belanja Jasa Kalibrasi Pulse Oxymetry	Unit	180,000
	48.30	Belanja Jasa Kalibrasi Sphygmomanometer	Unit	84,000
	48.31	Belanja Jasa Kalibrasi Suction Pump	Unit	144,000
	48.32	Belanja Jasa Kalibrasi Syringe Pump	Unit	288,000
	48.33	Belanja Jasa Kalibrasi Timbangan Bayi	Unit	180,000
	48.34	Belanja Jasa Kalibrasi Timbangan Dewasa	Unit	200,000
	48.35	Belanja Jasa Kalibrasi Ultrasonografi (USG)	Unit	300,000
	48.36	Belanja Jasa Kalibrasi Ultrasonografi (USG) 3D/4D	Unit	350,000
	48.37	Belanja Jasa Kalibrasi UV Sterilizer	Unit	180,000
	48.38	Belanja Jasa Ventilator	Unit	396,000
	48.39	Belanja Jasa Kalibrasi Vaporizer	Unit	396,000
	48.40	Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kimia Darah	Unit	252,000
	48.41	Belanja Jasa Kalibrasi Alat Hematology	Unit	400,000
	48.42	Belanja Jasa Kalibrasi Autopulse	Unit	500,000
	48.43	Belanja Jasa Kalibrasi Pulse Oximeter Digital	Unit	150,000
	48.44	Belanja Jasa Kalibrasi Kereta Dorong Bayi	Unit	250,000
	48.45	Belanja Jasa Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan	Paket	109,921,010
9.1.2.03.12.01.001	49	<b>SATUAN BIAYA JASA PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT</b>		
	49.1	Belanja Jasa Perizinan. Pemuatan. Packing. Angkut. dll	Triwulan	200,000,000
	49.2	Belanja Jasa Pengelola Limbah Medis Rumah Sakit	Triwulan	125,000,000
	49.3	Belanja Jasa Pengelola Limbah Medis Rumah Sakit	Triwulan	62,500,000
	49.4	Belanja Jasa Pengelola Limbah	Triwulan	57,500,000
	49.5	Belanja Jasa Pengelola Limbah	Triwulan	100,000,000
9.1.2.03.12.01.001	50	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG RUMAH SAKIT</b>	Tahun	#REF!
9.1.2.03.12.01.001	51	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM</b>	Tahun	150,000,000
9.1.2.03.12.01.001	52	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT</b>		
	52.1	Belanja Pemeliharaan AC	Unit	750,000
	52.2	Belanja Pemeliharaan TV	Unit	500,000
	52.3	Belanja Pemeliharaan Komputer	Unit	750,000
	52.4	Belanja Pemeliharaan Laptop	Unit	1,000,000
	52.5	Belanja Pemeliharaan Printer	Unit	500,000
	52.6	Belanja Pemeliharaan Airphone/Telepon	Unit	400,000
	52.7	Belanja Pemeliharaan Mesin Cuci	Kali	300,000
	52.8	Belanja Pemeliharaan Mesin Genset	Bulan	800,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.03.12.01.001	52	52.9 Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air	Bulan	350,000
		52.10 Belanja Pemeliharaan Airphone/Telepon	Bulan	350,000
		52.11 Belanja Pemeliharaan TV Kabel	Bulan	500,000
		52.12 Belanja Pemeliharaan Kipas Angin	Bulan	100,000
		52.13 Belanja Pemeliharaan Staval	Bulan	500,000
		52.14 Belanja Pemeliharaan Mesin Potong Rambut	Unit	500,000
		52.15 Belanja Pemeliharaan Cok Rol	Buah	150,000
		52.16 Belanja Pemeliharaan Mesin Incenerator	Bulan	2,500,000
		52.17 Belanja Pemeliharaan Mesin Ipal	Bulan	2,500,000
		52.18 Belanja Pemeliharaan Mesin Ipal	Bulan	1,000,000
		52.19 Belanja Pemeliharaan Pemeriksaan sampel Ipal	Bulan	2,000,000
		52.20 Beban Pemeliharaan Alat Kantor RSUD Masohi	Tahun	90,000,000
		52.21 Beban Pemeliharaan Prasarana Fasilitas RS	Paket	35,000,000
		<b>53 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN</b>		
		53.1 Belanja Pemeliharaan Alkes X-Ray General Purpose	Unit	8,000,000
		53.2 Belanja Pemeliharaan AlkesX-Ray Mobile	Unit	8,000,000
		53.3 Belanja Pemeliharaan AlkesCT Scan	Unit	8,000,000
		53.4 Belanja Pemeliharaan Alkes Computer Radiography	Unit	4,000,000
		53.5 Belanja Pemeliharaan Alkes Bed Side Monitor	Unit	1,500,000
		53.6 Belanja Pemeliharaan Alkes Blood Pressure Monitor	Unit	750,000
		53.7 Belanja Pemeliharaan Alkes Centrifuge	Unit	500,000
		53.8 Belanja Pemeliharaan Alkes CPAP	Unit	750,000
		53.9 Belanja Pemeliharaan AlkesDC Shock	Unit	840,000
		53.10 Belanja Pemeliharaan Alkes Dental Unit	Unit	3,000,000
		53.11 Belanja Pemeliharaan Alke ECG Recorder	Unit	800,000
		53.12 Belanja Pemeliharaan Alkes ESU	Unit	1,000,000
		53.13 Belanja Pemeliharaan Alkes Examination lamp	Unit	300,000
		53.14 Belanja Pemeliharaan Alkes Fetal Detector	Unit	300,000
		53.15 Belanja Pemeliharaan Alkes Flow meter	Unit	500,000
		53.16 Belanja Pemeliharaan Alkes Infant Warmer	Unit	1,000,000
		53.17 Belanja Pemeliharaan Alkes Infusion pump	Unit	500,000
		53.18 Belanja Pemeliharaan Alkes Inkubator Perawatan	Unit	1,000,000
		53.19 Belanja Pemeliharaan Alkes Lampu Operasi	Unit	1,500,000
		53.20 Belanja Pemeliharaan Alkes Nebulizer	Unit	1,000,000
		53.21 Belanja Pemeliharaan Alkes Phototerapy Unit	Unit	1,500,000
		53.22 Belanja Pemeliharaan Alkes Portable O2 Concentrat	Unit	1,000,000
		53.23 Belanja Pemeliharaan Alkes Pulse Oximeter	Set	500,000
		53.24 Belanja Pemeliharaan Alkes Sphygmomanometer	Unit	500,000
		53.25 Belanja Pemeliharaan AlkesSuction pump	Unit	1,000,000
		53.26 Belanja Pemeliharaan Alkes Syringe Pump	Unit	1,000,000
		53.27 Belanja Pemeliharaan Alkes Timbangan bayi	Unit	500,000
		53.28 Belanja Pemeliharaan AlkesUSG	Unit	1,500,000
		53.29 Belanja Pemeliharaan Alkes UV Sterilisor	Unit	2,000,000
		53.30 Belanja Pemeliharaan Alkes Ventilator	Unit	1,500,000
		53.31 Belanja Pemeliharaan AlkesVaporizer	Unit	1,500,000
		53.32 Belanja Pemeliharaan Alkes Blood Bank	Unit	500,000
		53.33 Belanja Pemeliharaan Alkes Kimia Analyzer	Unit	17,500,000
		53.34 Belanja Pemeliharaan Alkes Vascoluminator	Unit	1,000,000
		53.35 Belanja Pemeliharaan Alkes Kereta oksigen	Unit	500,000
		53.36 Belanja Pemeliharaan Alkes Brankart	Unit	250,000
9.1.2.03.12.01.001	54	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN MOBIL AMBULANCE</b>		
		54.1 Mobil Ambulance	Tahun	18,950,000
		54.2 Service Spare Part Ambulance	Tahun	15,000,000
		54.3 Service Mobil Direktur	Bulan	1,000,000
9.1.2.03.12.01.001	55	<b>SATUAN BIAYA BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGANEKARAGAMAN KOMSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL</b>		
		55.1 Belanja Bahan Pelatihan Tata Boga	Paket	2,000,000
		55.2 Belanja Bahan Dekorasi	Paket	4,000,000
		55.3 Belanja Jasa Pengetikan Buku Resep B2SA	Buah	35,000
		55.4 Belanja Jasa Pembuat Buku Resep	Buah	100,000
		55.5 Belanja Jasa Pembuat Buku Resep	Buah	200,000
9.1.2.03.12.01.001	56	<b>SATUAN BIAYA BELANJA HADIAH UANG UNTUK JUARA LOMBA FESTIVAL B2SA DALAM RANGKA HUT RI DAN HUT KOTA</b>		
		56.1 Juara I	1 Kali	4,000,000
		56.2 Juara II	1 Kali	3,500,000
9.1.2.03.12.01.001	57	56.3 Juara III	1 Kali	3,000,000
		56.4 Juara Harapan I	1 Kali	2,500,000
		56.5 Juara Harapan II	1 Kali	2,000,000
		56.6 Juara Harapan III	1 Kali	1,500,000
		<b>SATUAN BIAYA BELANJA HADIAH PIALA UNTUK JUARA LOMBA FESTIVAL B2SA DALAM RANGKA HUT RI DAN HUT KOTA</b>		
		57.1 Juara I	1 Kali	750,000
		57.2 Juara II	1 Kali	700,000
		57.3 Juara III	1 Kali	600,000
		57.4 Juara Harapan I	1 Kali	500,000
		57.5 Juara Harapan II	1 Kali	450,000
		57.6 Juara Harapan III	1 Kali	400,000
9.1.2.03.12.01.001	58	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU PESERTA KEGIATAN PELATIHAN. BIMTEK. SOSIALISASI.DAN LAIN-LAIN</b>		
		58.1 Uang Saku Peserta	OH	100,000
		58.2 Uang Saku Peserta	OH	50,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.03.12.01.001	59	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU PATROLI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN</b>	OK	150,000
9.1.2.03.12.01.001	60	<b>SATUAN BIAYA BELANJA PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH</b>		
	60.1	Belanja Bahan		
	a.	Bahan Percontohan Sektor Pertanian dan Perkebunan	1 Paket	1,500,000
	b.	Bahan Percontohan Sektor Perikanan	1 Paket	1,500,000
	c.	Bahan Percontohan Sektor Pariwisata	1 Paket	1,500,000
	d.	Bahan Percontohan Sektor Ekonomi Kreatif	1 Paket	1,500,000
	60.2	Belanja Sewa Stand Pameran		
	a.	Jakarta	M2	3,250,000
	b.	Ambon	M2	1,500,000
	c.	Masohi	M2	1,000,000
	60.3	Belanja Sewa Design dan Dekorasi Stand Pameran		
	a.	Sewa Design dan Dekorasi Stand Pameran	1 Paket	10,000,000
	b.	Sewa Design dan Dekorasi Stand Pameran	Ruang	1,000,000
9.1.2.03.12.01.001	61	<b>SATUAN BIAYA BIMTEK PPNS</b>		
	61.1	Biaya Akomodasi Peserta	1 Paket	27,000,000
9.1.2.03.12.01.001	62	<b>SATUAN BIAYA PEMBINAAN PESERTA KHALIFAH MTQ</b>	OB	2,500,000
9.1.2.27.02.01.001	63	<b>SATUAN BIAYA BELANJA UANG YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT (HADIAH LOMBA)</b>		
	63.1	Bonus Pemenang Sepak Bola U 19		
	a.	Juara I	Tim	10,000,000
	b.	Juara II	Tim	9,000,000
	c.	Juara III	Tim	6,000,000
	d.	Juara Harapan I	Tim	5,000,000
	e.	Top Score	Orang	1,200,000
	f.	Pemain Terbaik	Orang	1,000,000
9.1.2.08.01.01.001	64	<b>SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM RANGKA DISTRIBUSI BANTUAN BAHAN PERDAGANGAN DAN INDUSTRI BAGI MASYARAKAT (18 KECAMATAN)</b>		
	64.1	Sewa Kendaraan Roda 4 Dalam Kota Masohi	Hari	200,000
	64.2	Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Amahai	Hari	300,000
	64.3	Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - T.N.S	Hari	600,000
	64.4	Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Elpaputih	Hari	700,000
	64.5	Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Salahutu	Hari	1,500,000
	64.6	Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Leihitu	Hari	2,000,000
	64.7	Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Leihitu Barat	Hari	2,000,000
	64.8	Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Tehoru	Hari	1,000,000
	64.9	Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Telutih	Hari	1,300,000
	64.10	Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Serut Barat	Hari	1,300,000
	64.11	Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Seram Utara	Hari	1,500,000
	64.12	Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Serut Kobi	Hari	1,700,000
	64.13	Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Serut Seti	Hari	2,000,000
	64.14	Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - P. Haruku	Hari	1,500,000
	64.15	Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Nusalaui	Hari	1,500,000
	64.16	Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Saparua	Hari	1,500,000
	64.17	Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Saparua Timur	Hari	1,500,000
	64.18	Sewa Kendaraan Roda 4 Masohi - Banda (Ambon)	Hari	2,000,000
9.1.2.08.01.01.001	65	<b>SATUAN BIAYA SEWA BARANG DAN BURUH ANGKUT BARANG</b>		
	65.1	Sewa Barang Ambon - Jakarta	Kg	300,000
	65.2	Sewa Bagasi - Ambon Makasar	Kg	150,000
	65.3	Sewa Buru Angkut Barang	Orang	300,000
	65.4	Buru Bagasi	Orang	20,000
9.1.2.03.12.01.001	66	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN PRODUK KERAJINAN UNTUK DEKRANASDA DAN INOVASI</b>		
	66.1	Pengadaan Produk Kerajinan untuk Dekranasda	Paket	5,000,000
	66.2	Pengadaan Produk Inovasi	Unit	5,000,000
9.1.2.03.12.01.001	67	<b>SATUAN BIAYA PERLATAN DAN BAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA</b>		
	67.1	Peralatan Pengolahan Kelapa	Unit	5,000,000
	67.2	Peralatan Membatik	Unit	7,000,000
	67.3	Bahan Pengolahan Kelapa	Unit	2,500,000
	67.4	Bahan Anyaman Rotan	Unit	3,000,000
	67.5	Bahan Membatik	Unit	8,000,000
9.1.2.03.12.01.001	68	<b>SATUAN BIAYA BELANJA PERALATAN USAHA SEKTOR JASA</b>		
	68.1	Mesin Jahit	Unit	3,500,000
	68.2	Mesin Obras	Unit	3,500,000
	68.3	Mesin Ketel Minyak	Unit	30,000,000
	68.4	Alat Pres Batako	Unit	25,000,000
9.1.2.03.08.01.001	69	<b>SATUAN BIAYA BELANJA KALIBRASI PERALATAN METROLOGI</b>		
	69.1	Vernier Caliper	Per Alat	150,000
	69.2	AT Dacin M1 Kapasitas 110 kg (5 kg. 10 kg. 10 kg. 10 kg 25 kg. 25 kg )	Per Alat	50,000
	69.3	AT Kelas M1 ( 1 mg - 1 kg )	Per Alat	50,000
	69.4	AT Miligram Kelas M1 ( 1 mg - 500 mg )	Per Alat	50,000
	69.5	AT Kelas m1 ( 1 mg - 20 kg )	Per Alat	50,000
	69.6	AT Besi M2 (10 kg. 10 kg. 5 kg. 5 kg. 2 kg. 2 kg)	Per Alat	50,000
	69.7	AT Remidi Kuningan M2 ( 1 g - 1 kg )	Per Alat	50,000
	69.8	AT Kuningan M2 (500 g - 2 kg)	Per Alat	50,000
	69.9	AT kelas M2 ( 100 mg - 1 kg)	Per Alat	50,000
	69.10	AT kelas M2 ( 2 kg)	Per Alat	50,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		69.11 AT kelas M2 ( 5 kg)	Per Alat	50,000
		69.12 AT kelas M2 ( 10 kg)	Per Alat	50,000
		69.13 AT kelas M2 ( 20 kg)	Per Alat	50,000
		69.14 AT Bidur M2 Kapasitas 20 Kg	Per Alat	50,000
		69.15 AT F2 Kap 1 g - 5 kg	Per Alat	75,000
		69.16 AT Kelas F2 (1 mg - 1 kg)	Per Alat	75,000
		69.17 AT F2 Kapasitas 10 Kg	Per Alat	75,000
		69.18 AT F2 Kapasitas 20 Kg	Per Alat	75,000
		69.19 Komparator Sidang	Per Alat	112,500
		69.20 Gelas Ukur Kap 1 liter	Per Alat	75,000
		69.21 Stopwatch	Per Alat	100,000
		69.22 Termohygrometer	Per Alat	175,000
		69.23 Salib Ukur	Per Alat	32,500
		69.24 Meter Saku	Per Alat	25,000
		69.25 Depth Tape	Per Alat	50,000
		69.26 Termometer Gelas	Per Alat	175,000
		69.27 Ban Ukur	Per Alat	100,000
		69.28 Bejana 5 Liter	Per Alat	95,000
		69.29 Bejana 10 Liter	Per Alat	95,000
		69.30 Bejana 20 Liter	Per Alat	95,000
		69.31 Bejana 100 Liter	Per Alat	80,000
		69.32 Bejana 500 Liter	Per Alat	80,000
		69.33 Tongkat Duga 1 x 3 m	Per Alat	75,000
		69.34 Termometer Digital ketelitian 0.1 C	Per Alat	175,000
		69.35 Timbangan kelas 1 kap 30 kg	Per Alat	225,000
		69.36 Timbangan kelas 1 kap 6 kg	Per Alat	225,000
		69.37 Timbangan kelas 1 kap 200 g	Per Alat	225,000
		69.38 Ultrasonic Thickness Gauge	Per Alat	150,000
9.1.2.03.08.01.001	70	<b>SATUAN BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN OPERASIONAL TERA</b>		
		70.1 Timah Segel	Kg	100,000
		70.2 Kawat Segel/Kawat Email	Rol	150,000
		70.3 Lemping Timah	M2	100,000
		70.4 Meter Saku	Buah	125,000
		70.5 Stabila Sprit Level (Waterpas)	Buah	600,000
9.1.2.03.03.01.001	71	<b>SATUAN BIAYA TARIF LISTRIK,AIR, TELEPON DAN INTERNET</b>		
		71.1 a. Tarif Listrik		
		a. Tarif Listrik	Kwh	1,450,000
		b. Tarif Listrik	Bulan	4,000,000
		b. Rumah Dinas Sekwan	Bulan	1,000,000
		c. Rumah Dinas Pimpinan DPR	Bulan	2,350,000
		d. Rumah Dinas Pimpinan	OB	2,350,000
		e. Pemasangan Listrik	23 Watt	25,000,000
		f. Tambah Daya	Watt	4,640,970
		a. Daya Listrik	32 Paket	35,000,000
		b. Listrik Rumah Jabatan	Paket	78,000,000
		c. Daya	Kwh	1,500
		g. Tagihan Listrik	Kwh	1,500
		h. Belanja Rekening Listrik	Bulan	4,000,000
		i. Listrik Kantor	Bulan	15,000,000
		j. Jasa Listrik	Bulan	4,000,000
		k. Jasa Listrik	Bulan	627,500
		l. Jasa Listrik	Kwh	7,000,000
		m. Jasa Listrik	Kwh	165,000
		n. Jasa Listrik	Kwh	145,000
		o. Jasa Perbaikan Listrik	Per Titik	150,000
		p. Jasa Teknisi Listrik	OB	500,000
		q. Tagihan Telepon/Fax	Tahun	815,000
		r. Tagihan Listrik Covid	Tahun	52,000,000
		s. Tagihan Listrik Rumah Sakit	Bulan	50,000,000
		t. Tagihan Listrik Rumah Sakit	Bulan	53,000,000
		71.2 Tarif Air		
		a. 1 s/d 10	M3	4,000
	71.3	b. 11 s/d 20	M3	4,500
		c. 21 s/d 30	M3	5,000
		d. 31 keatas	M3	5,500
		e. Rumah Dinas Sekwan	Bulan	500,000
		f. Rumah Pimpinan	Bulan	3,000,000
		g. Ketua DPRD	M2	130,000
		h. Air Kantor	Bulan	3,000,000
		i. Belanja Rekening Air	Tahun	1,000,000
		Tarif Internet (Indihome)		
		a. 10 MBPS	Paket	300,000
		b. 20 MBPS	Paket	315,000
		c. 50 MBPS	Paket	530,000
		d. 100 MBPS	Paket	885,000
		e. 10 MBPS	Paket	200,000
		f. Hosting dan Cloud	Tahun	20,000,000
		g. Astinet dan Indihome	Tahun	1,100,000,000
		h. Maintenance jaringan internet	Tahun	15,000,000
		i. Jaringan Internet	Jaringan	200,000,000
		j. Pemasangan Internet	Paket	930,000
		k.Wifi Rumah Pimpinan	Bulan	500,000
		l.Jaringan Internet	Bulan	400,000
		m.Telepon dan Internet	Paket	150,000
		n.Telepon dan Internet	Paket	180,000
		o.Jasa Internet	Paket	350,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		p.Jasa Internet q.Wifi & Indohome r.Telepon dan Wifi s.Rekening Telepon t.Belanja Kawat/Faksmile/Internet/Tivi Berlangganan	Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	450,000 850,000 650,000 1,300,000 500,000
9.1.2.03.02.01.001	72	SATUAN BIAYA SEWA HOSTING/WEBSITE	Tahun	5,000,000
9.1.2.03.02.01.001	73	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ASSET TAK BERWUJUD (APLIKASI)	Unit	80,000,000
9.1.2.03.12.01.001	74	SATUAN BIAYA PENYAMPAIAN SPPT-PBB	Lembar	1,000
9.1.2.03.12.01.001	75	SATUAN BIAYA PEMBAYARAN PBB-P2 PEMDA MALTENG	Tahun	45,139,850
9.1.2.03.12.01.001	76	SATUAN BIAYA ANGKUT SPPT KE KECAMATAN	Per Kecamatan	500,000
9.1.2.03.12.01.001	77	SATUAN BIAYA PENGADAAN APLIKASI E-GOVERNMENT PAJAK DAERAH		
	77.1	Aplikasi SIMPBB + H2H BANK	Aplikasi	198,000,000
	77.2	Aplikasi SIMBPHTB + H2H BANK	Aplikasi	199,000,000
	77.3	Aplikasi Validasi Piutang	Aplikasi	80,000,000
	77.4	Aplikasi SIMPADA	Aplikasi	140,000,000
	77.5	WP SIMP PBB GO/E SPOP DAN LSPOP	Aplikasi	80,000,000
	77.6	Payment Point Basis WEB	Aplikasi	125,000,000
	77.7	WEB Report SIMPBB	Aplikasi	80,000,000
	77.8	Maintenance	Tahun	80,000,000
	77.9	Pengembangan Aplikasi Monitoring	Aplikasi	49,052,500
9.1.2.27.02.01.001	78	SATUAN BIAYA BELANJA HADIAH BEASISWA LOMBA PEMILIHAN ANAK KREATIF		
	78.1	Hadiah Pemenang Lomba Tkt. TK/RA/PAUD		
	a. Juara I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,750,000	
	b. Juara II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,500,000	
	c. Juara III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,250,000	
	d. Juara Harapan I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	750,000	
	e. Juara Harapan II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	750,000	
	f. Juara Harapan III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	500,000	
	78.2	Hadiah Pemenang Lomba Tkt. SD		
	a. Juara I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	2,000,000	
	b. Juara II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,500,000	
	c. Juara III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,250,000	
	d. Juara Harapan I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	750,000	
	e. Juara Harapan II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	750,000	
	f. Juara Harapan III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	750,000	
	78.3	Hadiah Pemenang Lomba Tkt. SMP		
	a. Juara I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	2,000,000	
	b. Juara II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,750,000	
	c. Juara III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,500,000	
	d. Juara Harapan I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	750,000	
	e. Juara Harapan II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	750,000	
	f. Juara Harapan III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	750,000	
	78.4	Hadiah Pemenang Lomba Tkt. SMA		
	a. Juara I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	2,500,000	
	b. Juara II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	2,000,000	
	c. Juara III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,500,000	
	d. Juara Harapan I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,000,000	
	e. Juara Harapan II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,000,000	
	f. Juara Harapan III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	1,000,000	
9.1.2.27.02.01.001	79	SATUAN BIAYA BELANJA HADIAH BEASISWA LOMBA PEMILIHAN ANAK KREATIF DI KECAMATAN		
	79.1	Hadiah Pemenang Lomba Tkt. TK/RA/PAUD		
	a. Juara I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	750,000	
	b. Juara II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	650,000	
	c. Juara III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	550,000	
		d. Juara Harapan I : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	300,000
		e. Juara Harapan II : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	300,000
		f. Juara Harapan III : Beasiswa 1 Tahun	Orang/Tahun	300,000
9.1.2.03.12.01.001	80	SATUAN BIAYA BELANJA TROPHI/PIALA LOMBA PEMILIHAN ANAK KREATIF	Set	1,000,000
	80.1	Piala Ukuran Besar	Buah	798,000
	80.2	Piala Ukuran Sedang	Buah	661,000
9.1.2.03.12.01.001	81	SATUAN BIAYA BELANJA AKUN ZOOM MEETING UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN LOMBA PEMILIHAN ANAK KREATIF DAN WORSHOP ANAK	1 Paket	3,200,000
9.1.2.03.12.01.001	82	SATUAN BIAYA BELANJA SIDANG ISBAT KE PENGADILAN AGAMA	Pasang	300,000
9.1.2.03.12.01.001	83	SATUAN BIAYA PENGADAAN SOAL UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH	Paket	200,000
9.1.2.03.12.01.001	84	SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS		
	84.1	ACEH	Orang/Kali	95,000
	84.2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232,000
	84.3	R I A U	Orang/Kali	70,000
	84.4	KEPULAUAN ARU	Orang/Kali	96,000
	84.5	J A M B I	Orang/Kali	60,000
	84.6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	151,000
	84.7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	90,000
	84.8	LAMPUNG	Orang/Kali	123,000
	84.9	BENGKULU	Orang/Kali	80,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		84.10 BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	60,000
		84.11 B A N T E N	Orang/Kali	306,000
		84.12 JAWA BARAT	Orang/Kali	60,000
		84.13 D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	300,000
		84.14 JAWA TENGAH	Orang/Kali	50,000
		84.15 D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	94,000
		84.16 JAWA TIMUR	Orang/Kali	148,000
		84.17 B A L I	Orang/Kali	116,000
		84.18 NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	213,000
		84.19 NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	72,000
		84.20 KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	107,000
		84.21 KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	80,000
		84.22 KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	97,000
		84.23 KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	353,000
		84.24 KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353,000
		84.25 SULAWESI UTARA	Orang/Kali	110,000
		84.26 GORONTALO	Orang/Kali	115,000
		84.27 SELAWESI BARAT	Orang/Kali	217,000
		84.28 SELAWESI SELATAN	Orang/Kali	128,000
		84.29 SELAWESI TENGAH	Orang/Kali	60,000
		84.30 SELAWESI TENGGARA	Orang/Kali	131,000
		84.31 MALUKU	Orang/Kali	250,000
		84.32 MALUKU UTARA	Orang/Kali	174,000
		84.33 PAPUA	Orang/Kali	354,000
		84.34 PAPUA BARAT	Orang/Kali	130,000
9.1.2.23.01.01.001.0	85	<b>SATUAN BIAYA PELATIHAN/KOORDINASI</b>		
	85.1	Pertemuan dan Pelatihan	Paket	3,000,000
	85.2	Pertemuan dan Koordinasi	Paket	1,000,000
9.1.2.03.12.01.001	86	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH (IPAL)</b>		
	86.1	Kapasitas 50 - 100 Tempat Tidur	Paket	1,500,000,000
	86.2	Kapasitas s/d 50 Tempat Tidur	Paket	1,040,000,000
9.1.2.03.12.01.001	87	<b>SATUAN BIAYA PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA</b>		
	87.1	Sumber Pembiayaan APBD-DAU	Unit	17,500,000
	87.2	Sumber Pembiayaan APBD-DAK	Unit	20,000,000
9.1.2.26.03.01.001	88	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN IRIGASI</b>		
	88.1	Operator	OH	55,000
	88.2	Supir	OH	55,000
	88.3	Mandor	OH	55,000
	88.4	Pekerja	OH	50,000
	88.5	Kendaraan Truck Roda 6	1/2 H	200,000
9.1.2.19.02.01.001	89	<b>SATUAN BIAYA BELANJA JASA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BIDANG CIPTA KARYA</b>		
	89.1	Penyusunan DED Air Minum	Dok	391,838,750
	89.2	Perencanaan Air Minum	Dok	491,838,750
	89.3	Fisibility Studi SPAM	Dok	291,838,750
	89.4	Dokumen RISPAM	Dok	591,838,750
	89.5	DED Jalan Lingkungan	Dok	395,200,000
9.1.2.19.02.01.001	90	<b>SATUAN BIAYA BELANJA JASA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BIDANG SUMBER DAYA AIR</b>		
	90.1	Perencanaan DED Irigasi	Dok	93,854,000
	90.2	Pengawasan Irigasi	Dok	94,265,000
9.1.2.19.02.01.001	91	<b>SATUAN BIAYA BELANJA JASA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BIDANG TATA RUANG</b>		
	91.1	Penyusunan Master Plan	Dok	144,300,000
	91.2	Pendampingan RDTR	Dok	174,313,000
	91.3	Persetujuan Substansi RDTR	Dok	116,337,500
	91.4	Perencanaan Gedung	Dok	75,000,000
	91.5	Pengawasan Gedung	Dok	65,000,000
	91.6	Pendampingan RTRW	Dok	120,000,000
9.1.2.19.02.01.001	92	<b>SATUAN BIAYA BELANJA JASA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BIDANG BINA MARGA</b>		
	92.1	Perencanaan Pembangunan Jalan	Dok	578,915,000
	92.2	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Dok	168,880,000
	92.3	Survey Kondisi Jalan	Dok	589,642,750
	92.4	Survey Kondisi Jembatan	Dok	224,998,000
9.1.2.19.02.01.001	93	<b>SATUAN BIAYA BELANJA JASA PERENCANAAN</b>		
	93.1	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Riol Dalam Kota Masohi	1 Paket	62,645,840
	93.2	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Riol Relokasi Wae Ela	1 Paket	154,065,635
	93.3	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pengaman Sungai Wae Tanusang Negeri Alang	1 Paket	47,702,880
	93.4	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Talud Pantai Negeri Kobisadar	1 Paket	33,555,600
	93.5	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih Wae Ela	1 Paket	51,268,719
	93.6	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Wae Ela	1 Paket	97,754,304
	93.7	Jasa Konsultansi Perencanaan Wilayah Pembuatan Dokumen RP3KP	1 Paket	431,000,000
	93.8	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Lantai III Gedung B dan C Kantor Bupati	1 Paket	60,000,000
	93.9	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kerja Lantai II Gedung A Kantor Bupati	1 Paket	30,000,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	93.10	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Ruang Tunggu Kantor Bupati	1 Paket	17,500,000
	93.11	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Pagar Rumah Dinas Sekretaris Daerah	1 Paket	12,000,000
	93.12	Jasa Konsultansi Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (RP2KPKPK)	1 Paket	484,660,000
	93.13	Jasa Penyusunan Dokumen Kawasan dan Lahan Siap Bangun	1 Paket	150,429,600
	93.14	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Pasar Tehoru	Dokumen	25,000,000
	93.15	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Pasar Tuhaha	Dokumen	14,250,000
	93.16	Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Dokumen Zona Nilai Tanah	1 Paket	740,000,000
	93.17	Jasa Perencanaan Irigasi	Dokumen	93,854,000
	93.18	Jasa Perencanaan Epaksi	Dokumen	40,000,000
	93.19	Jasa Perencanaan Pembangunan Kantor Dinas		3,442,630
	93.20	Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan SD	1 Paket	3,648,000
	93.21	Jasa Perencanaan Penambahan Ruang kelas Baru SD	1 Paket	48,260,000
	93.22	Jasa Perencanaan Penambahan Ruang kelas Baru SMP	1 Paket	47,740,000
	93.23	Jasa Perencanaan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas SD	1 Paket	5,540,000
	93.24	Jasa Perencanaan Meubeler SD	1 Paket	5,535,310
	93.25	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Koridor Gedung NICU	1 Paket	30,272,000
	93.26	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Koridor Gedung HCU/ICU	1 Paket	30,272,000
	93.27	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Lantai Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Wainana Kec. P. Haruku	1 Paket	40,000,000
	93.28	Jasa Konsultansi Perencanaan Rumah Dinas Medis	Dokumen	27,000,000
	93.29	Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Perpustakaan	1 Paket	26,690,000
	93.30	Jasa Desain Master Pland Bangunan Perpustakaan	1 Paket	50,000,000
	93.31	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar	1 Paket	29,600,000
	93.32	Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Bengkel Nelayan dan Galangan Kapal Rakyat	1 Paket	3,000,000
	93.33	Jasa Konsultansi Perencanaan DAK	1 Paket	28,000,000
	93.34	Jasa Perencanaan Rehabilitasi Pagar Kantor Bupati	1 Paket	86,062,500
	93.35	Jasa perencanaan Rehabilitasi Kamar Mandi dan Tangga Kantor Bupati	1 Paket	9,753,750
	93.36	Jasa Perencanaan Rehabilitasi Kamar Mandi Gedung Terbine Lapangan Nusantara	1 Paket	6,638,625
	93.37	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang Tunggu dan Fasilitas Pendukung Tambatan Perahu Kailolo Kec. P. Haruku	1 Kegiatan	3,500,000
	93.38	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ruang ULP	Paket	7,500,000
	93.39	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Selatsar Kantor Bupati Gedung A	Paket	11,000,000
	93.40	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Kamar Mandi Gedung Terbine Lapangan Nusantara	Paket	9,220,313
	93.41	Jasa perencanaan Perbaikan Kamar Mandi dan Wc Gor	Paket	9,753,750
	93.42	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Ringan Pembangunan Gedung Dahlia RS	Paket	4,000,000
	93.43	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Paving Blok Rumah Sakit	Paket	5,000,000
	93.44	Jasa Perencanaan Pembangunan Kios Terminal	Kegiatan	3,360,000
	93.45	Jasa Perencanaan DED Irigasi	Dokumen	93,854,000
	93.46	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Pertemuan Kecamatan	Dokumen	75,000,000
	93.47	Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi Air Masawae	Dokumen	175,512,000
	93.48	Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Transportasi Perdesaan TA. 2022	Dokumen	100,000,000
	93.49	Jasa Konsultansi Perencanaan Survey Identifikasi Ruas Jalan Sugiarto-STIKIP Kampung Baru Hatuheno- Banda Lama	Dokumen	50,000,000
	93.50	Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED TPA Kawasan Seram Utara Timur Kobi	Dokumen	380,994,000
	93.51	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Taman Rumah Sakit	Paket	5,000,000
	93.52	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Bengkel Nelayan	Paket	15,000,000
	93.53	Jasa Konsultansi Perencanaan DAK	Kegiatan	300,000,000
	93.54	Jasa Konsultansi Perencanaan Survey Identifikasi Ruas Jalan Seahari-Mausu Ane- Kambelu- Maneo Rendah	Dokumen	50,000,000
	93.55	Jasa Konsultansi Perencanaan Kajian Lingkungan (AMDAL) Ruas Jalan Sp. Lintas Seram-Kalao-Elamata-Hatuolo-Manusela-Marahina	Dokumen	438,965,000
	93.56	Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan DAK Penugasan	Dokumen	99,665,000
	93.57	Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan DAK Reguler	Dokumen	99,665,000
	93.58	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan	Dokumen	439,840,000
	93.59	Jasa Konsultansi Perencanaan Survey Kondisi Jembatan Kabupaten	Dokumen	220,000,000
	93.60	Jasa Konsultansi Perencanaan Survey Kondisi Jalan Kabupaten	Dokumen	659,716,700
	93.61	Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Marka	Dokumen	2,500,000
	93.62	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Halte	Dokumen	2,000,000
	93.63	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar	Dokumen	15,000,000
	93.64	Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Jalan Lingkungan Seram 1	Dokumen	100,000,000
	93.65	Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Jalan Lingkungan Ambon	Dokumen	100,000,000
	93.66	Jasa Konsultansi Perencanaan	Kegiatan	51,520,000
	93.67	Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan DED Jalan Lingkungan Seram 2 dan PP Lease	Dokumen	100,000,000
	93.68	Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Air Minum Wilayah 4	Dokumen	100,000,000
	93.69	Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Air Minum Wilayah 3	Dokumen	100,000,000
	93.70	Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Air Minum Wilayah 2	Dokumen	100,000,000
	93.71	Jasa Konsultansi Perencanaan DAK Air Minum Wilayah 1	Dokumen	100,000,000
	93.72	Jasa Konsultansi Perencanaan	Kegiatan	30,200,000
	93.73	Jasa Konsultansi Perencanaan	Kegiatan	10,010,000
	93.74	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan	Dokumen	339,840,000
	93.75	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tambatan Perahu	Kegiatan	40,000,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.19.03.01.001	94	93.76 Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Riol Wae Mayapada Dalam Negeri Haya	Paket	6,800,000
		93.77 Jasa Konsultansi Perencanaan Desain Daya Tarik Wisata-Desain Perencanaan Pembuatan Gazebo di Negeri Pulau Kec Pulau Haruku dan Negeri Portho Kec Saparua serta Taman/ Pelataran	Paket	250,000,000
		93.78 Jasa Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Pagar	Paket	6,000,000
		<b>SATUAN BIAYA BELANJA JASA PENGAWASAN</b>		
		94.1 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Koridor Gedung HCU/ICU	Paket	60,000,000
		94.2 Jasa Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Kulur Kec. Saparua	1 Kegiatan	33,000,000
		94.3 Jasa Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Waai Kec.Salahutu	1 Kegiatan	33,000,000
		94.4 Jasa Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Wairiang Kec. P. Haruku	1 Kegiatan	33,000,000
		94.5 Jasa Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Wahai Kec. Seram Utara	1 Kegiatan	33,000,000
		94.6 Jasa Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Kulur Kec. Saparua	1 Kegiatan	35,000,000
		94.7 Jasa Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Nusalaut Kec.Nusalaut	1 Kegiatan	38,000,000
		94.8 Jasa Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Wairiang Kec. P. Haruku	1 Kegiatan	51,000,000
		94.9 Jasa Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Wahai Kec.Seram Utara	1 Kegiatan	10,000,000
		94.10 Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kerja Lantai II Gedung A Kantor Bupati	Paket	24,000,000
		94.11 Jasa Konsultansi Pengawasan Rumah Sakit Pratama (DAK Fisik)	Dok	187,733,047
		94.12 Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan Puskesmas ( DAK Fisik)	Dok	100,000,000
		94.13 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan PCS 119 (DAK Fisik)	Dok	35,000,000
		94.14 Jasa Konsultansi pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Kesehatan(DAK Fisik)	Dok	22,500,000
		94.15 Jasa Konsultansi Pengawasan Rumah Sakit Pratama (DAK Fisik)	Dok	187,733,047
		94.16 Jasa Konsultansi Pengawasan pembangunan Puskesmas ( DAK Fisik)	Dok	100,000,000
		94.17 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan PCS 119 (DAK Fisik)	Dok	35,000,000
		94.18 Jasa Konsultansi pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Kesehatan(DAK Fisik)	Dok	22,500,000
		94.19 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Ruang Tunggu Kantor Bupati	Paket	14,000,000
		94.20 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Garasi Mobil Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Paket	10,000,000
		94.21 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Kulur Kec. Saparua	1 Dok	33,000,000
		94.22 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Waai Kec.Salahutu	1 Dok	33,000,000
		94.23 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Wairiang Kec. P. Haruku	1 Dok	33,000,000
		94.24 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Wahai Kec. Seram Utara	1 Dok	33,000,000
		94.25 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Kulur Kec. Saparua	1 Dok	35,000,000
		94.26 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Nusalaut Kec.Nusalaut	1 Dok	38,000,000
		94.27 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Wairiang Kec. P. Haruku	1 Dok	51,000,000
		94.28 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Wahai Kec.Seram Utara	1 Dok	10,000,000
		94.29 Jasa Konsultansi Pengawasan Irigasi	Dok	94,008,000
		94.30 Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pagar Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Paket	10,000,000
		94.31 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan Wae Ela	Paket	130,500,000
		94.32 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Talud Pantai Negeri Kobisadar	Paket	44,740,800
		94.33 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Kulur Kec. Saparua	Dok	33,000,000
		94.34 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Waai Kec.Salahutu	Dok	33,000,000
		94.35 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Wairiang Kec. P. Haruku	Dok	33,000,000
		94.36 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung NICU	Paket	60,000,000
		94.37 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Rawat Inap Penunjang	Paket	50,000,000
		94.38 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Wahai Kec. Seram Utara	Dok	33,000,000
		94.39 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Kulur Kec. Saparua	Dok	35,000,000
		94.40 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Nusalaut Kec.Nusalaut	Dok	38,000,000
		94.41 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Wairiang Kec. P. Haruku	Dok	51,000,000
		94.42 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Wahai Kec.Seram Utara	Dok	10,000,000
		94.43 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Kulur Kec. Saparua	Dok	33,000,000
		94.44 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Waai Kec.Salahutu	Dok	33,000,000
		94.45 Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Wairiang Kec. P. Haruku	Dok	33,000,000



KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	94.46	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Wahai Kec. Seram Utara	Dok	33,000,000
	94.47	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Kulur Kec. Saparua	Dok	35,000,000
	94.48	Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Perpustakaan	Orang/Paket	21,000,000
	94.49	Jasa Pengawas/Koodinator Teknis Bangunan Perpustakaan	Orang/Bulan	9,500,000
	94.50	Jasa Inspector/Pengawas Lapangan Bangunan Perpustakaan	Orang/Bulan	6,250,000
	94.51	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Nusalaut Kec.Nusalaut	Dok	38,000,000
	94.52	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Wairiang Kec. P. Haruku	Dok	51,000,000
	94.53	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Wahai Kec.Seram Utara	Dok	10,000,000
	94.54	Jasa Konsultansi Pengawasan	Dok	75,000,000
	94.55	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Kulur Kec. Saparua	Dok	33,000,000
	94.56	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Waai Kec.Salahutu	Dok	33,000,000
	94.57	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Wairiang Kec. P. Haruku	Dok	33,000,000
	94.58	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Wahai Kec. Seram Utara	Dok	33,000,000
	94.59	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Kulur Kec. Saparua	Dok	35,000,000
	94.60	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Nusalaut Kec.Nusalaut	Dok	38,000,000
	94.61	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Wairiang Kec. P. Haruku	Dok	51,000,000
	94.62	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Wahai Kec.Seram Utara	Dok	10,000,000
	94.63	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Kulur Kec. Saparua	Dok	33,000,000
	94.64	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Waai Kec.Salahutu	Dok	33,000,000
	94.65	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Wairiang Kec. P. Haruku	Dok	33,000,000
	94.66	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Wahai Kec. Seram Utara	Dok	33,000,000
	94.67	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Kulur Kec. Saparua	Dok	35,000,000
	94.68	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Nusalaut Kec.Nusalaut	Dok	38,000,000
	94.69	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Wairiang Kec. P. Haruku	Dok	51,000,000
	94.70	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Wahai Kec.Seram Utara	Dok	10,000,000
	94.71	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Kulur Kec. Saparua	Dok	33,000,000
	94.72	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Waai Kec.Salahutu	Dok	33,000,000
	94.73	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Wairiang Kec. P. Haruku	Dok	33,000,000
	94.74	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Perairan Pel. Penyeberangan Wahai Kec. Seram Utara	Dok	33,000,000
	94.75	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Kulur Kec. Saparua	Dok	35,000,000
	94.76	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Nusalaut Kec.Nusalaut	Dok	38,000,000
	94.77	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Wairiang Kec. P. Haruku	Dok	51,000,000
	94.78	Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Darat Pel. Penyeberangan Wahai Kec.Seram Utara	Dok	10,000,000
	94.79	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Bangunan Pengaman Sungai Wae Tanusang Negeri Alang	Paket	63,603,840
	94.80	Jasa Pengawasan Pedestrian Kantor Bupati	Dok	75,000,000
	94.81	Jasa Pengawasan Revitalisasi Ina Marina	Dok	75,000,000
	94.82	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Riol Relokasi Wae Ela	Paket	205,554,180
	94.83	Jasa Pengawasan Landscape Baplitbangda	Dok	75,000,000
	94.84	Jasa Pengawasan Gedung DPRD	Dok	200,000,000
	94.85	Jasa Pengawasan Gedung Bina Marga	Dok	175,000,000
	94.86	Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Speed boot Viber glass	Paket	15,000,000
	94.87	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Riol Dalam Kota Masohi	Paket	83,661,120
	94.88	Jasa Konsultansi Pengawasan Kantor Dinas	OK	3,442,380
	94.89	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih Wae Ela	Paket	68,359,285
	94.90	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan SD	OK	3,648,000
	94.91	Jasa Konsultansi Pengawasan Penambahan RKB SD	OK	48,260,000
	94.92	Jasa Konsultansi Pengawasan Penambahan RKB SMP	OK	47,740,000
	94.93	Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab. Sedang/Berat Ruang Kelas SD	OK	5,540,000
	94.94	Jasa Pengawasan Gedung Kantor Sosial dan Perindag	Dok	150,000,000
	94.95	Jasa Pengawasan Jalan (DAU)	Dok	437,235,000
	94.96	Jasa Pengawasan Jalan Perdesaan Reguler	Dok	30,135,045
	94.97	Jasa Pengawasan Jalan (DAK Reguler)	Dok	30,000,000
	94.98	Jasa Pengawasan Jembatan	Dok	48,650,000
	94.99	Jasa Pengawasan Irigasi	Dok	94,265,000
	94.100	Jasa Pengawasan Pembangunan Gedung	Dok	65,000,000
	94.101	Jasa Konsultansi Pengawasan	Buku	162,500,000
	94.102	Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Meubeler	Paket	5,535,310
	94.103	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung NICU	Paket	60,000,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		94.104 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Koridor Gedung HCU/ICU	Paket	60,000,000
		94.105 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Rawat Inap	Paket	50,000,000
		94.106 Jasa Konsultansi Jasa Pengawasan Rehabilitasi Lantai III Gedung B dan C Kantor Bupati	Paket	48,000,000
		94.107 Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pasar Tingkat Binaya Masohi	Dok	127,500,000
		94.108 Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pasar Tuhaha	Dok	14,210,000
		94.109 Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pasar Tehoru	Dok	25,000,000
		94.110 Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Pagar Kantor Bupati	Paket	68,850,000
		94.111 Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Kamar Mandi dan Tangga Kantor Bupati	Paket	7,803,000
		94.112 Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Kamar Mandi dan Gedung Terbine Lapangan Nusantara	Paket	5,310,900
		94.113 Pengawasan Pembangunan Ruang DPRD Kabupaten	Dokumen	150,000,000
		94.114 Pengawasan Pembangunan Gedung Bina Marga PUPR	Dokumen	225,000,000
		94.115 Jasa Konsultasi Pengawasan Irigasi	Dokumen	94,090,000
		94.116 Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Speed Boat FRP	Kegiatan	17,500,000
		94.117 Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Ruang ULP	Paket	6,000,000
		94.118 Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Taman Rumah sakit	Paket	2,000,000
		94.119 Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan Ruas Waai Putih- Wai Tila 1	Dokumen	100,000,000
		94.120 Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan Ruas Sp. Lintas Seram Namto	Dokumen	100,000,000
		94.121 Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan Ruas Morokai- Morokai (Jalur 4)	Dokumen	100,000,000
		94.122 Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan Ruas Sp. Lintas Seram- Besi (Jalur 2)	Dokumen	100,000,000
		94.123 Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan Ruas Sp. Lintas Seram- Saka (Tambatan Perahu)	Dokumen	100,966,000
		94.124 Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan Ruas Sp. Tial - Jalur Evakuasi	Dokumen	100,000,000
		94.125 Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan Ruas Jalan Simalouw- Banda Lama (Km 12)	Dokumen	100,000,000
		94.126 Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Kantor Dinas Sosial, Perdagangan dan Perindustrian	Dokumen	150,000,000
		94.127 Jasa Pengawasan/ Koordinator Teknis Bangunan Perpustakaan	OB	9,500,000
		94.128 Jasa Konsultansi Pengawasan	Kegiatan	10,010,000
		94.129 Jasa Konsultansi Pengawasan Perbaikan Kamar Mandi WC GOR	Paket	9,000,000
		94.130 Jasa Pengawasan Pembangunan Ruang Kerja DPRD 2021	Dokumen	100,000,000
		94.131 Jasa Pengawasan Revitalisasi Gedung Islamic Center Tahap II	Dokumen	100,000,000
		94.132 Jasa Konsultasi Pengawasan Paving Block Rumah Sakit	Paket	2,000,000
		94.133 Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan Wilayah Pulau Haruku	Dokumen	44,835,000
		94.134 Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan Wilayah Tehoru	Dokumen	100,000,000
		94.135 Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan Wilayah Masohi	Dokumen	100,000,000
		94.136 Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Pelabuhan Penyebrangan Wariang Kec Pulau Haruku	Kegiatan	240,000,000
		94.137 Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Ringan Pembangunan Gedung Dahlia RS	Paket	2,000,000
		94.138 Jasa Konsultasi Pengawasan Penggadaan Marka	Kegiatan	2,500,000
9.1.2.19.02.01.001	95	94.139 Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Kamar Mandi dan Tangga Kantor Bupati	Paket	7,803,000
		94.140 Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Pagar	Paket	5,000,000
		94.141 Jasa Konsultasi Pengawasan	Kegiatan	51,520,000
		94.142 Jasa Konsultasi Pengawasan	Kegiatan	30,200,000
		94.143 Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Kamar Mandi dan Tangga Kantor Bupati	Paket	7,376,250
		94.144 Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Pagar Kantor Bupati	Paket	68,850,000
		94.145 Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Kamar Mandi Gedung Terbine Lapangan Nusantara	Paket	5,310,900
		94.146 Jasa Konsultasi Pengawasan DAK	Kegiatan	20,000,000
		94.147 Jasa Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar	Dokumen	8,000,000
		94.148 Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan	Dokumen	344,835,000
		94.149 Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan Ruas Sp.Lintas Seram Waimusal	Dokumen	100,000,000
		94.150 Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan Ruas Sp.Lintas Seram Tanah Merah (Jalur 11)	Dokumen	100,000,000
		<b>SATUAN BIAYA BELANJA JASA LAINNYA</b>		
		95.1 Jasa Penyusunan Dokumen Analisis Standar Belanja	Paket	150,000,000
		95.2 Jasa Pengembangan Aplikasi JDIH	Aplikasi	180,000,000
		95.3 Jasa Bantuan Hukum	Perkara	70,000,000
		95.4 Jasa Pengembangan Aplikasi e-UKPBJ	Paket	47,000,000
		95.5 Jasa Pembuatan Software Aplikasi Integrasi Data Base Angkutan Darat Berbasis Exed	Paket	22,500,000
		95.6 Jasa Software Packg Aplikasi SISMAADAK	Paket	25,000,000
		95.7 Jasa Tenaga Teknis Arsip dan Perpustakaan	OB	1,500,000
		95.8 Jasa Tenaga Administrasi Perpustakaan	OB	1,500,000
		95.9 Jasa Tenaga Operator Aplikasi Perpustakaan	OB	1,500,000
		95.10 Jasa Tenaga Layanan Mobil Perpustakaan Keliling	OB	1,500,000
		95.11 Jasa Perbanyakan Tanaman Pertanian	OB	1,500,000
		95.12 Jasa Konsultasi IKM	Buku	148,000,000
		95.13 Jasa Narasumber (Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB).Bina Keluarga Remaja (BKR).Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)	OK	400,000
		95.14 Jasa Narasumber Pengelolaan dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK	OK	500,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	95.15	Jasa Narasumber (Pelaksanaan dan Pengelolaan Pogram KKBPK di Kampung KB	OK	400,000
	95.16	Jasa Narasumber Mini Lokakarya	OK	150,000
	95.17	Jasa Narasumber Penyuluh	OK	300,000
	95.18	Jasa Narasumber Pembinaan Kader IMP	OK	300,000
	95.19	Jasa Narasumber Tenaga Lini Lapangan	OK	300,000
	95.20	Jasa Narasumber Identifikasi Kasus Stunting	OK	325,000
	95.21	Jasa Narasumber Evaluasi Hasil Audit Stunting	OK	325,000
	95.22	Jasa Narasumber Rapat Koordinasi Pelayanan KB	OK	125,000
	95.23	Jasa Pengaman Balai Penyuluh KB	OB	750,000
	95.24	Jasa Servis Aplikasi SIAK	OK	1,604,000
	95.25	Jasa Konsultasi Survey IKM	Paket	99,500,000
	95.26	Jasa Konsultasi Perencanaan SIMRUSWA	Paket	114,000,000
	95.27	Jasa Konsultasi Perencanaan e-Paksi	Dokumen	100,000,000
	95.28	Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan- Jasa Survey Penyusunan Dokumen Nilai Zona	Paket	740,000,000
	95.29	Jasa Penyusunan ASB Fisik	Paket	100,000,000
	95.30	Jasa Konsultasi Pembuatan E-Ticketing Objek Wisata Pantai Natsepa Kec-Salahutu	Paket	135,700,000
9.1.2.15.01.01.001	96	<b>SATUAN BIAYA BELANJA BARANG JASA DAN MODAL</b>		
	96.1	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Tahun	24,052,486,000
	96.2	Akreditasi (Dak Non Fisik)	Tahun	2,211,824,000
	96.3	Bok Farmalkes (Dak Non Fisik)	Tahun	434,489,000
	96.4	Jampersal (Dak Non Fisik)	Tahun	347,632,000
	96.5	Bok Stunting (Dak Non Fisik)	Tahun	773,830,000
	96.6	Bok Kabupaten (Dak Non Fisik)	Tahun	2,174,135,000
	96.7	Bok Puskesmas (Dak Non Fisik)	Tahun	29,700,733,000
9.1.2.27.02.01.001	97	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB-DAK)</b>		
	97.1	Belanja Transport Mini Lokakarya	OT	100,000
	97.2	Belanja Transport Kader Desa	OT	400,000
	97.3	Belanja Transport Aseptor IUD	OT	100,000
	97.4	Belanja Transport Aseptor Implant	OT	100,000
	97.5	Belanja Transport Aseptor MOW	OT	300,000
	97.6	Belanja Transport Aseptor Cabut Implant	OT	100,000
	97.7	Belanja Transport Rapat Pembinaan Pelayanan KB Di Faskes	OT	100,000
	97.8	Belanja Transport Penggerakan/Pendampingan Calon Pengantin di Desa	OT	10,000
	97.9	Belanja Transport Biaya Penggerakan/Pendampingan Ibu Hamil di Desa	OT	10,000
	97.10	Belanja Transport Biaya Penggerakan/Pendampingan Pasca Persalinan di Desa	OT	10,000
	97.11	Belanja Transport Biaya Penggerakan/Surveillance Stunting Tingkat Desa	OT	100,000
	97.12	Belanja Transport Rapat Koordinasi Pelayanan KB Di Faskes	OT	100,000
	97.13	Transport Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB	OT	100,000
	97.14	Transport Kegiatan Orientasi Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok	OT	100,000
		Belanja Transport (Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	OT	150,000
	97.17	Belanja Transport (Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB)	OT	150,000
	97.18	Belanja Transport Pelayanan KB MOP	OT	70,000
	97.19	Belanja Transport Pelayanan KB MOW	OT	70,000
	97.20	Belanja Transport IUD dan Implant	OT	71,000
		Belanja Transport Registrasi Faskes (Pengendalian dan Pendistribuan Kebutuhan Alat dan Obat Konstrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	OT	400,000
	97.22	Belanja Transport Visitasi (Pengendalian dan Pendistribuan Kebutuhan Alat dan Obat Konstrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	OT	150,000
		Belanja Transport Distribusi Alkon (Pengendalian dan Pendistribuan Kebutuhan Alat dan Obat Konstrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Orang	351,000
	97.24	Belanja Transport Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	OT	300,000
	97.25	Belanja Transport Pemutahiran Data (Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	OT	600,000
	97.26	Belanja Transport Lokal (Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK	OT	150,000
	97.27	Belanja Penganti Biaya Hidup Pelayanan KB MOP	OH	250,000
	97.28	Belanja Penganti Biaya Hidup Pelayanan KB MOW	OH	250,000
9.1.2.19.01.01.001	98	<b>SATUAN BIAYA SURVEY JALAN DAN JEMBATAN</b>		
	98.1	Survey kondisi jalan ruas jalan Kabupaten (DAK Penugasan)	Dok	589,642,750

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		98.2 Survey kondisi jembatan pada ruas jalan Kabupaten (DAK Penugasan)	Dok	224,998,000
9.1.1.03.02.01.001	99	<b>SATUAN BIAYA PENUNJANG DAK</b>		
	99.1	Biaya Penunjang (DAK Transportasi Perdesaan)	Dok	89,600,000
	99.2	Biaya Penunjang (DAK Reguler)	Dok	92,680,000
	99.3	Biaya Penunjang (DAK Transportasi Perdesaan)	Dok	83,400,000
	99.4	BOK DAK Jalan Tahun 2021 (DAU)	Dok	350,000,000
9.1.2.25.04.01.001	100	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)</b>		
	100.1	Honor Admin BPP (12 Bulan)	OB	200,000
	100.2	Paket Data di BPP (12 Bulan)	Bulan	200,000
	100.3	Biaya Koordinasi ke Dinas (12 Bulan)	OP	200,000
	100.4	Bahan dan ATK Pelaporan (4 Triwulan)	Triwulan	387,500
	100.5	Biaya Penggandaan dan Dokumentasi (4 Triwulan)	Triwulan	375,000
9.1.2.03.12.01.001	101	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TPA DAN IPLT</b>		
	101.1	Kecamatan Seram Utara	M2	5,000
	101.2	Kecamatan Salahutu	M2	5,100
9.1.2.03.12.01.001	102	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBRANGAN 'WAAI DI NEGERI WAAI KECAMATAN SALAHUTU</b>	M2	115,000
9.1.2.03.12.01.001	103	<b>SATUAN BIAYA SERTIFIKASI LAHAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENYEBRANGAN WAAI 'DI NEGERI WAAI KECAMATAN SALAHUTU</b>	1 Paket	9,000,000
1.1.7.01.08.01.001	104	<b>SATUAN BIAYA PENGIRIMAN NITROGEN CAIR</b>	1 Paket	4,000,000
1.1.7.01.08.01.001	105	<b>SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL DARAH</b>	Tabung	10,000
9.1.1.01.09.01.001	106	<b>SATUAN BIAYA MEDICAL CHEK UP KESEHATAN</b>		
	106.1	Bupati dan Wakil Bupati	Orang	100,000,000
	106.2	Anggota DPRD	Orang	7,000,000
	106.3	Jamaah Haji	Orang	900,000
9.1.1.03.02.01.001	107	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG DAK</b>	Paket	350,000,000
9.1.1.03.02.01.001	108	<b>SATUAN BIAYA PEMBAYARAN PBB P2</b>	Tahun	45,139,450
9.1.2.02.06.01.001	109	<b>SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM PADA FASILITAS PELAYANAN URUSAN KESEHATAN</b>		
	109.1	Dokter Jaga	OH	15,000
	109.2	Suervisor	OH	15,000
	109.3	Petugas Jaga	OH	15,000
	109.4	Penjaga Kantor	OH	15,000
	109.5	Penjaga Mesin Genset	OH	15,000
9.1.2.03.07.01.001	110	<b>SATUAN BIAYA JASA PAKET/PENGIRIMAN</b>		
	110.1	Cargo Pesawat Ambon-Makasar	Kg	134,200
	110.2	Cargo Pesawat Ambon-Bandung	Kg	279,400
	110.3	Jasa Pengiriman	Bulan	200,000
	110.4	Pengiriman Barang/Media PTM Swab (2 x 6 Bulan)	KL	100,000
	110.5	Jasa Pengiriman	Paket	150,000
	110.6	Paket Pengiriman	Kg	79,000
9.1.2.03.07.01.001	111	<b>SATUAN BIAYA PENGIRIMAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI KE KECAMATAN</b>		
	111.1	Kecamatan Banda	Faskes	800,000
	111.2	Kecamatan Saparua	Faskes	500,000
	111.3	Kecamatan Saparua Timur	Faskes	500,000
	111.4	Kecamatan P. Haruku	Faskes	535,000
9.1.2.03.12.01.001	112	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG RSUD MASOHI</b>	Tahun	292,000,000
9.1.2.03.12.01.001	113	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU PESERTA RESES DPRD</b>	OK	100,000
9.1.2.03.12.01.001	114	<b>SATUAN BIAYA JASA PENCUCIAN PAKAIAN. ALAT KESENIAN DAN KEBUDAYAAN SERTA ALAT RUMAH TANGGA</b>	Tahun	1,000,000
9.1.2.05.05.01.001	115	<b>SATUAN BIAYA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT</b>		
	115.1.	Mobil Dinas		
	a.	Izuzu Panther Tahun 2006	Unit/Tahun	2,500,000
	b.	Sedan Nisan Tahun 2016	Unit/Tahun	4,225,000
	c.	Toyota Avansa Tahun 2010	Unit/Tahun	5,000,000
	d.	Pajero Dakar. Kijang Inova 2.0 Q M/T Tahun 2017 - 2019	Unit/Tahun	6,000,000
	e.	Fortuner Tahun 2015	Unit/Tahun	4,225,000
	f.	Toyota Avansa Tahun 2015	Unit/Tahun	6,700,000
	g.	Suzuki Ertiga/ Toyota Inova	Unit/Tahun	1,684,000
	h.	Suzuki Ertiga Tahun 2015	Unit/Tahun	1,850,000
	i.	Suzuki Ertiga Tahun 2016	Unit/Tahun	1,684,000
	j.	Avansa	Unit/Tahun	1,750,000
	k.	Toyota Avansa	Unit/Tahun	1,394,500
	m.	Mitsubishi Triton Tahun 2008	Unit/Tahun	3,000,000
	n.	Toyota KF 60 Tahun 2003	Unit/Tahun	800,000
	o.	Toyota KF 60 Tahun 2003	Unit/Tahun	1,701,925
	p.	Suzuki Tahun 2016	Unit/Tahun	1,850,000
	q.	Toyota Rush Tahun 2016	Unit/Tahun	2,106,000
	r.	Toyota Rush Tahun 2019	Unit/Tahun	3,500,000
	s.	Toyota Inova. Pick Up Hilux D-Cab	Unit/Tahun	4,500,000
	t.	Garuda Moge 1250 2004	Unit/Tahun	150,000
	u.	Kendaraan Dinas Kepala OPD	Unit/Tahun	2,500,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		v. Pajak Kendaraan Bermotor w. Pajak Kendaraan Bermotor x. Pajak Kendaraan Bermotor y. Pajak Kendaraan Bermotor z. Pajak Kendaraan Dinas Rs	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	2,000,000 10,000,000 2,400,000 1,180,000 1,500,000 13,000,000
		115.2 Mobil Operasional a. Ambulance b. Mobil Truck Crane Izuzu Tahun 2018 c. Mobil Hilux Perpustakaan Keliling d. Mobil Hilux Perpustakaan Keliling e. Mobil Hilux Perpustakaan Keliling f. Mobil Ambulance Inova g. Mobil Ambulance APV 2 h. Mobil Ambulance APV 2 i. Mobil Ambulance Hyundai j. Mobil Minibush Ambulance k. Mobil Ambulance Lapangan l. Mobil Ambulance Minibush m. Mobil Ambulance Jenasah APV n. Mobil Ambulance Toyota o. Mobil Hilux Perpustakaan	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	3,440,000 4,500,000 4,500,000 2,000,000 1,500,000 2,750,000 1,800,000 2,000,000 3,000,000 344,000 14,720,000 4,000,000 Unit/Tahun 4,000,000 1,500,000
9.1.2.11.05.01.001	116	<b>SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU PIMPINAN DPRD</b> 116.1 Ketua DPRD 116.2 Wakil Ketua DPRD 116.3 Makan dan Minum Harian DPRD	Bulan Bulan Tahun	26,000,000 20,000,000 75,000,000
1.3.5.02.03.02.001	117	<b>SATUAN BIAYA PENGHARGAAN PEMILIHAN ABDIYASA TELADAN</b> 117.1 ABDIYASA Teladan Peringkat I 117.2 ABDIYASA Teladan Peringkat II 117.3 ABDIYASA Teladan Peringkat III	Rupiah Rupiah Rupiah	2,500,000 2,200,000 2,000,000
1.3.5.02.03.02.001	118	<b>SATUAN BIAYA PENGHARGAAN/HADIAH LOMBA DI TINGKAT KECAMATAN</b> 118.1 Pemenang/Juara I 118.2 Pemenang/Juara II 118.3 Pemenang/Juara III 118.4 Uang Stimulan Bagi Peserta Lomba	Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah	1,250,000 1,000,000 750,000 500,000
9.1.2.03.12.01.001	119	<b>SATUAN BIAYA PEMBAYARAN PBB-P2 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021</b>	Tahun	45,139,850
9.1.2.03.12.01.001	120	<b>SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG DAK GEDUNG HCU/ICU</b>	Tahun	148,084,000
9.1.1.06.01.01.001	121	<b>SATUAN BIAYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN</b>	Paket	175,000,000
9.1.1.06.01.01.001	122	<b>SATUAN BIAYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL</b>	Paket	1,658,300,000
9.1.1.06.01.01.001	123	<b>SATUAN BIAYA INSENTIF STAF PENGELOLAH KAS DAERAH</b>	OB	2,000,000
9.1.2.27.02.01.001	124	<b>SATUAN BIAYA JASA TENAGA JURI. KESEHATAN DAN KEAMANAN PADA KEGIATAN FESTIVAL/EVEN PENERIMAAN TAMU DAERAH</b> 124.1 Tenaga Juri 124.2 Tenaga Kesehatan 124.3 Tenaga Keamanan	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	1,000,000 500,000 500,000
9.1.2.27.02.01.001	125	<b>SATUAN BIAYA SEWA ALAT SELAM</b> 125.1 Alat Snorking 125.2 Speed Boat/Katinting 125.3 Alat Diving 125.4 Speed Boat	Paket Hari Paket Km	750,000 800,000 1,500,000 100,000
9.1.2.25.04.01.001	126	<b>SATUAN BIAYA JASA PENAGIHAN RETRIBUSI PELAYANAN</b>	Tahun	26,000,000
9.1.2.02.06.01.001	127	<b>SATUAN BIAYA FASILITASI PELAYANAN URUSAN KESEHATAN</b> 127.1 a. Petugas Jaga b. Dokter Jaga c. Penjaga Kantor d. Supervisor e. Penjaga Mesin Genzet	Hari Hari Hari Hari Hari	15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
9.1.2.03.12.01.001	128	<b>SATUAN BIAYA JASA SUPIR</b> 128.1 Supir/operator Loader 128.2 Supir/Operator Exapator 128.3 Supir 128.4 Supir Ambulance 128.5 Supir	OB OB OB OB OB	3,500,000 3,500,000 2,300,000 1,442,000 2,250,000
9.1.2.03.12.01.001	129	<b>SATUAN BIAYA BELANJA JASA TENAGA TEKNIS PERTANIAN DAN PANGAN</b> 129.1 Petugas Persemaian Cabe Holo 129.2 Petugas Pengolahan Lahan 129.3 Petugas Pembuatan Bedengan 129.4 Petugas Penanaman 129.5 Petugas Pemupukan 129.6 Petugas Penyiangian 129.7 Petugas Pemberantasan OPT 129.8 Petugas Panen dan Pasca Panen	Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha	1,250,000 2,000,000 3,000,000 1,750,000 1,250,000 1,750,000 1,250,000 2,000,000

KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.1.2.03.12.01.001	130	129.9 Petugas Perawatan tanaman pertanian	Ha	1,500,000
		129.10 Petugas Pengisian Polybag	Buah	1,000
		129.11 Jasa Pengelola Lahan Pertanian	Ha	1,500,000
		129.12 Jasa Panen dan Pasca Panen	Ha	1,500,000
		<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN</b>		
		130.1 Pemeliharaan Komputer	Buah	300,000
		130.2 Pemeliharaan Laptop	Buah	300,000
		130.3 Pemeliharaan Scanner	Buah	300,000
		130.4 Pemeliharaan Infocus	Buah	300,000
		130.5 Pemeliharaan Komputer	Tahun	100,000,000
		130.6 Pemeliharaan Komputer/ Laptop	Unit	500,000
9.1.2.25.04.01.001	131	<b>SATUAN BIAYA FASILITASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH</b>	OK	750,000
9.1.2.07.05.01.001	132	<b>SATUAN BIAYA AKOMODASI HOTEL/PENGINAPAN</b>		
		132.1 Biaya Akomodasi Hotel/Penginapan	Hari	500,000
		132.2 Biaya Akomodasi Hotel/Penginapan	Hari	300,000
9.1.2.11.02.01.001	133	<b>SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUM RAPAT APIP</b>	Per Kegiatan	7,570,000
9.1.2.25.01.01.001	134	<b>SATUAN BIAYA MOBIL PATWAL</b>	Unit	500,000
9.1.2.15.01.01.001	135	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA</b>	OH	250,000
9.1.2.15.01.01.001	136	<b>SATUAN BIAYA UANG SAKU PEREVIU/EVALUATOR</b>	OH	150,000
9.1.2.05.06.01.001	137	<b>SATUAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR</b>		
		137.1 Pencabutan Berkas Dari Jakarta	Unit	20,000,000
9.1.2.15.01.01.001	138	<b>SATUAN BIAYA BELANJA JASA TENAGA MEDIS PELAYANAN KB MOP ( PENGENDALIAN DAN PENGDISTRIBUAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI KABUPATEN/KOTA)</b>	OK	350,000
9.1.2.15.01.01.001	139	<b>SATUAN BIAYA BELANJA JASA TENAGA MEDIS PELAYANAN KB MOW ( PENGENDALIAN DAN PENGDISTRIBUAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI KABUPATEN/KOTA)</b>	OK	1,555,300
9.1.2.27.02.01.001	140	<b>SATUAN BIAYA BELANJA HADIAH BEASISWA LOMBA PEMILIHAN ANAK KREATIF</b>		
		140.1 Hadiah Pemenang Lomba Tkt. TK/RA/PAUD di Kecamatan		
		a. Juara I : Beasiswa 1 Tahun	OT	750,000
		b. Juara II : Beasiswa 1 Tahun	OT	650,000
		c. Juara III : Beasiswa 1 Tahun	OT	550,000
		d. Juara Harapan I : Beasiswa 1 Tahun	OT	300,000
		e. Juara Harapan II : Beasiswa 1 Tahun	OT	300,000
		f. Juara Harapan III : Beasiswa 1 Tahun	OT	300,000
9.1.2.27.02.01.001	141	<b>SATUAN BIAYA BELANJA HADIAH LOMBA B2SA KECAMATAN</b>		
		141.1 Hadiah Pemenang Lomba Tkt. Negeri/Desa		
		a. Juara I	OT	750,000
		b. Juara II	OT	650,000
		c. Juara III	OT	550,000
		d. Juara Harapan I	OT	350,000
		e. Juara Harapan II	OT	350,000
		f. Juara Harapan III	OT	350,000
9.1.2.27.02.01.001	142	<b>SATUAN BIAYA BELANJA HADIAH LOMBA SERBA IKAN KECAMATAN</b>		
		142.1 Hadiah Pemenang Lomba Tkt. Negeri/Desa		
		a. Juara I	OT	750,000
		b. Juara II	OT	650,000
		c. Juara III	OT	550,000
		d. Juara Harapan I	OT	350,000
		e. Juara Harapan II	OT	350,000
		f. Juara Harapan III	OT	350,000
9.1.2.15.01.01.001	143	<b>SATUAN BIAYA BELANJA PERJALANAN DINAS LAPANGAN (BOKB-DAK)</b>		
		143.1 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tenaga Lini Lapangan	OT	125,000
		143.2 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport Pembinaaan Kader IMP	OT	125,000
		143.3 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyuluhan	OT	125,000
		143.4 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Identifikasi Kasus Stunting	OT	100,000
		143.5 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Evaluasi Hasil Audit Stunting	OT	100,000
9.1.2.15.01.01.001	144	<b>SATUAN BIAYA BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (DAK)</b>	Paket	85,740,000
9.1.2.15.01.01.001	145	<b>SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LAPANGAN</b>		
		145.1 Perjalanan Dinas Konsultasi Akreditasi RS	Paket	25,000,000
		145.2 Perjalanan Dinas Biasa IMB	Paket	209,550,000
		145.3 Perjalanan Dinas Advokasi Program Bangsa Kencana	OT	100,000
		145.4 Dukungan Percepatan Vaksinasi	Paket	140,191,200
		145.5 Dukungan Percepatan Vaksinasi	Tahun	90,000,000
9.1.2.27.02.01.001	146	<b>SATUAN BIAYA KEBUTUHAN JEMAAH HAJI</b>		
		146.1 Kebutuhan Jemaah Haji	Orang	2,717,000
		146.2 Transportasi Angkutan Laut Jemah Haji	Orang	117,000
9.1.2.03.12.01.001	147	<b>SATUAN BIAYA EMBARKASI JEMAAH HAJI</b>	Orang	2,600,000



KODE KELOMPOK	NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		165.8 Pengisian Freon AC 1,5 PK - 2 PK	Kali	500,000
		165.9 Pengisian Freon AC 1/2 PK - 1 PK	Kali	250,000
		165.10 Pengisian Freon AC 1/2 PK - 1 PK	Kali	300,000
		165.11 Pengisian Freon AC	Kali	300,000
		165.12 Pengisian Freon AC	Buah	500,000
		165.13 Pengisian Freon AC	Kali	650,000
		165.14 Pasang AC 2 PK - 3 PK	Kali	450,000
		165.15 Pasang AC 1,5 PK - 2 PK	Kali	350,000
		165.16 Pasang AC 1,5 PK - 2 PK	Kali	400,000
		165.17 Pasang AC 2 PK - 3 PK	Kali	550,000
		165.18 Pasang AC 2 PK - 3 PK	Kali	600,000
		165.19 Pasang AC 1/2 PK - 1 PK	Kali	400,000
		165.20 Pasang AC 1/2 PK - 1 PK	Kali	350,000
9.1.2.08.02.01.001	166	<b>SATUAN BIAYA TRANSPOTASI LAUT MASOHI - TULEHU</b>	Orang	120,000
9.1.2.15.01.01.001	167	<b>SATUAN BIAYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (DAK NON FISIK)</b>	Tahun	459,094,000
9.1.2.25.04.01.001	168	<b>SATUAN BIAYA JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER</b>		
		168.1 Supervisor Aplikasi SIKS-NG	OB	800,000
		168.2 Operator Aplikasi SIKS-NG	OB	800,000
		168.3 Operator Aplikasi SIMLU	OB	100,000
		168.4 Operator Website	OB	500,000
		168.5 Operator E-Formasi	OB	500,000
		168.6 Operator Aplikasi/Input Data SIMPEG	OB	500,000
		168.7 Operator Aplikasi (Non PNS)	OB	1,500,000
		168.8 Operator Aplikasi (Non PNS)	OB	1,200,000
		168.9 Tenaga Operator/Administrator	OB	1,000,000
		168.10 Operator SSCN (Admin Instansi) CPNS	OB	500,000
9.1.2.26.01.01.002	169	<b>SATUAN BIAYA PELAKSANAAN PERSETUJUAN SEBSTANSI, EVALUASI KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN RDTR KABUPATEN/KOTA</b>		
		169.1 Tenaga Ahli Perencanaan RDTR	OB	5,000,000
		169.2 Tenaga Ahli GIS RDTR	OB	5,000,000
		169.3 Ketua Tim RDTR	OB	3,000,000
		169.4 Asisten Tenaga Ahli Perencanaan RDTR	OB	2,000,000
		169.5 Asisten Tenaga Ahli GIS RDTR	OB	2,000,000
		169.6 Administrasi RDTR	OB	1,000,000
9.1.2.26.01.01.002	170	<b>SATUAN BIAYA PELAKSANAAN PERSETUJUAN SEBSTANSI, EVALUASI KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN RTRW KABUPATEN/KOTA</b>		
		170.1 Tenaga Ahli Perencanaan RTRW	OB	5,000,000
		170.2 Tenaga Ahli GIS RTRW	OB	5,000,000
		170.3 Ketua Tim RTRW	OB	3,000,000
		170.4 Asisten Tenaga Ahli Perencanaa RTRW	OB	2,000,000
		170.5 Asisten Tenaga Ahli GIS RTRW	OB	2,000,000
		170.6 Administrasi RTRW	OB	1,000,000
9.1.2.26.01.01.002	171	<b>SATUAN BIAYA PENYESUAIAN KLHS RDTR MASOHI, KLHS RDTR HILA. KLHS RDTR TULEHU</b>		
		171.1 Tenaga Ahli 3 KLHS	OB	29,000,000
		171.2 Tenaga Ahli 2 KLHS	OB	29,000,000
		171.3 Tenaga Ahli 1 KLHS	OB	29,000,000
		171.4 Ketua Tim KLHS	OB	5,000,000
		171.5 Tenaga ArcGIS KLHS	OB	3,000,000
		171.6 Tenaga Administrasi KLHS	OB	2,500,000
9.1.1.06.01.01.001	172	<b>SATUAN BIAYA INSENTIF PEMUNGUTAN BAGI KDH/WKDH ATAS RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN</b>		
		172.1 Jasa Pelayanan Pasien Umum	Tahun	928,568,000
		172.2 Jasa Pelayanan Pasien Umum	Tahun	918,168,000
		172.3 Jasa Pelayanan Pasien Umum	Tahun	1,118,168,000
		172.4 Jasa Pelayanan Pasien Umum	Tahun	1,218,168,000
9.1.2.03.12.01.001	173	<b>SATUAN BIAYA JASA TANAH</b>		
		173.1 Penaksir Harga Tanah	Paket	10,000,000
		173.2 Sertifikasi Tanah	Paket	10,000,000
		173.3 Survei Zona Nilai Tanah	Paket	241,345,500
	174	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN CLIRING TPA BANDA</b>	Kali	30,000,000
	175	<b>SATUAN BIAYA MOBILITAS TENGGI AIR</b>	Unit	300,000
	176	<b>SATUAN BIAYA BELANJA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT</b>	Dokumen	99,500,000



**177 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI  
PERGI-PULANG (PP)**

*(dalam US\$)*

No.	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>AMERIKA UTARA</b>			
1	Washington DC	12,733	6,891	3,662
2	Otawa	12,266	6,924	4,083
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
3	Buenos Aries	23,000	15,300	10,400
4	Caracas	23,128	13,837	6,825
5	Brasilia	16,393	11,518	5,970
6	Santiago	21,874	15,539	8,900
7	Bogota	18,399	9,426	7,713
8	Lima	8,263	8,263	5,038
9	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
10	Quito	17,325	16,269	12,127
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
11	Mexico City	11,822	7,831	3,966
12	Havana	14,702	11,223	7,335
13	Panama	15,532	9,306	6,195
	<b>EROPA BARAT</b>			
14	Wina	10,500	4,177	3,367
15	Brussels	10,713	5,994	3,870
16	Paris	10,724	6,085	3,331
17	Berlin	10,277	6,126	3,959
18	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
19	Bern	11,478	6,778	4,355
	<b>EROPA UTARA</b>			
20	Kopenhagen	9,696	4,920	3,730
21	Helsinki	10,023	5,931	3,681
22	Oslo	9,856	4,773	4,049
23	Stockholm	9,917	5,506	3,433
24	London	11,410	7,293	4,153
	<b>EROPA SELATAN</b>			
25	Sarayevo	11,778	7,129	6,033
26	Zagreb	16,974	10,177	5,182
27	Madrid	10,393	4,767	3,631
28	Athens	14,911	9,256	8,041
29	Roma	10,000	6,000	4,500
30	Lisabon	9,309	4,746	3,383
31	Beograd	10,318	6,404	5,564
	<b>EROPA TIMUR</b>			
32	Sofia	7,473	6,346	3,612
33	Praha	19,318	11,848	6,748
34	Budapest	8,839	5,979	2,187

No.	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	Warsawa	10,777	5,052	3,447
36	Bukarest	8,839	4,982	4,113
37	Moskow	9,537	7,206	5,143
38	Klev	10,860	6,029	5,193
	<b>AFRIKA BARAT</b>			
39	Abuja	10,281	7,848	6,818
40	Dakar	12,900	9,848	8,555
	<b>AFRIKA TIMUR</b>			
41	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
42	Nairobi	8,732	7,966	6,081
43	Antananarive	11,779	9,000	8,282
44	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
45	Harare	11,118	10,600	5,747
	<b>AFRIKA SELATAN</b>			
46	Windhoek	18,241	11,774	7,510
47	Pretoria	12,943	9,802	7,216
	<b>AFRIKA UTARA</b>			
48	Algires	9,536	6,593	5,710
49	Kairo	8,683	7,122	4,483
50	Rabat	8,910	7,721	5,665
51	Tunis	9,419	5,018	3,619
52	Khartoum	5,904	4,507	3,915
53	Tripoli	6,551	5,706	4,975
	<b>ASIA BARAT</b>			
54	Damascus	8,684	5,390	3,325
55	Manawa	6,573	6,154	4,827
56	Bagdad	5,433	4,148	3,545
57	Amman	7,561	6,431	3,545
58	Kuwait City	6,771	4,273	3,110
59	Beirut	7,703	4,490	3,730
60	Doha	5,216	3,639	2,745
61	Riyadah	5,359	3,510	3,000
62	Ankara	9,449	6,643	3,581
63	Abudhabi	5,283	4,976	2,727
64	Sanaa	8,205	5,878	3,679
65	Istanbul	11,061	4,435	2,467
66	Muskat	6,469	5,156	3,727
	<b>ASIA TIMUR</b>			
67	Beijing	2,595	2,140	1,623
68	Hongkong	3,028	2,633	1,257
69	Tokyo	3,734	2,675	1,835
70	Seul	3,233	2,966	1,737
71	Pyongyang	4,040	2,220	1,660

No.	Kota	Besaran		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>ASIA SELATAN</b>			
72	Kabul	6,307	3,905	3,028
73	Dhaka	3,063	2,417	1,092
74	New Delhi	3,500	2,500	1,500
75	Islamabad	5,482	3,333	2,501
76	Kolombo	3,119	2,562	2,628
77	Teheran	5,800	4,600	3,200
	<b>ASIA TENGAH</b>			
78	Tashken	13,617	8,453	7,343
79	Astana	13,661	12,089	8,962
	<b>ASIA TENGGARA</b>			
80	Manila	2,453	1,614	1,150
81	Singapura	991	673	403
82	Kualalumpur	1,158	659	585
83	Bangkok	2,344	1,155	823
84	Johor Bahru	1,195	911	525
85	Laos	2,274	2,025	1,420
86	Hanoi	1,833	1,833	1,656
87	Bandar Seri Begawan	1,628	1,147	919
88	Phnom Penh	2,202	1,981	1,627
89	Dilli	747	491	350
	<b>ASIA FASIFIK</b>			
90	Canbera	6,304	6,304	2,500
91	Wellington	11,750	9,830	4,120
92	Port Moresbi	17,090	13,835	8,252
93	Suva	12,668	4,461	2,669
94	Darwin	6,689	4,900	3,964

**178. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI**

KODE KELOMPOK	NO.	KECAMATAN / KOTA / DAERAH TUJUAN	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI					
			BUPATI/WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPR/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD/ESELON II	ESELON III/GOL.IV	ESELON IV/GOL. III	GOL. I DAN II
<b>9.1.2.15.01.01.001</b>	<b>178.1</b>	<b>DALAM DAERAH</b>						
9.1.2.15.01.01.001	1	KOTA MASOHI	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
9.1.2.15.01.01.001	2	AMAHAI	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
9.1.2.15.01.01.001	3	TNS	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
9.1.2.15.01.01.001	4	TELUK ELPAPUTIH	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
9.1.2.15.01.01.001	5	TEHORU	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
9.1.2.15.01.01.001	6	TELUTIH	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
9.1.2.15.01.01.001	7	SERAM UTARA BARAT	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
9.1.2.15.01.01.001	8	SERAM UTARA	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
9.1.2.15.01.01.001	9	SERAM UTARA TIMUR KOBİ	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
9.1.2.15.01.01.001	10	SERAM UTARA TIMUR SETI	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
9.1.2.15.01.01.001	11	SAPARUA	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
9.1.2.15.01.01.001	12	SAPARUA TIMUR	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
9.1.2.15.01.01.001	13	NUSALAUT	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
9.1.2.15.01.01.001	14	PULAU HARUKU	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
9.1.2.15.01.01.001	15	SALAHUTU	850,000	850,000	850,000	850,000	650,000	650,000
9.1.2.15.01.01.001	16	LEIHITU	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	850,000	850,000
9.1.2.15.01.01.001	17	LEIHITU BARAT	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	850,000	850,000
9.1.2.15.01.01.001	18	BANDA	1,900,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,500,000	1,500,000
<b>9.1.2.15.01.01.001</b>	<b>178.2</b>	<b>LUAR DAERAH DALAM PROVINSI</b>						
9.1.2.15.01.01.001	1	KOTA AMBON	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	850,000	850,000
9.1.2.15.01.01.001	2	SERAM BAGIAN BARAT	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
9.1.2.15.01.01.001	3	SERAM BAGIAN TIMUR	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000
9.1.2.15.01.01.001	4	PULAU BURU	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000
9.1.2.15.01.01.001	5	BURU SELATAN	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000
9.1.2.15.01.01.001	6	KOTA TUAL	3,850,000	3,850,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000
9.1.2.15.01.01.001	7	MALUKU TENGGARA	3,850,000	3,850,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000	3,410,000

KODE KELOMPOK	NO.	KECAMATAN / KOTA / DAERAH TUJUAN	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI					
			BUPATI/WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPR/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD/ESELON II	ESELON III/GOL.IV	ESELON IV/GOL. III	GOL. I DAN II
9.1.2.15.01.01.001	8	MALUKU TENGGARA BARAT	4,950,000	4,950,000	4,455,000	4,455,000	4,455,000	4,455,000
9.1.2.15.01.01.001	9	KEPULAUAN ARU	5,500,000	5,500,000	4,895,000	4,895,000	4,895,000	4,895,000
9.1.2.15.01.01.001	10	MALUKU BARAT DAYA	5,390,000	5,390,000	4,785,000	4,785,000	4,785,000	4,785,000
<b>9.1.2.15.01.01.001</b>	<b>178.3</b>	<b>LUAR PROVINSI</b>						
9.1.2.15.01.01.001	1	ACEH	23,510,000	13,213,000	11,280,000	10,950,000	10,950,000	10,950,000
9.1.2.15.01.01.001	2	SUMATERA UTARA	23,092,000	12,993,000	10,944,000	10,614,000	10,614,000	10,614,000
9.1.2.15.01.01.001	3	RIAU	23,039,000	12,965,000	10,933,000	10,521,000	10,521,000	10,521,000
9.1.2.15.01.01.001	4	KEPULAUAN RIAU	22,779,000	12,828,000	10,758,000	10,400,000	10,400,000	10,400,000
9.1.2.15.01.01.001	5	JAMBI	22,516,000	12,690,000	11,445,000	10,263,000	10,263,000	10,263,000
9.1.2.15.01.01.001	6	SUMATERA BARAT	22,250,000	12,553,000	10,483,000	10,235,000	10,235,000	10,235,000
9.1.2.15.01.01.001	7	SUMATERA SELATAN	21,471,000	12,140,000	10,208,000	9,850,000	9,850,000	9,850,000
9.1.2.15.01.01.001	8	LAMPUNG	21,405,000	11,839,000	9,883,000	9,526,000	9,526,000	9,526,000
9.1.2.15.01.01.001	9	BENGKULU	22,883,000	12,003,000	9,960,000	9,603,000	9,603,000	9,603,000
9.1.2.15.01.01.001	10	BANGKA BELITUNG	21,420,000	12,883,000	10,730,000	10,373,000	10,373,000	10,373,000
9.1.2.15.01.01.001	11	BANTEN	21,420,000	13,701,000	10,235,000	9,779,000	9,779,000	9,779,000
9.1.2.15.01.01.001	12	JAWA BARAT	22,256,000	12,113,000	10,153,000	9,366,000	9,366,000	9,366,000
9.1.2.15.01.01.001	13	D.K.I. JAKARTA	22,798,000	12,579,000	8,725,000	8,725,000	8,725,000	8,725,000
9.1.2.15.01.01.001	14	JAWA TENGAH	21,420,000	12,113,000	10,290,000	9,493,000	9,493,000	9,493,000
9.1.2.15.01.01.001	15	D.I. YOGYAKARTA	22,256,000	12,553,000	10,730,000	9,933,000	9,933,000	9,933,000
9.1.2.15.01.01.001	16	JAWA TIMUR	17,024,000	9,273,000	8,330,000	8,330,000	8,330,000	8,330,000
9.1.2.15.01.01.001	17	BALI	17,549,000	9,549,000	8,403,000	8,403,000	8,403,000	8,403,000
9.1.2.15.01.01.001	18	NUSA TENGGARA BARAT	18,069,000	9,823,000	8,578,000	8,578,000	8,578,000	8,578,000
9.1.2.15.01.01.001	19	NUSA TENGGARA TIMUR	19,010,000	10,318,000	9,073,000	9,073,000	9,073,000	9,073,000
9.1.2.15.01.01.001	20	KALIMANTAN BARAT	19,323,000	10,483,000	9,238,000	9,238,000	9,238,000	9,238,000
9.1.2.15.01.01.001	21	KALIMANTAN TENGAH	19,534,000	12,794,000	9,348,000	9,348,000	9,348,000	9,348,000
9.1.2.15.01.01.001	22	KALIMANTAN TIMUR	15,810,000	8,634,000	7,389,000	7,389,000	7,389,000	7,389,000
9.1.2.15.01.01.001	23	KALIMANTAN SELATAN	19,534,000	12,794,000	9,348,000	9,348,000	9,348,000	9,348,000
9.1.2.15.01.01.001	24	KALIMANTAN UTARA	20,057,000	13,069,000	10,724,000	10,724,000	10,724,000	10,724,000
9.1.2.15.01.01.001	25	SULAWESI UTARA	17,482,000	9,514,000	8,571,000	8,571,000	8,571,000	8,571,000

KODE KELOMPOK	NO.	KECAMATAN / KOTA / DAERAH TUJUAN	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI					
			BUPATI/WAKIL BUPATI	PIMPINAN DPR/SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA DPRD/ESELON II	ESELON III/GOL.IV	ESELON IV/GOL. III	GOL. I DAN II
9.1.2.15.01.01.001	26	GORONTALO	16,960,000	9,239,000	7,664,000	6,949,000	6,949,000	6,949,000
9.1.2.15.01.01.001	27	SULAWESI BARAT	15,915,000	8,679,000	7,856,000	7,856,000	7,856,000	7,856,000
9.1.2.15.01.01.001	28	SULAWESI SELATAN	13,302,000	7,314,000	6,371,000	6,371,000	6,371,000	6,371,000
9.1.2.15.01.01.001	29	SULAWESI TENGAH	16,437,000	8,964,000	8,131,000	8,131,000	8,131,000	8,131,000
9.1.2.15.01.01.001	30	SULAWESI TENGGARA	16,169,000	9,349,000	8,417,000	8,417,000	8,417,000	8,417,000
9.1.2.15.01.01.001	31	MALUKU UTARA	7,032,000	5,114,000	4,694,000	4,694,000	4,694,000	4,694,000
9.1.2.15.01.01.001	32	PAPUA	19,617,000	13,364,000	11,569,000	11,569,000	11,569,000	11,569,000
9.1.2.15.01.01.001	33	PAPUA BARAT	19,095,000	11,300,000	9,650,000	9,650,000	9,650,000	9,650,000

**BUPATI MALUKU TENGAH**

**TUASIKAL ABUA**

**PENJELASAN**  
**STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023**  
**YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

**1. Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kota Kabupaten/Kecamatan Pergi Pulang (PP)**

Uang transport kegiatan dalam kota kabupaten/kota kecamatan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi.

Uang transport kegiatan dalam kota kabupaten/kota kecamatan tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.

Uang transport kegiatan dalam kota kabupaten/kota kecamatan tidak dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

**2. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural**

Satuan biaya diklat Pimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

**3. Satuan Biaya Latihan Prajabatan**

Satuan Biaya Latihan Prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon Aparatur Sipil Negara sebagai syarat untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

**4. Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur**

Satuan Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kontribusi bagi Pejabat/Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti bimbingan teknis, dan atau pendidikan dan pelatihan aparatur. Bimbingan teknis dan atau pendidikan dan pelatihan aparatur yang dapat dibiayai adalah bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Tidak diperkenankan menggunakan biaya ini untuk mengikuti bimbingan teknis dan atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain selain instansi pemerintah.

**5. Satuan Biaya Perawatan dan Kendaraan Bermotor**

Satuan biaya perawatan kendaraan bermotor digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut tidak termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya bahan bakar minyak.

**6. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor**

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi, Personal Computer/Notebook, Printer, AC Split dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

**7. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non - Gelar**

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non-gelar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non-gelar bagi pegawai yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma II, Diploma III, Diploma IV atau strata 1 (satu) dan pendidikan Pasca Sarjana (Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga)) yang terdiri dari biaya hidup, biaya operasional, dan uang buku.

**8. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Sosial.**

Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan kepada pasien rumah sakit dan penyandang masalah sosial (PMS).

**9. Satuan Biaya Keperluan Sehari-Hari Perkantoran**

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal.

**10. Satuan Biaya Makan dan Minum**

Satuan biaya makan dan minum adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan minuman termasuk minuman dan kudapan dan diberikan untuk :

**a. Makan dan Minum Rapat**

Satuan biaya makan dan minum rapat adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan makanan dan minuman Rapat/Pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat eselon II/setara maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan di kantor.

Rapat koordinasi tingkat eselon II/setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah eselon II/pejabat yang setara.

**b. Makan dan Minum Kegiatan**

Satuan biaya makan dan minum kegiatan adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan, Seminar, Diklat, dll.

**c. Makan dan Minum Tamu**

Satuan biaya makan dan minum kegiatan adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan makanan dan minuman untuk tamu.

**d. Makan dan Minum Penjagaan Kantor / Rumah Dinas**

Satuan biaya makan dan minum kegiatan adalah satuan biaya yang digunakan untuk pengadaan makanan dan minuman untuk penjagaan Kantor atau Rumah Dinas.



**11. Satuan Biaya Makanan dan Belanja Bahan Makanan pada Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah**

Satuan biaya makanan dan belanja bahan makanan pada rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya makanan dan belanja bahan makanan pada rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

**12. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru**

Satuan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris bagi pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) pegawai, sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

**13. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan**

Satuan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

**14. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan**

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dan sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system* dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

**15. Satuan Biaya Sewa Kendaraan**

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Satuan biaya sewa kendaraan diperuntukan bagi pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati) yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dalam kota dan diberikan secara *at cost*.

**16. Satuan Biaya Sewa Sound Sistem**

Satuan biaya sewa sound sistem merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa sound sistem yang terdiri dari sound system ruangan, sound system lapangan standar dan sound system lapangan lux untuk menunjang pelaksanaan kegiatan rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis. Untuk

sound system lapangan standar dan sound system lapangan lux dihitung per watt.

**17. Satuan Biaya Sewa Generator**

Satuan biaya sewa generator merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa generator untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor, sudah termasuk bahan bakar minyak.

**18. Satuan Biaya Sewa Tenda**

Satuan biaya sewa tenda merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa tenda yang terdiri dari tenda biasa dan tenda lux dan tenda lux lengkap untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya.

**19. Satuan Biaya Sewa Meubeler**

Satuan biaya sewa meubeler merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa meubeler yang terdiri dari kursi, sofa dan meja untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis.

**20. Satuan Biaya Sewa Dekorasi**

Satuan biaya sewa dekorasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa dekorasi untuk kegiatan pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lain yang sejenis.

**21. Satuan Biaya Sewa Fasilitas Di Kawasan Pariwisata**

Satuan biaya sewa fasilitas di kawasan pariwisata merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengelolaan destinasi pariwisata.

**22. Satuan Biaya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Belanja dan Kuliner**

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya alat/bahan untuk kegiatan pelatihan pemandu wisata belanja dan kuliner.

**23. Satuan Biaya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Belanja dan Warisan Budaya**

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya alat/bahan untuk kegiatan pelatihan pemandu wisata Belanja dan warisan budaya

**24. Satuan Biaya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Traking dan Tematik**

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya alat/bahan untuk kegiatan pelatihan pemandu wisata traking dan tematik

**25. Satuan Biaya Jasa Bongkar Pasang Atribut Destinasi Wisata**

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya bongkar pasang atribut destinasi wisata.

- 26. Satuan Biaya Pembuatan dan Pemasangan Spanduk**  
Satuan biaya pembuatan dan pemasangan spanduk digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembuatan dan pemasangan spanduk dan dihitung dalam satuan meter dan dalam satuan buah.
- 27. Satuan Biaya Pemasangan Baleho**  
Satuan biaya pemasangan baleho digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemasangan baleho dan dihitung dalam satuan buah. Biaya pemasangan baleho tidak termasuk biaya sewa Billboard/Papan Reklame.
- 28. Satuan Biaya Peliputan Media Eletronik dan Media Cetak**  
Satuan biaya sewa peliputan media eletronik dan media cetak merupakan satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan biaya sewa peliputan media elektronik misalnya radio dan televisi sedangkan media cetak misalnya surat kabar/harian/tabloid/bulletin.
- 29. Satuan Biaya Media Cetak Iklan dan Media Online**  
Satuan biaya media cetak Iklan dan media online merupakan satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan biaya sewa media cetak harian, mingguan, bulanan seperti surat kabar / harian/ tabloid / bulletin dan satuan biaya sewa media online.
- 30. Satuan Biaya Pembuatan Iklan Media Cetak dan Online**  
Satuan biaya pembuatan iklan media cetak dan online adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan pembuatan iklan pada media cetak atau media online.
- 31. Satuan Biaya Pembuatan Vidio Promosi dan Biaya Jasa Design Buku/Majalah/Tabloid/Kalender Wisata / Booklet / Leaflet / Brosur Promosi Wisata.**  
Satuan biaya pembuatan video promosi wisata dan biaya jasa design buku/majalah/tabloid/kalender wisata/booklet/leaflet/brosur promosi wisata adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya pembuatan video promosi wisata dan biaya jasa design buku/majalah/tabloid/kalender wisata/booklet/leaflet/brosur untuk promosi wisata.
- 32. Satuan Biaya Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.**  
Satuan biaya belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam sebuah kegiatan lomba/festival .
- 33. Satuan Biaya Belanja Perhargaan Atas Prestasi**  
Satuan biaya belanja penghargaan atas prestasi adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya belanja penghargaan atas sebuah prestasi pada ajang promosi wisata.

**34. Satuan Biaya Dokumentasi**

Satuan biaya dokumentasi digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan dan pencetakan dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto / gambar, belum termasuk biaya bingkai foto.

**35. Satuan Biaya Pembuatan Laporan**

Satuan biaya pembuatan laporan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pembuatan laporan suatu kegiatan dalam bentuk buku /dokumen yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan akhir kegiatan atau naskah akhir.

**36. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas**

Satuan Biaya Pengadaan pakaian dinas adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.

**37. Satuan Biaya Kebutuhan Paskibraka**

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya Kebutuhan Paskibraka.

**38. Satuan Biaya Tim Teknis**

Satuan biaya tim teknis adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya tenaga tim teknis dalam daerah di kabupaten Maluku Tengah.

**39. Satuan Biaya Kontribusi Fasilitas PERDA dan PERBUP**

Satuan Biaya Kontribusi Fasilitas PERDA dan PERBUP adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya fasilitas rancangan PERDA dan PERBUP.

**40. Satuan Biaya Belanja Makanan dan Minuman Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB)**

Satuan biaya makanan dan minuman Biaya Operasional Keluarga Berencana adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya makanan dan minuman Belanja Operasional Keluarga Berencana yang dibiayai dari DAK.

**41. Satuan Biaya Jasa Tenaga Medis**

Satuan biaya jasa tenaga medis pelayanan KB IUD dan Implant adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pembayaran jasa tenaga medis dalam pelayanan KB IUD dan Implant.

**42. Satuan Biaya Colocation Server**

Satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan pembayaran biaya colocation server selama 1 tahun.

**43. Satuan Biaya Transportasi Pendamping dan Siswa Kegiatan Lomba Olimpiade Sains SD dan SMP Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional**

Satuan biaya transportasi pendamping dan siswa kegiatan lomba olimpiade sains SD dan SMP Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi pendamping dan siswa dalam mengikuti lomba olimpiade

sains SD dan SMP untuk Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.

**44. Satuan Biaya Belanja Barang dan Jasa JKN**

Satuan biaya belanja barang dan jasa JKN adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana JKN.

**45. Satuan Biaya Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan covid-19**

Satuan biaya belanja barang dan jasa untuk penanganan covid-19 adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya belanja barang dan jasa untuk penanganan covid-19.

**46. Satuan Biaya Belanja Modal yang Bersumber dari Dana JKN**

Satuan biaya belanja modal yang bersumber dari dana JKN adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya belanja modal yang bersumber dari dana JKN

**47. Satuan Biaya Belanja Modal untuk Kebutuhan Penanganan Covid-19**

Satuan biaya belanja modal untuk kebutuhan penanganan covid-19 adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan belanja modal untuk kebutuhan penanganan covid-19.

**48. Satuan Biaya Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan**

Satuan biaya belanja jasa kalibrasi alat kesehatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja jasa kalibrasi alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**49. Satuan Biaya Jasa Pengelolaan Limba Rumah Sakit**

Satuan biaya jasa pengelolaan limbah rumah sakit adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya jasa pengelolaan limbah rumah sakit.

**50. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit**

Satuan biaya pemeliharaan gedung rumah sakit adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya pemeliharaan gedung rumah sakit.

**51. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum**

Satuan biaya pemeliharaan alat kedokteran umum adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya pemeliharaan alat kedokteran umum.

**52. Satuan Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit**

Satuan biaya pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pemeliharaan Perlengkapan Rumah Sakit.

**53. Satuan Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan**

Satuan biaya pemeliharaan alat kesehatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pemeliharaan alat-alat kesehatan.

**54. Satuan Biaya Pemeliharaan Mobil Ambulance**

Satuan biaya pemeliharaan mobil ambulance adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pemeliharaan mobil ambulance pada RSUD Masohi.

**55. Satuan Belanja Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal**

Satuan biaya belanja pemberdayaan masyarakat dalam rangka penganekaragaman konsumsi berbasis sumber daya lokal adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan belanja pemberdayaan masyarakat dalam rangka penganekaragaman konsumsi berbasis daya lokal.

**56. Satuan Biaya Belanja Hadiah Uang Untuk Lomba Festival B2SA Dalam Rangka HUT RI dan HUT Kota**

Satuan biaya belanja hadiah uang untuk lomba festival B2SA dalam rangka HUT RI dan HUT Kota adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja hadiah uang untuk lomba festival B2SA dalam rangka HUT RI dan HUT Kota.

**57. Satuan Biaya Belanja Hadiah Piala Untuk Juara Lomba Festival B2SA Dalam Rangka HUT RI dan HUT Kota**

Satuan biaya belanja hadiah piala untuk lomba festival B2SA dalam rangka HUT RI dan HUT Kota adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja hadiah piala untuk lomba festival B2SA dalam rangka HUT RI dan HUT Kota.

**58. Satuan Biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi, dan Lain-lain**

Satuan biaya uang saku peserta pelatihan, bimtek, sosialisasi dan lain-lain adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya uang saku untuk kegiatan pelatihan, bimtek, sosialisasi dan lain-lain.

**59. Satuan Biaya Uang Saku Patroli Pengamanan dan Pengawasan**

Satuan biaya uang saku patroli pengamanan dan pengawasan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya uang saku patroli pengamanan dan pengawasan.

**60. Satuan Biaya Belanja Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal**

Satuan biaya belanja penyelenggaraan promosi penanaman modal adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah.

**61. Satuan Biaya Bimtek PPNS**

Satuan biaya bimtek PPNS adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya bimtek PPNS.

**62. Satuan Biaya Pembinaan Peserta Khalifah MTQ**

Satuan biaya pembinaan peserta khalifah MTQ adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pembinaan peserta khalifah MTQ.

**63. Satuan Biaya Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat (Hadiah Lomba)**

Satuan biaya belanja uang yang diberikan kepada masyarakat adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja uang yang diberikan kepada masyarakat dalam sebuah lomba atau kompetisi.

**64. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Dalam Rangka Distribusi Bantuan Bahan Perdagangan dan Industri Bagi Masyarakat (18 Kecamatan)**

Satuan biaya sewa kendaraan dalam rangka distribusi bantuan bahan perdagangan dan industri bagi masyarakat adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya sewa kendaraan dalam rangka distribusi bahan perdagangan dan industri bagi masyarakat di 18 kecamatan.

**65. Satuan Biaya Sewa Barang dan Buruh Angkut Barang**

Satuan biaya sewa barang dan buruh angkut barang adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya sewa barang dan buruh angkut barang.

**66. Satuan Biaya Pengadaan Produk Kerajinan Untuk Dekranasda dan Inovasi**

Satuan biaya pengadaan produk kerajinan untuk Dekranasda dan Inovasi adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pengadaan produk kerajinan untuk Dekranasda dan Inovasi.

**67. Satuan Biaya Peralatan dan Bahan Industri Rumah Tangga**

Satuan biaya pengadaan peralatan dan bahan industri rumah tangga adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pengadaan peralatan industri dan rumah tangga dalam program bantuan kepada masyarakat.

**68. Satuan Biaya Belanja Bantuan Peralatan Usaha Sektor Jasa**

Satuan biaya belanja bantuan peralatan usaha sektor jasa adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan belanja bantuan peralatan usaha masyarakat di sektor jasa.

**69. Satuan Biaya Belanja Kalibrasi Peralatan Metrologi**

Satuan biaya belanja kalibrasi peralatan metrologi adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja kalibrasi peralatan metrology.

**70. Satuan Biaya Belanja Pemeliharaan Peralatan Operasional Tera**

Satuan biaya belanja pemeliharaan peralatan operasional tera/tera ulang dan pengawasan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja pemeliharaan peralatan operasional tera.

**71. Satuan Biaya Tarif Listrik, Tarif Air, Telepon dan Internet**

Satuan biaya tarif listrik, air, telepon dan internet adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya tarif listrik, air dan internet untuk kebutuhan selama 1 tahun.

**72. Satuan Biaya Sewa Hosting/Website**

Satuan biaya sewa hosting/website adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya sewa hosting/website untuk kebutuhan selama 1 tahun.

**73. Satuan Biaya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (Aplikasi)**

Satuan biaya pemeliharaan aset tak berwujud adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pemeliharaan aset yang tak berwujud (aplikasi).

**74. Satuan Biaya Penyampaian SPPT- PBB**

Satuan Biaya Penyampaian SPPT-PBB adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya penyampaian SPPT-PBB.

**75. Satuan Biaya Pembayaran PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah**

Satuan biaya pembayaran PPB-P2 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pembayaran PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

**76. Satuan Biaya Angkut SPPT Ke Kecamatan**

Satuan biaya angkut SPPT ke Kecamatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya angkut SPPT ke Kecamatan.

**77. Satuan Biaya Pengadaan Aplikasi E-Government Pajak Daerah**

Satuan biaya pengadaan aplikasi e-government pajak daerah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pengadaan aplikasi e-Government pajak daerah.

**78. Satuan Biaya Belanja Hadiah Beasiswa Lomba Pemilihan Anak Kreatif**

Satuan biaya belanja hadiah beasiswa lomba pemilihan anak kreatif adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja hadiah uang (beasiswa) bagi juara lomba pemilihan anak kreatif.

**79. Satuan Biaya Belanja Hadiah Beasiswa Lomba Pemilihan Anak Kreatif Di Kecamatan**

Satuan biaya belanja hadiah beasiswa lomba pemilihan anak kreatif di kecamatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja hadiah uang (beasiswa) bagi juara lomba pemilihan anak kreatif.

**80. Satuan Biaya Belanja Trophi/Piala Lomba Pemilihan Anak Kreatif**

Satuan biaya belanja trophi/piala lomba pemilihan anak kreatif adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja trophi/piala untuk lomba anak kreatif.

**81. Satuan Biaya Belanja Akun Zoom Meeting Untuk Pelaksanaan Kegiatan Lomba Anak Kreatif dan Workshop Anak.**

Satuan biaya belanja akun zoom meeting adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan belanja akun zoom meeting kegiatan lomba pemilihan anak kreatif dan workshop anak.



**82. Satuan Biaya Belanja Sidang Isbat ke Pengadilan Agama**

Satuan biaya belanja sidang isbat ke Pengadilan Agama adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya sidang isbat ke Pengadilan Agama.

**83. Satuan Biaya Pengadaan Soal Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah**

Satuan biaya pengadaan soal ujian dinas dan penyesuaian ijazah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pengadaan soal ujian dinas dan penyesuaian ijazah.

**84. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas**

Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor /tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan /terminal atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Catatan :

- a. Indeks tarif taksi di Kabupaten Maluku Tengah di hitung dari Tulehu dan atau dermaga penyeberangan Hunimua sampai dengan Bandara Pattimura Laha.
- b. Contoh perhitungan alokasi biaya taksi  
Seorang Pejabat/Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas jabatan dari Masohi ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :
  - 1) Berangkat :
    - a) Biaya taksi dari pelabuhan Tulehu dan atau dermaga penyeberangan Hunimua ke Bandara Pattimura Laha; dan
    - b) Biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.
  - 2) Kembali :
    - a) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno Hatta; dan
    - b) Biaya taksi dari Bandara Pattimura Laha ke tempat pelabuhan Tulehu dan atau dermaga penyeberangan Hunimua.

**85. Satuan Biaya Pelatihan /Koordinasi**

Satuan biaya Pelatihan /Koordinasi adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya Pelatihan /Koordinasi dalam daerah dan luar daerah kabupaten Maluku Tengah.

**86. Satuan Biaya Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)**

Satuan biaya pengadaan instalasi pengelolaan air limbah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pengadaan instalasi pengelolaan air limbah khususnya di RSUD.

**87. Satuan Biaya Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya**

Satuan biaya peningkatan kualitas rumah swadaya adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya untuk peningkatan kualitas rumah swadaya bagi masyarakat.

**88. Satuan Biaya Pemeliharaan Rutin Jalan**

Satuan biaya pemeliharaan rutin jalan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pemeliharaan rutin jalan.

**89. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya**

Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja jasa konsultansi (perencanaan dan pengawasan) untuk Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

**90. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air**

Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Sumber Daya Air adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja jasa konsultansi (perencanaan dan pengawasan) untuk Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

**91. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Tata Ruang**

Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Tata Ruang adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja jasa konsultansi (perencanaan dan pengawasan) untuk Bidang Bina Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

**92. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Bina Marga**

Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan Bidang Bina Marga adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja jasa konsultansi (perencanaan dan pengawasan) untuk Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

**93. Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan**

Satuan Biaya Belanja Jasa Perencanaan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja jasa perencanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

**94. Satuan Biaya Belanja Jasa Pengawasan**

Satuan Biaya Belanja Jasa Pengawasan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja jasa pengawasan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

**95. Satuan Biaya Belanja Jasa Lainnya**

Satuan Biaya Belanja Jasa Lainnya adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja jasa-jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

**96. Satuan Biaya Belanja Barang, Jasa dan Modal**

Satuan Biaya Belanja Barang, Jasa dan Modal adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja barang, jasa dan modal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

**97. Satuan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB-DAK)**

Satuan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB-DAK) adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya belanja operasional kegiatan pelayanan KB MOP dan IUD sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

**98. Satuan Biaya Survey Jalan dan Jembatan**

Satuan biaya survey jalan dan jembatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya survey jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

**99. Satuan Biaya Penunjang DAK**

Satuan biaya penunjang DAK adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya penunjang DAK sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

**100. Satuan Biaya Operasional Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)**

Satuan biaya operasional Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP) untuk waktu 1 tahun.

**101. Satuan Biaya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan TPA dan IPLT**

Satuan biaya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan TPA dan IPLT adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan TPA dan IPLT.

**102. Satuan Biaya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Waai di Negeri Waai Kecamatan Salahutu.**

Satuan biaya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Waai di Negeri Waai Kecamatan Salahutu adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Waai di Negeri Waai Kecamatan Salahutu.

**103. Satuan Biaya Sertifikasi Lahan Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Waai di Negeri Waai Kecamatan Salahutu.**

Satuan biaya Sertifikasi Lahan Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Waai di Negeri Waai Kecamatan Salahutu adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya Sertifikasi Lahan untuk Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Waai di Negeri Waai Kecamatan Salahutu.

**104. Satuan Biaya Pengiriman Nitrogen Cair**

Satuan biaya pengiriman nitrogen cair adalah satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan biaya pengiriman nitrogen.

- 105. Satuan Biaya Pemeriksaan Sampel Darah**  
Satuan biaya pemeriksaan sampel darah adalah satuan biaya yang dipergunakan dalam perencanaan biaya pemeriksaan sampel darah.
- 106. Satuan Biaya Medical Chek Up Kesehatan**  
Satuan biaya medical chek up Kesehatan adalah satuan biaya yang dipergunakan dalam perencanaan biaya medical chek up Kesehatan.
- 107. Satuan Biaya Opsional Penunjang DAK**  
Satuan Biaya Operasional Penunjang DAK adalah satuan biaya yang dipergunakan dalam perencanaan biaya opsional penunjang DA.
- 108. Satuan Biaya Pembayaran PBB-P2**  
Satuan Biaya pembayaran PBB-P2 adalah satuan biaya yang dipergunakan dalam perencanaan biaya pembayaran PBB-P2.
- 109. Satuan Biaya Makan dan Minum Pada Pelayanan Urusan Kesehatan**  
Satuan biaya makan dan minum pada fasilitas urusan Kesehatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya makan dan minum pada fasilitas urusan Kesehatan.
- 110. Satuan Biaya Jasa Paket/Pengiriman**  
Satuan biaya jasa paket/pengiriman adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya jasa paket/pengiriman.
- 111. Satuan Biaya Pengiriman Alat dan Obat Kontrasepsi ke Kecamatan**  
Satuan biaya pengiriman alat dan obat kontrasepsi ke kecamatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pengiriman alat dan obat kontrasepsi ke kecamatan.
- 112. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung RSUD Masohi**  
Satuan biaya pemeliharaan Gedung RSUD Masohi adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pemeliharaan Gedung RSUD Masohi selama 1 tahun.
- 113. Satuan Biaya Uang Saku Peserta Reses DPRD**  
Satuan biaya uang saku peserta reses DPRD adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya uang saku peserta reses anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
- 114. Satuan Biaya Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan Serta Alat Rumah Tangga**  
Satuan biaya jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan serta alat rumah tangga adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan serta alat rumah tangga.
- 115. Satuan Biaya Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat**  
Satuan biaya pajak kendaraan bermotor roda empat adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pajak kendaraan bermotor roda empat untuk 1 tahun.

- 116. Satuan Biaya Makan dan Minum Tamu Pimpinan DPRD**  
Satuan biaya makan dan minum tamu pimpinan DPRD adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya makan dan minum tamu pimpinan DPRD selama 1 tahun.
- 117. Satuan Biaya Penghargaan Pemilihan ABDIYASA Teladan.**  
Satuan biaya pemilihan ABDIYASA teladan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pemilihan ABDIYASA teladan.
- 118. Satuan Biaya Penghargaan atau Hadiah Lomba di Tingkat Kecamatan**  
Satuan biaya penghargaan atau hadiah lomba di tingkat kecamatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya penghargaan atau lomba yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dalam rangka hari-hari besar nasional.
- 119. Satuan Biaya Pembayaran PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021.**  
Satuan biaya pembayaran PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pembayaran PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021.
- 120. Satuan Biaya Operasional Penunjang DAK Gedung HCU/ICU**  
Satuan biaya penunjang DAK Gedung HCU/ICU adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya penunjang DAK Gedung HCU/ICU.
- 121. Satuan Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan.**  
Satuan biaya insentif pemungutan retribusi jasa umum pelayanan kesehatan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya insentif pemungutan retribusi jasa umum pelayanan Kesehatan.
- 122. Satuan Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Jaminan Kesehatan Nasional**  
Satuan biaya insentif pemungutan retribusi jasa jaminan kesehatan nasional adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya insentif pemungutan retribusi jasa jaminan Kesehatan nasional.
- 123. Satuan Biaya Insentif Staf Pengelola Kas Daerah**  
Satuan biaya insentif staf pengelola kas Daerah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya insentif pengelola kas Daerah.
- 124. Satuan Biaya Jasa Tenaga Juri, Kesehatan dan Keamanan pada Festival/Even Penerimaan Tamu Daerah.**  
Satuan biaya jasa tenaga juri, kesehatan dan keamanan pada festival/even penerimaan tamu daerah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya jasa tenaga juri, kesehatan dan keamanan pada festival/even penerimaan tamu daerah.
- 125. Satuan Biaya Sewa Alat Selam.**  
Satuan biaya sewa alat selam merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa alat selam .

**126. Satuan Biaya Jasa Penagihan Distribusi Pelayanan**

Satuan biaya jasa Penagihan distribusi pelayanan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan untuk biaya penagihan distribusi pelayanan.

**127. Satuan Biaya Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan**

Satuan biaya fasilitas pelayanan urusan Kesehatan adalah satuan biaya yang digunakan untuk fasilitas pelayanan urusan Kesehatan.

**128. Satuan Biaya Jasa Sopir**

Satuan biaya jasa sopir adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya jasa sopir

**129. Satuan Biaya Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian Dan Pangan**

Satuan biaya belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan.

**130. Satuan Biaya Pemeliharaan**

Satuan biaya pemeliharaan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya pemeliharaan.

**131. Satuan Biaya Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah**

Satuan biaya peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan biaya peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.

**132. Satuan Biaya Akomodasi Hotel/Penginapan**

Satuan biaya akomodasi hotel/penginapan adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan belanja biaya akomodasi hotel/penginapan.

**133. Satuan Biaya Makan Dan Minum Rapat APIP**

Satuan biaya makan dan minum rapat APIP adalah satuan biaya yang digunakan untuk biaya makan dan minum rapat APIP.

**134. Satuan Biaya Mobil Patwal**

Satuan biaya mobil patwal adalah satuan biaya yang digunakan untuk biaya pengawalan mobil patwal.

**135. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa**

Satuan biaya uang saku pemeriksa adalah satuan biaya yang digunakan untuk biaya uang saku pemeriksa.

**136. Satuan Biaya Uang Saku Preview/Evaluator**

Satuan biaya uang saku preview/Evaluator adalah satuan biaya yang digunakan untuk biaya uang saku preview/evaluator.

**137. Satuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Satuan biaya bea balik nama kendaraan bermotor adalah satuan biaya yang digunakan untuk biaya balik nama kendaraan bermotor.

**138. Satuan Biaya Belanja Jasa Tenaga Medis Pelayanan KB MOP (Pengendalian Dan Pengdistribusian) Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Kabupaten/Kota).**

Satuan biaya belanja jasa tenaga medis pelayanan KB MOP (pengendalian dan pengdistribusian) kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten/Kota adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan untuk biaya belanja jasa tenaga medis pelayanan KB MOP (pengendalian dan pengdistribusian) kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten/Kota.

**139. Satuan Biaya Belanja Jasa Tenaga Medis Pelayanan KB MOW (Pengendalian Dan Pengdistribusian) Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Kabupaten/Kota).**

Satuan biaya belanja jasa tenaga medis pelayanan KB MOW (pengendalian dan pengdistribusian) kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten/Kota adalah satuan biaya yang digunakan dalam perencanaan untuk biaya belanja jasa tenaga medis pelayanan KB MOW (pengendalian dan pengdistribusian) kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten/Kota.

**140. Satuan Biaya Belanja Hadiah Beasiswa Lomba Pemilihan Anak Kreatif**

Satuan biaya belanja hadiah beasiswa lomba pemilihan anak kreatif adalah satuan biaya yang digunakan dalam lomba pemilihan anak kreatif di Kabupaten Maluku Tengah.

**141. Satuan Biaya Belanja Hadiah Lomba B2SA di Wilayah Kecamatan**

Satuan biaya belanja hadiah lomba B2SA adalah satuan biaya yang digunakan dalam lomba B2SA wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah.

**142. Satuan Biaya Belanja Hadiah Lomba Serba Ikan Kecamatan**

Satuan biaya belanja hadiah lomba serba ikan adalah satuan biaya yang digunakan dalam lomba serba ikan wilayah Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah.

**143. Satuan Biaya Belanja Perjalanan Dinas Lapangan (BOKB- DAK)**

Satuan biaya belanja perjalanan dinas adalah satuan biaya yang digunakan untuk perjalanan dinas lapangan (BOKB-DAK) di Kabupaten Maluku Tengah.

**144. Satuan Biaya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DAK)**

Satuan biaya belanja perjalanan dinas dalam daerah adalah satuan biaya yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam daerah (DAK) di Kabupaten Maluku Tengah.

**145. Satuan Biaya Belanja Perjalanan Dinas Lapangan**

Satuan biaya belanja perjalanan dinas lapangan adalah satuan biaya yang digunakan untuk perjalanan dinas lapangan di Kabupaten Maluku Tengah.

- 146. Satuan Biaya Kebutuhan Jemaah Haji**  
Satuan biaya Kebutuhan Jemaah Haji adalah satuan biaya yang di diberikan untuk Kebutuhan Jemaah haji.
- 147. Satuan Biaya Embarkasi Jemaah Haji**  
Satuan biaya embarkasi Jemaah Haji adalah satuan biaya yang di diberikan untuk Kebutuhan Jemaah haji.
- 148. Satuan Biaya Belanja Hadiah Lomba Jurnalistik**  
Satuan biaya belanja hadiah lomba jurnalistik adalah satuan biaya yang di gunakan untuk Belanja hadiah lomba jurnalistik di Kabupaten Maluku Tengah.
- 149. Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Tamu KDH Dan Wakil KDH**  
Satuan biaya makanan dan minuman tamu KDH dan Wakil KDH adalah satuan biaya yang di gunakan untuk makan dan minum tamu KDH dan Wakil KDH dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.
- 150. Satuan Biaya Fasilitasi Perda/Perbup**  
Satuan biaya Perda/Perbup adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya Fasilitasi Perda/Perbup dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.
- 151. Satuan Biaya Pengawas Lapangan**  
Satuan biaya pengawas lapangan adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya pengawas lapangan dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.
- 152. Satuan Biaya Tim Kesehatan Seleksi Paskibraka**  
Satuan biaya tim Kesehatan seleksi Paskibraka adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya Kesehatan paskibraka dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.
- 153. Satuan Biaya Tenaga Ahli Penulisan Buku**  
Satuan biaya tenaga ahli penulisan buku adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya tenaga ahli penulisan buku dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.
- 154. Satuan Biaya Non Personil Penulisan Buku**  
Satuan biaya non personil penulisan buku adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya non personil penulisan buku dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.
- 155. Satuan Biaya Pemasangan Satuan Instalasi Video Troon**  
Satuan biaya Pemasangan satuan instalasi video troon adalah satuan biaya yang di gunakan untuk Pemasangan satuan instalasi video troon dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.
- 156. Satuan Biaya Jasa Tenaga Keamanan/ Kebersihan Sentral Industri**  
Satuan biaya jasa tenaga keamanan/kebersihan sentral industri adalah satuan biaya yang di gunakan untuk jasa tenaga keamanan/kebersihan sentral industri dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.



**157. Satuan Biaya Operasional Penyuluh THL-TBPP**

Satuan biaya operasional penyuluh THL-TBPP adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya operasional penyuluh THL-TBPP dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.

**158. Satuan Biaya Tenaga Pendamping OSSBRADAN LKPM**

Satuan biaya tenaga pendamping OSSBRADAN LKPM adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya tenaga pendamping OSSBRADAN LKPM dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.

**159. Satuan Biaya Penyambungan Listrik Outlet**

Satuan biaya penyambungan listrik outlet adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya penyambungan listrik outlet dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.

**160. Satuan Biaya Iuran Jaminan Kesehatan**

Satuan biaya iuran jaminan kesehatan adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya iuran jaminan kesehatan dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.

**161. Satuan Biaya Jasa Tenaga Medis Dan Non Medis**

Satuan biaya jasa tenaga medis dan non medis adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya jasa tenaga medis dan non medis dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.

**162. Satuan Biaya Uang Saku DAK Non Fisik**

Satuan biaya uang saku DAK non fisik adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya uang saku DAK non fisik dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.

**163. Satuan Biaya Jasa Tenaga Laboratorium**

Satuan biaya jasa tenaga laboratorium adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya jasa tenaga laboratorium dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.

**164. Satuan Biaya Krans Bunga Bucket**

Satuan biaya Krans bunga bucket adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya Krans bunga bucket dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.

**165. Satuan Biaya Jasa Pemasangan Dan Servis AC**

Satuan biaya jasa pemasangan dan servis AC adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya jasa pemasangan dan servis AC dalam daerah di kabupaten Maluku Tengah.

**166. Satuan Biaya Transportasi Laut Masohi-Tulehu**

Satuan biaya transpotasi laut masohi-tulehu adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya transpotasi laut masohi-tulehu dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.

- 167. Satuan Biaya Pengawasan Obat Dan Makanan DAK Non Fisik**  
Satuan biaya pengawasan obat dan makanan DAK Non Fisik adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya pengawasan obat dan makanan DAK Non Fisik dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.
- 168. Satuan Biaya Jasa Tenaga Operator Komputer**  
Satuan biaya jasa tenaga operator komputer adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya jasa tenaga operator komputer dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.
- 169. Satuan Biaya Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi Konsultasi Evaluasi Dan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota**  
Satuan biaya Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RDTR Kabupaten/Kota adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RDTR Kabupaten/Kota dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.
- 170. Satuan Biaya Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi Konsultasi Evaluasi Dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota**  
Satuan biaya Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.
- 171. Satuan Biaya Penyesuaian KLHS RDTR Masohi, KLHS RDTR Hila, KLHS RDTR Tulehu**  
Satuan biaya penyesuain KLHS RDTR Masohi, KLHS RDTR Hila, KLHS RDTR Tulehu adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya penyesuain KLHS RDTR Masohi, KLHS RDTR Hila, KLHS RDTR Tulehu dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.
- 172. Satuan Biaya Insentif Pemungutan Bagi KDH/WKDH Atas Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan**  
Satuan biaya insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas retribusi jasa umum pelayanan adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas retribusi jasa umum pelayanan dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.
- 173. Satuan Biaya Jasa Tanah**  
Satuan biaya jasa tanah adalah satuan biaya yang di gunakan untuk biaya jasa tanah dalam daerah di Kabupaten Maluku Tengah.
- 174. Satuan Biaya Pemeliharaan Cliring TPA Banda**  
Satuan biaya sewa Pemeliharaan cliring TPA Banda merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya Pemeliharaan cliring TPA Banda untuk kegiatan sejenis.
- 175. Satuan Biaya Sewa Mobilitas Tengki Air**  
Satuan biaya sewa mobilitas tengki air merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mobilitas tengki air untuk kegiatan.

**176. Satuan Biaya Penelitian dan Pengembangan Masyarakat**

Satuan biaya Penelitian dan Pengembangan Masyarakat adalah satuan biaya yang di gunakan untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat dalam daerah Kabupaten Maluku Tengah.

**177. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi – Pulang (PP)**

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas/kegiatan keluar negeri.

**178. Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Pergi – Pulang (PP) dari Kota Masohi**

Biaya Transportasi Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas/kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/ instansi.

Uang transport perjalanan dinas tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan dinas yang bersifat rutin. Uang transport perjalanan dinas dalam kabupaten tidak dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

Catatan :

- a. Untuk kegiatan dalam kabupaten yang tidak mengharuskan menggunakan moda transportasi udara dan atau laut maupun memerlukan biaya yang melebihi biaya yang ditetapkan dan diberikan secara *at cost*.
- b. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.
- c. Biaya transportasi sudah termasuk semua kebutuhan Perjalanan Dinas salah satunya antigen dan PCR.
- d. Biaya transportasi perjalanan dinas untuk istri pejabat (Bupati dan Wakil Bupati) disetarakan dengan pegawai golongan III non eselon.
- e. Pejabat yang menduduki jabatan sebagai Plt (rangkap jabatan), pembayaran biaya transportasi disesuaikan dengan jabatan difinitifnya. Pejabat yang menduduki jabatatan sebagai Plt (tidak rangkap jabatan), pembayaran biaya transportasi disesuaikan dengan jabatan Plt yang didudukinya.

**Catatan umum :**

- 1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut :
  - a) pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;
  - b) pembatasan dan pengendalian biaya rapat di luar kantor;

- 2) Satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sudah termasuk pajak.

**Pengertian istilah :**

a. OJ	:	Orang / Jam
b. OH	:	Orang / Hari
c. OB	:	Orang / Bulan
d. OT	:	Orang / Transport
e. OP	:	Orang / Paket
f. OK	:	Orang / Kegiatan
g. OR	:	Orang / Responden
h. Oter	:	Orang / Terbitan
i. Obk	:	Orang / Buku
j. Oeks	:	Orang / Eksemplar

**BUPATI MALUKU TENGAH,**

**TUASIKAL ABUA**